



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.1. PENDAHULUAN

7.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai keefektifan dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu pemerintah daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat;

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan;

d. Keseimbangan Antar Generasi

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pemerintah daerah pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah dalam rangka menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana pemerintah daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan pemerintah daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pemerintah daerah.

7.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2019, meliputi:

1. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2007 Nomor 5/A);



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 5);
30. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 74);
31. Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Blitar (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 75);
32. Peraturan Walikota Blitar Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2019 Nomor 81).

7.1.3. Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi

Posisi Geografis Kota Blitar terletak pada koordinat 112°14' - 112°28' Bujur Timur dan 08°2' - 08°8' Lintang Selatan. Kota Blitar terletak pada jarak sekitar 160 km ke arah Barat Daya terhadap Ibukota Provinsi Jawa Timur.

Kota Blitar terletak di tengah-tengah Kabupaten Blitar. Hal ini menyebabkan Kabupaten Blitar merupakan batas langsung (border) dari Kota Blitar. Secara rinci, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Nglekok dan Kecamatan Garum Kabupaten Blitar. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Garum dan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kanigoro dan Kecamatan Sanan Kulon Kabupaten Blitar. Sedangkan di



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Sanan Kulon dan Nglegok Kabupaten Blitar.

Kota Blitar mempunyai luas wilayah sekitar 32,59 km². Dengan luas ini, Kota Blitar menjadi kota terkecil kedua di Provinsi Jawa timur setelah Mojokerto. Kota Blitar terbagi atas 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Sananwetan, Kecamatan Kepanjen Kidul, dan Kecamatan Sukorejo. Diantara ketiga kecamatan tersebut, Kecamatan terluas adalah Kecamatan Sananwetan dengan luas 12,16 km² (37,31%), kemudian Kecamatan Kepanjen Kidul 10,50 km² (32,22%), dan yang terkecil adalah Kecamatan Sukorejo dengan luas sekitar km² 9,93 (30,47%).

Berdasarkan wilayah administrasi, yaitu terdapat 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Sananwetan, Kepanjen Kidul, dan Sukorejo masing-masing terdiri dari 7 Kelurahan, adapun jumlah Kelurahan di Kota Blitar adalah 21 Kelurahan. Dari 21 Kelurahan yang ada, kelurahan terluas adalah Kelurahan Sentul dengan luas sekitar 2,68 km². Sementara kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Karang Sari dan Turi, yaitu dengan luas masing-masing sekitar 0,51 km² dan 0,52 km².

Pemerintah Kota Blitar menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Blitar mencakup urusan:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- g. pangan;
- h. lingkungan hidup;
- i. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- j. perhubungan;
- k. komunikasi dan informatika;
- l. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- m. penanaman modal;
- n. kepemudaan dan olah raga;
- o. perpustakaan.

Selain urusan wajib tersebut Pemerintah Kota Blitar juga melaksanakan urusan pilihan yang mencakup:

- a. pariwisata;
- b. perdagangan.

Adapun penunjang urusan meliputi:

- a. pengawas;
- b. perencanaan;



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- c. keuangan;
- d. kepegawaian

Sedangkan yang merupakan pendukung adalah:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tugas pokok masing-masing yang merupakan pelaksanaan fungsi dari urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya. Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, setiap OPD selaku entitas akuntansi juga melakukan pengelolaan dalam bidang keuangan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Blitar yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Blitar sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar dan Peraturan Walikota Blitar Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah.

7.1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

7.1 PENDAHULUAN

- 7.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 7.1.3 Informasi Umum Tentang Entitas Pelaporan atau Entitas Akuntansi
- 7.1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

7.2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 7.2.1 Ekonomi Makro
- 7.2.2 Kebijakan Keuangan
- 7.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

7.3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

7.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 7.4.1 Basis Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah
- 7.4.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 7.4.2.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan – LRA dan Pendapatan –



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LO

- 7.4.2.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban
- 7.4.2.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- 7.4.2.4 Kebijakan Akuntansi Piutang
- 7.4.2.5 Kebijakan Akuntansi Aset
- 7.4.2.6 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
- 7.4.2.7 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
- 7.4.2.8 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas
- 7.4.2.9 Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
- 7.4.2.10 Konsolidasi Laporan Keuangan

7.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 7.5.1 Laporan Realisasi Anggaran
 - 7.5.1.1 Pendapatan LRA
 - 7.5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah
 - 7.5.1.1.2 Pendapatan Transfer
 - 7.5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah
 - 7.5.1.2 Belanja
 - 7.5.1.2.1 Belanja Operasi
 - 7.5.1.2.2 Belanja Modal
 - 7.5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga
 - 7.5.1.2.4 Belanja Transfer
 - 7.5.1.3 Pembiayaan
 - 7.5.1.4 SiLPA/SiKPA
- 7.5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 - 7.5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal
 - 7.5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
 - 7.5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
 - 7.5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Sebelumnya



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 7.5.2.5 Lain-lain
- 7.5.2.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir
- 7.5.3 Neraca
 - 7.5.3.1 Aset
 - 7.5.3.1.1 Aset Lancar
 - 7.5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang
 - 7.5.3.1.3 Aset Tetap
 - 7.5.3.1.4 Akumulasi Penyusutan
 - 7.5.3.1.5 Aset Lainnya
 - 7.5.3.2 Kewajiban
 - 7.5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek
 - 7.5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang
 - 7.5.3.3 Ekuitas
- 7.5.4 Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional
 - 7.5.4.1 Pendapatan – LO
 - 7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LO
 - 7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO
 - 7.5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO
 - 7.5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO
 - 7.5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi – LO
 - 7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO
 - 7.5.4.2 Beban
 - 7.5.4.2.1 Beban Pegawai
 - 7.5.4.2.2 Beban Persediaan
 - 7.5.4.2.3 Beban Jasa
 - 7.5.4.2.4 Beban Pemeliharaan
 - 7.5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas
 - 7.5.4.2.6 Beban Bunga
 - 7.5.4.2.7 Beban Subsidi
 - 7.5.4.2.8 Beban Hibah



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 7.5.4.2.9 Beban Bantuan Sosial
- 7.5.4.2.10 Beban Penyusutan
- 7.5.4.2.11 Beban Amortisasi
- 7.5.4.2.12 Beban Transfer
- 7.5.4.2.13 Beban Lain-lain
- 7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional
- 7.5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
- 7.5.4.5 Pos Luar Biasa
- 7.5.4.6 Surplus/Defisit – LO
- 7.5.5 Penjelasan atas pos-pos Laporan Arus Kas (LAK)
 - 7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
 - 7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
 - 7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran
 - 7.5.5.5 Saldo Akhir Kas
- 7.5.6 Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 7.5.6.1 Saldo Awal Ekuitas
 - 7.5.6.2 Surplus/Defisit – LO
 - 7.5.6.3 Koreksi-koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas
 - 7.5.6.4 Ekuitas Akhir
- 7.5.7 INFORMASI PENTING LAIN YANG DIPERLUKAN
 - 7.5.7.1 Dana Tugas Pembantuan (TP)
 - 7.5.7.2 Penerimaan Kas yang tidak Melalui RKUD
 - 7.5.7.3 Penyelesaian Kerugian Daerah
 - 7.5.7.4 Pengungkapan Informasi Permasalahan Investasi
 - 7.5.7.5 Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2019
 - 7.5.7.6 Konstruksi dalam pengerjaan atas pekerjaan Pembangunan Jaringan *Fiber Optic* pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- 7.5.8 Penutup



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.2. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

7.2.1. EKONOMI MAKRO

Perkembangan perekonomian dan pembangunan suatu daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah PDRB dan pertumbuhan ekonomi, IPM, angka kemiskinan, indeks gini dan tingkat pengangguran terbuka, secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)

Salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian suatu daerah setiap tahun adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang umumnya dalam waktu satu tahun. Manfaat PDRB antara lain :

- a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu daerah diukur dengan harga berlaku saat itu. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi, begitu juga sebaliknya. PDRB ADHB menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk daerah.
- b. Distribusi PDRB ADHB menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah.
- c. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap sektor dari tahun ke tahun.
- d. Distribusi PDRB menurut penggunaan menunjukkan peranan kelembagaan dalam menggunakan barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi.
- e. PDRB Atas Dasar Harga Konstan bermanfaat untuk mengukur laju pertumbuhan konsumsi, investasi, dan perdagangan.
- f. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu daerah.

Tabel 1 Target dan Realisasi PDRB ADHB

(dalam juta rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2015	4.819.089,00	4.819.128,00
2016	5.332.286,72	5.331.286,70



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2017	5.929.670,00	5.782.364,10
2018	6.577.538,00	6.302.331,20
2019	7.296.191,00	6.792.246,70

**Tabel 2 PDRB Kota Blitar Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Lapangan Usaha**

(dalam juta rupiah)

Lapangan Usaha/Industri		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	164.008,3	172.914,9	178.373,2	186.040,7	193.059,9
2	Pertambangan dan penggalian	334,4	335,8	341,8	361,7	368,1
3	Industri Pengolahan	457.171,2	502.362,5	552.608,4	607.975,8	659.375,4
4	Pengadaan Listrik dan Gas	3.039,3	3.297,9	3.915,4	4.274,5	4.586,1
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Limbah Daur Ulang	7.145,7	7.709,9	8.192,1	8.621,9	9.059,8
6	Konstruksi	372.228,7	414.679,8	452.641,9	484.943,1	512.114,6
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.125.713,6	1.271.622,4	1.379.424,1	1.535.545,4	1.675.162,2
8	Transportasi dan Pergudangan	198.590,4	222.264,7	247.375,3	273.406,3	298.819,0
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	240.316,2	277.001,5	308.495,1	337.319,9	365.962,2
10	Informasi dan Komunikasi	505.492,5	556.924,4	607.745,0	648.784,1	703.269,3
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	526.913,2	589.209,9	640.867,6	688.195,9	717.424,4
12	Real Estate	180.103,2	196.689,2	211.459,2	233.172,7	252.182,7
13	Jasa Perusahaan	35.624,9	38.903,4	43.617,3	48.734,7	53.151,5
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	317.849,3	339.763,0	360.188,6	397.528,0	438.481,1
15	Jasa Pendidikan	345.002,2	374.821,8	399.640,3	428.107,1	461.589,8
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	92.237,3	100.881,0	110.234,8	118.797,8	129.137,4
17	Jasa Lainnya	247.357,4	261.904,7	277.244,1	300.521,6	318.502,2
	PDRB	4.819.128,0	5.331.286,7	5.782.364,1	6.302.331,2	6.792.246,7

Sumber: BPS Kota Blitar, 2020

Sektor perdagangan mendominasi dengan nilai Rp1.675.162.200.000,00. Semakin dominannya sektor perdagangan mencerminkan karakteristik sebagai sebuah wilayah perkotaan.

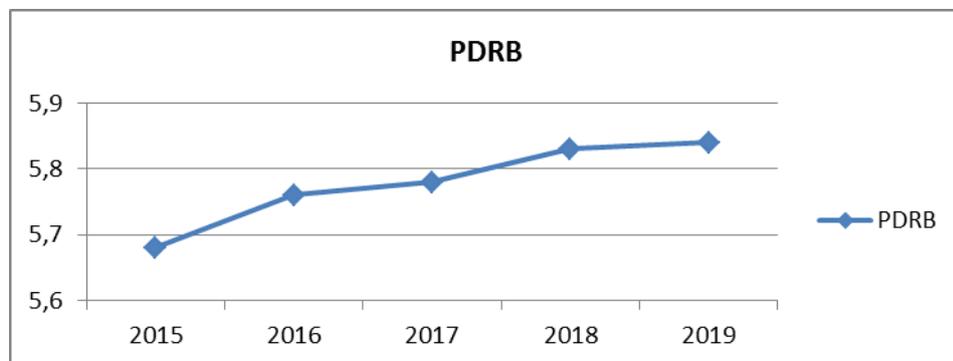


PEMERINTAH KOTA BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Karakteristik sebagai wilayah perkotaan juga semakin diperkuat dengan berkembangnya sektor jasa. Sektor jasa keuangan dan asuransi merupakan penyumbang terbesar kedua, sebesar Rp717.424.400.000,00. Semakin meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga keuangan dan kesadaran pentingnya asuransi semakin mendorong peningkatan sektor ini.

Sementara itu, sektor informasi menduduki posisi tiga besar penyumbang PDRB Kota Blitar dengan nilai sebesar Rp703.269.300.000,00. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kebutuhan komunikasi dan informasi semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

Gambar 1
Laju Pertumbuhan PDRB Kota Blitar Menurut Lapangan Usaha



Sumber : BPS Kota Blitar, 2020

Laju Pertumbuhan PDRB cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2015 sebesar 5,68, kemudian meningkat menjadi 5,76 pada tahun 2016, lalu 5,78 pada tahun 2017, dilanjutkan 5,83 pada tahun 2018, dan naik tipis menjadi 5,84 pada tahun 2019.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses pertambahan output wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik. Dengan diketahuinya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi maka dapat ditentukan sector prioritas pembangunan.

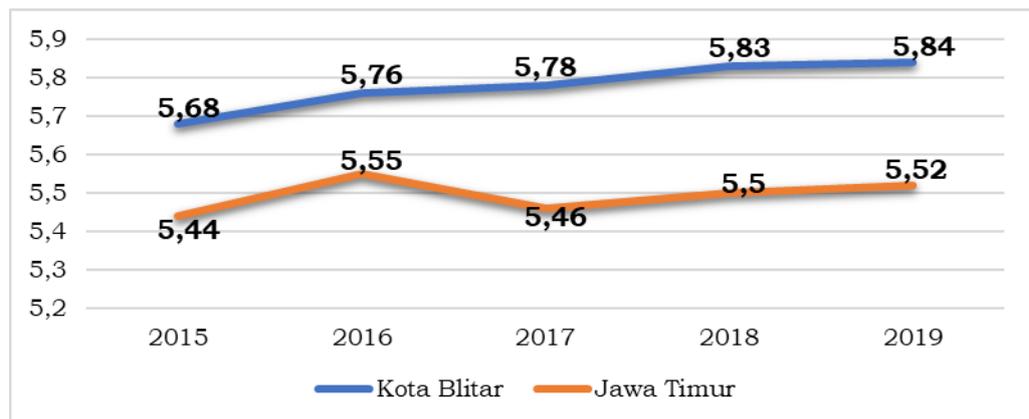


PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 3 Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	Target	Realisasi
2015	5,68	5,68
2016	5,76	5,76
2017	5,81	5,78
2018	5,86	5,83
2019	5,90	5,84

Gambar 2
Pertumbuhan Ekonomi Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2015-2019



Sumber: BPS Kota Blitar dan BPS RI, 2020, diolah

3. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

IPM adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara di seluruh dunia. IPM digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang, dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 4 Komponen IPM, IPM Kota Blitar, dan IPM Jawa Timur 2015 – 2019

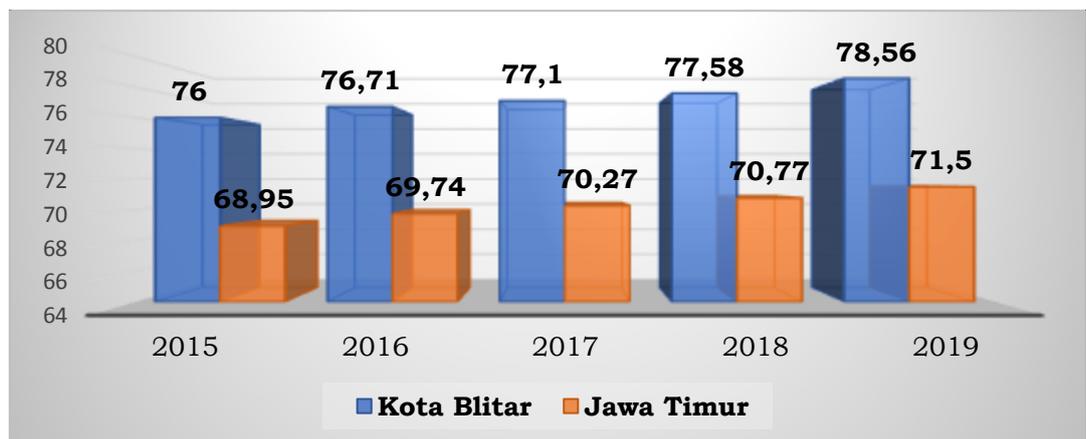
Komponen IPM	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Harapan Hidup	73	73,09	73,17	73,36	73,60
Harapan Lama Sekolah	13,53	14	14,01	14,02	14,31
Rata-Rata Lama Sekolah	9,87	9,88	9,89	9,90	10,10
Daya Beli	12.258	12.499	12.910	13.391	13.851
IPM Kota Blitar	76	76,71	77,10	77,58	78,56
IPM Jawa Timur	68,95	69,74	70,27	70,77	71,50

Sumber : BPS Kota Blitar, 2020

Tabel 5 Target dan Realisasi IPM

Tahun	Target	Realisasi
2015	76,00	76,00
2016	76,71	76,71
2017	77,88	77,10
2018	78,65	77,58
2019	79,40	78,56

Gambar 3
IPM Kota Blitar dan Jawa Timur Tahun 2015 – 2019



Secara Umum IPM Kota Blitar masuk dalam kategori tinggi. IPM Kota Blitar selalu diatas IPM Jawa Timur. Pada Tahun 2019 IPM Kota Blitar 78,56 dan IPM Propinsi Jawa Timur 71,50. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Blitar lebih baik dibandingkan rata-rata kesejahteraan Kabupaten/Kota lainnya di lingkup Propinsi Jawa Timur.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Gambar 4
Perkembangan Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kota Blitar
Tahun 2015 -2019



Standar hidup masyarakat Kota Blitar direpresentasikan dengan komponen pengeluaran perkapita yang menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Kondisi ini dibuktikan dengan pengeluaran perkapita masyarakat yang semakin meningkat.

4. Angka Kemiskinan

Secara umum, konsep kemiskinan dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin. Kemiskinan relatif adalah kondisi yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan seseorang lebih miskin dibandingkan dengan lainnya. Kondisi ini terjadi apabila antar kelompok pendapatan menunjukkan fenomena ketimpangan (Bappenas, 2018).

Tabel 6 Target dan Realisasi Angka Kemiskinan

Tahun	Target	Realisasi
2015	6,82	7,29
2016	6,72	7,18
2017	6,72	8,03
2018	6,61	7,44



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun	Target	Realisasi
2019	6,49	7,13

Gambar 5
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Blitar, 2015-2019



Sumber : BPS Kota Blitar, 2019

Gambar diatas memperlihatkan kemiskinan di Kota Blitar berfluktuasi selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin Kota Blitar 10.040 jiwa, kemudian turun di tahun 2016 menjadi 9.970 jiwa. Berikutnya pada 2017 naik cukup signifikan menjadi 11.220 jiwa, lalu turun pada tahun 2018 menjadi 10.470 jiwa dan turun lagi di tahun 2019 menjadi 10.100 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa APBD Kota Blitar telah berhasil berkontribusi menurunkan angka kemiskinan melalui program dan kegiatan yang disusun.

Tabel 7 Jumlah Penduduk Miskin dan Indikator Kemiskinan Kota Blitar Tahun 2015-2019

Tahun	Garis Kemiskinan	Penduduk Miskin		Indikator Kemiskinan	
		Jumlah	Persentase	Kedalaman	Keparahan
2015	338.532	10.040	7,29	0,89	0,18
2016	356.147	9.970	7,18	1,04	0,20
2017	383.021	11.220	8,03	0,93	0,24
2018	425.832	10.470	7,44	1,05	0,31
2019	456.778	10.100	7,13	1,14	0,23

Sumber : BPS, 2020

5. Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian dimana harga-harga secara umum mengalami kenaikan, dan kenaikan harga tersebut berlangsung dalam jangka panjang.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

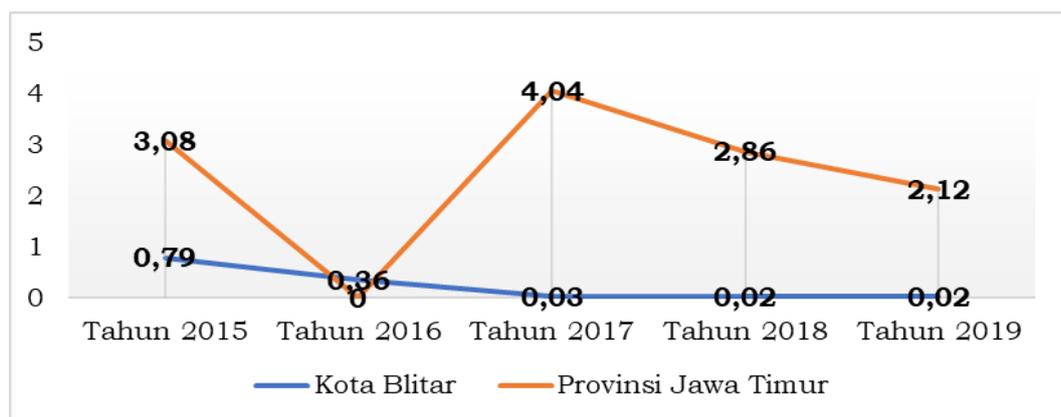
Tabel 8 Inflasi Bulanan Kota Kediri 2017 – 2019

Bulan	2017	2018	2019
Januari	0.94	0.14	0.15
Februari	0.70	0.26	-0.08
Maret	-0.13	0.10	0.16
April	0.38	0.14	0.36
Mei	0.50	0.17	0.05
Juni	0.44	0.43	0.08
Juli	-0.11	0.09	0.44
Agustus	-0.17	-0.10	-0.23
September	0.31	0.20	-0.27
Oktober	-0.12	0.16	0.32
Nopember	0.23	0.40	0.38
Desember	0.43	0.29	0.29

Sumber : BPS Kota Kediri, 2020

Data Inflasi Kota Blitar merujuk pada Inflasi Kota Kediri karena daerah penghitung Inflasi adalah daerah yang berada di bawah Bank Indonesia, sehingga Kota Blitar mengadopsi Kota Kediri untuk pendekatan Inflasinya dengan pertimbangan karakteristik antara kedua kota yang hampir sama.

Gambar 6
Laju Inflasi Kota Blitar dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019



Sumber : 1) Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2020, BPS, diolah
2) Kota Blitar Dalam Angka Tahun 2020, BPS, diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa dalam 5 tahun laju inflasi Kota Blitar cenderung menurun walaupun sangat tipis, dan dalam 2 tahun terakhir konstan di angka 0,02. Laju Inflasi Kota Blitar jauh dibawah laju inflasi Provinsi Jawa Timur.

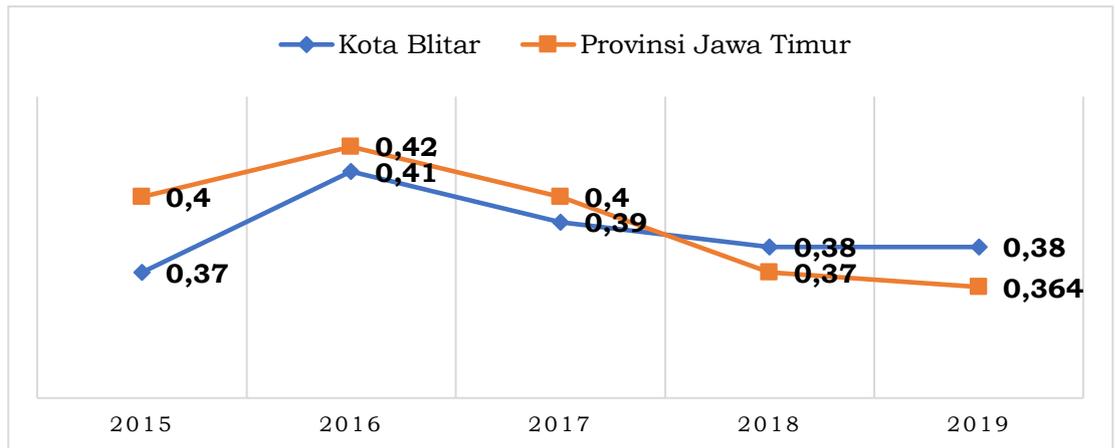


PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

6. Indeks Gini

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama.

Gambar 7
Indeks Gini Kota Blitar dan Jawa Timur Tahun 2015 – 2019



Sumber : 1) BPS Kota Blitar, 2020 diolah
2) BPS Provinsi Jawa Timur, 2020, diolah

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 sempat mengalami kenaikan 0,04, namun berhasil turun 0,02 pada tahun 2017, dan stagnan di dua tahun terakhir pada angka 0,38. Indeks Gini Kota Blitar pada tahun 2019 diatas Indeks Gini Provinsi Jawa Timur.

7. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT adalah prosentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Sedangkan pengertian pengangguran terbuka adalah mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

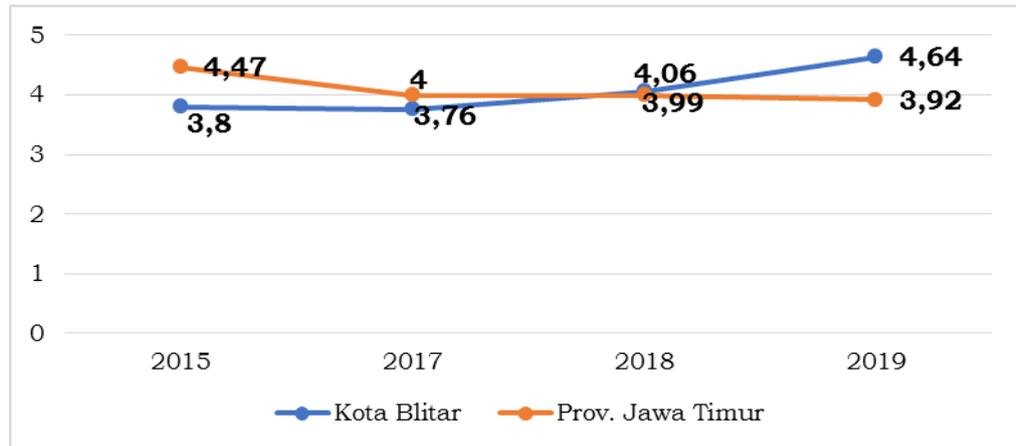
Tabel 9 Target dan Realisasi Angka Pengangguran Terbuka

Tahun	Target	Realisasi
2015	3,80	3,80
2017	3,60	3,76
2018	3,60	4,06
2019	3,50	4,64



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Gambar 8
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Blitar
Tahun 2015 - 2019



Sumber : BPS Kota Blitar dan BPS RI, 2020, diolah



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

a. Umum

Tahun 2019 adalah tahun keempat dalam proses pelaksanaan RPJMD Kota Blitar 2016–2021. Tahun ini merupakan tahap penguatan untuk mencapai kondisi pemantapan piranti pendukung yang kondusif bagi kemajuan kota yang berkeadilan yang didukung masyarakat yang unggul dan kreatif sesuai dengan amanat RPJPD Kota Blitar. Oleh karena itu arah kebijakan pembangunan tahun keempat difokuskan pada penguatan pengembangan kerjasama daerah & dunia usaha serta optimalisasi jalur informasi guna meningkatkan investasi, dengan tetap mengedepankan sektor perdagangan, industri (industri kecil) dan pariwisata sebagai penyangga utama pembangunan ekonomi daerah. Strategi pembangunan diarahkan pada upaya untuk menguatkan capaian pembangunan yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya dengan terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pada tahun keempat diarahkan pada upaya untuk mensinergikan capaian pembangunan di masing-masing bidang/sector agar terwujud visi pembangunan Kota Blitar semakin sejahtera.

Uraian Kebijakan Umum APBD tahun 2019 secara garis besar meliputi kebijakan umum bidang pendapatan, kebijakan umum bidang belanja dan kebijakan umum bidang pembiayaan pada bagian dibawah ini.

b. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Kota Blitar diarahkan agar pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dalam upaya pencapaian kemandirian fiskal daerah. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Peranan Pendapatan Asli Daerah dalam pendanaan program pembangunan di daerah terus meningkat setiap tahunnya. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, pendapatan terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat mengurangi ketergantungan pembiayaan yang bersumber dari dana transfer melalui upaya perbaikan regulasi. Dalam perencanaan kebijakan anggaran, target pendapatan daerah setiap tahunnya diupayakan terus meningkat sejalan dengan bertambahnya kebutuhan pendanaan dalam rangka pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan infrastruktur yang produktif.

Di tengah keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah harus diimbangi dengan berbagai upaya antara lain :

- 1) Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui pembenahan manajemen penerimaan PAD, melakukan evaluasi terhadap pajak dan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

retribusi daerah yang telah ditetapkan, menetapkan target pendapatan berdasarkan potensi pendapatan baru.

- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan retribusi daerah.
- 3) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dengan tidak mengurangi fungsi yang berorientasi pada pelayanan.
- 4) Melakukan koordinasi secara sinergis dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan antar OPD penghasil PAD.

c. Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah Tahun 2019

Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Kota Blitar diarahkan agar pengelolaan pendapatan daerah lebih difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam rangka diversifikasi, efisiensi dan efektifitas penggalan sumber-sumber pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kebijakan umum peningkatan pendapatan daerah harus diarahkan pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara proporsional, realistis dan tidak memberatkan masyarakat dengan dititik beratkan kepada upaya: (1) Optimalisasi pengelolaan aset daerah terutama yang merupakan sarana dan prasarana pendukung penerapan sistem perdagangan dan jasa unggulan daerah, (2) Intensifikasi dan ekstensifikasi penarikan retribusi dan pajak daerah yang disertai dengan berbagai langkah pengawasan dan penertiban serta pemberian reward dan punishment, (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kapasitas pihak-pihak berkepentingan untuk memenuhi retribusi dan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah harus selalu diupayakan secara sungguh-sungguh melalui proses intensifikasi dan ekstensifikasi secara proporsional, realistis dan obyektif. Dalam implementasinya, upaya ini tetap berpedoman dan mengedepankan prinsip-prinsip dasar pelayanan yang tidak memberatkan warga masyarakat. Kebijakan PAD dimaksud tetap diarahkan dengan titik berat pada:

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan Pendapatan Daerah;
- 2) Optimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui : membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;

- 3) Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
- 4) Optimalisasi kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
- 5) Peningkatan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah;
- 6) Penetapan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan less distortive perekonomian;
- 7) Pelembagaan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah;
- 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) pengelolaan pendapatan daerah;
- 9) Peningkatan sarana dan prasarana guna mendukung kelancaran proses pengelolaan pendapatan daerah;
- 10) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi;
- 11) Meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi.

d. Kebijakan Umum Belanja

Kebijakan umum belanja daerah diarahkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta pengawasan penggunaan anggaran. Dengan penerapan skala prioritas untuk pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan serta memberikan ruang dalam mengantisipasi adanya perubahan kondisi eksternal terutama kondisi perekonomian nasional dan regional yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan daerah. Dalam implementasinya, penggunaan anggaran belanja untuk tahun 2019 akan diprioritaskan untuk :

- 1) Mencukupi belanja wajib terutama untuk mengantisipasi tambahan belanja gaji pegawai dan pegawai baru dengan mempertimbangan kenaikan gaji serta beberapa kebutuhan untuk mendukung program-program strategis daerah.
- 2) Mewujudkan sasaran dan prioritas pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RKPD tahun 2019.
- 3) Merespon tuntutan kebutuhan pembangunan yang secara riil berkembang ditengah masyarakat dan yang telah menjadi komitmen bersama antara pemerintah Kota Blitar dengan masyarakat dan agenda tetap daerah yang harus tetap dianggarkan yang menjadi *fixed cost* daerah.

e. Strategi Pengendalian Belanja Daerah Tahun 2019

Strategi pengendalian belanja daerah Kota Blitar tahun 2019 dititik beratkan kepada langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Blitar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dengan tetap melakukan sinkronisasi dengan program/kegiatan di RPJMD Kota Blitar maupun dengan Program Pemerintah Pusat dan Propinsi.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 3) Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja (*performance budgeting*) yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Adapun langkah-langkah strategis yang ditempuh Pemerintah Kota Blitar dalam rangka implementasi kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi pengalokasian belanja tidak langsung pegawai (gaji) dan belanja wajib lainnya
2. Pengendalian belanja langsung secara selektif dengan berpedoman pada prinsip efisiensi pemenuhan belanja terutama belanja rutin (listrik, air, telepon, rehab ringan gedung kantor dan perjalanan dinas).
3. Memprioritaskan belanja daerah dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sesuai kewenangan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Efektifitas dan efisiensi pemanfaatan belanja melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian pelaksanaan kegiatan dan memperketat fungsi pengawasan.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan belanja langsung untuk penyelenggaraan urusan kewenangan pemerintah daerah sesuai prioritas daerah yaitu:
 - a) Pengembangan sektor pariwisata pendukung ekonomi kreatif dengan mengoptimalkan fungsi pengembangan pasar daerah, sarana promosi daerah, obyek wisata daerah dan kawasan agro tekno lainnya serta pelestarian budaya yang berwasan kebangsaan
 - b) Peningkatan kerjasama daerah dan dunia usaha yang mendukung penguatan daya saing produk lokal
 - c) Melaksanakan upaya-upaya peningkatan derajat kesehatan dan pencapaian program Jaminan Kesehatan Nasional
 - d) Peningkatan kualitas pendidikan dan pembentukan karakter bangsa
 - e) Penguatan sektor-sektor ekonomi kota yang mengarah pada peningkatan kualitas sarana-prasarana perdagangan, perluasan lapangan kerja, pengembangan sektor ekonomi yang berbasis pada kreativitas, inovasi, teknologi informasi, komunikasi dan sumber daya lokal
 - f) Memperkuat tahapan implementasi Program Mayajuwita (Masyarakat Berdaya Menuju Kota Pariwisata) sebagai salah satu program terapan ekonomi kreatif di Kota Blitar
 - g) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan melalui peningkatan fasilitasi sarana ibadah dan kegiatan keagamaan
 - h) Mempertahankan dan melanjutkan kebijakan strategis bidang pendidikan melalui program sekolah gratis pendukung wajib belajar 9 tahun serta kebijakan 5 hari sekolah



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- i) Meningkatkan daya saing di bidang penyediaan tenaga kerja berkualitas dan peningkatan kualitas produk barang dan jasa melalui standarisasi dan sertifikasi
- j) Meningkatkan pelayanan publik meliputi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan formal dan non formal, kesehatan, ketersediaan air bersih dan olah raga serta kebudayaan
- k) Meningkatkan daya dukung bagi investasi daerah yang banyak menyerap tenaga kerja melalui penyederhanaan perijinan
- l) Mendukung program nasional pengembangan infrastruktur jaringan irigasi, sanitasi, pengendalian banjir, bantaran sungai, jaringan jalan, pengendalian tata ruang, sarana dan prasarana lingkungan untuk tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif
- m) Meningkatkan kualitas hidup dan keberdayaan masyarakat miskin dan pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
- n) Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan gender dalam pembangunan

Mengembangkan birokrasi pemerintahan yang berkompetensi tinggi, bersih dan profesional.

f. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan kualitas manajemen pembiayaan daerah agar dapat berjalan lebih akurat, efisien, efektif, transparan dan realistis melalui langkah-langkah pengelolaan pembiayaan sebagai berikut :

1. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil adalah melakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk Giro/Deposito, penyertaan modal, atau sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.

7.2.3. PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Dari sisi pendapatan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi pendapatan dalam APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp940.722.867.100,39 dari anggaran Pendapatan sebesar Rp972.395.129.547,00. Realisasi tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi sebesar Rp166.140.178.781,39 atau 93,72% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp177.268.796.653,00, dan dari Pendapatan Transfer dengan realisasi Rp757.519.568.319,00 atau 97,51% dari anggaran sebesar Rp776.849.412.894,00. Sedangkan untuk Lain – lain Pendapatan Yang Sah



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

teralisasi sebesar Rp17.063.120.000,00 atau 93,36% dari target sebesar Rp18.276.920.000,00.

2. Sebaliknya Belanja terealisasi sebesar Rp974.719.201.136,17 atau 82,99% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.174.514.025.791,46. Realisasi belanja yang kurang dari anggaran sebesar 17,01% disebabkan karena kebutuhan riil SKPD dalam mengemban misi daerah untuk melayani masyarakat telah menggunakan pendekatan prioritas dan akuntabel serta dapat menekan belanja yang bukan prioritas daerah. Adapun Transfer Bagi Hasil ke Desa terealisasi sebesar Rp7.087.680,00 atau 47,25% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00.

7.3. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Dari uraian di atas dapat kami rinci untuk pendapatan pada tabel berikut :

Tabel 10 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% (Pelampauan/ dibawah anggaran)
1	PENDAPATAN	972.395.129.547,00	940.722.867.100,39	96,74
1.1	Pendapatan Asli Daerah	177.268.796.653,00	166.140.178.781,39	93,72
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	39.627.800.000,00	44.650.054.610,03	112,67
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	10.126.283.822,00	10.138.463.905,50	100,12
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.169.069.219,00	1.169.069.219,24	100,00
1.1.4	Lain – lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	126.345.643.612,00	110.182.591.046,62	87,21
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	776.849.412.894,00	757.519.568.319,00	97,51
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	661.041.692.394,00	617.074.500.118,00	93,35
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	45.644.856.000,00	38.722.150.634,00	93,35
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	83.445.154.000,00	55.197.441.211,00	66,15
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	437.776.459.000,00	437.776.459.000,00	100,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	94.175.223.394,00	85.378.449.273,00	90,66
1.2.2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	51.430.800.000,00	51.430.800.000,00	100,00
1.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	Dana Penyesuaian	51.430.800.000,00	51.430.800.000,00	100,00
1.2.3	Transfer Pemerintah Provinsi	64.376.920.500,00	89.014.268.201,00	138,27
1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	62.503.361.500,00	87.140.709.201,00	139,42
1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	1.873.559.000,00	1.873.559.000,00	100,00
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	18.276.920.000,00	17.063.503.000,00	93,36



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	% (Pelampauan/ dibawah anggaran)
1.3.1	Pendapatan Hibah	18.276.920.000,00	17.063.120.000,00	93,36
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	972.395.129.547,00	940.722.867.100,39	96,74

Sedangkan realisasi belanja daerah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 11 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2019

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	% Pelampauan/ Dibawah Anggaran
2	BELANJA	1.174.529.025.791,46	974.726.288.816,45	82,99
2.1	BELANJA OPERASI	831.874.963.283,71	727.328.055.922,45	87,43
2.1.1	Belanja Pegawai	364.726.378.270,00	309.908.797.300,40	84,97
2.1.2	Belanja Barang	412.660.246.503,71	366.755.965.835,05	88,88
2.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	29.081.985.000,00	26.739.219.800,00	91,94
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	24.890.918.910,00	23.408.640.162,00	94,04
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	515.434.600,00	515.432.825,00	100,00
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Vertikal Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00
2.2	BELANJA MODAL	341.487.937.624,75	247.385.889.913,72	72,44
2.2.1	Belanja Tanah	36.834.643.021,00	7.034.003.140,00	19,10
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	101.686.711.624,09	81.505.948.849,00	80,16
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan	131.513.329.688,66	100.616.728.055,33	76,51
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi & Jaringan	61.525.550.929,00	51.090.096.065,39	83,04
2.2.5	Belanja Aset tetap lainnya	4.917.453.903,00	4.192.993.604,00	85,27
2.2.6	Belanja Aset lainnya	5.010.248.459,00	2.943.120.200,00	58,74
2.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.151.124.883,00	5.255.300,00	0,46
2.4	TRANSFER	15.000.000,00	7.087.680,00	47,25
2.4.1	TRANSFER BAGI HASIL KE DESA	15.000.000,00	7.087.680,00	47,25
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00	0,00
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	15.000.000,00	7.087.680,00	47,25
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.174.529.025.791,46	974.726.288.816,17	82,99



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa optimalisasi kegiatan yang dibiayai APBD dalam mengimplementasikan otonomi daerah mampu memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat.

7.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

7.4.1 Basis Akuntansi Pelaporan Keuangan Daerah

Pada Tahun Anggaran 2019, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah basis akrual.

Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar dalam penyusunan laporan keuangan dengan basis akrual mengacu pada delapan prinsip yaitu: 1) Basis akuntansi, 2) Prinsip nilai historis, 3) Prinsip realisasi, 4) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, 5) Prinsip periodisasi, 6) Prinsip konsistensi, 7) Prinsip pengungkapan lengkap, dan 8) Prinsip penyajian wajar.

Pertama, basis akuntansi menggunakan basis akrual untuk LO, LPE, dan Neraca. Biasanya, basis akrual untuk LO mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Anggaran yang disusun dan dilaksanakan berdasarkan Basis Kas, LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Neraca yang berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Kedua, penerapan nilai historis (*historical cost*) dikatakan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar. Aset Pemerintah Kota Blitar dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Ketiga, realisasi (*realization*) adalah pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

periode tersebut, sedangkan pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Keempat, substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka substansi transaksi tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

Kelima, periodisitas (*periodicity*) berarti laporan Pemerintah Kota Blitar disusun dengan periode pelaporan yaitu tahunan, pada akhir tahun akan didapatkan Laporan LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

Keenam, konsistensi (*consistency*) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan. Metode akuntansi yang digunakan Pemerintah Kota Blitar dalam pelaksanaan (implementasi) akuntansi pemerintahan adalah berbasis akrual. Kami yakin dalam pelaksanaan pasti masih ada kekurangan sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Guna mendapatkan prinsip konsistensi maka dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang berdampak pada adanya dampak kumulatif.

Ketujuh, prinsip pengungkapan lengkap (*full disclosure*) berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. Dengan demikian maksud CaLK adalah untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Blitar dan penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE).

Kedelapan, prinsip penyajian wajar (*fair presentation*) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

7.4.2 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan laporan keuangan yang dapat dianalisis dimana pengukurannya dalam akuntansi wajib menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan yang dinilai dengan satuan uang.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

Pengukuran pada masing-masing pos laporan keuangan Pemerintah Kota Blitar sebagai berikut:

7.4.2.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Blitar, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau diterima di OPD atau diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SiLPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi dicatat sebesar nilai nominal yang telah diterima berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

Pada realisasinya Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari pemerintah pusat/provinsi. Hal ini dikarenakan meskipun sudah ada penetapan alokasi dari Kementerian Keuangan/Pemerintah Pusat dan atau Gubernur namun penerimaannya secara bertahap dan penerimaan tahap berikutnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu jika tidak terpenuhi, maka dana tidak ditransfer dari pusat ke daerah dan tidak ada surat pernyataan dari pusat/gubernur ke daerah perihal jumlah hak perolehan daerah. Dana transfer dalam penyampaiannya pada daerah sering terjadi kurang bayar atau lebih



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

bayar untuk hal tersebut diberlakukan sebagai hak dan kewajiban yang harus diakui pada saat adanya surat/SK Menteri yang mengatur hal tersebut.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kota Blitar yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yang sudah diterima dengan pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

b. Pendapatan LRA

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat. Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

c. Pendapatan LO

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

telah diterima Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat.

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi Pada Pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi. Selain itu untuk pendapatan yang diterima oleh OPD/Unit Kerja tidak melalui RKUD diakui sebagai pendapatan sepanjang OPD/Unit Kerja yang bersangkutan melaporkan atas penerimaan dana dimaksud dan atau timbulnya pengesahan pendapatan dan belanja.

Transaksi keuangan yang tidak dapat dicatat secara bruto, antara lain adalah :

- a. Jasa giro dan biaya administrasi bank (atas rekening operasional Pemerintah Kota Blitar) yang langsung diberikan dan dipotong pihak bank sesuai dengan ketentuan bank pada saat nasabah membuka rekening.
- b. Upah pungut yang dipotong oleh penyeter (akibat kerja sama) misalnya Upah Pungut PPJU yang langsung dipotong oleh PLN. Realisasi penerimaan harus dicatat secara bruto (termasuk upah pungut).
- c. Komisi/Potongan/Rabat diakui sebagai pendapatan meskipun langsung mengurangi pengeluaran yang dilakukan Pemda. Dengan demikian SP2D atas pengeluaran tersebut berfungsi juga sebagai bukti penerimaan.

7.4.2.2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja diakui pada saat:

- a. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
- c. Dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran OPD atau Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Blitar untuk pembayaran gaji pegawai dalam membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan realisasi klasifikasi yang diterapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah, apabila dalam mata uang asing, maka dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja.

Beban diakui pada saat :

- a. Timbulnya kewajiban
- b. Terjadinya konsumsi aset
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/ berlalunya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Dalam hal Badan Layanan Umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

7.4.2.3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kota Blitar, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah Kota Blitar terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kota Blitar, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah, antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain,



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

penyertaan modal Pemerintah Kota Blitar, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Akuntansi pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA atau SiKPA.

7.4.2.4 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

a. Klasifikasi Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas :

1) Pungutan :

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas :

- a) Piutang Pajak Daerah yang timbul atas pendapatan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Dapat diketahui dari Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain tentang penetapan pajak daerah yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
- b) Piutang Retribusi yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada atau ditandai dengan terbitnya surat penagihan atau ketetapan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain tentang penetapan retribusi yang belum dilunasi oleh wajib bayar retribusi.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- c) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya karena potensi PAD lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, dan sebagainya.
- 2) Perikatan yaitu piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, seperti:
- a) Pemberian pinjaman, merupakan piutang karena pemberian pinjaman timbul sehubungan dengan adanya pinjaman yang diberikan pemerintah kepada pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/D, perusahaan swasta, atau organisasi lainnya.
 - b) Penjualan, piutang yang timbul dapat dari pemindahtanganan barang milik daerah, sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
 - c) Kemitraan, piutang pemerintah timbul jika terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, tanggal pelaporan keuangan per 31 Desember, belum dilunasi oleh mitra kerja samanya.
 - d) Pemberian fasilitas/jasa, piutang timbul sehubungan dengan adanya fasilitas yang diberikan kepada pihak lain, misalnya pemberian konsesi kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi terhadap sumber daya alam. Ketika hak pemerintah atas imbalan yang dapat dinilai dengan uang dan sampai dengan tanggal pelaporan keuangan per 31 Desember belum diterima dari pihak terkait tersebut diakui sebagai piutang dan disajikan di neraca.

Pengakuan piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat :

- a. terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

- a. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang telah diterima; atau
- b. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

c. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi.

Sedangkan pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian pinjaman, dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- b. Penjualan, diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- c. Kemitraan, diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- d. Pemberian fasilitas/jasa, diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Besaran tarif penyusutan piutang ditentukan dari penilaian kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 12 Tingkat Kolektibilitas Piutang Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Tahun)				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d	> 3 s.d	>5
1	Piutang Pajak Daerah	Lancar	K L	R	R	Macet
2	Piutang Retribusi	Lancar	KL	R	Macet	Macet
3	Bagian Laba BUMN/D	Lancar	K L	R	R	Macet



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Umur Piutang dan Tingkat Kolektibilitas (Tahun)				
		0 s.d 1	>1 s.d 2	> 2 s.d	> 3 s.d	>5
4	Biaya Dibayar di Muka	Lancar	K L	R	R	Macet
5	Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Propinsi	Lancar	K L	R	R	Macet
6	Piutang Penjualan dan atau Bagian Lancar Penjualan Angsuran	Lancar	K L	R	R	Macet
7	Piutang Pemberian Pinjaman dan atau Bagian Lancar Pemberian Pinjaman	Lancar	K L	R	R	Macet
8	Piutang Kemitraan dan atau Bagian Lancar Piutang Kemitraan	Lancar	K L	R	R	Macet
9	Piutang atas Fasilitas/Jasa dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Fasilitas/Jasa	Lancar	K L	R	R	Macet
10	Tagihan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Bagian Lancar atas Tagihan TGR	Lancar	K L	R	R	Macet
11	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan dan atau Bagian Lancar atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	Lancar	K L	R	R	Macet
12	Piutang Lain-Lain	Lancar	K L	R	R	Macet

Sedangkan penyisihan piutang sesuai tabel berikut :

Tabel 13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun Anggaran 2019

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
A	Lancar	0 %
B	Kurang Lancar	10 %
C	Diragukan	50 %
D	Macet	100 %

7.4.2.5. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Blitar sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kota Blitar, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan daerah sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berupa :

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pendekatan dalam pengakuan beban persediaan, yaitu:

- a. Dalam pendekatan aset, beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi, dengan maksud untuk persediaan-persediaan yang penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, dinas kesehatan dan puskesmas maupun di sekretariat OPD.
- b. Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan langsung dicatat sebagai beban persediaan, dengan maksud persediaan-persediaan yang penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan OPD.

Persediaan, diukur dengan menggunakan yaitu :

- a. Metode Perpetual:

Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di OPD dan membutuhkan pengendalian yang kuat, utamanya untuk persediaan obat-obatan di RSUD dan Dinas Kesehatan termasuk didalamnya UPTD Dinas Kesehatan dan lain sebagainya. Dalam ini pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

- b. Metode Periodik :

Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Metode ini digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan OPD.

Persediaan dinilai dengan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (FIFO), atau barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali dikeluarkan, saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan persediaan terakhir. Selain itu dengan metode Harga Pembelian Terakhir



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis.

Untuk persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Persediaan dicatat sebesar:

- a. Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
- b. Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Pencatatan untuk barang yang berasal dari anggaran belanja modal dengan nilai per unit di bawah Rp500.000,00 atau aset tetap yang harga perolehannya dibawah nilai minimum kapitalisasi yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, tidak disajikan di neraca, namun tetap dicatat dalam daftar aset tetap ekstrakomptabel.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen.

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Yang termasuk dalam Investasi Non Permanen di Pemerintah Kota Blitar adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Koperasi dan UM kepada kelompok masyarakat, usaha mikro dan koperasi di wilayah Kota Blitar. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Penyisihan Investasi Non Permanen yang tidak tertagih ditetapkan berdasarkan kategori dari investasi non permanen, yaitu:

- a. Lancar
Investasi Non Permanen dikategorikan lancar apabila tidak terdapat tunggakan baik angsuran pokok dan/atau bunga sampai dengan tanggal jatuh tempo.
- b. Dalam Perhatian Khusus



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Investasi Non Permanen dikategorikan DPK apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/ atau bunga sampai dengan 3 bulan.

- c. Kurang Lancar
Investasi Non Permanen dikategorikan kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 3 bulan sampai dengan 4 bulan.
- d. Diragukan
Investasi Non Permanen dikategorikan diragukan apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 4 bulan sampai dengan 6 bulan.
- e. Macet
Investasi Non Permanen dikategorikan macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga lebih dari 6 bulan.
Adapun besarnya penyisihan Dana Bergulir yang tidak tertagih ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 14 Penyisihan Dana Bergulir

No	Kategori Penyaluran Dana Bergulir	% Perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih
1	Lancar	0%
2	Dalam Perhatian Khusus	5%
3	Kurang Lancar	15%
4	Diragukan	40%
5	Macet	70%

Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Kota Blitar adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu :

- a. PD. BPR Artha Praja
- b. PDAM

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kota Blitar atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal, bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap.

Pengukuran aset adalah sebagai berikut :

- 1) Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- 2) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
- 3) Piutang dicatat sebesar nilai nominal.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- 4) Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.
- 5) Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Penyusutan sebagai alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan dengan metode garis lurus (*straight line method*).

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria manfaat ekonomi atas aset tetap dan nilai rupiah pengeluaran. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Kapitalisasi adalah penentuan nilai perolehan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- 1) Pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang yang manfaat ekonominya lebih dari satu periode akuntansi (lebih dari 12 bulan);
- 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan;
- 3) Barang tersebut dibeli dengan tujuan tidak untuk dijual; dan
- 4) Barang yang dibeli tersebut pada waktu penggunaannya akan membutuhkan belanja pemeliharaan.

Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 15 Kapitalisasi Aset Tetap

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1.3.1	Tanah	Seluruhnya
1.3.2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
01	Alat-alat Besar	20.000.000,00
02	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1.000.000,00
03	Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	500.000,00
04	Alat-alat angkutan air bermotor	1.000.000,00
05	Alat-alat angkutan air tidak bermotor	500.000,00
06	Alat-alat angkutan udara	1.000.000,00
07	Alat-alat Bengkel	500.000,00
08	Alat-alat ukur	500.000,00
09	Alat-alat Pertanian	500.000,00
10	Alat-alat Peternakan	500.000,00
11	Alat-alat Perikanan	500.000,00
12	Alat Kantor	500.000,00
13	Meubelair	500.000,00
14	Alat pengukur waktu	500.000,00
15	Alat pembersih	500.000,00
16	Alat pendingin	500.000,00
17	Alat Dapur	500.000,00
18	Alat Rumah Tangga	500.000,00
19	Komputer	500.000,00
20	Alat Studio	500.000,00
21	Alat-alat Komunikasi	500.000,00
22	Alat-alat Kedokteran	500.000,00
23	Alat-alat Laboratorium	500.000,00
24	Alat Persenjataan/Keamanan	500.000,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
01	Bangunan Gedung tempat kerja	Seluruhnya
02	Bangunan Gedung tempat tinggal	Seluruhnya
03	Bangunan Menara	Seluruhnya
04	Bangunan Lainnya	Seluruhnya
05	Bangunan Bersejarah	Seluruhnya
06	Bangunan Tugu Peringatan	Seluruhnya
07	Bangunan Candi	Seluruhnya
08	Rambu-rambu	500.000,00
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi terdiri atas:	



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
	01 Jalan	Seluruhnya
	02 Jembatan	Seluruhnya
	03 Bangunan Air	Seluruhnya
	04 Instalasi	Seluruhnya
	05 Jaringan	Seluruhnya
1.3.5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
	01 Buku	Seluruhnya
	02 Terbitan	Seluruhnya
	03 Barang-Barang Perpustakaan	Seluruhnya
	04 Barang Bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga	Seluruhnya
	05 Alat olahraga lainnya	200.000,00
	06 Hewan/Ternak dan Tumbuhan (ikan, hewan, tanaman)	500.000,00
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Seluruhnya

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- 1) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- 2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- 3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- 4) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Blitar.

Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 16 Kapitalisasi Pengeluaran Belanja yang Menambah Nilai Aset

No	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
1.3.1	Tanah	Seluruhnya
1.3.2	Peralatan dan Mesin, terdiri atas:	
	01 Alat-alat Besar	10.000.000,00
	02 Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	1.000.000,00
	03 Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	500.000,00
	04 Alat-alat angkutan air bermotor	1.000.000,00
	05 Alat-alat angkutan air tidak bermotor	500.000,00
	06 Alat-alat angkutan udara	1.000.000,00
	07 Alat-alat Bengkel	500.000,00
	08 Alat-alat ukur	500.000,00
	09 Alat-alat Pertanian	500.000,00
	10 Alat-alat Peternakan	500.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Jumlah Harga per unit (Rp)
11	Alat-alat Perikanan	500.000,00
12	Alat Kantor	500.000,00
13	Meubelair	500.000,00
14	Alat pengukur waktu	500.000,00
15	Alat pembersih	500.000,00
16	Alat pendingin	500.000,00
17	Alat Dapur	500.000,00
18	Alat Rumah Tangga	500.000,00
19	Komputer	500.000,00
20	Alat Studio	500.000,00
21	Alat-alat Komunikasi	500.000,00
22	Alat-alat Kedokteran	500.000,00
23	Alat-alat Laboratorium	500.000,00
24	Alat Persenjataan/Keamanan	500.000,00
1.3.3	Gedung dan Bangunan, terdiri atas:	
01	Bangunan Gedung tempat kerja	12.500.000,00
02	Bangunan Gedung tempat tinggal	12.500.000,00
03	Bangunan Menara	12.500.000,00
04	Bangunan Lainnya	12.500.000,00
05	Bangunan Bersejarah	12.500.000,00
06	Bangunan Tugu Peringatan	12.500.000,00
07	Bangunan Candi	12.500.000,00
08	Rambu-rambu	12.500.000,00
1.3.4	Jalan, Jaringan dan Instalasi terdiri atas:	
01	Jalan	12.500.000,00
02	Jembatan	12.500.000,00
03	Bangunan Air	12.500.000,00
04	Instalasi	12.500.000,00
05	Jaringan	12.500.000,00
1.3.5	Aset Tetap Lainnya, terdiri atas:	
01	Buku	Tidak dikapitalisasi
02	Terbitan	Tidak dikapitalisasi
03	Barang-Barang Perpustakaan	Tidak dikapitalisasi
04	Barang Bercorak Kebudayaan/Kesenian/alat olahraga	Tidak dikapitalisasi
05	Alat olahraga lainnya	Tidak dikapitalisasi
06	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	Tidak dikapitalisasi
1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Seluruhnya



PEMERINTAH KOTA BLITAR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Pembangunan aset tersebut dapat dikerjakan sendiri (swakelola) maupun menggunakan jasa pihak ketiga melalui kontrak konstruksi. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau masih dalam proses pengerjaan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya, besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Biaya Rencana Pembangunan berupa kegiatan *Feasibility Study* (FS) dan *Detail Engineering Design* (DED) sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan, namun apabila FS dan DED tersebut diikuti dengan pembangunan fisik, maka biaya perolehan FS dan DED akan dikapitalisasi dengan pembangunan fisik pada aset bersangkutan. Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun maka akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

7.4.2.6. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Dana cadangan diklasifikasikan berdasarkan peruntukannya, dan pembentukannya didasarkan pada perencanaan yang matang. Pembentukan dan peruntukan dana cadangan didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan. Dana cadangan diakui pada saat SP2D LS Pembentukan dana cadangan. Sedangkan pengukurannya sesuai nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Hasil dari yang diperoleh dari dana cadangan diukur sebesar nominal yang diterima.

7.4.2.7. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan penggunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah.

Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemda sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :

- a. Bangun Guna Serah (BGS);
- b. Bangun Serah Guna (BSG);
- b. Kerja Sama Pemanfaatan;
- c. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan diluar entitas. Adapun jenis-jenis Aset Tak Berwujud antara lain *software* komputer, lisensi dan *franchise*, hak paten dan hak cipta, hasil kajian, pengembangan dan *heritage* ATB (ATB yang memiliki nilai sejarah/budaya, film/seni).

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Blitar karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

Aset lainnya diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya berupa pendapatan atau penghematan belanja yang dapat diukur dengan andal telah diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.

Aset lainnya dalam pengerjaan jika jangka waktu perolehannya melebihi satu tahun anggaran atau melewati tanggal pelaporan. Sebagai *intangible asset work in progress*.

Aset lainnya diukur dan dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan, Surat Keputusan Pembebanan/SKTJM setelah dikurangi dengan setoran, harga perolehan. Khusus untuk ATB utamanya *software*



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dan hasil kajian/penelitian/pengembangan memiliki masa manfaat 5 tahun dan dilakukan amortasi secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

7.4.2.8. Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kota Blitar.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan selain itu kewajiban yang akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi dimana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 1) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 2) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

- 1) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*);
- 2) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- 3) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); dan
- 4) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika Pemerintah Kota Blitar menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang.

Dalam transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Kota Blitar pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang Pemerintah Kota Blitar yang substansinya sama dengan SUN. Aliran



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Kota Blitar baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas Pemerintah Kota Blitar yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Blitar dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang Perhitungan Fihak Ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

7.4.2.9. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Dalam rangka implementasi Entitas tidak melakukan penyajian kembali laporan keuangan sebagai akibat perubahan kebijakan dan koreksi kesalahan. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan sebelumnya disajikan pada laporan ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan Laporan atas Keuangan

Perubahan yang signifikan atas pos-pos laporan keuangan akibat dari perubahan kebijakan dan koreksi kesalahan yang berdampak pada laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan dalam Catatan Laporan atas Keuangan dalam rangka memberikan informasi atas keterbandingan laporan keuangan.

7.4.2.10. Konsolidasi Laporan Keuangan

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kota Blitar sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan (Dalam hal ini BPKAD selaku PPKD).

Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.



PEMERINTAH KOTA BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah (SKPD/OPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kota Blitar sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD/OPD dan PPKD.

Prosedur konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi OPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca.

Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K SKPD dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K Dinas Aset dieliminasi menjadi R/K Aset.

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi atau transaksi keuangan, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemerintah Kota Blitar merupakan entitas pelaporan yang berkewajiban memberikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan mencakup seluruh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran (PA/KPA) yang terdiri dari 28 OPD dan 39 Unit Kerja.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

7.5.1.1 PENDAPATAN LRA

Realisasi Pendapatan Tahun 2019 sebesar Rp940.722.867.100,39 atau 96,74% dibandingkan dengan anggaran Pendapatan sebesar Rp972.395.129.547,00. Realisasi Pendapatan Tahun 2019 naik 5,18% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Tahun 2018 sebesar Rp894.409.176.023,96. Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.

7.5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 sebesar Rp166.140.178.781,39 atau 93,72% dari anggaran sebesar Rp177.268.796.653,00. Realisasi PAD Tahun 2019 naik sebesar 1,91% dibandingkan dengan realisasi PAD Tahun 2018 sebesar Rp163.026.005.752,93. Adapun rincian penerimaan PAD terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
1. Pajak Daerah	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	39.627.800.000,00	44.650.054.610,03	40.501.229.760,26

Realisasi Pajak Daerah Tahun 2019 sebesar Rp44.650.054.610,03 atau 112,67% dari anggaran sebesar Rp39.627.800.000,00 yang naik 10,24% dibandingkan dengan realisasi Pajak Daerah Tahun 2018 sebesar Rp40.501.229.760,26. Adapun rincian penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pajak	SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Pajak Hotel	BPKAD	910.000.000,00	1.082.717.025,00	118,98	1.004.623.397,00
2	Pajak Restoran	BPKAD	4.219.000.000,00	4.544.325.347,60	107,71	3.609.361.813,26
3	Pajak Hiburan	BPKAD	2.275.000.000,00	2.119.693.250,00	93,17	982.745.204,00
4	Pajak reklame	BPKAD	500.000.000,00	614.505.667,43	122,90	639.066.975,00
5	Pajak Penerangan Jalan	BPKAD	9.500.000.000,00	10.311.381.864,00	108,54	9.893.741.919,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Jenis Pajak	SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
6	Pajak Parkir	BPKAD	265.300.000,00	335.986.763,00	126,64	295.382.400,00
7	Pajak Air Tanah	BPKAD	58.500.000,00	63.321.286,00	108,24	62.973.960,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	BPKAD	11.300.000.000,00	12.061.691.607,00	106,74	11.789.303.518,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	BPKAD	10.600.000.000,00	13.516.431.800,00	127,51	12.224.030.574,00
Jumlah			39.627.800.000,00	44.650.054.610,03	112,67	40.501.229.760,26

Pendapatan Pajak Daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah. Terdapat 9 (sembilan) jenis pajak daerah di Kota Blitar sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Blitar. Kebijakan Umum Pajak Daerah Kota Blitar mengacu pada :

1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
2. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
3. Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2009 tentang Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
4. Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
5. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Keputusan atas Permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

Metode pembayaran pajak daerah menggunakan metode *Self Assesment* dan *Official Assesment*. Metode *Self Assesment* memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang. *Self Assesment* diterapkan pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan *Official Assesment* adalah Sistem Pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada Pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak bersifat pasif karena utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak oleh Pemerintah. *Official Assesment* diterapkan pada pada Pajak Reklame, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan Pajak Air Tanah.

Pada Tahun 2019 terdapat peningkatan realisasi dari tahun lalu dikarenakan Pemerintah Kota Blitar telah berusaha secara optimal dalam melakukan intensifikasi potensi objek pajak daerah dan pemungutannya yaitu dengan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Blitar telah bekerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan PT Pos Indonesia dalam mempermudah Wajib Pajak PBB- P2 melakukan pembayaran sehingga tidak hanya melalui PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk saja. Pada Tahun 2020, Pemerintah Kota Blitar juga akan melakukan kerja sama dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak.
2. Pemerintah Kota Blitar membuat pelayanan pembayaran pajak daerah menggunakan sistem *online* (aplikasi Padamoveon) diharapkan dengan aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat dalam membayar pajak daerah karena dapat diakses oleh Wajib Pajak dimanapun berada sehingga penerimaan pajak daerah semakin meningkat dan tidak terjadi kebocoran.

Berdasarkan tabel di atas, walaupun pajak hiburan mengalami kenaikan pendapatan yang cukup signifikan dari tahun lalu, tetapi realisasinya belum memenuhi target pendapatan pada Tahun 2019. Hal ini disebabkan adanya larangan beroperasi untuk tempat hiburan karaoke, yang dianggap berpotensi menimbulkan keresahan masyarakat. Adapun terkait potensi pajak yang dinamikanya ditentukan oleh pasar dan kegiatan roda ekonomi masyarakat seperti pajak reklame dan pajak parkir perlu ditumbuh kembangkan situasi kondisi dan dinamika perekonomian yang kondusif.

	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2. Retribusi Daerah	10.126.283.822,00	10.138.463.905,50	9.940.599.576,00

Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019 sebesar Rp10.138.463.905,50 atau 100,16% dari anggaran sebesar Rp10.126.283.822,00. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019 naik 1,99% dibandingkan dengan realisasi Retribusi Daerah Tahun 2018 sebesar Rp9.940.599.576,00. Adapun rincian penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Retribusi	SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
A.	Retribusi Jasa Umum					
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.588.173.472,00	1.254.259.472,00	78,97	1.431.093.447,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Jenis Retribusi	SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	248.028.000,00	274.487.000,00	110,67	130.517.000,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	Dinas Perhubungan	1.700.000.000,00	1.791.873.000,00	105,40	1.728.902.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.027.500.000,00	1.035.003.000,00	100,73	1.099.613.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	485.665.000,00	527.227.901,00	108,56	486.334.200,00
6	Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus	Dinas Lingkungan Hidup	14.540.000,00	23.400.000,00	160,94	16.420.000,00
7	Retribusi Pengolahan limbah cair	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10.500.000,00	10.900.000,00	103,81	11.555.000,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	31.600.000,00	17.719.200,00	56,07	31.244.200,00
9	Sewa Alat-alat Berat/Walls	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15.000.000,00	24.650.000,00	164,33	25.150.000,00
10	Pelayanan Pemeriksaan Lab kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	89.750.000,00	150.470.000,00	167,65	108.640.000,00
Jumlah A			5.210.756.472,00	5.109.989.573,00	98,07	5.069.468.847,00
B.	Retribusi Jasa Usaha					
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	OPD Penghasil	2.012.797.350,00	1.649.085.232,50	81,93	1.833.405.445,00
2	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	144.200.000,00	140.550.000,00	97,47	169.775.984,00
3	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan	116.280.000,00	117.722.000,00	101,24	140.860.500,00
4	Retribusi Tempat khusus parkir	OPD Penghasil	683.705.000,00	676.309.000,00	98,92	708.436.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Jenis Retribusi	SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
5	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	148.125.000,00	315.877.000,00	213,25	181.967.000,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan olah Raga	Dinas Kepemudaan dan Olah raga	148.060.000,00	176.315.000,00	119,08	192.042.500,00
7	Retribusi Jasa Informasi dan Penyiaran	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	60.000.000,00	60.591.000,00	100,99	0,00
8	Retribusi Memasuki Kawasan Wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.000.800.000,00	1.048.140.000,00	104,73	1.112.441.000,00
Jumlah B			4.313.967.350,00	4.184.589.232,50	97,00	4.338.928.429,00
C.	Retribusi Perijinan Tertentu					
1	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	600.000.000,00	842.492.100,00	140,41	530.625.300,00
2	Retribusi Ijin Trayek	Dinas Perhubungan	1.560.000,00	1.393.000,00	89,29	1.577.000,00
Jumlah C			601.560.000,00	843.885.100,00	140,28	532.202.300,00
Jumlah keseluruhan (A+B+C)			10.126.283.822,00	10.138.463.905,50	100,12	9.940.599.576,00

Pengelolaan Retribusi berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Retribusi Pelayanan Kesehatan menjadi retribusi dengan realisasi terendah yaitu sebesar 78,97%. Hal ini disebabkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota BPJS Kesehatan, sehingga mayoritas pasien berobat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Adapun realisasi dari retribusi ini sebagian besar berasal dari warga luar Kota Blitar yang bukan anggota BPJS Kesehatan.

	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
3.		1.169.069.219,00	1.169.069.219,24	1.104.657.721,40

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah pos penerimaan untuk menampung pendapatan dari Hasil Investasi berupa deviden tunai. Penyertaan Modal ini sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah Kota Blitar memiliki Penyertaan Modal kepada PDAM, PD BPR Artha Praja dan PT Bank Jatim.

Atas penyertaan modal ini PD BPR Artha Praja berkewajiban menyetorkan 50% dari Laba bersih setelah dipotong Pajak sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar. Dan Pembagian eviden Tahun Buku 2018 dari PD BPR Artha Praja dituangkan dalam Surat Persetujuan Pembagian Deviden Nomor : 580/51.II.BPR.III/410.440.2/2019 Tanggal 21 Maret 2019.

Penyertaan Modal pada PT Bank Jatim menghasilkan deviden sebagaimana tercantum dalam Salinan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2018 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor 99 tanggal 26 April 2019. Sedangkan Penyertaan Modal terhadap PDAM belum menghasilkan deviden mengingat kondisi keuangan yang terus merugi.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019 sebesar Rp1.169.069.219,24 atau 100% dari anggaran. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019 naik 5,83% dibandingkan dengan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2018 sebesar Rp1.104.657.721,40. Kenaikan ini berasal dari penerimaan laba atas penyertaan pada PT Bank Jatim dan PD BPR Artha Praja dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penerimaan *cash dividen*/bagian laba Tahun Buku 2018 yang dibayarkan pada Tahun 2019 atas Penyertaan Modal pada Bank Jatim sebesar Rp774.780.901,24. Deviden tersebut telah ditransfer pada Tanggal 29 Mei 2019.
- b. Penerimaan *cash dividen*/bagian laba Tahun 2018 yang dibayarkan pada Tahun 2019 atas Penyertaan Modal pada PD BPR Artha Praja sebesar Rp394.288.318,00 yang dibayarkan Tanggal 18 April 2019.

	Lain-lain	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
4.	PAD yang Sah	126.345.643.612,00	110.182.591.046,62	111.479.518.695,27

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2019 sebesar Rp110.182.591.046,62 atau 87,21% dari anggaran sebesar Rp126.345.643.612,00. Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2019 turun 1,16% dibandingkan dengan realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2018 sebesar Rp111.479.518.695,27. Rincian penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 19 Rincian Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
A	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan					
1	Penjualan hasil penebangan pohon	DLH	13.800.000,00	14.840.000,00	107,54	13.860.000,00
2	Penjualan Bahan Bekas Bangunan	BPKAD	132.550.999,00	132.550.999,00	100,00	0,00
3	Penjualan hasil pertanian	DKPP	8.647.700,00	8.047.700,00	93,06	78.003.750,00
4	Penjualan hasil perikanan	DKPP	24.900.000,00	25.423.500,00	102,10	44.610.000,00
Jumlah A			179.898.699,00	180.862.199,00	100,54	136.473.750,00
B	Jasa Giro (B)					
1	Jasa Giro Kas Daerah	BPKAD	2.367.806.793,00	3.475.131.030,07	146,77	2.586.722.297,83
2	Jasa Giro BOS	SD/SMP	0,00	3.138.646,35	0,00	0,00
Jumlah B			2.367.806.793,00	3.478.269.676,42	146,90	2.586.722.297,83
C	Bunga Deposito					
1	Bank Jatim	BPKAD	200.000.000,00	464.828.767,03	232,41	302.876.712,26
2	Bank BNI 46	BPKAD	156.843.956,00	399.467.120,00	254,69	179.112.645,00
3	Bank Mandiri	BPKAD	126.000.000,00	282.962.592,36	224,57	180.453.410,00
4	Bank BRI	BPKAD	96.394.556,00	352.603.056,00	365,79	109.668.513,00
5	Bank BTN	BPKAD	0,00	130.869.863,01	0,00	0,00
Jumlah C			579.238.512,00	1.630.731.398,40	281,53	772.111.280,26
D	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai tukar Rupiah					
1	Lain – lain/(Pembulatan Gaji)	BPKAD	0,00	122.610,00	0,00	5.049,00
Jumlah D			0,00	122.610,00	0,00	5.049,00
E	Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan					
1	Bidang Pendidikan	BPKAD	0,00	9.534.450,00	0,00	101.660.662,40
2	Bidang Kesehatan	BPKAD	84.403.657,00	84.403.657,71	100,00	0,00
3	Bidang Pekerjaan Umum	BPKAD	294.412.017,00	338.390.892,11	114,94	175.089.542,89
4	Bidang Lingkungan Hidup	BPKAD	5.081.366,00	5.819.924,64	114,53	17.877,80



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
5	Bidang Pariwisata	BPKAD	0,00	8.371.153,29	0,00	
6	Bidang Perdagangan	BPKAD	39.912.650,00	0,00	0,00	0,00
7	Bidang Otoda	BPKAD	0,00	0,00	0,00	10.171.137,00
Jumlah E			423.809.690,00	446.520.077,75	105,36	286.939.220,09
F	Pendapatan denda Pajak (F)					
1	PBB P2	BPKAD	0,00	28.698.031,00	0,00	26.873.672,00
Jumlah F			0,00	28.698.031,00	0,00	26.873.672,00
G	Pendapatan Denda Retribusi (G)					
1	Jasa Umum	Disparbud	125.200.000,00	109.700.000,00	87,62	134.675.000,00
2	Jasa Usaha	Disparbud	9.000.000,00	1.690.500,00	18,78	37.848.000,00
Jumlah G			134.200.000,00	111.390.500,00	83,00	172.523.000,00
H	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan					
1	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	BPKAD	0,00	8.824.223,94	0,00	0,00
2	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame	DPM PTSP	0,00	9.577.223,71	0,00	2.642.000,00
Jumlah H			0,00	18.401.447,65	0,00	2.642.000,00
I	Pendapatan dari Pengembalian					
1	Pendapatan dari Pengembalian dari Kelebihan Belanja	BPKAD	617.497.671,00	1.030.626.208,50	166,90	444.239.932,84
.. Jumlah I			617.497.671,00	1.030.626.208,50	166,90	444.239.932,84
J	Pendapatan Fasilitas Sosial dan Umum					
	Fasilitas Sosial	Dispera	113.238.000,00	118.053.298,00	104,25	109.075.665,00
	Fasilitas Umum	Dispera, BPKAD, dan 3 Kecamatan	1.333.120.670,00	1.335.704.429,00	100,19	1.024.398.283,00
Jumlah J			1.446.358.670,00	1.453.757.727,00	100,51	1.133.473.948,00
K	Pendapatan dari BLUD		112.000.000.000,00	95.869.457.204,43	85,60	100.820.369.771,53



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
L	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir					
1	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari UMKM/Koperasi	Dinkop	67.187.848,00	9.928.209,47	14,78	58.132.307,99
2	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari KPUK/BNI 46	BPKAD	0,00	0,00	0,00	1.395.660,00
Jumlah L			67.187.848,00	9.928.209,47	14,78	59.527.967,99
M	Dana Kapitasi JKN Pada FKTP					
1	Dana kapitasi JKN FKTP UPTD Kes. Kec. Kep. Kidul		2.517.583.287,00	1.637.209.200,00	65,03	1.247.015.100,00
2	Dana kapitasi JKN FKTP UPTD Kes. Kec. Sukorejo		2.644.164.296,00	1.628.120.400,00	61,57	1.369.026.000,00
3	Dana kapitasi JKN FKTP UPTD Kes. Kec. Sananwetan		2.735.360.638,00	2.090.498.700,00	76,42	1.856.138.250,00
Jumlah M			7.897.108.221,00	5.355.828.300,00	67,82	4.472.179.350,00
N	Pendapatan denda keterlambatan dan atau tidak adanya laporan bulanan PPAT/PPATS		0,00	250.000,00	0,00	14.750.000,00
O	BPJS Non Kapitasi		632.537.508,00	563.241.100,00	89,04	467.920.300,00
P	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LRA		0,00	267.200,00	0,00	505.489,73
Q	Pendapatan atas Kelebihan Pembayaran Pajak					
1	Pendapatan atas Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	50.900,00	0,00	21.976.565,00
2	Pendapatan atas Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah		0,00	3.899.000	0,00	4.000,00
3	Pendapatan atas Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang Sah		0,00	289.257,00	0,00	2.269.101,00
Jumlah Q			0,00	4.239.157,00	0,00	24.249.666,00
R	Pendapatan atas jasa informasi dan penyiaran		0,00	0,00	0,00	58.012.000,00
Jumlah Lain-Lain PAD (A s/d R)			126.345.643.612,00	110.182.591.046,62	87,21	111.479.518.695,27

Lain-lain PAD yang Sah merupakan kelompok pendapatan lain yang tidak termasuk dalam kategori Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer, yang terdiri dari :

- A. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan terdiri dari penjualan hasil penebangan pohon, penjualan bahan bekas bangunan, penjualan hasil pertanian, dan penjualan hasil perikanan.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- B. Jasa Giro mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 146,90% disebabkan banyaknya saldo UP/GU/TU Bendahara Pengeluaran SKPD yang belum terpakai sebagai akibat transaksi non tunai, dan adanya rekening penampungan pendapatan yang disetor setiap akhir bulan ke RKUD, sehingga dana yang mengendap di Giro Kas Daerah juga meningkat.
- C. Bunga Deposito sebesar 281,53% berasal dari kenaikan jumlah deposito dari Rp13.000.0000.000,00 pada tahun 2018 menjadi Rp60.000.000.000,00 pada tahun 2019.
- D. Komisi, Potongan, dan Selisih Nilai Tukar Rupiah adalah pembulatan atas gaji.
- E. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp446.520.077,75 dengan rincian :
1. Bidang Pendidikan sebesar Rp9.534.450,00 merupakan denda atas keterlambatan pengadaan seragam siswa dengan nomor kontrak 27/671/PPK-2/410.110.1/2019 sebesar Rp8.591.000,00 dan denda atas keterlambatan pengadaan *interactive white board* dengan nomor kontrak 27/K.TEL.1208/410.110/2019 dengan nilai Rp943.450,00
 2. Bidang Kesehatan sebesar Rp84.403.657,71 merupakan denda atas Pembangunan Gedung Bedah Sentral pada RSUD Mardi Waluyo dengan Nomor Kontrak 445/1475/410.205/PPK/2018.
 3. Bidang Pekerjaan Umum sebesar Rp338.390.892,11 merupakan denda atas 15 pekerjaan sebagai berikut:

**Tabel 20 Rincian Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Pekerjaan Umum**

No.	Nama Pekerjaan	Nomor Kontrak	Nilai (Rp)
1	Peningkatan jalan di Jl. Klampis	620.DAK/708/410.102/2018	38.000.000,00
2	Peningkatan Jalan di Jl. Jati	620.DAK/711/410.102/2018	50.000.000,00
3	Peningkatan Jalan di Jl. Jati	620.DAK/711/410.102/2018	50.000.000,00
4	Pelebaran Jalan di Jl. Mastrip Lanjutan	620/551/410.102/2018	38.068.036,44
5	Pelebaran Jalan di Jl. Cisadane	620/485/410.102/2018	20.000.000,00
6	Pelebaran Jalan di Jl. Cisadane	620/485/410.102/2018	6.903.000,00
7	Pelebaran Jalan di Jl. Cisadane	620/485/410.102/2018	10.000.000,00
8	Peningkatan Jalan di Jl. Muara Takus	620.DAK/707/410.102/2018	30.000.000,00
9	Peningkatan Jalan di Jl.	620.DAK/707/410.102/2018	11.835.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Nama Pekerjaan	Nomor Kontrak	Nilai (Rp)
	Muara Takus		
10	Peningkatan Jalan di Jl. Muara Takus	620.DAK/707/410.102/2018	20.000.000,00
11	Peningkatan Jalan di Jl. Muara Takus	620.DAK/707/410.102/2018	51.014.558,17
12	Pengawasan Pembangunan Jembatan Masuk Kel. Karangtengah	620.DAU/646.AWAS/410.102/2019	187.400,00
13	Pembangunan Jembatan Masuk Kel. Karangtengah	620.DAU/647/410.102/2019	4.063.700,00
14	Rehabilitasi Saluran di Jl. Kabaena	610/1009/410.102/2019	1.069.000,00
15	Peningkatan Jalan di Jl. Ir. Soekarno Utara	620.DAK/685/410.102/2016	7.250.197,50
	Total		338.390.892,11

4. Bidang Lingkungan Hidup sebesar Rp5.819.924,64 merupakan denda atas :
- a. Kekurangan volume pekerjaan Pembangunan TPS Plosokerep dengan nomor kontrak 027/427/PPK/410.115.2/2018 tanggal 2 Maret 2018 yang merupakan Hasil Pemeriksaan Interim LKPD TA 2018 sebesar Rp2.685.706,01.
 - b. Kekurangan volume pekerjaan Pembangunan TPS Klampok dengan nomor kontrak 027/643/PPK/410.115.2/2018 tanggal 4 April 2018 yang merupakan Hasil Pemeriksaan Interim LKPD TA 2018 sebesar Rp2.395.660,83.
 - c. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan perencanaan pembuatan Kanopi/Tutup TPS Kelurahan Blitar dan TPS A. Yani TA 2018 dengan nomor kontrak 027/2111/PPK/410.115.2/2018 tanggal 9 November 2018 sebesar Rp15.518,00.
 - d. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan perencanaan Penambahan SR Gas Metan TA 2019 dengan nomor kontrak 027/16.62/PPK/410.115.2/2019 tanggal 5 September 2019 sebesar Rp47.190,00.
 - e. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Taman di Jl. Sumatra TA 2019 dengan nomor kontrak 027/20.82/PPK/410.115.3/2019 tanggal 4 November 2019 sebesar Rp256.300,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- f. Denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Jogging track dan pagar aloon-aloon TA 2019 dengan nomor kontrak 027/19.23/PPK/410.115.3/2019 tanggal 11 Oktober 2019 sebesar Rp419.549,80.
- 5. Bidang Pariwisata sebesar Rp8.371.153,29 merupakan denda atas pekerjaan Peningkatan Sarana Prasarana Agro Wisata Blimbing (Pembangunan Kios, Tempat Duduk, Mushola, Pembangunan Panggung Tradisional) dengan Nomor Kontrak 027/136/PPKom/410.107.3/2019.
- F. Pendapatan Denda Pajak merupakan pendapatan dari pajak yang terlambat dibayarkan.
- G. Pendapatan Denda Retribusi merupakan pendapatan denda dari retribusi yang terlambat dibayar.
- H. Pendapatan dari Pengembalian dari Kelebihan Belanja sebesar Rp1.030.626.208,50 merupakan setoran kembali ke Kas Daerah atas kelebihan belanja dan temuan pemeriksaan.
- I. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan merupakan hasil eksekusi jaminan atas pelaksanaan pekerjaan yang mengalami wan prestasi, dan atas pembongkaran reklame.
- J. Pendapatan Fasilitas Sosial dan Umum
Pendapatan Fasilitas Sosial berasal dari pembayaran Tagihan Listrik dan Air Rusunawa.
Pendapatan Fasilitas Umum merupakan Sewa Tanah Pertanian eks Bengkok.
- K. Pendapatan dari BLUD merupakan pendapatan RSUD Mardi Waluyo.
- L. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan pendapatan bunga atas dana bergulir.
- M. Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah besaran pembayaran per bulan yang dibayar di muka kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- N. Pendapatan Denda Keterlambatan dan atau tidak adanya Laporan Bulanan PPAT/PPATS merupakan denda bagi PPAT/PPATS yang terlambat atau tidak melaporkan realisasi akta.
- O. BPJS Non Kapitasi merupakan besaran pembayaran klaim oleh BPJS kepada FKTP berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
- P. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya merupakan setoran tunai bendahara BOSNAS ke rekening BOSNAS.
- Q. Pendapatan atas Kelebihan Pembayaran Pajak adalah pos untuk menampung kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1.1.2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2019 sebesar Rp757.519.568.319,00 atau 97,51% dari anggaran sebesar Rp776.849.412.894,00. Transfer Tahun 2019 naik 2,55% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2018 sebesar Rp714.475.849.626,00. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat—Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat—Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi.

	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1.		661.041.692.394,00	617.074.500.118,00	626.534.717.922,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat—Dana Perimbangan Tahun 2019 sebesar Rp617.074.500.118,00 atau 93,35% dari anggaran sebesar Rp661.041.692.394,00. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2019 turun 1,51% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp626.534.717.922,00. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA), DAK, dan DAU. Masing-masing dana tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan PBB yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan.
 - b. DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan, yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan Pasal 29. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan. Sedangkan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Pajak Penghasilan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.
 - c. DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
Pergunaan DBH Pajak bersifat *blockgrant*, yaitu penggunaan dana diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kecuali untuk DBH CHT paling sedikit 50% digunakan untuk mendanai program/kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian anggaran dan realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2019 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 21 Dana Bagi Hasil Pajak
Tahun Anggaran 2019**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
a.	Dana Bagi Hasil Pajak	45.644.856.000,00	38.722.150.634,00	84,83	33.311.778.801,00
1.	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	4.412.195.000,00	3.461.285.700,00	78,45	3.995.603.608,00
2.	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21	15.450.722.000,00	9.465.476.244,00	61,26	15.634.320.193,00
3.	Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau	25.781.939.000,00	25.795.388.690,00	100,05	13.681.855.000,00

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dasar hukum Alokasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) adalah Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) terdiri atas 5 (lima) jenis yaitu:
- DBH SDA Kehutanan merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Kehutanan.
 - DBH SDA Minyak dan Gas Bumi merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minyak dan Gas Bumi.
 - DBH SDA Mineral dan Batu Bara (Minerba) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Minerba yang berasal dari luran Tetap (*Land-Rent*) dan iuran Eksploitasi/Eksplorasi (*royalti*).
 - DBH SDA Panas Bumi merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Panas Bumi yang berasal dari Setoran Bagian Pemerintah atau luran Tetap dan luran Produksi.
 - DBH SDA Perikanan merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA Perikanan.

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak tidak sama dengan anggaran disebabkan adanya perubahan data prognosa realisasi Penerimaan Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dibagikan ke daerah sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2019 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV TA 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.07/2019 tentang Rincian Dana Bagi Hasil



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tembakau menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 untuk Dana Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau.

Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) sebesar Rp55.197.441.211,00 atau 66,15% dari anggaran sebesar Rp83.445.154.000,00, turun 18,18% dari realisasi Tahun 2018 sebesar Rp67.464.332.495,00 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 22 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Tahun Anggaran 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
b.	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	83.445.154.000,00	55.197.441.211,00	66,15	67.464.332.495,00
1.	Bagi Hasil dar Provisi Sumber Daya Hutan	234.970.000,00	140.982.000,00	60,00	250.178.053,00
2.	Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	590.155.800,00	60,00	701.234.591,00
3.	Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi	73.316.648.000,00	47.885.480.122,00	65,31	62.568.101.586,00
4.	Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi	8.064.840.000,00	5.978.092.816,00	74,13	3.099.167.031,00
5.	Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	33.739.000,00	34.775.673,00	103,07	31.203.994,00
6.	Bagi Hasil Pertambangan Umum	811.364.000,00	567.954.800,00	70,00	814.447.240,00

3. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU diukur dari total penerimaan transfer yang didasarkan pada Alokasi Dasar dan Celah Fiskal.

Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp437.776.459.000,00 atau 100% dari anggaran, naik 3,93% dari realisasi Tahun 2018 sebesar Rp421.212.306.000,00. Dasar hukum Transfer Dana Alokasi Umum adalah Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Tabel 23 Dana Alokasi Umum (DAU)
Tahun Anggaran 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
c.	Dana Alokasi Umum (DAU)	437.776.459.000,00	437.776.459.000,00	100,00	421.212.306.000,00
1.	Dana Alokasi Umum (DAU)	430.364.699.000,00	430.364.698.000,00	100,00	421.212.306.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
2.	Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan	7.411.760.000,00	7.411.761.000,00	100,00	0,00

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK diukur dari jumlah penerimaan DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat. DAK terbagi atas 2 jenis, DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus Non Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah. Rincian DAK Fisik dan DAK Non Fisik Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 24 Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Tahun Anggaran 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
d.	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK)	40.656.400.000,00	35.013.276.203,00	86,12	54.970.338.080,00
1.	DAK Bidang Pendidikan	5.016.417.000,00	4.841.763.342,00	96,52	4.723.986.880,00
2.	DAK Bidang Kesehatan dan KB	8.529.094.000,00	7.897.897.386,00	92,60	10.836.389.900,00
3.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan/Jembatan	11.790.501.000,00	9.013.132.350,00	76,44	25.060.350.000,00
4.	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	2.640.986.000,00	2.107.876.970,00	79,81	2.211.111.700,00
5.	DAK Bidang Air Minum	400.000.000,00	0,00	0,00	600.113.000,00
6.	DAK Bidang Sanitasi (reguler)	1.028.239.000,00	1.028.239.000,00	100,00	1.574.339.200,00
7.	DAK Bidang Pertanian	2.661.530.000,00	2.547.599.701,00	95,72	648.750.000,00
8.	DAK Bidang Lingkungan Hidup	730.711.000,00	641.094.443,00	87,74	475.840.150,00
9.	DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman	3.262.144.000,00	3.209.644.000,00	98,39	2.365.755.000,00
10.	DAK Bidang Pasar	1.380.390.000,00	1.172.921.600,00	84,97	2.832.276.100,00
11.	DAK Bidang Pariwisata	1.325.241.000,00	1.099.104.511,00	82,94	1.821.926.000,00
12.	DAK Bidang Kesehatan dan KB (Penugasan)	1.441.147.000,00	1.008.802.900,00	70,00	0,00
13.	DAK Bidang Sanitasi (Penugasan)	450.000.000,00	445.200.000,00	98,93	1.819.500.150,00

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp35.013.276.203,00 atau 86,12% dari anggaran sebesar Rp40.656.400.000,00, turun 36,31% dari realisasi



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun 2018 sebesar Rp54.970.338.080,00. Dasar hukum Transfer DAK Fisik adalah Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Realisasi DAK Fisik kurang dari anggaran karena Tranfer DAK Fisik berdasarkan atas kemajuan realisasi fisik.

Tabel 25 Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Tahun Anggaran 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
e.	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	53.518.823.394,00	50.365.173.070,00	94,11	49.575.962.546,00
	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	4.252.200.000,00	3.524.945.350,00	82,90	3.967.695.350,00
	Dana Alokasi Khusus Tunjangan Profesi Guru	41.653.094.394,00	40.291.163.325,00	96,73	42.132.720.844,00
	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan dan KB	3.871.009.000,00	2.935.551.276,00	75,83	2.038.496.050,00
	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	1.828.100.000,00	1.828.100.000,00	100,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	470.000.000,00	470.000.000,00	100,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataaan	521.736.000,00	521.736.000,00	100,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional KB	0,00	0,00	0,00	631.945.082,00
	Dana Alokasi Khusus Tambahan Penghasilan Guru	112.825.000,00	0,00	0,00	90.900.000,00
	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Administrasi Kependudukan	809.859.000,00	793.677.119,00	98,00	714.205.220,00

Realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp50.365.173.070,00 atau 94,11% dari anggaran sebesar Rp53.518.823.394,00, naik 1,59% dari realisasi Tahun 2018 sebesar Rp49.575.962.555,00. Dasar hukum Transfer DAK Non Fisik adalah Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) kurang dari anggaran karena SiLPA DAK Non Fisik tahun sebelumnya mengurangi Transfer DAK Non Fisik tahun ini.

	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2. Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	51.430.800.000,00	51.430.800.000,00	13.000.000.000,00

Dana Insentif Daerah adalah bagian dari Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun 2019 sebesar Rp51.430.800.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat—Lainnya Tahun 2019 naik sebesar 295,62% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp13.000.000.000,00 disebabkan oleh adanya peningkatan prestasi atas kinerja Pemerintah Kota Blitar pada TA 2019 ditandai dengan memperoleh DID atas kinerja Pelayanan Dasar Publik Bidang Pendidikan sebesar Rp10.709.803.000,00; Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan sebesar Rp10.832.553.000,00; Pelayanan Dasar Publik Bidang Infrastruktur sebesar Rp11.459.226.000,00; Penyelenggaraan Pemerintahan sebesar Rp9.392.573.000,00 dan SAKIP sebesar Rp9.036.645.000,00. Alokasi DID berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 sedangkan untuk pengelolaannya berdasarkan pada 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah. Rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya.

3. Transfer Pemerintah Provinsi	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
	64.376.920.500,00	89.014.268.201,00	74.941.131.704,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 sebesar Rp89.014.268.201,00 atau 138,27% dari anggaran sebesar Rp64.376.920.500,00. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2019 naik 27,68% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp74.941.131.704,00. Adapun rincian Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 26 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi
Tahun Anggaran 2019**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2019			Realisasi 2018
		Anggaran	Realisasi	%	
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	62.503.361.500,00	87.140.709.201,00	139,42	73.188.601.704,00
	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.056.262.600,00	29.555.982.376,00	173,29	21.659.047.141,00
	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.610.456.200,00	12.455.357.556,00	107,28	11.012.387.462,00
	Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.514.161.500,00	21.766.236.519,00	140,30	15.492.389.614,00
	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air	174.890.350,00	250.651.373,00	143,32	203.947.369,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Permukaan				
	Bagi Hasil Pajak Rokok	18.147.590.850,00	23.112.481.377,00	127,36	24.820.830.118,00
2	Bantuan Keuangan Provinsi	1.873.559.000,00	1.873.559.000,00	100,00	1.752.530.000,00
	Jumlah	64.376.920.500,00	89.014.268.201,00	138,27	74.941.131.704,00

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar Rp87.140.709.201,00 atau melampaui sebesar 139,42% dari anggaran sebesar Rp62.503.361.500,00 disebabkan oleh adanya tambahan Transfer atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak Triwulan IV TA 2018, Definitif TA 2017 dan 2018. Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebagai berikut :

Tabel 27 Rincian Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi

(dalam Rupiah)

No	Tanggal	Nomor STS	SK GUBERNUR JAWA TIMUR		Nominal (Rp)	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
1	17/01/2019	12/PPKD/I/2019	188/788/KPTS/013/2018	31/12/2018	5.024.336.392,00	Triwulan IV TA 2018
			Jumlah		5.024.336.392,00	
2	16/05/2019	68/PPKD/V/2019	188/222/KPTS/013/2019	08/05/2019	4.236.035.478,00	Triwulan I TA 2019
3	16/05/2019	69/PPKD/V/2019	188/222/KPTS/013/2019	08/05/2019	1.970.514.116,00	Triwulan I TA 2019
4	17/05/2019	79/PPKD/V/2019	188/222/KPTS/013/2019	08/05/2019	3.449.003.499,00	Triwulan I TA 2020
5	17/05/2019	80/PPKD/V/2019	188/222/KPTS/013/2019	08/05/2019	36.842.105,00	Triwulan I TA 2021
			Jumlah		9.692.395.198,00	
6	17/06/2019	6/PPKD/VI/2019	188/257/KPTS/013/2019	27/5/2019	3.586.781.990,00	Bagian Des 2018
			Jumlah		3.586.781.990,00	
7	18/06/2019	8/PPKD/VI/2019	188/258/KPTS/013/2019	27/5/2019	1.989.185.624,00	Triwulan I TA 2019
			Jumlah		1.989.185.624,00	
8	29/07/2019	23/PPKD/VII/2019	188/321/KPTS/013/2019	17/7/2019	5.295.044.347,00	Triwulan II TA 2019
9	29/07/2019	24/PPKD/VII/2019	188/321/KPTS/013/2019	17/7/2019	2.463.142.645,00	Triwulan II TA 2019
10	29/07/2019	25/PPKD/VII/2019	188/321/KPTS/013/2019	17/7/2019	4.311.254.374,00	Triwulan II TA 2019
11	29/07/2019	26/PPKD/VII/2019	188/321/KPTS/013/2019	17/7/2019	46.052.632,00	Triwulan II TA 2019
			Jumlah		12.115.493.998,00	
12	28/08/2019	29/PPKD/VIII/2019	188/369/KPTS/013/2019	21/8/2019	7.092.072.925,00	
			Jumlah		7.092.072.925,00	
13	24/10/2019	30/PPKD/X/2019	188/471/KPTS/013/2019	10/10/2019	5.295.044.347,00	Triwulan III TA 2019
14	25/10/2019	31/PPKD/X/2019	188/471/KPTS/013/2019	10/10/2019	2.463.142.645,00	Triwulan III TA 2019
15	30/10/2019	39/PPKD/X/2019	188/471/KPTS/013/2019	10/10/2019	4.311.254.374,00	Triwulan III TA 2019
16	30/10/2019	40/PPKD/X/2019	188/471/KPTS/013/2019	10/10/2019	46.052.632,00	Triwulan III TA 2019
			Jumlah		12.115.493.998,00	
17	11/11/2019	15/PPKD/XI/2019	188/107/kpts/013/2019	11/02/2019	3.694.975.918,00	Definitif 2017
18	11/11/2019	16/PPKD/XI/2019	188/107/kpts/013/2019	11/02/2019	862.031.723,00	Definitif 2017
19	18/11/2019	20/PPKD/XI/2019	188/107/kpts/013/2019	11/02/2019	1.693.748.071,00	Definitif 2017
20	22/11/2019	28/PPKD/XI/2019	188/107/kpts/013/2019	11/02/2019	34.073.972,00	Definitif 2017
			Jumlah		6.284.829.684,00	
24	25/11/2019	33a/PPKD/XI/2019	188/551/kpts/013/2019	11/12/2019	5.420.104.446,00	Triwulan III TA 2019
			Jumlah		5.420.104.446,00	
21	25/11/2019	29/PPKD/XI/2019	188/518/kpts/013/2019	28/10/2019	4.477.959.751,00	Definitif 2018
22	25/11/2019	30/PPKD/XI/2019	188/518/kpts/013/2019	28/10/2019	6.260.616.733,00	Definitif 2018
23	25/11/2019	31/PPKD/XI/2019	188/518/kpts/013/2019	28/10/2019	2.504.303.097,00	Definitif 2018



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Tanggal	Nomor STS	SK GUBERNUR JAWA TIMUR		Nominal (Rp)	Keterangan
			Nomor	Tanggal		
25	26/11/2019	37/PPKD/XI/2019	188/518/kpts/013/2019	28/10/2019	48.156.348,00	Definitif 2018
Jumlah					13.291.035.929,00	
26	30/12/2019	54/PPKD/XII/2019	188/656/kpts/013/2019	18/12/2019	4.774.265.553,00	Triwulan IV TA 2019
27	30/12/2019	55/PPKD/XII/2019	188/656/kpts/013/2019	18/12/2019	2.192.223.330,00	Triwulan IV TA 2019
28	30/12/2019	56/PPKD/XII/2019	188/656/kpts/013/2019	18/12/2019	3.523.016.450,00	Triwulan IV TA 2019
29	30/12/2019	57/PPKD/XII/2019	188/656/kpts/013/2019	18/12/2019	39.473.684,00	Triwulan IV TA 2019
Jumlah					10.528.979.017,00	
Total					87.140.709.201,00	

b. Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp1.873.559.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.873.559.000,00, akan tetapi dari dana yang cair 100% tersebut yang terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan hanya sebesar Rp 1.539.946.318,00, sehingga dana bantuan tersebut tersisa sebesar Rp333.612.682,00. Rincian kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi sebagai berikut:

Tabel 28 Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Kegiatan	Sumber Dana	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Peserta didik dan pengembangan pembangunan karakter PAUD dan PNF	Bantuan Keuangan Provinsi	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00
2	Dinas Pendidikan	Penyediaan Biaya Operasional Madrasah	Bantuan Keuangan Provinsi	100.000.000,00	54.503.000,00	45.497.000,00
3	Dinas Kesehatan	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Bantuan Keuangan Provinsi	176.029.000,00	124.790.318,00	51.238.682,00
4	Bagian Tata Pemerintahan	Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Bantuan Keuangan Provinsi	50.000.000,00	48.423.000,00	1.577.000,00
5	BPKAD	BPPDGS	Bantuan Keuangan Provinsi	1.311.930.000,00	1.118.730.000,00	193.200.000,00
		Bantuan Sekolah Swasta	Bantuan Keuangan Provinsi	225.600.000,00	183.600.000,00	42.000.000,00
Total				1.873.559.000,00	1.539.946.318,00	333.612.682,00

Atas sisa dana Bantuan Keuangan TA 2019 tersebut, Pemkot Blitar harus menyetor kembali pada rekening Kas Umum Daerah Propinsi Jawa Timur dengan menggunakan Dana BTT (Bantuan Tak Terduga). Dasar dari penyetoran dana tersebut sesuai:

1. Surat Sekretariat Daerah Pemprop Jatim Nomor 903/17.545/201/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Khusus Kepada Kab/Kota pada APBD Prop Jatim TA 2019 point 4 yang menyebutkan apabila Kab/kota tidak melaksanakan atau tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Bantuan Keuangan tersebut sesuai dengan peruntukannya, maka dana Bantuan Keuangan tersebut harus disetor kembali pada Rekening Kas Umum Daerah Propinsi Jawa Timur.

2. Berita Acara Rekonsiliasi Tripartit Saldo Akun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur Nomor : 943.3/03.D.01/203.4/2020 tanggal 10 Maret 2020.

7.5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1. Pendapatan Hibah	18.276.920.000,00	17.063.120.000,00	16.907.320.645,03

Jumlah realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2019 Rp17.063.120.000,00 atau 93,36% dari target sebesar Rp18.276.920.000,00. Sedangkan realisasi pada tahun 2018 sebesar Rp16.907.320.645,03. Nilai pendapatan hibah tersebut merupakan Dana BOS SD dan SMP.

Realisasi Pendapatan Per SKPD TA. 2019

Realisasi Pendapatan pada masing-masing SKPD se Kota Blitar Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 29 Rincian Realisasi Pendapatan Per SKPD
Tahun Anggaran 2019**

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
1	Dinas Pendidikan	84.900.000,00	84.350.000,00	99,35	98.850.000,00
2	Dinas Kesehatan	2.337.260.980,00	1.992.520.572,00	85,25	2.032.953.747,00
3	UPT Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul	2.517.583.287,00	1.637.209.200,00	65,03	1.247.015.100,00
4	UPT Puskesmas Kecamatan Sukorejo	2.644.164.296,00	1.628.120.400,00	61,57	1.369.026.000,00
5	UPT Puskesmas Kecamatan Sananwetan	2.735.360.638,00	2.090.498.700,00	76,42	1.856.138.250,00
6	RSUD Mardi Waluyo	112.000.000.000,00	95.869.457.204,43	85,60	100.820.369.771,53
7	Dinas Perumahan Rakyat	480.438.000,00	363.265.855,00	75,61	379.414.159,46
8	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	615.000.000,00	867.142.100,00	141,00	555.775.300,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
9	Dinas Perhubungan	2.370.480.000,00	2.497.384.901,00	105,35	2.405.924.700,00
10	Dinas Kominfo & Statistik	60.000.000,00	60.591.000,00	100,99	58.012.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	203.400.000,00	213.901.000,00	105,16	174.339.000,00
12	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	125.200.000,00	109.700.000,00	87,62	134.675.000,00
13	Dinas Koperasi & UM	62.600.382,00	10.590.111,65	16,92	58.132.307,99
14	Kecamatan Kepanjenkidul	295.108.191,00	289.631.950,00	98,14	289.192.800,00
15	Kecamatan Sukorejo	403.574.810,00	403.124.810,00	99,89	244.624.810,00
16	Kecamatan Sananwetan	304.403.949,00	302.403.949,00	99,34	311.551.551,00
17	BPKAD	840.401.336.964,00	827.520.284.514,81	98,47	777.338.023.647,98
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian,	220.572.700,00	388.248.200,00	176,02	341.480.750,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	367.470.000,00	337.496.200,00	91,84	343.974.500,00
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.128.884.000,00	2.036.654.750,00	95,67	2.302.049.000,00
21	Dinas Perdagangan & Perindustrian	1.990.891.350,00	1.981.691.250,00	99,54	2.000.262.834,00
22	Bagian Umum Setda	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	3.500.000,00
23	Dinas Penanaman Modal, TK, & PTSP	43.000.000,00	35.100.432,50	81,63	43.890.795,00
Jumlah		972.395.129.547,00	940.722.867.100,39	96,74	894.409.176.023,96

7.5.1.2 BELANJA DAN TRANSFER

Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2019 sebesar Rp974.726.288.816,17 atau 82,99% dari anggaran Belanja dan Transfer sebesar Rp1.174.529.025.791,46. Realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2019 naik sebesar Rp163.683.535.692,34 atau 20,18% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp811.042.753.123,83. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga.

7.5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 sebesar Rp727.328.055.922,45 atau 87,43% dari anggaran sebesar Rp831.874.963.283,71. Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 naik sebesar Rp76.476.624.836,28 atau 11,75% dibandingkan dengan Belanja Operasi Tahun 2018 sebesar Rp650.851.431.086,17. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan, dengan rincian sebagai berikut:

	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1. Belanja Pegawai	364.726.378.270,00	309.909.180.300,40	274.035.428.694,50



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 sebesar Rp309.909.180.300,40 atau 84,97% dari anggaran sebesar Rp364.726.378.270,00. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 naik Rp35.873.751.605,90 atau 13,09% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018 sebesar Rp274.035.428.694,50. Adapun rincian Belanja Pegawai Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 30 Rincian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	2019			Realisasi 2018	Kenaikan / penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
A	Belanja Tidak Langsung						
1	Gaji dan Tunjangan	288.808.867.973,00	241.468.852.059,00	83,61	231.608.655.859,00	9.860.196.200,00	4,26
2	Tambahan Penghasilan PNS	61.697.113.168,00	56.187.922.824,00	91,07	29.679.775.219,00	26.508.147.605,00	89,31
3	Belanja Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	4.355.454.640,00	3.934.224.100,00	90,33	4.402.333.500,00	(468.109.400,00)	(10,63)
4	Insentif pemungutan Pajak Daerah	1.981.390.000,00	1.677.039.989,00	84,64	1.532.281.984,00	144.758.005,00	9,45
5	Insentif pemungutan Retribusi Daerah	506.314.250,00	231.677.878,40	45,76	316.799.201,50	(85.121.323,10)	(26,87)
Jumlah A		357.349.140.031,00	303.499.716.850,40	84,93	267.539.845.763,50	35.959.871.086,90	13,44
B	Belanja Langsung						
1	Uang Lembur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Pegawai BLUD	7.114.704.739,00	6.080.866.950,00	85,47	6.238.195.931,00	(157.328.981,00)	(2,52)
3	Belanja Pegawai BOS	262.533.500,00	328.596.500,00	125,16	257.387.000,00	71.209.500,00	27,67
Jumlah B		7.377.238.239,00	6.409.463.450,00	86,88	6.495.582.931,00	(86.119.481,00)	(1,33)
Jumlah Total (A+B)		364.726.378.270,00	309.909.180.300,40	84,97	274.035.428.694,50	35.873.751.605,90	13,09

Nilai Belanja Pegawai sebesar Rp309.909.180.300,40 sudah termasuk Belanja Pegawai BLUD –yang didanai dari pendapatan BLUD RSUD Mardi Waluyo sebesar Rp6.080.866.950,00. Belanja tidak langsung pegawai selain untuk gaji, ada belanja pegawai yang realisasinya tergantung beberapa syarat tertentu seperti kehadiran pegawai dan prestasi/kinerja untuk Tambahan Penghasilan kepada Pegawai (TPP) serta insentif pajak daerah dan retribusi daerah.

Kenaikan tambahan penghasilan pegawai sebesar Rp26.508.147.605,00 atau sekitar 89,31% dibandingkan dengan realisasi tahun lalu disebabkan oleh adanya perubahan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 19 tahun 2019 tentang pemberian tambahan penghasilan pegawai berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2. Belanja Barang	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
	412.660.246.503,71	366.755.582.835,05	329.255.542.203,67

Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 sebesar Rp366.755.582.835,05 atau 88,88% dari anggaran sebesar Rp412.660.246.503,71. Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 naik sebesar Rp37.500.040.631,38 atau 11,39% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang Tahun 2018 sebesar Rp329.255.542.203,67. Belanja Barang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang mendukung pelaksanaan program dan bahan pakai habis, bahan/material, belanja jasa kantor, belanja premi asuransi, belanja cetak dan penggandaan, belanja sewa sarana, belanja makanan dan minuman, belanja perjalanan dinas serta belanja pemeliharaan. Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 31 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019
(Sebelum Konversi)**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Honorarium PNS	4.083.369.002,00	2.849.243.000,00	69,78	2.079.213.000,00	770.030.000,00	37,03
2	Honorarium Non PNS	3.871.636.160,00	3.398.920.245,00	87,79	3.044.661.311,00	354.258.934,00	11,64
3	Belanja Bahan Pakai Habis	12.777.042.970,53	11.501.319.676,00	90,02	10.944.772.373,00	556.547.303,00	5,09
4	Belanja Bahan/Material	11.268.939.924,00	10.727.071.906,13	95,19	10.563.697.907,00	163.373.999,13	1,55
5	Belanja Jasa Kantor	83.229.953.364,97	75.418.726.326,79	90,61	67.969.686.824,32	7.449.039.502,47	10,96
6	Belanja Premi Asuransi	12.620.198.050,00	9.746.925.057,00	77,23	7.131.229.880,00	2.615.695.177,00	36,68
7	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.369.629.001,00	3.645.022.722,00	83,42	3.481.262.039,00	163.760.683,00	4,70
8	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.642.940.512,00	10.575.370.995,00	90,83	9.151.805.790,00	1.423.565.205,00	15,56
9	Belanja Sewa Tanah/Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.756.515.790,00	1.388.242.100,00	79,03	690.658.500,00	697.583.600,00	101,00
10	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	618.876.650,00	575.322.250,00	92,96	468.648.400,00	106.673.850,00	22,76
11	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.644.745.095,00	5.933.937.140,00	89,30	5.158.876.945,00	775.060.195,00	15,02
12	Belanja Makanan dan Minuman	29.194.034.963,00	25.678.281.614,00	87,96	22.033.337.030,00	3.644.944.584,00	16,54
13	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	662.035.000,00	521.094.500,00	78,71	429.802.700,00	91.291.800,00	21,24
14	Belanja Pakaian Kerja	2.662.393.165,00	2.527.627.115,00	94,94	1.669.401.105,00	858.226.010,00	51,41



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
15	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	5.371.988.642,00	5.199.209.175,00	96,78	4.188.109.950,00	1.011.099.225,00	24,14
16	Belanja Perjalanan Dinas	32.216.932.206,00	30.064.509.111,00	93,32	31.560.809.149,99	(1.496.300.038,99)	(4,74)
17	Belanja Kursus, pelatihan, Sosialisasi dan BinteK/Sosialisasi	10.609.094.300,00	9.857.864.903,00	92,92	6.915.777.943,96	2.942.086.959,04	42,54
18	Belanja Pemeliharaan	22.470.364.714,50	20.819.287.157,24	92,65	16.232.459.160,00	4.586.827.997,24	28,26
19	Belanja Jasa Konsultasi	8.197.141.600,00	7.340.514.908,40	89,55	6.048.158.168,00	1.292.356.740,40	21,37
20	Belanja Hibah Barang/Jasa	2.739.339.000,00	1.950.759.800,00	71,21	6.056.859.958,00	(4.106.100.158,00)	(67,79)
21	Belanja Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga	18.655.618.910,00	18.546.692.662,00	99,42	18.707.114.730,00	(160.422.068,00)	(0,86)
22	Belanja Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial yang diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.054.750.790,00	8.745.071.992,00	96,58	1.744.697.985,00	7.000.374.007,00	401,24
23	Belanja Materi Pendidikan dan Perlengkapan Sekolah	9.713.855.900,00	7.289.809.251,00	75,05	7.953.863.000,00	(664.053.749,00)	(8,35)
24	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.264.333.800,00	1.126.458.800,00	89,10	785.225.000,00	341.233.800,00	43,46
25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	104.313.917.043,71	91.713.898.680,70	87,92	89.358.103.387,78	2.355.795.292,92	2,64
26	Belanja Barang Non Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00	1.368.445.167,00	(1.368.445.167,00)	(100,00)
27	Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	10.639.322.100,00	7.570.069.918,00	71,15	5.368.514.959,52	2.201.554.958,48	41,01
28	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.406.235.760,00	12.541.784.291,79	93,55	12.914.324.528,10	(372.540.236,31)	(2,88)
Jumlah		434.055.204.413,71	387.253.035.297,05	89,22	354.019.516.891,67	33.233.518.405,38	9,39

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp20.497.452.462,00 dikonversi menjadi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial karena merupakan belanja barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yaitu hibah dan bantuan sosial berupa barang. Belanja Barang dan Jasa yang dikonversi ke Belanja Hibah sebesar Rp1.950.759.800,00 dan ke Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp18.546.692.662,00. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 pada Pasal 21 yang menyebutkan bahwa realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversi sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Laporan Realisasi Anggaran dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Rincian Belanja Barang dan Jasa TA 2019 setelah dikonversi sebagai berikut:

**Tabel 32 Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019
(Setelah Konversi)**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Honorarium PNS	4.083.369.002,00	2.849.243.000,00	69,78	2.079.213.000,00	770.030.000,00	37,03
2	Honorarium Non PNS	3.871.636.160,00	3.398.920.245,00	87,79	3.044.661.311,00	354.258.934,00	11,64
3	Belanja Bahan Pakai Habis	12.777.042.970,53	11.501.319.676,00	90,02	10.944.772.373,00	556.547.303,00	5,09
4	Belanja Bahan/Material	11.268.939.924,00	10.727.071.906,13	95,19	10.563.697.907,00	163.373.999,13	1,55
5	Belanja Jasa Kantor	83.229.953.364,97	75.418.726.326,79	90,61	67.969.686.824,32	7.449.039.502,47	10,96
6	Belanja Premi Asuransi	12.620.198.050,00	9.746.925.057,00	77,23	7.131.229.880,00	2.615.695.177,00	36,68
7	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	4.369.629.001,00	3.645.022.722,00	83,42	3.481.262.039,00	163.760.683,00	4,70
8	Belanja Cetak dan Penggandaan	11.642.940.512,00	10.575.370.995,00	90,83	9.151.805.790,00	1.423.565.205,00	15,56
9	Belanja Sewa Tanah/Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.756.515.790,00	1.388.242.100,00	79,03	690.658.500,00	697.583.600,00	101,00
10	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	618.876.650,00	575.322.250,00	92,96	468.648.400,00	106.673.850,00	22,76
11	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.644.745.095,00	5.933.937.140,00	89,30	5.158.876.945,00	775.060.195,00	15,02
12	Belanja Makanan dan Minuman	29.194.034.963,00	25.678.281.614,00	87,96	22.033.337.030,00	3.644.944.584,00	16,54
13	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	662.035.000,00	521.094.500,00	78,71	429.802.700,00	91.291.800,00	21,24
14	Belanja Pakaian Kerja	2.662.393.165,00	2.527.627.115,00	94,94	1.669.401.105,00	858.226.010,00	51,41
15	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	5.371.988.642,00	5.199.209.175,00	96,78	4.188.109.950,00	1.011.099.225,00	24,14
16	Belanja Perjalanan Dinas	32.216.932.206,00	30.064.509.111,00	93,32	31.560.809.149,99	(1.496.300.038,99)	(4,74)
17	Belanja Kursus, pelatihan, Sosialisasi dan BinteK/Sosialisasi	10.609.094.300,00	9.857.864.903,00	92,92	6.915.777.943,96	2.942.086.959,04	42,54
18	Belanja Pemeliharaan	22.470.364.714,50	20.819.287.157,24	92,65	16.232.459.160,00	4.586.827.997,24	28,26
19	Belanja Jasa Konsultasi	8.197.141.600,00	7.340.514.908,40	89,55	6.048.158.168,00	1.292.356.740,40	21,37
20	Belanja Hibah Barang/Jasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Belanja Bantuan Sosial Barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Belanja Barang/Jasa Selain Hibah dan	9.054.750.790,00	8.745.071.992,00	96,58	1.744.697.985,00	7.000.374.007,00	401,24



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
	Bantuan Sosial yang diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat						
23	Belanja Materi Pendidikan dan Perlengkapan Sekolah	9.713.855.900,00	7.289.809.251,00	75,05	7.953.863.000,00	(664.053.749,00)	(8,35)
24	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.264.333.800,00	1.126.458.800,00	89,10	785.225.000,00	341.233.800,00	43,46
25	Belanja Barang dan Jasa BLUD	104.313.917.043,71	91.713.898.680,70	87,92	89.358.103.387,78	2.355.795.292,92	2,64
26	Belanja Barang Non Kapitalisasi	0,00	0,00	0,00	1.368.445.167,00	(1.368.445.167,00)	(100,00)
27	Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	10.639.322.100,00	7.570.069.918,00	71,15	5.368.514.959,52	2.201.554.958,48	41,01
28	Belanja Barang dan Jasa BOS	13.406.235.760,00	12.541.784.291,79	93,55	12.914.324.528,10	(372.540.236,31)	(2,88)
	Jumlah	412.660.246.503,71	366.755.582.835,05	88,88	329.255.542.203,67	37.500.040.631,38	11,39

Realisasi Belanja Jasa Kantor meningkat sebesar Rp7.449.039.502,47 dari tahun 2018 dikarenakan adanya kenaikan Belanja Listrik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dikarenakan adanya pembangunan *Fiber Optic* baru, adanya kenaikan Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan akibat peningkatan kepesertaan Jamkesda pada Dinas Kesehatan dan adanya kenaikan Belanja Jasa Partisipasi Masyarakat pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan dikarenakan kenaikan insentif untuk guru ngaji dan guru minggu sebanyak Rp50.000,00 per orang selama Tahun Anggaran 2019.

Realisasi Belanja Makan/minum Rapat/kegiatan naik sebesar 16,54% dibandingkan dengan Tahun 2018 dikarenakan adanya kegiatan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Realisasi Belanja Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial yang Diserahkan pada Pihak Ketiga/Masyarakat Tahun 2019 naik sebesar 401,24% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 dikarenakan komitmen Pemerintah Pusat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan publik di tingkat kelurahan melalui Dana DAU (Tambahan) dan adanya pergeseran rekening dari belanja makan/minum rapat/kegiatan berupa pemberian paket peningkatan kesejahteraan untuk Guru Non PNS (Dikda), Kader posyandu (DP3A), Dinas Sosial (PSM, TKS, Karang Taruna, Sakti Peksos, Pengurus Panti, Pertuni, PWRI, Pepabri, Gerontologi, LVRI, Perintis dan DHC-45, Tambahan kesejahteraan bagi juru kunci makam dan modin kematian, Paket sembako untuk pengirit Sampah (LH), Paket sembako, Juru Parkir, Abang Becak (Dinhab), Paket Sembako Guru Ngaji dan Guru Minggu (Bag. Perekonomian), Paket Sembako RT/RW, LPMK (Kecamatan), serta adanya Pembangunan JUT, Jalan Produksi dan Pintu Air untuk Poktan (DAK Pertanian).

3.	Belanja Hibah	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
		<u>29.081.985.000,00</u>	<u>26.739.219.800,00</u>	<u>24.368.685.958,00</u>

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019 sebesar Rp26.739.219.800,00 atau 91,94% dari anggaran sebesar Rp29.081.985.000,00. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

naik Rp2.370.533.842,00 atau 9,73% dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun 2018 sebesar Rp24.368.685.958,00. Adapun rincian Belanja Hibah Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 33 Rincian Belanja Hibah Tahun Anggaran 2019
(Setelah Konversi)**

No.	Uraian	2019			Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.045.000.000,00	4.045.000.000,00	100,00	800.000.000,00	3.245.000.000,00	405,63
2	Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	9.688.000.000,00	9.645.910.000,00	99,57	7.565.900.000,00	2.080.010.000,00	27,49
3	Hibah kepada Kelompok/anggota masyarakat	7.615.046.000,00	6.541.300.000,00	85,90	6.428.726.000,00	112.574.000,00	1,75
4	Belanja Hibah BOP PAUD Masyarakat /Swasta	3.379.200.000,00	3.129.900.000,00	92,62	3.517.200.000,00	(387.300.000,00)	(11,01)
5	Belanja Hibah BOP Pendidikan Kesetaraan	1.615.400.000,00	1.426.350.000,00	88,30	0,00	1.426.350.000,00	0,00
6	Belanja Hibah Barang/Jasa	2.739.339.000,00	1.950.759.800,00	71,21	6.056.859.958,00	(4.106.100.158,00)	(67,79)
Jumlah		29.081.985.000,00	26.739.219.800,00	91,94	24.368.685.958,00	2.370.533.842,00	9,73

Belanja Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus. Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kota Blitar adalah sebesar Rp26.739.219.800,00. Realisasi tersebut termasuk belanja hibah barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp1.950.759.800,00 yang dikonversi sebagai Belanja Hibah. Rincian penerima hibah Tahun 2019 dapat dilihat pada **Lampiran 1** catatan atas laporan keuangan.

4. Belanja Bantuan Sosial	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
	24.890.918.910,00	23.408.640.162,00	22.691.789.730,00

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019 sebesar Rp23.408.640.162,00 atau 94,04% dari anggaran sebesar Rp24.890.918.910,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019 naik sebesar Rp716.850.432,00 atau 3,16% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp22.691.789.730,00. Adapun rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 34 Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019
(Setelah Konversi)**

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Anggaran 2019	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	3.115.000.000,00	3.010.000.000,00	96,63	2.247.500.000,0	762.500.000,00	33,93
2	Belanja Bantuan Sosial Santunan kematian	1.750.000.000,00	1.456.600.000,00	83,23	1.223.200.000,0	233.400.000,00	19,08
3	Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya	1.000.000.000,00	84.347.500,00	8,43	283.950.000,0	(199.602.500,00)	(70,29)
4	Belanja Bantuan Sosial Santunan Anak yatim	370.300.000,00	311.000.000,00	83,99	230.025.000,0	80.975.000,00	35,20
5	Belanja Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	18.655.618.910,00	18.546.692.662,00	99,42	18.707.114.730,0	(160.422.068,00)	(0,86)
Jumlah		24.890.918.910,00	23.408.640.162,00	94,04	22.691.789.730,00	716.850.432,00	3,16

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp23.408.640.162,00 diantaranya termasuk bantuan sosial berupa belanja barang dan jasa sebesar Rp18.546.692.662,00 yang dikonversi ke Belanja Bantuan Sosial. Peraturan Walikota Blitar Nomor 30 Tahun 2012, menyatakan bahwa belanja bantuan sosial diberikan untuk mengurangi dan mengatasi masyarakat penyandang masalah sosial dan atau risiko sosial. Oleh karena itu bantuan sosial ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana baik secara individu, keluarga, kelompok dan atau masyarakat. Bantuan Sosial pada Tahun 2019 antara lain berupa santunan kematian, santunan anak yatim/piatu, beras fakir miskin, bantuan korban bencana alam/kebakaran.

5. Belanja Bantuan Keuangan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
	515.432.825,00	515.432.825,00	499.984.500,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2019 sebesar Rp515.432.825,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp515.434.600,00. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2019 naik sebesar Rp15.448.325,00 atau 3,09% dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp499.984.500,00. Belanja Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019 berupa Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Adapun rincian bantuan keuangan kepada partai politik sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 35 Rincian Penerima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2019

(dalam Rupiah)

No.	Partai Politik	2019		%	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi				
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	217.991.625,00	217.991.400,00	100,00	224.404.000,00	(6.412.600,00)	(2,86)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	70.968.350,00	70.968.350,00	100,00	76.200.000,00	(5.231.650,00)	(6,87)
3	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	57.548.715,00	57.548.715,00	100,00	47.817.000,00	9.731.715,00	20,35
4	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	46.559.800,00	46.559.400,00	100,00	40.373.500,00	6.185.900,00	15,32
5	Partai Demokrat (PD)	34.864.100,00	34.863.300,00	100,00	32.800.000,00	2.063.300,00	6,29
6	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	14.546.200,00	14.546.200,00	100,00	21.829.000,00	(7.282.800,00)	(33,36)
7	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	20.202.300,00	20.202.300,00	100,00	19.206.000,00	996.300,00	5,19
8	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	31.690.225,00	31.689.875,00	100,00	19.065.000,00	12.624.875,00	66,22
9	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	21.063.285,00	21.063.285,00	100,00	18.290.000,00	2.773.285,00	15,16
Jumlah		515.434.600,00	515.432.825,00	100,00	499.984.500,00	15.448.325,00	3,09

Adapun tiga besar Partai Politik penerima bantuan keuangan adalah PDIP, Gerindra, dan PKB dan paling rendah penerima bantuan adalah PKS.

7.5.1.2.2. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 sebesar Rp247.385.889.913,72 atau 72,44% dari anggaran sebesar Rp341.487.937.624,75. Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 turun sebesar Rp87.351.489.700,06 atau 54,58% dibandingkan dengan Belanja Modal Tahun 2018 sebesar Rp160.034.400.213,66. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal TA 2019 sebagai berikut:

Tabel 36 Rincian Belanja Modal TA 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2019		%	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi				
1	Belanja Tanah	36.834.643.021,00	7.034.003.140,00	19,10	138.767.500,00	6.895.235.640,00	4.968,91
2	Belanja Peralatan dan Mesin	101.686.711.624,09	81.508.948.849,00	80,16	51.554.910.344,41	29.954.038.504,59	58,10
3	Belanja Gedung dan Bangunan	131.513.329.688,66	100.616.728.055,33	76,51	45.978.095.429,99	54.638.632.625,34	118,84
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	61.525.550.929,00	51.090.096.065,39	83,04	57.003.831.744,26	(5.913.735.678,87)	(10,37)
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.917.453.903,00	4.192.993.604,00	85,27	3.439.456.815,00	753.536.789,00	21,91
6	Belanja Aset	5.010.248.459,00	2.943.120.200,00	58,74	1.919.338.380,00	1.023.781.820,00	53,34



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	2019			%	Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi					
	Lainnya							
	Jumlah	341.487.937.624,75	247.385.889.913,72	72,44	160.034.400.213,66	87.351.489.700,06	54,58	

Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 termasuk di dalamnya Belanja Modal BLUD-RSUD Mardi Waluyo Tahun 2019 sebesar Rp22.859.635.299,48 yang terdiri dari:

a. Belanja Modal BLUD - dana APBD	Rp	13.056.143.757,80
b. Belanja Modal BLUD – non APBD	Rp	9.803.491.541,68
Jumlah Belanja Modal BLUD	Rp	22.859.635.299,48

dan termasuk di dalamnya Belanja Modal BOS Tahun 2019 sebesar Rp2.453.798.479,00 yang terdiri dari:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	Rp	1.531.588.499,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BOS	Rp	96.529.000,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan BOS	Rp	12.772.000,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	Rp	812.908.980,00
Belanja Modal Aset Lainnya BOS	Rp	0,00
Jumlah Belanja Modal BOS	Rp	2.453.798.479,00

Belanja Modal terdiri dari Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

	<u>Anggaran 2019</u> <u>(Rp)</u>	<u>Realisasi 2019</u> <u>(Rp)</u>	<u>Realisasi 2018</u> <u>(Rp)</u>
1. Belanja Tanah	36.834.643.021,00	7.034.003.140,00	138.767.500,00

Realisasi Belanja Tanah Tahun 2019 sebesar Rp7.034.003.140,00 atau 19,10% dari anggaran sebesar Rp36.834.643.021,00. Realisasi Belanja Tanah Tahun 2019 naik sebesar Rp6.895.235.640,00 atau 4.968,91% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tanah Tahun 2018 sebesar Rp138.767.500,00. Rincian Belanja Modal pengadaan tanah pada tabel berikut ini:

Tabel 37 Rincian Belanja Modal Tanah Tahun 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2019			Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Tanah Untuk Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	138.767.500,00	(138.767.500,00)	(100,00)
2	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan /Perusahaan	1.420.167.500,00	23.485.000,00	1,65	0,00	23.485.000,00	0,00
3	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja /Jasa	8.921.587.830,00	1.864.510.000,00	20,90	0,00	1.864.510.000,00	0,00
4	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga	20.050.950.000,00	43.806.000,00	0,22	0,00	43.806.000,00	0,00
5	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan	930.000.000,00	922.500.000,00	99,19	0,00	922.500.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	2019			Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
6	Belanja modal pengadaan Tanah Untuk Taman	5.511.937.691,00	4.179.702.140,00	75,83	0,00	4.179.702.140,00	0,00
Jumlah		36.834.643.021,00	7.034.003.140,00	19,10	138.767.500,00	6.895.235.640,00	4.968,91

Realisasi yang hanya sebesar 0,22% pada Belanja modal pengadaan tanah lapangan olah raga merupakan penganggaran pembebasan lahan jalan tembus sirkuit Kota Blitar pada Dinas Pemuda dan Olahraga, namun kegiatan tidak dapat diselesaikan karena keterbatasan waktu dan kurangnya sosialisasi sehingga tidak tercapainya kesepakatan harga dengan masyarakat. Sedangkan realisasi yang hanya sebesar 1,65% pada Belanja Modal pengadaan tanah untuk bangunan Gedung perdagangan/ perusahaan merupakan penganggaran pembelian tanah pada Dinas Pekerjaan Umum yang tidak dapat terealisasi seluruhnya dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan harga tanah karena warga menawarkan harga diatas nilai *appraisal*.

	<u>Anggaran 2019 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2019 (Rp)</u>	<u>Realisasi 2018 (Rp)</u>
2. Belanja Peralatan dan Mesin	101.686.711.624,09	81.508.948.849,00	51.554.910.344,41

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2019 sebesar Rp81.508.948.84900 atau 80,16% dari anggaran sebesar Rp101.686.711.624,09. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2019 naik sebesar Rp29.954.038.504,59 atau 58,10% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp51.554.910.344,41. Adapun rincian Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2019			Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Alat-alat Berat	2.639.928.270,00	2.494.160.000,00	94,48	166.126.000,00	2.328.034.000,00	1.401,37
2	Alat Bantu	514.155.600,00	500.746.980,88	97,39	1.047.373.559,00	(546.626.578,12)	(52,19)
3	Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	10.187.966.420,00	9.165.686.179,00	89,97	5.666.895.154,70	3.498.791.024,30	61,74
4	Alat-alat angkutan Darat tidak bermotor	586.286.200,00	581.975.000,00	99,26	3.817.147.500,00	(3.235.172.500,00)	(84,75)
5	Alat-alat Bengkel/Mesin	496.278.400,00	471.182.800,00	94,94	335.316.394,00	135.866.406,00	40,52
6	Alat Bengkel Tak Bermesin	159.935.000,00	103.570.000,00	64,76	63.664.300,00	39.905.700,00	62,68
7	Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	460.989.850,00	423.663.050,00	91,90	348.965.400,00	74.697.650,00	21,41
8	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	568.655.327,00	540.697.743,00	95,08	97.164.750,00	443.532.993,00	456,48
9	Peralatan/Perlengkapan Kantor	3.043.993.983,00	2.775.894.249,72	91,19	2.551.563.896,00	224.330.353,72	8,79
10	Komputer	34.564.664.002,50	27.228.270.759,00	78,77	9.310.030.475,00	17.918.240.284,00	192,46
11	Mebeulair	194.515.300,00	190.008.774,00	97,68	282.972.550,00	(92.963.776,00)	(32,85)
12	Peralatan Dapur/Rumah Tangga	6.009.076.381,00	5.360.217.173,00	89,20	4.555.330.906,00	804.886.267,00	17,67
13	Alat-alat Studio	4.688.896.385,00	4.198.805.327,00	89,55	2.682.856.150,00	1.515.949.177,00	56,51



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	2019			Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
14	Alat-alat Komunikasi	673.910.700,00	628.686.250,00	93,29	631.732.208,00	(3.045.958,00)	(0,48)
15	Peralatan Pemancar	436.925.000,00	434.225.500,00	99,38	0,00	434.225.500,00	0,00
16	Alat-alat Ukur	762.663.550,00	640.885.150,00	84,03	1.937.152.200,00	(1.296.267.050,00)	(66,92)
17	Alat-alat Kedokteran	16.319.901.434,00	14.705.331.377,80	90,11	9.484.634.969,43	5.220.696.408,37	55,04
18	Alat Kesehatan	1.970.796.371,00	945.726.630,00	47,99	135.385.000,00	810.341.630,00	598,55
19	Alat-alat Laboratorium	693.504.500,00	634.835.346,00	91,54	121.510.454,00	513.324.892,00	422,45
21	Alat-alat Keamanan	2.830.225.945,00	2.664.339.400,00	94,14	1.667.489.875,00	996.849.525,00	59,78
22	Alat Peraga/Praktek Sekolah	397.983.000,00	113.936.666,00	28,63	0,00	113.936.666,00	0,00
23	Barang Extracomptable	1.382.679.145,00	1.271.866.577,00	91,99	0,00	1.271.866.577,00	0,00
24	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.043.599.131,00	3.902.649.417,60	55,41	5.326.263.453,28	(1.423.614.035,68)	(26,73)
25	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	5.059.181.729,59	1.531.588.499,00	30,27	1.325.335.150,00	206.253.349,00	15,56
Jumlah		101.686.711.624,09	81.508.948.849,00	80,16	51.554.910.344,41	29.954.038.504,59	58,10

Kenaikan realisasi sebesar 192,46% pada belanja modal komputer dikarenakan adanya pelaksanaan ujian nasional pada tahun 2019 adalah ujian nasional berbasis komputer, sehingga dibutuhkan sarana prasarana tambahan berupa pengadaan komputer pada 9 (sembilan) sekolah menengah pertama di Kota Blitar.

	<u>Anggaran 2019</u>	<u>Realisasi 2019</u>	<u>Realisasi 2018</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
3. Belanja Gedung dan Bangunan	131.513.329.688,66	100.616.728.055,33	45.978.095.429,99

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2019 sebesar Rp100.616.728.055,33 atau 76,51% dari anggaran sebesar Rp131.513.329.688,66. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2019 naik sebesar Rp54.638.632.625,34 atau 118,84% dibandingkan dengan realisasi Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2018 sebesar Rp45.978.095.429,99 Adapun rincian Belanja Gedung dan Bangunan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 dan 2018
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2019			Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	116.651.043.088,66	90.806.026.786,85	77,84	43.808.565.429,99	46.997.461.356,86	107,28
2	Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
3	Konstruksi Pagar/Gapura/Taman Menara	3.217.923.400,00	3.006.732.469,05	93,44	895.532.000,00	2.111.200.469,05	235,75



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	2019			Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
4	Rambu-rambu Lalu Lintas	766.987.700,00	750.066.484,35	97,79	968.856.000,00	(218.789.515,65)	(22,58)
5	Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan	182.795.000,00	180.120.191,00	0,00	0,00	180.120.191,00	
6	Belanja Modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	154.980.000,00	153.656.000,00	99,15	15.000.000,00	138.656.000,00	924,37
7	Konstruksi Gedung dan Bangunan BLUD	10.421.227.500,00	5.623.597.124,08	53,96	226.858.500,00	5.396.738.624,08	2.378,90
8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BOS	118.373.000,00	96.529.000,00	81,55	63.283.500,00	33.245.500,00	52,53
Jumlah		131.513.329.688,66	100.616.728.055,33	76,51	45.978.095.429,99	54.638.632.625,34	118,84

Realisasi belanja modal konstruksi Gedung dan bangunan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Tahun 2019 hanya 53,96% dari anggaran dikarenakan arus kas yang kurang lancar di BLUD RSUD Mardi Waluyo akibat keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS dan sampai dengan akhir tahun klaim yang terbayar masih sampai dengan Bulan Juni 2019. Dengan adanya arus kas yang kurang lancar disepakati untuk tidak merealisasikan sisa Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Belanja modal konstruksi pembelian Gedung kantor naik sebesar 107,28% dari Tahun 2018 dikarenakan adanya realisasi pembangunan Pasar Legi Kota Blitar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang rusak akibat kebakaran pada Tahun 2017 dan adanya realisasi kelanjutan penyelesaian pembangunan SMPN 3 pada Dinas Pendidikan.

	Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
4.	Irigasi, dan Jaringan	61.525.550.929,00	51.090.096.065,39	57.003.831.744,26

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2019 sebesar Rp51.090.096.065,39 atau 83,04% dari anggaran sebesar Rp61.525.550.929,00. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2019 turun sebesar Rp5.913.735.678,87 atau 10,37% dibandingkan dengan realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2018 sebesar Rp57.003.831.744,26. Adapun rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 40 Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
TA 2019 dan 2018**

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2019			Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Jalan	40.193.195.959,00	31.129.262.006,46	77,45	30.283.634.777,26	845.627.229,20	2,79
2	Jembatan	1.119.684.000,00	1.012.945.600,00	90,47	537.677.000,00	475.268.600,00	88,39
3	Jaringan Air (Irigasi)	7.594.722.250,00	6.577.726.858,47	86,61	5.309.970.350,00	1.267.756.508,47	23,88
4	Instalasi Telepon	34.675.000,00	19.322.500,00	55,72	42.000.000,00	(22.677.500,00)	(53,99)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	Uraian	2019			Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
5	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	8.548.727.200,00	8.413.524.307,48	98,42	0,00	8.413.524.307,48	0,00
6	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	11.218.420,00	10.865.300,00	96,85	631.795.000,00	(620.929.700,00)	(98,28)
7	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	59.936.400,00	59.909.300,00	99,95	7.588.648.200,00	(7.528.738.900,00)	(99,21)
8	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	74.660.000,00	73.492.500,00	98,44	17.825.000,00	55.667.500,00	312,30
9	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	189.492.000,00	184.740.000,00	97,49	196.118.000,00	(11.378.000,00)	(5,80)
10	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air tanah	575.392.100,00	554.939.477,98	96,45	596.882.000,00	(41.942.522,02)	(7,03)
11	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air	0,00	0,00	0,00	47.960.000,00	(47.960.000,00)	(100,00)
12	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	10.742.009.747,00	(10.742.009.747,00)	(100,00)
13	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	48.175.000,00	(48.175.000,00)	(100,00)
14	Belanja modal Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik dan Penerangan Jalan	3.090.902.600,00	3.040.596.215,00	98,37	961.136.670,00	2.079.459.545,00	216,35
15	Belanja Modal Jalan Instalasi Jaringan BOS	32.945.000,00	12.772.000,00	38,77	0,00	12.772.000,00	0,00
Jumlah		61.525.550.929,00	51.090.096.065,39	83,04	57.003.831.744,26	(5.913.735.678,87)	(10,37)

	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
5. Belanja Aset Tetap Lainnya	4.917.453.903,00	4.192.993.604,00	3.439.456.815,00

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 sebesar Rp4.192.993.604,00 atau 85,27% dari anggaran sebesar Rp4.917.453.903,00. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 naik sebesar Rp753.536.789,00 atau 21,91% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp3.439.456.815,00. Adapun rincian Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 41 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2019 dan 2018
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2019			Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Buku Perpustakaan	1.727.614.900,00	1.710.609.276,00	99,02	684.079.950,00	1.026.529.326,00	150,06
3	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan dan Olahraga	1.726.320.923,00	1.392.855.348,00	80,68	502.223.000,00	890.632.348,00	177,34
4	Hewan/Ternak dan Tanaman	0,00	0,00	0,00	36.275.000,00	(36.275.000,00)	(100,00)
5	Tanaman Hias	276.644.000,00	276.620.000,00	99,99	32.500.000,00	244.120.000,00	751,14
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.186.874.080,00	812.908.980,00	68,49	2.184.378.865,00	(1.371.469.885,00)	(62,79)
Jumlah		4.917.453.903,00	4.192.993.604,00	85,27	3.439.456.815,00	753.536.789,00	21,91

	Anggaran 2019	Realisasi 2019	Realisasi 2018
	(Rp)	(Rp)	(Rp)
6. Belanja Aset Lainnya	5.010.248.459,00	2.943.120.200,00	1.919.338.380,00

Realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun 2019 sebesar Rp2.943.120.200,00 atau 58,74% dari anggaran sebesar Rp5.010.248.459,00. Realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun 2019 turun sebesar Rp1.023.781.820,00 atau 53,34% dibandingkan dengan realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun 2018 sebesar Rp1.919.338.380,00. Adapun rincian penerimaan Belanja Aset Lainnya Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 42 Rincian Belanja Modal Aset Lainnya TA 2019 dan 2018
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2019			Realisasi 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
		Anggaran	Realisasi	%			
1	Software, DED, Kajian	0,00	0,00	0,00	1.864.383.380,00	(1.864.383.380,00)	(100,00)
2	Kajian	1.310.625.000,00	304.733.000,00	23,25	0,00	304.733.000,00	0,00
3	Perangkat lunak/software komputer	3.415.623.459,00	2.361.142.200,00	69,13	0,00	2.361.142.200,00	0,00
4	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	284.000.000,00	277.245.000,00	97,62	48.455.000,00	228.790.000,00	472,17
5	Belanja Modal Aset Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	(6.500.000,00)	(100,00)
Jumlah		5.010.248.459,00	2.943.120.200,00	58,74	1.919.338.380,00	1.023.781.820,00	53,34

Belanja modal kajian hanya terealisasi sebesar 23,25% dari anggaran dikarenakan pada studi kelayakan pemanfaatan ex SMPN 10 yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selesai pada akhir Desember 2019 sehingga belanja modal kajian yang dianggarkan di Badan Kepegawaian Daerah berupa DED, Andalalin, UKL/UPL Balai Diklat serta masterplan Balai Diklat dan BKPSDM tidak bisa dilaksanakan dan direalisasikan pada Tahun 2019.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga

	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1. Belanja Tidak Terduga	1.151.124.883,00	5.255.300,00	144.678.144,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2019 sebesar Rp5.255.300,00 atau 0,46% dari anggaran sebesar Rp1.151.124.883,00. Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2019 turun sebesar Rp139.422.844,00 atau 96,37% dibandingkan dengan realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2018 sebesar Rp144.678.144,00

Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.255.300,00 adalah pengembalian BPHTB kepada Sdr/i Tri Mei Hastuti.

7.5.1.2.4. Transfer

	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1. Belanja Bagi Hasil Retribusi	15.000.000,00	7.087.680,00	12.243.680,00

Realisasi Belanja Transfer merupakan Bagi Hasil Retribusi Tahun 2019 sebesar Rp7.087.680,00 atau 47,25% dari anggaran sebesar Rp15.000.000,00. Realisasi Bagi Hasil Retribusi Tahun 2019 turun sebesar Rp5.156.000,00 atau 42,11% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp12.243.680,00. Realisasi Belanja Bagi Hasil Retribusi adalah pembayaran Dana Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah atas pendapatan retribusi pelayanan tera/tera ulang kepada Kabupaten Malang. Berdasar perjanjian Kerjasama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang Nomor 510/01.1/410.108/2019 dan Nomor 134.4/3/35.07.022/2019 tentang penyelenggaraan tera ulang dan pengawasan *metrology legal*. Perjanjian ini bertujuan untuk menghindari stagnansi tera ulang dan pengawasan pada Pemerintah Kota Blitar yang belum memiliki unit *metrology legal*. Hasil dari perjanjian tersebut diperkuat dengan SK Walikota Blitar Nomor 188/438/HK/410.010.2/2019 tentang Penetapan Definitive Alokasi Bagi Hasil Tera Ulang, Tera Ulang dan Pengawasan Metrology Legal untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang Realisasi Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2019.

Realisasi Belanja Per SKPD TA. 2019

Realisasi Belanja pada masing-masing SKPD di Kota Blitar Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 43 Rincian Realisasi Belanja Per SKPD Tahun Anggaran 2019

(dalam Rupiah)

No.	SKPD	Tahun Anggaran 2019		
		Anggaran	Realisasi	%
1	Dinas Pendidikan	226.927.582.930,59	192.740.158.152,94	84,93
2	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	2.620.532.500,00	2.276.343.150,00	86,87



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Tahun Anggaran 2019		
		Anggaran	Realisasi	%
3	UPT Satuan Pendidikan SMPN 2	2.890.671.650,00	2.639.168.738,00	91,30
4	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3	2.426.671.225,00	2.106.261.704,00	86,80
5	UPT Satuan Pendidikan SMPN 4	3.004.230.250,00	2.692.590.161,00	89,63
6	UPT Satuan Pendidikan SMPN 5	2.502.717.100,00	2.195.347.506,00	87,72
7	UPT Satuan Pendidikan SMPN 6	2.313.398.287,00	1.966.176.107,00	84,99
8	UPT Satuan Pendidikan SMPN 7	2.536.247.100,00	2.252.425.185,00	88,81
9	UPT Satuan Pendidikan SMPN 8	2.661.319.100,00	2.392.003.293,00	89,88
10	UPT Satuan Pendidikan SMPN 9	3.177.983.225,00	2.506.562.108,00	78,87
11	Dinas Kesehatan	65.647.842.347,00	49.161.258.068,60	74,89
12	Uptd Puskesmas Kecamatan Kepanjenkidul	6.336.413.838,00	5.066.109.148,00	79,95
13	Uptd Puskesmas Kecamatan Sananwetan	6.520.751.534,00	5.165.120.533,13	79,21
14	Uptd Puskesmas Kecamatan Sukorejo	6.022.172.483,00	4.422.311.815,00	73,43
15	RSUD Mardi Waluyo	176.558.111.922,71	149.851.570.803,18	84,87
16	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	68.489.367.229,00	46.991.760.260,12	68,61
17	Dinas Perumahan Rakyat	18.918.841.608,00	17.574.729.798,82	92,90
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.959.650.219,00	9.373.308.782,00	85,53
19	Dinas Perhubungan	23.830.933.277,00	22.179.598.590,91	93,07
20	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	29.324.337.542,00	22.773.937.731,00	77,66
21	Dinas Lingkungan Hidup	46.690.585.552,00	42.349.460.079,50	90,70
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.644.632.454,00	7.222.843.122,00	83,55
23	Dinas Sosial	26.691.548.278,00	25.833.461.741,00	96,79
24	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	5.436.919.432,00	4.742.450.615,00	87,23
25	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana	9.098.524.762,00	8.247.605.605,00	90,65
26	Satuan Polisi Pamong Praja	15.340.502.887,00	14.065.664.640,00	91,69
27	Bagian Umum	22.383.960.335,00	19.820.693.344,00	88,55
28	Bagian Pembangunan Dan Layanan Pengadaan	1.791.349.485,00	1.364.152.161,00	76,15
29	Bagian Hukum Dan Organisasi	2.249.814.900,00	2.027.848.246,00	90,13
30	Bagian Humas Dan Protokol	3.859.551.790,00	3.587.786.367,00	92,96
31	Bagian Perekonomian Dan Kesejahteraan Rakyat	7.919.422.025,00	7.410.662.057,00	93,58
32	Bagian Tata Pemerintahan	1.661.069.950,00	1.607.592.428,00	96,78
33	Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	645.625.178,00	450.905.390,00	69,84
34	Sekretariat DPRD	33.487.705.482,00	28.123.757.751,00	83,98
35	Inspektorat Daerah	9.789.591.996,00	8.656.234.591,00	88,42
36	Kecamatan Kepanjenkidul	13.158.977.968,00	11.954.844.532,93	90,85
37	Kecamatan Sukorejo	12.437.398.008,00	11.012.502.720,00	88,54
38	Kecamatan Sananwetan	11.921.410.115,50	10.644.943.858,50	89,29
39	Kelurahan Kepanjenkidul	1.937.723.131,00	1.859.862.742,00	95,98



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No.	SKPD	Tahun Anggaran 2019		
		Anggaran	Realisasi	%
40	Kelurahan Ngadirejo	1.469.016.160,00	1.433.798.045,00	97,60
41	Kelurahan Sentul	1.464.391.881,00	1.435.089.916,00	98,00
42	Kelurahan Kauman	1.632.003.835,00	1.576.861.355,00	96,62
43	Kelurahan Tanggung	1.516.616.361,00	1.474.311.338,00	97,21
44	Kelurahan Bendo	1.463.433.661,00	1.455.234.700,00	99,44
45	Kelurahan Kepanjenlor	1.477.723.876,00	1.462.561.658,00	98,97
46	Kelurahan Pakunden	1.568.620.224,00	1.539.285.447,03	98,13
47	Kelurahan Blitar	1.643.295.844,00	1.631.660.819,00	99,29
48	Kelurahan Tlumpu	1.232.795.017,00	1.212.280.775,00	98,34
49	Kelurahan Turi	1.406.259.918,00	1.383.420.176,00	98,38
50	Kelurahan Karang Sari	1.393.093.379,00	1.384.517.891,00	99,38
51	Kelurahan Sukorejo	1.950.217.359,00	1.896.601.336,00	97,25
52	Kelurahan Tanjungsari	1.677.264.361,00	1.634.438.019,00	97,45
53	Kelurahan Gedog	1.674.695.940,00	1.654.208.762,00	98,78
54	Kelurahan Plosokerep	1.242.988.810,00	1.231.911.731,00	99,11
55	Kelurahan Klampok	1.293.248.052,00	1.285.368.285,00	99,39
56	Kelurahan Sananwetan	2.174.610.985,00	2.168.166.673,00	99,70
57	Kelurahan Rembang	1.236.919.306,00	1.221.356.926,00	98,74
58	Kelurahan Karangtengah	1.391.672.382,00	1.289.534.753,00	92,66
59	Kelurahan Bendogerit	1.556.501.251,00	1.484.327.948,00	95,36
60	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9.192.335.705,00	8.041.766.504,00	87,48
61	Badan Kepegawaian Daerah	18.151.528.792,00	14.330.603.224,00	78,95
62	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	61.642.179.175,00	53.081.209.147,00	86,11
63	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, PPdan KB	8.794.668.479,00	7.706.276.024,00	87,62
64	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	7.199.298.828,00	6.122.985.282,20	85,05
65	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.569.338.479,00	13.018.711.571,80	89,36
66	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	25.433.314.746,00	22.585.254.071,94	88,80
67	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	31.085.010.826,00	9.779.073.025,60	31,46
68	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	69.179.893.063,66	52.895.459.785,97	76,46
Jumlah		1.174.529.025.791,46	974.726.288.816,17	82,99

7.5.1. 3. Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau diterima kembali yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1. Penerimaan Pembiayaan	211.133.896.244,46	211.167.078.000,99	130.738.072.378,33

Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 sebesar Rp211.167.078.000,99 atau 100,02% dari anggaran sebesar Rp211.133.896.244,46. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 turun 61,52% dibandingkan dengan Penerimaan Pembiayaan Tahun 2018 sebesar Rp130.738.072.378,33. Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	211.104.495.278,46	211.104.495.278,46	100,00
2	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	29.400.966,00	62.582.722,53	212,85
Jumlah		211.133.896.244,46	211.167.078.000,99	100,02

	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
2. Pengeluaran Pembiayaan	9.000.000.000,00	2.500.000.000,00	3.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019 sebesar Rp2.500.000.000,00 atau 27,78% dari anggaran sebesar Rp9.000.00.000,00. Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019 turun 16,67% dibandingkan dengan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan tersebut berupa investasi kepada PDAM Kota Blitar sebesar Rp2.500.000.000,00.

7.5.1. 4. SiLPA/SiKPA

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu tahun anggaran. Realisasi SiLPA Tahun 2019 sebesar Rp174.663.656.285,21 atau turun sebesar 17,26% jika dibandingkan dengan saldo SiLPA Tahun 2018 sebesar Rp211.104.495.278,46. Perhitungan SiLPA Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

a. Total Pendapatan Tahun 2019	Rp	940.722.867.100,39
b. Total Belanja Tahun 2019	Rp	974.726.288.816,17
c. Surplus/(Defisit) (a-b)	Rp	(34.003.421.715,78)
d. Pembiayaan Neto	Rp	208.667.078.000,99
SiLPA (c+d)	Rp	174.663.656.285,21

Jumlah SiLPA sebesar Rp174.663.656.285,21 terdiri dari:

a. Deposito	Rp	60.000.000.000,00
b. Kas di BLUD – RSD Mardi Waluyo	Rp	5.448.648.445,76



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

c. Kas di Kapitasi JKN	Rp	768.900.139,00
d. Kas di Kas Daerah	Rp	104.626.861.717,21
e. Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	20.080,00
f. Kas di Kas BOSNAS	Rp	3.832.970.903,24
g. Utang Kepada Pihak ketiga –Dana BOSNAS SMPN 3	Rp	(13.745.000,00)
SILPA	Rp	174.663.656.285,21



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) periode tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) merupakan komponen laporan keuangan yang hanya disajikan oleh entitas pelaporan, selain Laporan Arus Kas, Pos-pos LPSAL yang mencakup:

7.5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	211.104.495.278,46	129.194.198.394,42

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp211.104.495.278,46 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018.

7.5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
Penggunaan SAL	211.104.495.278,46	129.223.082.686,32

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp211.104.495.278,46 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Tahun Anggaran 2018 yang dipergunakan untuk pos-pos Pembiayaan tahun berjalan.

7.5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
SILPA	174.663.656.285,21	211.104.495.278,46

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp174.663.656.285,21 merupakan penjumlahan dari nominal Pembiayaan Neto sebesar Rp208.667.078.000,99 dengan Defisit Anggaran sebesar (Rp34.003.421.715,78).

7.5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.2.5. Lain – lain

Pos Lain-lain pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp0,00.

7.5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
Saldo Anggaran Lebih Akhir	174.663.656.285,21	211.104.495.278,46

Saldo Anggaran Lebih Akhir pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp174.663.656.285,21 merupakan hasil dari Saldo Anggaran Lebih Awal dikurangi Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan, ditambahkan dengan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), dan kemudian disesuaikan dengan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya dan Pos Lain-lain.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

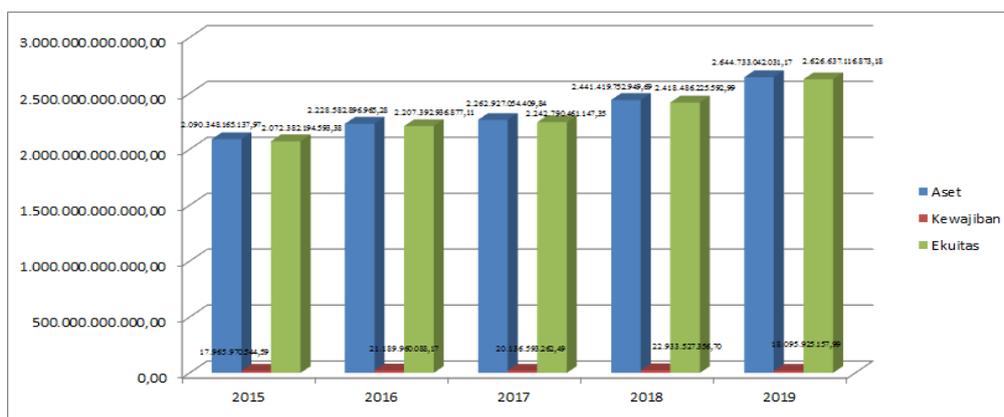
7.5.3. NERACA

Neraca adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Tabel 45 Perkembangan Neraca 5 Tahun Terakhir
(dalam Rupiah)

Tahun	Aset	Ekuitas	Kewajiban
2015	2.090.348.165.137,97	2.072.382.194.593,38	17.965.970.544,59
2016	2.228.582.896.965,28	2.207.392.936.877,11	21.189.960.088,17
2017	2.262.927.054.409,84	2.242.790.461.147,35	20.136.593.262,49
2018	2.441.419.752.949,69	2.418.486.225.592,99	22.933.527.356,70
2019	2.644.733.042.031,17	2.626.637.116.873,18	18.095.925.157,99

Gambar 9 Perkembangan Neraca 5 Tahun Terakhir



Tabel 46 Rincian Neraca Tahun 2019 dan 2018
(dalam Rupiah)

Uraian	2019	2018
Aset Lancar	264.178.394.848,23	265.737.476.324,30
Investasi Jangka Panjang	26.777.811.805,44	24.674.861.064,12
Aset Tetap	2.343.271.736.653,45	2.115.056.603.152,67
Aset Lainnya	10.505.098.724,05	35.950.812.408,60
Kewajiban Jangka Pendek	18.095.925.157,99	22.933.527.356,70
Ekuitas Dana	2.626.637.116.873,18	2.418.486.225.592,99



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.3.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan non-lancar (Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya).

7.5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.

Tabel 47 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	2019	2018
Kas di Kas Daerah	164.626.861.717,21	191.485.363.908,07
Kas di Bendahara Pengeluaran	10.800.080,00	104.682.000,00
Kas BOSNAS	3.832.970.903,24	2.082.743.069,59
Kas di Bendahara Penerimaan	89.061.073,66	134.359.900,63
Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	5.448.648.445,76	17.177.448.413,71
Kas di Kapitasi JKN	768.900.139,00	365.186.629,00
Kas di Bendahara Lainnya	4.819.572,00	0,00
Piutang Pajak	8.566.328.579,00	7.887.300.285,50
Piutang Retribusi	7.035.399.765,00	6.864.141.715,00
Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat	24.904.844.346,00	0,00
Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi	3.080.083.848,00	5.024.336.392,00
Bagian Lancar pinjaman kepada perusahaan daerah	82.087.000,00	82.087.000,00
Bagian Lancar pinjaman kepada pemerintah pusat	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan perbendaharaan	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	687.960.000,00	0,00
Piutang Bunga	142.272.930,00	129.362.340,00
Piutang Lainnya	45.795.702.333,87	33.713.730.684,72



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian	2019	2018
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(15.240.363.242,32)	(14.105.294.107,81)
Belanja Dibayar Dimuka	10.454.166,67	17.950.000,00
Persediaan	14.331.563.191,14	14.774.078.093,89
Jumlah	264.178.394.848,23	265.737.476.324,30

Penjelasan Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
1. Kas di Kas Daerah	164.626.861.717,21	191.485.363.908,07

Kas di Kas Daerah adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Umum Daerah berupa kas yang tersimpan di RKUD (Rekening Umum Kas Daerah) dan deposito kurang dari 3 bulan. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp164.626.861.717,21 atau turun 14,03% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp191.485.363.908,07. Rincian Kas di Kas Daerah sebagai berikut :

Tabel 48 Rincian Saldo Kas Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018
(dalam Rupiah)

No	Bank Penyimpan	No. Rekening	Tahun 2019	Tahun 2018
A. Giro:				
1	Bank Jatim (BPD)	141015672	104.626.861.717,21	178.485.363.908,07
2	Bank Jatim (BPD) DAK	141015681	0,00	0,00
Jumlah A			104.626.861.717,21	178.485.363.908,07
B. Deposito:				
1	Bank Jatim	BB.205.01.00	22.500.000.000,00	5.000.000.000,00
2	Bank BNI	0372831044	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
3	Bank BNI	0372825542	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
4	Bank BNI	0850905909	5.500.000.000,00	0,00
5	Bank BNI	0806162376	2.000.000.000,00	0,00
6	Bank Mandiri	100-01-0002047678-4	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
7	Bank Mandiri	900-01-0002047669-5	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
8	Bank Mandiri	100-01-0002047644-9	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
9	Bank Mandiri	800-05-5002052492-0	5.500.000.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Bank Penyimpan	No. Rekening	Tahun 2019	Tahun 2018
10	Bank BRI	0009-01-009389-40-3	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
11	Bank BRI	0009-01-010320-40-0	7.000.000.000,00	
12	Bank BRI	0009-01-010036-40-9	2.000.000.000,00	
13	Bank BTN	000388-01-40-000538-9	7.500.000.000,00	
Jumlah B			60.000.000.000,00	13.000.000.000,00
Jumlah Total (A+B)			164.626.861.717,21	191.485.363.908,07

Saldo deposito per 31 Desember 2019 senilai Rp60.000.000.000,00 di 5 (lima) Bank yaitu Bank Jatim sebanyak 1 (satu) lembar dengan nilai Rp22.500.000.000,00, Bank BNI sebanyak 4 (empat) lembar dengan nilai Rp10.500.000.000,00, Bank Mandiri sebanyak 4 (empat) lembar senilai Rp8.500.000.000,00, Bank BRI sebanyak 3 (tiga) lembar dengan nilai Rp11.000.000.000,00, dan Bank BTN sebanyak 1 (lembar) dengan nilai Rp7.500.000.000,00. Seluruh deposito tersebut merupakan deposito jangka pendek satu bulan.

2. Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
	10.800.080,00	104.682.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran berupa Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU, potongan pajak, kas transitoris dan pengembalian kelebihan belanja yang belum disetorkan ke RKUD (Rekening Umum Kas Daerah) sampai dengan tanggal Neraca. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.800.080,00 atau turun 89,68% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 sebesar Rp104.682.000,00. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 terdiri dari sisa Tambahan Uang (TU) dan pengembalian belanja yang belum disetor sampai dengan 31 Desember 2019. Pengembalian belanja tersebut telah disetor ke Kas Daerah pada bulan Januari Tahun 2020. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp20.080,00 yaitu sisa TU TA 2019 termasuk komponen SiLPA sedangkan pengembalian belanja TA 2019 yang belum disetor sebesar Rp9.850.000,00 tidak termasuk komponen SiLPA. Selain itu terdapat Kas di Bendahara Pengeluaran dalam bentuk saldo di BNI atas nama Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup dengan Nomor Rekening 124600600 sebesar Rp930.000,00 yang juga bukan merupakan komponen SiLPA dikarenakan keberadaan rekening tersebut baru diketahui pada TA 2020. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

**Tabel 49 Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
per 31 Desember 2019 dan 2018**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2019	2018	Keterangan
1	Kelurahan Tanjungsari	20.000,00	0,00	Sisa TU TA 2019, disetor tgl 3/01/2020, Nomor STS 900/01/410.206.4/2020
2	Kelurahan Turi	80,00	0,00	Sisa TU TA 2019, disetor tgl 8/01/2020, Nomor STS 900/02/410.207.2/2020
3	BPKAD	9.850.000,00	104.282.000,00	Pengembalian kelebihan Dana Hibah Kesekolah Swasta dan Akademi Komunitas TA 2019 , disetor tgl: <ul style="list-style-type: none">- Rp5.850.000,00, pada 9/01/20, STS Nomor 900/3/410.206.4/2020- Rp3.600.000,00, pada 9 /01/ 20, STS Nomor 900/4/410.206.4/2020- Rp400.000,00, Tanggal 27/01/20, STS Nomor 900/17/410.206.4/2020
4	BPKAD	0,00	400.000,00	Pengembalian kelebihan Dana Bansos Kematian TA 2018
5	Dinas Lingkungan Hidup	930.000,00	0,00	Kurang catat saldo awal Kas Bendahara Pengeluaran DLH Kota Blitar di rekening BNI 124600600
Jumlah		10.800.080,00	104.682.000,00	

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
2. Kas BOSNAS	3.832.970.903,24	2.082.743.069,59

Kas BOSNAS adalah kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara BOSNAS. Saldo Kas BOSNAS per 31 Desember 2019 sebesar



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rp3.832.970.903,24 atau naik 84,03% dibandingkan dengan saldo Kas BOSNAS per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.082.743.069,59. Kas BOSNAS merupakan penerimaan saldo akhir per 31 Desember 2019 yang terdiri dari uang tunai dan saldo di rekening bank sekolah yang diterima melalui rekening BOS sekolah. Rincian Kas BOSNAS pada UPT Satuan Pendidikan sebagai berikut.

Tabel 50 Rincian Saldo Kas
pada Bendahara Bosnas per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam

Rupiah)

No	Nama Sekolah	No.Rekening	2019	2018
1	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1	0141040936	397.868.599,83	440.392.928,64
2	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 2	0141040685	164.149.658,08	123.802.833,55
3	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 3	0141041002	674.925.255,42	492.077.397,18
4	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 4	0141041134	994.012.633,89	138.224.660,75
5	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 5	0141040693	239.421.141,40	147.975.634,98
6	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 6	0141040553	393.881.353,45	167.804.342,97
7	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 7	0141040545	285.693.571,67	274.251.362,65
8	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 8	0141040537	321.867.546,60	152.645.855,06
9	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 9	0141040626	10.190.057,66	14.183.238,90
10	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Tlumpu	0141040740	37.883,26	211.889,92
11	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sukorejo 1	0141040561	63.216.515,62	71.942,59
12	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sukorejo 2	0141040570	499.558,32	465.310,40
13	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sukorejo 3	0141040707	7.505.914,95	5.454.749,90
14	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Turi 1	0141040839	3.604.626,44	1.942.576,50
15	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Turi 2	0141040774	2.461.882,77	6.754.161,24
16	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Blitar	0141040588	253.546,49	285.039,92
17	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karang Sari 1	0141040821	2.315.882,20	157.868,58
18	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karang Sari 2	0141040812	28.666.932,45	8.688.052,41
19	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karang Sari 3	0141040791	7.257.267,37	3.914.437,80
20	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Tanjungsari 1	0141040618	4.201.112,23	4.130.867,57
21	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Tanjungsari 2	0141040782	41.848,58	561.635,16
22	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Pakunden 1	0141040596	101.101.023,22	1.805.481,46
23	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Pakunden 2	0141040600	9.945.531,89	7.164.556,12
24	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sentul 1	0141041096	10.514.101,30	4.863.021,60



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Sekolah	No.Rekening	2019	2018
25	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sentul 2	0141040944	10.108.271,56	13.862.635,74
26	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sentul 3	0141040928	2.386.730,62	1.521.489,93
27	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sentul 4	0141040731	13.329.044,37	5.394.631,03
28	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Tanggung 1	0141040715	1.055.690,51	67.851,58
29	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Tanggung 2	0141041088	15.228,89	1.004.675,88
30	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Bendo 1	0141040863	90.544,29	145.860,94
31	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Bendo 2	0141041118	901.335,80	9.313.998,84
32	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Ngadirejo 1	0141040880	1.571.063,91	1.617.764,60
33	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Ngadirejo 2	0141040898	383.207,56	641.517,48
34	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kepanjenlor 1	0141040804	3.239.753,23	716.610,37
35	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kepanjenlor 2	0141040723	1.961.837,69	1.829.974,62
36	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kepanjenlor 3	0141041070	40.727,15	1.093.779,66
37	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kepanjenkidul 1	0141040758	422.781,89	1.501.390,86
38	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kepanjenkidul 2	0141041061	23.034.803,36	4.832.419,71
39	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kauman 1	0141041126	505.724,17	80.956,35
40	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kauman 2	0141040642	8.036.131,08	5.066.079,27
41	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sananwetan 1	0141041223	7.518.257,46	7.360.560,64
42	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sananwetan 2	0141040677	128.116,13	6.989.245,75
43	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sananwetan 3	0141040766	1.604.246,13	361.689,63
44	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Bendogerit 1	0141040961	1.276.414,26	907.624,19
45	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Bendogerit 2	0141040995	372.402,22	211.354,27
46	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Rembang 1	0141040910	65.773,98	114.198,39
47	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Rembang 2	0141040901	128.917,24	258.012,59
48	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Klampok	0141040871	598.661,09	829.358,33
49	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Plosokerep 1	0141040855	4.516.442,16	1.115.640,39
50	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Plosokerep 2	0141040847	173.190,54	103.220,76
51	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Gedog 1	0141041029	4.254.594,12	4.909.564,10
52	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Gedog 2	0141041053	10.364.446,36	7.533.396,11
53	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Gedog 3	0141040979	1.474.914,82	194.024,18
54	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karangtengah 1	0141041169	9.140.148,12	438.639,36



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama Sekolah	No.Rekening	2019	2018
55	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karangtengah 2	0141041258	533.632,19	2.633.202,02
56	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karangtengah 3	0141041142	29.135,97	447.033,98
57	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karangtengah 4	0141041193	75.289,28	1.814.822,19
Jumlah			3.832.970.903,24	2.082.743.069,59

Selanjutnya informasi terkait perhitungan rinci saldo akhir Kas di Bendahara BOSNAS per sekolah disajikan pada **Lampiran 2** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

	<u>31 Desember 2019</u> (Rp)	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)
3. Kas di Bendahara Penerimaan	89.061.073,66	134.359.900,63

Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas pada bendahara penerimaan yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2019. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp89.061.073,66 atau turun 33,71% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 sebesar Rp134.359.900,63. Nilai Kas di Bendahara Penerimaan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 51 Kas di Bendahara Penerimaan
per 31 Desember 2019 dan 2018**

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2019	2018
1	BPKAD	18.807.520,00	6.792.450,10
2	Dinas Perumahan Rakyat	5.104.069,00	67.468,85
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	3.813.000,00	4.045.000,00
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	4.488.000,00
5	RSUD Mardi Waluyo	59.485.522,00	100.489.693,00
6	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	1.640.962,66	7.097.288,68
7	Dinas Lingkungan Hidup	210.000,00	11.380.000,00
Jumlah		89.061.073,66	134.359.900,63

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

1. BPKAD

Terdapat penerimaan pada rekening penampungan yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jasa giro pada rekening penampungan dana bergulir PT Bank BNI (Persero) Tbk. dengan nomor rekening 0055308986 Rp92.490,00;



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- b. Jasa giro pada rekening penampungan dana bergulir PT Bank BNI (Persero) Tbk. dengan nomor rekening 0053545590 Rp4.443,00;
- c. Hasil pengelolaan dana bergulir pada rekening penampungan dana bergulir PT Bank BNI (Persero) Tbk. dengan nomor rekening 0053545590 Rp7.773.847,00; dan
- d. PBB P2 pada PT Pos Indonesia Rp10.936.740,00.

2. Dinas Perumahan Rakyat

Terdapat penerimaan secara tunai yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah Rp3.875.000,00;
- b. Fasilitas Sosial Rp1.229.060,00; dan
- c. Kelebihan pembayaran lain-lain PAD yang sah Rp9,00.

3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Terdapat penerimaan secara tunai yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Retribusi Pelayanan Pasar Rp2.095.000,00;
- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp300.000,00;
- c. Retribusi Pelayanan Persampahan Rp306.000,00; dan
- d. Retribusi Tempat khusus parkir Rp1.112.000,00.

4. RSUD Mardi Waluyo

Pendapatan BLUD RSUD yang belum disetorkan ke kas daerah sebesar Rp59.485.522,00.

5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Terdapat penerimaan pada rekening penampungan yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengembalian pokok dana bergulir pada rekening penampungan dana bergulir PT BPD Jatim Tbk. dengan nomor rekening 0142186217 sebesar Rp862.068,97 dan PD BPR Artha Praja nomor rekening 10111000729 sebesar Rp431.034,48.
- b. Hasil pengelolaan dana bergulir pada rekening penampungan dana bergulir PT BPD Jatim Tbk. dengan nomor rekening 0142186217 sebesar Rp137.931,03 dan PD BPR Artha Praja nomor rekening 10111000729 sebesar Rp68.965,52.
- c. Jasa Giro pada rekening penampungan dana bergulir pada:
 - 1) PT BPD Jatim Tbk., yaitu:
 - nomor rekening 0143003728 sebesar Rp4.309,09;
 - nomor rekening 0142038773 sebesar Rp6.472,39;
 - nomor rekening 0142132711 sebesar Rp4.379,17;
 - nomor rekening 0142136341 sebesar Rp4.374,88;
 - nomor rekening 0142136325 sebesar Rp5.175,16;
 - nomor rekening 0142136520 sebesar Rp4.736,14;
 - nomor rekening 0142137484 sebesar Rp14.026,37;
 - nomor rekening 0142132470 sebesar Rp4.379,17;
 - nomor rekening 0142136217 sebesar Rp55.350,99; dan



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- nomor rekening 0142136333 sebesar Rp4.379,17.

2) PD BPR Artha Praja nomor rekening 0011001000729 Rp33.380,13.

6. Dinas Lingkungan Hidup

- Terdapat penerimaan Retribusi Pelayanan Persampahan secara tunai sebesar Rp210.000,00 yang belum disetorkan ke kas daerah per 31 Desember 2019.

Kas di Bendahara Penerimaan pada Tahun 2019 secara keseluruhan telah disetor pada Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kota Blitar pada Tahun berikutnya dengan rincian sebagai berikut :

1. BPKAD sebesar Rp18.807.520,00 telah disetorkan berdasarkan :
 - a. Nota Kredit Bank Jatim Nomor /PB/III/2020 Tanggal 27 Maret 2020 atas Jasa giro Rp92.490,00, jasa giro Rp4.443,00, dan hasil pengelolaan dana bergulir Rp7.773.847,00.
 - b. Bukti Setoran PBB-P2 Tanggal 3 Januari 2020 sebesar Rp10.936.740,00.
2. Dinas Perumahan Rakyat sebesar Rp5.104.069,00 telah disetor berdasarkan:
 - a. STS Nomor 900/1/410.112/2020 Tanggal 2 Januari 2020 sebesar Rp.3.875.000,00;
 - b. STS Nomor 900/2/410.112/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Rp840.560,00; dan
 - c. STS Nomor 900/3/410.112/2020 Tanggal 2 Januari 2020 Rp388.500,00.
3. Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp3.813.000,00 telah disetorkan berdasarkan STS Nomor 900/001/410.108/2020 Tanggal 2 Januari 2020.
4. RSUD Mardi Waluyo sebesar Rp59.485.522,00 telah disetorkan berdasarkan STS Nomor 01/I/2020 Tanggal 2 Januari 2020;
5. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp1.640.962,66 telah disetorkan berdasarkan:
 - a. STS Nomor 900//410.207.2/2019 Tanggal 22 Januari 2020 sebesar Rp862.068,97;
 - b. STS Nomor 900/12/410.207.2/2019 Tanggal 23 Januari 2020 sebesar Rp431.034,48;
 - c. STS Nomor 900/10/410.207.2/2019 Tanggal 22 Januari 2020 sebesar Rp137.931,03;
 - d. STS Nomor 900//410.207.2/2019 Tanggal 23 Januari 2020 sebesar Rp68.965,52;
 - e. STS Nomor 900/57/410.207.2/2020 Tanggal 19 Maret 2020 sebesar Rp33.380,13; dan
 - f. STS Nomor 900/52 /410.207.2/2019 Tanggal 19 Maret 2020 Rp107.582,53.
6. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp210.000,00 telah disetorkan berdasarkan STS Nomor 900/14/410.115/2020 Tanggal 25 Februari 2020.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
5. Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	5.448.648.445,76	17.177.448.413,71



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kas di BLUD adalah kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran BLUD yang tersimpan di Bank Jatim dengan nomor rekening 0141007288 a.n. RSD Mardi Waluyo Kota Blitar. Saldo Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSD Mardi Waluyo per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.448.648.445,76 atau turun sebesar 68,28% dibandingkan dengan saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2018 sebesar Rp17.177.448.413,71. Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2019 turun disebabkan oleh adanya keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS dan sampai dengan akhir Tahun klaim yang terbayar masih sampai dengan Bulan Juni 2019.

Tabel 52 Realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD TA 2019
(dalam Rupiah)

Uraian	Pendapatan	Belanja
Triwulan I	30.166.729.918,39	17.643.341.033,49
Triwulan II	19.213.952.286,22	21.446.926.103,15
Triwulan III	19.193.295.893,48	26.727.396.706,05
Triwulan IV	27.295.479.106,34	41.780.593.329,69
Jumlah	95.869.457.204,43	107.598.257.172,38

Tabel 53 Mutasi Kas di BLUD Tahun 2019 dan 2018
(dalam Rupiah)

Uraian	2019	2018
Saldo awal	17.177.448.413,71	21.299.699.428,25
Pendapatan BLUD 2019	95.869.457.204,43	100.820.369.771,53
Jumlah	113.046.905.618,14	122.120.069.199,78
Belanja BLUD (diluar APBD) 2019	(107.598.257.172,38)	(101.197.876.271,82)
Penyetoran SiLPA Ke Kas Daerah	0,00	(3.744.744.514,25)
Saldo Kas di BLUD	5.448.648.445,76	17.177.448.413,71

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
6. Kas di Kapitasi JKN	768.900.139,00	365.186.629,00

Kas di Bendahara Kapitasi JKN adalah kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Kapitasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) pada masing-masing UPT Puskesmas dan merupakan nilai keseluruhan dari Kas Tunai dan Kas Bank.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Kas di Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per 31 Desember 2019 sebesar Rp768.900.139,00. Saldo Kas di Kapitasi JKN per 31 Desember 2019 naik 110,55% dibandingkan dengan saldo Kas di Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional per 31 Desember 2018 sebesar Rp365.186.629,00. Saldo kas di Kapitasi JKN merupakan sisa dana JKN pada tiga Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan perhitungan sebagai berikut.

Saldo Awal JKN (31/12/2018)	Rp 365.186.629,00
Pendapatan Kapitasi JKN	Rp 5.355.828.300,00
Belanja	<u>(Rp 4.952.114.790,00)</u>
Sisa Dana JKN (31/12/2019)	Rp 768.900.139,00

Tabel 54 Rincian Pendapatan dan Belanja Dana JKN pada FKTP Tahun 2019

(dalam Rupiah)

No	Nama FKTP	No Rekening	Saldo per 31 Des 2018	Pendapatan	Belanja	Saldo per 31 Des 2019
1	2	3	4	5	6	7=4+5-6
1	UPT Puskesmas Sananwetan	0141031601	153.378.106,00	2.090.498.700,00	1.857.400.040,00	386.476.766,00
2	UPT Puskesmas Sukorejo	0141031635	162.408.172,00	1.628.120.400,00	1.444.415.427,00	346.113.145,00
3	UPT Puskesmas Kepanjenkidul	0141031571	49.400.351,00	1.637.209.200,00	1.650.299.323,00	36.310.228,00
Jumlah			365.186.629,00	5.355.828.300,00	4.952.114.790,00	768.900.139,00

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
7. Kas di Bendahara Lainnya	4.819.572,00	0,00

Kas di Bendahara Lainnya adalah saldo kas dari penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Saldo Kas di Bendahara Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp4.819.572,00 merupakan saldo kas dari pendapatan hibah sebesar Rp4.808.248,43 ke Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah berupa Dana SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal), UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), PKL (Praktik Kerja Lapangan), Dana Sekolah Rujukan, Dana Bantuan Pembinaan Kurikulum, Bantuan Dana UN SMP, dan Bantuan Pemerintah untuk PKB (Pengembangan Profesi Berkelanjutan) melalui PKP (Peningkatan Kompetensi Pembelajaran) Berbasis Zonasi serta saldo kas di Dinas Pendidikan sebesar Rp11.323,57 untuk penampungan dana tunjangan profesi



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

guru pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1440014060260. Saldo Kas di Bendahara Lainnya per 31 Desember 2019 naik 100% dibandingkan dengan saldo Kas di Bendahara Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 55 Rincian Kas di Bendahara Lainnya Tahun 2019

(dalam Rupiah)

No	Nama	No Rekening	Saldo 31/12/ 2019
1	2	3	4
1.	Dinas Pendidikan		
	a. Dana PKB melalui PKP berbasis zonasi	0009-01-029493-53-3	3.351.939,00
	b. Bantuan Dana UN SMP	0141016563	18.465,47
	c. Dana SPMI, PKL, Pembinaan Kurikulum dan Sekolah Rujukan		
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sukorejo 3	0142949253	16.562,26
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Pakunden 2	0142383616	119.036,34
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sentul 2	0142883635	82.692,81
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Bendo 1	0142383586	148.574,84
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kepanjenkidul 2	0009-01-014320-53-3	85.140,00
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kauman 1	0009-01-029166-53-4	69.841,00
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sananwetan 1	0009-01-026229-53-7	175.812,00
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sananwetan 2	0009-01-003202-30-2	8.642,00
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sananwetan 3	0142383578	77.812,98
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Rembang 2	0142383535	60.420,59
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karangtengah 1	0142379996	75.155,46
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Bendogerit 1	0142883481	262.739,94
	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Turi 2	0142882141	42.595,30
	d. Dana Tunjangan Profesi Guru	1440014060260	11.323,57
2.	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 1		
	Dana UKS	0009-01-003163-30-4	0,00
3.	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 6		
	DANA SPMI	0142399032	75.124,62
4.	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 7		
	DANA SPMI	0142399041	76.446,00
5.	UPT Satuan Pendidikan SMP Negeri 8		



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Nama	No Rekening	Saldo 31/12/ 2019
	DANA SPMI	0142399024	61.247,82
Jumlah			4.819.572,00

Selanjutnya informasi terkait perhitungan saldo akhir Kas di Bendahara Lainnya disajikan pada **Lampiran 3** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

	<u>31 Desember 2019</u> (Rp)	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)
8. Piutang Pajak	8.566.328.579,00	7.887.300.285,50

Piutang pajak pada Pemerintah Kota Blitar timbul karena tunggakan pajak daerah yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak per 31 Desember 2019. Piutang Pajak dikelola oleh BPKAD dengan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.566.328.579,00 atau naik 8,61% dibandingkan dengan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.887.300.285,50. Piutang Pajak dicatat berdasarkan nilai nominal ketetapan pajak yang belum dilunasi Wajib Pajak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56 Rincian Mutasi Piutang Pajak Tahun 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31/12/2018	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31/12/2019
1	Pajak Hotel	116.904.229,00	130.602.499,00	113.076.464,00	134.430.264,00
2	Pajak Reklame	19.704.620,50	18.131.340,00	3.837.940,50	33.998.020,00
3	Pajak Rumah Makan	285.725.230,00	238.556.147,00	210.901.612,00	313.379.765,00
4	Pajak Katering	4.320.146,00	8.248.867,00	4.320.146,00	8.248.867,00
5	Pajak Hiburan	262.781.650,00	207.923.083,00	248.115.650,00	222.589.083,00
6	Pajak Air Tanah	11.403.817,00	5.814.903,00	7.148.335,00	10.070.385,00
7	Pajak Parkir	41.953.850,00	30.664.418,00	26.748.150,00	45.870.118,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	6.266.607.752,00	676.435.592,00	85.385.656,00	6.857.657.688,00
9	Pajak Penerangan Jalan Umum	877.898.991,00	940.084.389,00	877.898.991,00	940.084.389,00
Jumlah		7.887.300.285,50	2.256.461.238,00	1.577.432.944,50	8.566.328.579,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan pada Tahun 1996-2013 sebesar Rp4.066.836.564,00 merupakan piutang pelimpahan dari KPP Pratama Blitar berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Surat Keputusan Menteri Keuangan, Data Piutang PBB P2 dan Aset Sitaan Nomor BA-151/WPJ.12/KP.12/2014 Tanggal 29 Januari 2014. Berdasarkan jumlah data dan besar piutang PBB P2 versi Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut, telah diverifikasi di lapangan dan divalidasi oleh petugas yang diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 57 Hasil Verifikasi Lapangan atas Data Piutang PBB P2

No	Uraian	Jumlah NOP	Nilai Piutang (Rp)	Rekomendasi
1	Wajib Pajak Sudah Bayar (Pengakuan)	64.863	2.939.469.163,00	penghapusan piutang
2	Wajib Pajak Sudah Bayar (Ada Bukti)	54	27.258.721,00	koreksi piutang
3	Dobel NOP	64	3.865.512,00	koreksi piutang
4	Induk Sudah Dipecah	347	21.232.020,00	koreksi piutang
5	Fasilitas Umum/Fasilitas Sosial	610	22.557.478,00	koreksi piutang
6	Perubahan Kepemilikan/Wajib Pajak	6.515	300.236.834,00	penghapusan piutang
7	Objek Pajak Tidak Ditemukan	651	43.375.779,00	verifikasi lapangan
8	Wajib Pajak Tidak Diketahui Keberadaannya	4.982	491.315.796,00	penghapusan piutang
9	Wajib Pajak Bangkrut/Meninggal Dunia	1.953	109.624.944,00	penghapusan piutang
10	Wajib Pajak Mengalami Musibah/Force Majeaur	59	1.272.042,00	penghapusan piutang
11	Belum Bayar	1.849	106.628.275,00	penagihan piutang
	Total Piutang telah diverifikasi lapangan	81.947	4.066.836.564,00	

Pengelompokan umur piutang berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 58 Rincian Pengelompokan Umur Piutang Pajak 2019
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai	0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	2 s/d 5 Tahun	>5 Tahun
1	Pajak Hotel	134.430.264,00	130.602.499,00	385.000,00	1.843.000,00	1.599.765,00
2	Pajak Reklame	33.998.020,00	18.131.340,00	0,00	996.800,00	14.869.880,00
3	Pajak Rumah Makan	313.379.765,00	238.556.147,00	5.207.500,00	23.949.299,00	45.666.819,00
4	Pajak Katering	8.248.867,00	8.248.867,00	0,00	0,00	0,00
5	Pajak Hiburan	222.589.083,00	207.923.083,00	250.000,00	9.228.000,00	5.188.000,00
6	Pajak Air Tanah	10.070.385,00	5.814.903,00	25.960,00	237.082,00	3.992.440,00
7	Pajak Parkir	45.870.118,00	30.664.418,00	60.000,00	15.028.500,00	117.200,00
8	Pajak Bumi dan Bangunan	6.857.657.688,00	676.435.592,00	487.084.520,00	1.281.747.139,00	4.412.390.437,00
9	Pajak Penerangan Jalan Umum	940.084.389,00	940.084.389,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		8.566.328.579,00	2.256.461.238,00	493.012.980,00	1.333.029.820,00	4.483.824.541,00

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
9. Piutang Retribusi	7.035.399.765,00	6.864.141.715,00

Piutang Retribusi pada Pemerintah Kota Blitar timbul karena tunggakan retribusi daerah yang belum dilunasi oleh Wajib Retribusi per 31 Desember 2019. Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.035.399.765,00 atau naik 2,49% dibandingkan dengan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.864.141.715,00. Piutang Retribusi dicatat berdasarkan nilai nominal tagihan retribusi yang belum terealisasi per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 59 Rincian Mutasi Piutang Retribusi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31/12/2018	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31/12/2019
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
	Sewa Toko Stadion Suprijadi – Dinas Kepemudaan dan Olahraga	100.051.000,00	47.700.000,00	15.900.000,00	131.851.000,00
	Sewa lahan Stadion Suprijadi - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	10.402.000,00	9.561.000,00	8.007.000,00	11.956.000,00
	Sewa kios kebonrojo - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	8.100.000,00	2.835.000,00	4.860.000,00	6.075.000,00
	Sewa Kios Shopping Center – Dinas Perindustrian dan Perdagangan	44.851.000,00	0,00	0,00	44.851.000,00
	Sewa Tanah Jl. Kelud, Jl. A.Yani, Jl. Dr. Wahidin - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	227.561.300,00	4.679.000,00	6.032.700,00	226.207.600,00
	Sewa Kios/Bedak Jl. Mayang - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.930.000,00	5.400.000,00	1.620.000,00	15.710.000,00
	Sewa Kios/Bedak Jl. Mastrip - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.600.000,00	0,00	600.000,00	22.000.000,00
	Sewa Kios/Bedak Jl. Kelud - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.380.000,00	3.240.000,00	0,00	23.620.000,00
	Sewa Tanah dan Bangunan Gapensi - BPKAD	10.285.000,00	0,00	0,00	10.285.000,00
	Sewa kios souvenir MBK – Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	77.008.000,00	0,00	0,00	77.008.000,00
	Sewa kios terminal MBK Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	41.848.000,00	0,00	0,00	41.848.000,00
	Sewa kios los PIPP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	Sewa Kios Terminal –Dinas Perhubungan	274.555.000,00	0,00	0,00	274.555.000,00
	Penjualan Traktor dan Pemberian Kredit pertanian –Dinas	19.922.700,00	0,00	0,00	19.922.700,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo 31/12/2018	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31/12/2019
	Ketahanan Pangan dan Pertanian				
	Sewa Hunian Rusunawa – Dinas Perumahan Rakyat	183.425.000,00	112.300.000,00	9.325.000,00	286.400.000,00
	Sewa Tanah Reklame - Dinas Penanaman Modal,TK,&PTSP	109.650,00	0,00	109.650,00	0,00
	Flying Fox – Dinas Lingkungan Hidup	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.653.887.445,00	0,00	2.350.000,00	5.651.537.445,00
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - Sewa GOR	3.635.000,00	6.380.000,00	3.530.000,00	6.485.000,00
4	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan – Dinas Pekerjaan Umum	148.792.850,00	82.229.000,00	50.731.600,00	180.290.250,00
5	Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian – Dinas Lingkungan Hidup	2.477.770,00	0,00	0,00	2.477.770,00
Jumlah		6.864.141.715,00	274.824.000,00	103.565.950,00	7.035.399.765,00

Pengelompokan umur piutang retribusi berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 60 Rincian Pengelompokan Umur Piutang Retribusi

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai	0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	s/d 3 Tahun	>3 Tahun
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah					
	Sewa Toko Stadion Suprijadi	131.851.000,00	47.700.000,00	7.200.000,00	0,00	76.951.000,00
	Sewa lahan Stadion Suprijadi - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	11.956.000,00	9.561.000,00	2.395.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Nilai	0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	s/d 3 Tahun	>3 Tahun
	Sewa kios kebonrojo - Dinas Kepemudaan dan Olahraga	6.075.000,00	2.835.000,00	3.240.000,00	0,00	0,00
	Sewa Kios Shopping Center	44.851.000,00	0,00	0,00	0,00	44.851.000,00
	Sewa Tanah Jl. Kelud, Jl. A.Yani, Jl. Dr. Wahidin	226.207.600,00	4.679.000,00	0,00	0,00	221.528.600,00
	Sewa Kios/Bedak Jl. Mayang	15.710.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00	540.000,00	7.070.000,00
	Sewa Kios/Bedak Jl. Mastrip	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
	Sewa Kios/Bedak Jl. Kelud	23.620.000,00	3.240.000,00	1.200.000,00	0,00	19.180.000,00
	Sewa Tanah dan Bangunan Gapensi	10.285.000,00	0,00	0,00	0,00	10.285.000,00
	Sewa kios souvenir MBK	77.008.000,00	0,00	0,00	0,00	77.008.000,00
	Sewa kios terminal MBK	41.848.000,00	0,00	0,00	0,00	41.848.000,00
	Sewa kios los PIPP	1.820.000,00	0,00	0,00	0,00	1.820.000,00
	Sewa Kios Terminal	274.555.000,00	0,00	0,00	0,00	274.555.000,00
	Sewa Hunian Rusunawa	286.400.000,00	112.300.000,00	155.775.000,00	6.275.000,00	12.050.000,00
	Penjualan Traktor dan Pemberian Kredit Pertanian	19.922.700,00	0,00	0,00	0,00	19.922.700,00
	Flying Fox – DLH	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	5.651.537.445,00	0,00	0,00	23.550.000,00	5.627.987.445,00
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga - Sewa GOR	6.485.000,00	6.380.000,00	0,00	0,00	105.000,00
4	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	180.290.250,00	82.229.000,00	60.886.300,00	3.166.500,00	34.008.450,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Nilai	0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	s/d 3 Tahun	>3 Tahun
5	Retribusi Ijin Gangguan/Keramaian	2.477.770,00	0,00	0,00	0,00	2.477.770,00
Jumlah		7.035.399.765,00	274.824.000,00	233.396.300,00	33.531.500,00	6.493.647.965,00

10. Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
	<u>24.904.844.346,00</u>	<u>0,00</u>

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat adalah hak Pemerintah Kota Blitar atas dana bagi hasil pemerintah pusat yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Pusat per 31 Desember 2019 sebesar Rp24.904.844.346,00 atau naik 100% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp0,00.

Penambahan piutang tersebut berdasarkan:

1. PMK Nomor 20/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp12.142.743.303,00 yang terdiri dari:
 - a. PPh Pasal 25/29 sebesar Rp27.814.500,00;
 - b. PBB Bagi Rata Rp585.974.334,00;
 - c. PBB Bagian Daerah Sektor Kehutanan sebesar Rp4.917.883,00;
 - d. PBB Bagian Daerah Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp2.109.712,00;
 - e. PBB Bagian Daerah Sektor Lainnya Rp37.346.498,00;
 - f. PBB Biaya Pemungutan Sektor Kehutanan sebesar Rp204.912,00;
 - g. PBB Biaya Pemungutan Sektor Minyak Bumi dan Gas bumi sebesar Rp73.254,00;
 - h. PBB Biaya Pemungutan Sektor Lainnya sebesar Rp1.296.753,00;
 - i. DBHCHT sebesar Rp432.788.804,00;
 - j. PSDH sebesar Rp19.185.561,00;
 - k. Royalty sebesar Rp405.045.742,00;
 - l. Minyak Bumi 15% sebesar Rp7.737.380.041,00;
 - m. Minyak Bumi 0,50% sebesar Rp257.899.004,00;
 - n. Gas Bumi 30% sebesar Rp2.584.338.998,00;
 - o. Gas Bumi 0,50% sebesar Rp42.690.018,00; dan
 - p. Perikanan sebesar Rp3.677.289,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2. PMK Nomor 36/PMK.07/2020 Tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebesar Rp12.762.101.043,00 yang terdiri dari:
- a. PPh Pasal 21 sebesar Rp1.763.223.060,00;
 - b. PPh Pasal 25/29 sebesar Rp649.111,525,00;
 - c. PBB Bagi Rata sebesar Rp196.640.935,00;
 - d. PBB Bagian Daerah Sektor Kehutanan sebesar Rp2.890.237,00;
 - e. PBB Bagian Daerah Sektor Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar Rp62.192.725,00;
 - f. PBB Bagian Daerah Sektor Lainnya sebesar Rp23.555.748,00;
 - g. PBB Biaya Pemungutan Sektor Kehutanan sebesar Rp120.477,00;
 - h. PBB Biaya Pemungutan Sektor Minyak Bumi dan Gas bumi sebesar Rp2.159.477,00;
 - i. PBB Biaya Pemungutan Sektor Lainnya sebesar Rp817.864,00;
 - j. PSDH sebesar Rp46.994.146,00;
 - k. Royalty sebesar Rp408.798.045,00;
 - l. Minyak Bumi 15% sebesar Rp8.973.240.108,00;
 - m. Minyak Bumi 0,50% sebesar Rp299.063.289,00;
 - n. Gas Bumi 30% sebesar Rp156.074.744,00;
 - o. Gas Bumi 0,50% sebesar Rp2.577.236,00;
 - p. Iuran Tetap sebesar Rp4.013.524,00; dan
 - q. Perikanan sebesar Rp170.627.903,00.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
11. Piutang Dana Bagi Hasil dari Provinsi	3.080.083.848,00	5.024.336.392,00

Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi adalah hak Pemerintah Kota Blitar atas dana bagi hasil provinsi yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2019. Saldo Piutang Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.080.083.848,00 turun sebesar 38,70% dibandingkan dengan saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.024.336.392,00

Nilai Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp3.080.083.848,00 merupakan piutang Dana Bagi Hasil Pajak Rokok



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/7/KPTS/013/2020 Tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Untuk Kabupaten/Kota Di Jawa Timur berdasarkan Realisasi Penerimaan Kas Triwulan IV Tahun Anggaran 2019 Tanggal 21 Januari 2020

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
12. Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	82.087.000,00	82.087.000,00

Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah adalah bagian pinjaman yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah per 31 Desember 2019 adalah nilai pinjaman yang jatuh tempo pada 31 Desember 2020 berupa Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah yaitu pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah pada PDAM diakui berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 23 Tahun 2002 dengan nilai pinjaman sebesar Rp820.870.000,00.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
13. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	687.960.000,00	0,00

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah Tuntutan Ganti Rugi yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 sebesar Rp687.960.000,00. Nilai tersebut merupakan bagian lancar dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) 25 anggota DPRD Pemerintah Kota Blitar yang terdampak temuan pemeriksaan BPK RI TA 2018 atas kelebihan pembayaran Dana Operasional Pimpinan, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses DPRD dengan nilai total sebesar Rp1.429.470.000,00. Nilai tersebut telah dibayarkan ke kas daerah sebesar Rp347.091.250,00 selama TA 2019, sehingga pada 31 Desember 2019 terdapat saldo TGR sebesar Rp1.082.378.750,00. Bagian lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 tersebut adalah sebesar Rp687.960.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp394.418.750,00 disajikan pada Aset Lainnya. Perhitungan saldo akhir Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah TA 2019 disajikan pada **Lampiran 4** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
14. Piutang Bunga	142.272.930,00	129.362.340,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Piutang Bunga per 31 Desember 2019 sebesar Rp142.272.930,00. Saldo ini merupakan Piutang Bunga PDAM berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 06 Tahun 2001 tanggal 26 Nopember 2001 dan Nomor 23 Tahun 2002 tanggal 3 Oktober 2002, terdiri dari Piutang Bunga yang telah jatuh tempo pada 31 Desember 2019. Adapun rincian mutasi piutang bunga dan pengelompokan umur piutang sebagai berikut.

Tabel 61 Rincian Mutasi Piutang Bunga Tahun 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 31/12/2018	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31/12/2019
1	2	3	4	5 (2+3-4)
Piutang Bunga PDAM	129.362.340,00	12.910.590,00	0,00	142.272.930,00
Jumlah	129.362.340,00	12.910.590,00	0,00	142.272.930,00

Tabel 62 Pengelompokan Umur Piutang Bunga per 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

Uraian	Nilai	0 s/d 1 Tahun	1 s/d 2 Tahun	2 s/d 5 Tahun	>5 Tahun
Piutang Bunga PDAM	142.272.930,00	12.313.050,00	24.626.100,00	36.939.150,00	68.394.630,00

15. Piutang Lainnya	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
	45.795.702.333,87	33.713.730.684,72

Saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp45.795.702.333,87 atau naik 35,84% dibandingkan dengan saldo Piutang Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp33.713.730.684,72. Jenis piutang lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 63 Rincian Mutasi Piutang Lainnya Tahun 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31/12/2018	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31/12/2019
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
1	Piutang BPJS Kesehatan Non Kapitasi	87.030.000,00	43.675.000,00	87.030.000,00	43.675.000,00
2	Piutang BLUD	28.828.884.084,00	87.550.646.886,00	75.746.405.610,00	40.633.125.360,00
3	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	983.379.310,28	1.954,96	21.127.789,31	962.253.475,93
4	Piutang Denda	2.348.229.402,00	698.540.764,00	22.851.284,00	3.023.918.882,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo 31/12/2018	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31/12/2019
5	Piutang Jasa Giro	235.427.165,11	214.203.504,14	235.427.165,11	214.203.504,14
6	Piutang Bunga Deposito	26.704.109,58	319.236.294,30	26.704.109,58	319.236.294,30
7	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	278.911.538,00	223.292.877,00	167.802.589,00	334.401.826,00
8	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD PD BPR Artha Praja	394.288.318,00	222.321.391,50	394.288.318,00	222.321.391,50
9	Penjualan Hasil Pertanian	2.647.700,00	0,00	2.647.700,00	0,00
10	Piutang Pengembalian Kelebihan Belanja	528.229.057,75	0,00	528.229.057,75	0,00
11	Piutang Persediaan	0,00	42.566.600,00	0,00	42.566.600,00
Jumlah		33.713.730.684,72	89.314.485.271,90	77.232.513.622,75	45.795.702.333,87

Penjelasan atas piutang lainnya pada tabel diatas adalah sebagai berikut:

1. Piutang BPJS
 - BPJS Kesehatan Non Kapitasi pada Dinas Kesehatan dengan nilai piutang berdasarkan surat BPJS Kesehatan tanggal 22 Januari 2020 nomor 323/VII – 04/0120 perihal surat konfirmasi utang sebesar Rp40.535.000,00.
 - Piutang belanja Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) JKN Puskesmas Sananwetan Rp1.450.000,00.
 - Piutang belanja Prolanis (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) JKN Puskesmas Sukorejo Rp1.690.000,00.
2. Piutang BLUD dikelola oleh RSUD Mardi Waluyo dengan nilai piutang berdasarkan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) per 31 Desember 2019 sebesar Rp40.633.125.360,00 terdiri dari :
 - Piutang BPJS sebesar Rp40.151.702.160,00
 - Piutang Pasien Umum sebesar Rp224.971.007,00
 - Piutang Bakordik (Badan Koordinasi Pendidikan) sebesar Rp63.072.000,00
 - Piutang LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) sebesar Rp3.000.000,00
 - Piutang Jasa Raharja sebesar Rp190.380.193,00
3. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari UMKM/Koperasi adalah piutang bunga atas pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
 - Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari KPUK/BNI 46 adalah piutang bunga atas pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh BPKAD dengan nilai piutang berdasarkan Surat dari PT Bank BNI (Persero) Tbk. tanggal 20 Januari 2020 nomor BLT/7/301 perihal Data KPUK.
 - Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Bank BPR Jatim adalah piutang bunga atas pinjaman dana bergulir yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Setda Kota Blitar dengan nilai piutang berdasarkan Laporan Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur Cabang Blitar atas Nominatif Kredit KPUK Tanggal 31 Desember 2019.
4. Piutang Denda
- Piutang denda pajak PBB-P2 dikelola oleh BPKAD dengan perhitungan piutang berdasarkan wajib pajak PBB-P2 yang belum melunasi pembayaran per 31 Desember 2019 berdasarkan aplikasi SISMIOP.
 - Piutang denda sewa kios bedak Jl. Mayang, piutang denda sewa kios bedak Jl. Kelud, piutang denda sewa kios bedak Jl. A.Yani dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - Piutang denda sewa kios Kebonrojo dan piutang denda sewa kios stadion dikelola oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
 - Piutang denda sewa Waterpark Sumberudel dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan nilai piutang berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Blitar tanggal 21 Agustus 2019 nomor 900/3323/410.107.3/2019 perihal Pemutusan Perjanjian Sewa Waterpark Sumber Udel Kota Blitar.
5. Piutang Jasa Giro
- Piutang atas jasa giro pada PT BPD Jawa Timur Tbk. dengan nilai sebesar Rp214.203.236,14 dikelola oleh BPKAD. Piutang ini telah disetorkan pada rekening kas umum daerah Kota Blitar berdasarkan nota kredit Bank Jatim Cabang Blitar nomor /PB/I/2020 tanggal 1 Januari 2020 dengan nilai rincian piutang disajikan pada **Lampiran 5**.
 - Piutang atas jasa giro pada PT BNI (Persero) Tbk. dikelola oleh BPKAD Nomor Rekening 53545624 yang belum disetor ke kas umum daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp268,00. Piutang ini telah disetorkan pada rekening kas umum daerah Kota Blitar berdasarkan nota kredit Bank Jatim Cabang Blitar nomor 058/PB/I/2020 Tanggal 6 Januari 2020.
6. Piutang Bunga Deposito
- Piutang bunga deposito dikelola oleh BPKAD dan telah disetorkan ke rekening kas umum daerah Kota Blitar pada TA 2020 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 64 Penambahan Piutang Bunga Deposito
(dalam rupiah)

No	Nama Bank	Nilai Deposito	Nomor Rekening Deposito	Nilai Piutang	Tanggal Setor ke RKUD
1	Bank BTN	7.500.000.000,00	000388-01-40-000538-9	43.952.054,80	06/01/2020
2	Bank BNI	5.500.000.000,00	850905909	28.027.397,00	06/01/2020
3	Bank BNI	2.000.000.000,00	806162376	10.191.781,00	21/01/2020
4	Bank BNI	2.000.000.000,00	372831044	10.191.781,00	24/01/2020
5	Bank BNI	1.000.000.000,00	372825542	5.095.890,00	24/01/2020
6	Bank Jatim	7.500.000.000,00	BB.205.01.00	39.811.643,83	09/01/2020
7	Bank Jatim	5.000.000.000,00	BB.205.01.00	26.541.095,89	16/01/2020
8	Bank Jatim	10.000.000.000,00	BB.205.01.00	53.082.191,78	16/01/2020
9	Bank BRI	7.000.000.000,00	0009-01-010320-40-0	35.671.235,00	06/01/2020
10	Bank BRI	2.000.000.000,00	0009-01-010036-40-9	10.191.777,00	20/01/2020
11	Bank BRI	2.000.000.000,00	0009-01-009389-40-3	10.191.777,00	28/01/2020
12	Bank Mandiri	1.000.000.000,00	900-01-0002047669-5	5.308.219,00	03/01/2020
13	Bank Mandiri	1.000.000.000,00	100-01-0002047678-4	5.308.219,00	08/01/2020
14	Bank Mandiri	5.500.000.000,00	800-05-5002052492-0	30.363.013,00	21/01/2020
15	Bank Mandiri	1.000.000.000,00	100-01-0002047644-9	5.308.219,00	24/01/2020
	Jumlah	60.000.000.000,00		319.236.294,30	

7. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
 - Piutang fasilitas umum berdasarkan Surat Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar tanggal 29 Oktober 2019 nomor 032/2128/410.206.6/2019 perihal Pemberitahuan Tagihan Kontribusi Tahun an Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS). Surat Tagihan dibuat berdasarkan Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kota Blitar dengan PT.Linggajati Al Mushowa Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Tanah Milik Pemerintah Kota Blitar.
 - Piutang fasilitas rusunawa dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dengan nilai piutang berdasarkan data tunggakan listrik dan air yang belum dibayar oleh penyewa rusunawa.
8. Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD PD BPR Artha Praja. Piutang ini dikelola oleh BPKAD dengan nilai piutang berdasarkan Surat PD BPR Artha Praja tanggal 9 maret 2020 nomor 580/40.II.BPR.III/410.440.2/2020 perihal Pembagian Dividen PD BPR Artha Praja Kota Blitar Tahun Buku 2019.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

9. Piutang Persediaan sebesar Rp42.566.600,00 berupa peminjaman obat dari Dinas Kesehatan Kota Blitar kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yang telah dikembalikan pada Tahun 2020.

Rincian Mutasi Piutang Lainnya Tahun 2019 secara detail disajikan pada **Lampiran 6** dan pengelompokan umur piutang berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar disajikan pada **Lampiran 7**.

Piutang Jamkesda pada Laporan Keuangan BLUD RSUD Mardi Waluyo per 31 Desember 2019 sebesar Rp480.511.413,00 tidak dimunculkan pada Laporan Keuangan Konsolidasi karena merupakan piutang antar SKPD.

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
16. Penyisihan Piutang Tak Tertagih		(Rp)	(Rp)
		(15.240.363.242,32)	(14.105.294.107,81)

Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan pengelompokan umur Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pemerintah Pusat, Piutang Bagi Hasil Pemerintah Provinsi, Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Lainnya, dan Piutang Bunga PDAM per 31 Desember 2019 berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar.

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019 sebesar Rp(15.240.363.242,32) atau naik 8,05% dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2018 sebesar (Rp14.105.294.107,81). Hal ini dikarenakan banyaknya piutang yang umurnya lebih dari 3 dan 5 Tahun belum dilunasi sehingga mengakibatkan besarnya kenaikan Penyisihan Piutang Tak Tertagih di Tahun 2019. Rincian perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebagaimana tabel berikut:

Tabel 65 Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2019
(dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31/12/2019	Umur Piutang			
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
A.	Tingkat Kolektibilitas dengan masa kadaluarsa 3 Tahun		0 s.d 1 Tahun	> 1 s.d 2 Tahun	> 2 s.d 3 Tahun	> 3 Tahun
1	Piutang Retribusi	7.035.399.765,00	274.824.000,00	233.396.300,00	33.531.500,00	6.493.647.965,00
	% Penyisihan		0,00%	10,00%	50,00%	100,00%
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	6.533.753.345,00	0,00	23.339.630,00	16.765.750,00	6.493.647.965,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo 31/12/2019	Umur Piutang			
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
B.	Tingkat Kolektibilitas dengan masa kadaluarsa 5 Tahun		0 s.d 1 Tahun	> 1 s.d 2 Tahun	> 2 s.d 5 Tahun	> 5 Tahun
2	Piutang Pajak	8.566.328.579,00	2.256.461.238,00	493.012.980,00	1.333.029.820,00	4.483.824.541,00
	% Penyisihan		0,00%	10,00%	50,00%	100,00%
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	5.199.640.749,00	0,00	49.301.298,00	666.514.910,00	4.483.824.541,00
3	Piutang Dana Bagi Hasil Pusat	24.904.844.346,00	24.904.844.346,00	0,00	0,00	0,00
	% Penyisihan		0,00%	10,00%	50,00%	100,00%
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	3.080.083.848,00	3.080.083.848,00	0,00	0,00	0,00
	% Penyisihan		0,00%	10,00%	50,00%	100,00%
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	82.087.000,00	82.087.000,00	0,00	0,00	0,00
	% Penyisihan		0,00%	10,00%	50,00%	100,00%
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	687.960.000,00	687.960.000,00	0,00	0,00	0,00
	% Penyisihan		0,00%	10,00%	50,00%	100,00%
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Piutang Lainnya	45.795.702.333,87	41.767.756.091,10	272.150.642,00	730.736.663,31	3.025.058.937,46
	% Penyisihan		0,00%	10,00%	50,00%	100,00%
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	3.417.642.333,32	0,00	27.215.064,20	365.368.331,66	3.025.058.937,46
8	Piutang Bunga PDAM	142.272.930,00	12.313.050,00	24.626.100,00	36.939.150,00	68.394.630,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Saldo 31/12/2019	Umur Piutang			
			Lancar	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
	% Penyisihan		0,00%	10,00%	50,00%	100,00%
	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	89.326.815,00	0,00	2.462.610,00	18.469.575,00	68.394.630,00
	Jumlah Piutang	90.294.678.801,87	73.066.329.573,10	1.023.186.022,00	2.134.237.133,31	14.070.926.073,46
	Jumlah Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	15.240.363.242,32	0,00	102.318.602,20	1.067.118.566,66	14.070.926.073,46
	Net Realizable Value (NRV)	75.054.315.559,55	73.066.329.573,10	920.867.419,80	1.067.118.566,65	0,00

Penyajian umur piutang yang perlu diketahui nilai detail per Tahun khususnya Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Piutang Lainnya disajikan pada Lampiran sebagai berikut:

1. Penyisihan Piutang Pajak Tak Tertagih per Tahun disajikan pada **Lampiran 8**;
2. Penyisihan Piutang Retribusi Kategori Lancar, Kurang Lancar, dan Diragukan disajikan pada **Lampiran 9**;
3. Penyisihan Piutang Retribusi Kategori Macet (Tahun 2010 s/d Tahun 2016) disajikan pada **Lampiran 10**;
4. Penyisihan Piutang Retribusi Kategori Macet (lebih dari Tahun 2010) disajikan pada **Lampiran 11**;
5. Penyisihan Piutang Lainnya Kategori Lancar, Kurang Lancar, dan Diragukan disajikan pada **Lampiran 12**;
6. Penyisihan Piutang Lainnya Kategori Kategori Macet (Tahun 2009 s/d Tahun 2014) disajikan pada **Lampiran 13**;
7. Penyisihan Piutang Lainnya Kategori Kategori Macet (Tahun 2002 s/d Tahun 2008) disajikan pada **Lampiran 14**; dan
8. Penyisihan Piutang Lainnya Kategori Kategori Macet (lebih dari Tahun 2002) disajikan pada **Lampiran 15**.

17.	Belanja Dibayar di Muka	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		(Rp)	(Rp)
		<u>10.454.166,67</u>	<u>17.950.000,00</u>

Belanja Dibayar di Muka adalah pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Daerah dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah. Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.454.166,67 adalah berupa belanja sewa domain/hosting internet pada tiga SKPD dengan rincian sebagai berikut.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 66 Rincian Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

No	SKPD	2019	2018
1	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	187.500,00	187.500,00
2	Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistika	5.600.000,00	10.762.500,00
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.666.666,67	7.000.000,00
	Jumlah	10.454.166,67	17.950.000,00

Tabel 67 Perhitungan Belanja Dibayar Di Muka per 31 Desember 2019

(dalam

Rupiah)

No.	SKPD	Dokumen sumber	Nominal (Rp)	Belanja Dibayar di Muka	Beban	Jangka Waktu
1.	UPT Satuan Pendidikan SMPN 1	Surat Perjanjian No. 004/C-03/AN/III/2019	750.000,00	187.500,00	562.500,00	25/03/2019 s/d 25/03/2020
2.	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistika	Surat Perjanjian No.027.11/3.1.10.11/4 10.105.2/2019	11.200.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	21/06/2019 s/d 20/06/2020
3.	Dinas Pariwisata	BAST No. 027/050/410.107.3/2019	14.000.000,00	4.666.666,67	9.333.333,33	25/04/2019 s/d 25/04/2020
Jumlah			25.950.000,00	10.454.166,67	15.495.833,33	

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
18. Persediaan	(Rp)	(Rp)
	14.331.563.191,14	14.774.078.093,89

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual/dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat berdasarkan harga perolehan. Saldo persediaan per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp14.331.563.191,14 dan terdiri 45 jenis persediaan. Perolehan persediaan dari dana APBD sebesar Rp 14.326.921.791,14 dan dana BOS sebesar Rp4.641.400,00. Rincian jenis persediaan disajikan pada **Lampiran 16** sedangkan rincian persediaan per SKPD disajikankan pada **Lampiran 17.1** sampai dengan **Lampiran 17.6**.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pada Tahun 2019 Pemerintah Kota Blitar menerima Hibah Persediaan dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur sebesar Rp2.197.387.689,80 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dinas Kesehatan senilai total Rp2.096.057.363,00 berupa Obat Rp1.040.813.604,00 dan Bahan Kesehatan Rp1.055.243.759,00;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Persediaan Cetak (blanko KTP elektronik) senilai Rp79.282.500,00; dan
- c. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berupa Persediaan Barang/Jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat senilai Rp22.047.826,80.

7.5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi dua yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 68 Investasi Jangka Panjang

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1.1	Investasi Non Permanen				
	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	778.619.000,00	778.619.000,00	0,00	
	Investasi Dana Bergulir	5.770.710.967,67	5.828.990.155,72	(58.279.188,05)	(1,00)
	Penyisihan Piutang (Investasi Non Permanen) Tak Tertagih	(4.517.718.707,27)	(4.385.460.792,18)	(132.257.915,09)	3,02
	Jumlah Investasi Nonpermanen	2.031.611.260,40	2.222.148.363,54	(190.537.103,14)	(8,57)
1.2	Investasi Permanen				



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	24.746.200.545,04	22.452.712.700,58	2.293.487.844,46	10,21
Jumlah Investasi Permanen	24.746.200.545,04	22.452.712.700,58	2.293.487.844,46	10,21
Jumlah Total	26.777.811.805,44	24.674.861.064,12	2.102.950.741,32	8,52

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp26.777.811.805,44 mengalami kenaikan sebesar Rp2.102.950.741,32 atau 8,52% dibandingkan dengan saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 sebesar Rp24.674.861.064,12. Rincian Investasi Jangka Panjang sebagaimana tabel diatas dirinci sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
1. Investasi Non Permanen	2.031.611.260,40	2.222.148.363,54

Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.031.611.260,40 mengalami penurunan sebesar Rp190.537.103,14 atau turun 8,57% dibandingkan dengan saldo Investasi Non Permanen per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.222.148.363,54. Investasi Non Permanen Tahun 2018 berupa Pinjaman kepada Perusahaan Daerah dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp778.619.000,00 dan Investasi pada Dana Bergulir dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.770.710.967,67. *Net Realizable Value (NRV)* Investasi Non Permanen disajikan sebagai berikut:

Tabel 69 Rincian Saldo Investasi Non Permanen Tahun 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	778.619.000,00	778.619.000,00	0,00	0,00
Investasi Dana Bergulir	5.770.710.967,67	5.828.990.155,72	(58.279.188,05)	(1,00)
Jumlah Investasi (Harga Perolehan)	6.549.329.967,67	6.607.609.155,72	(58.279.188,05)	(0,88)
Penyisihan Investasi tak Tertagih atas Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	(500.344.070,00)	(336.170.070,00)	(164.174.000,00)	48,84
Penyisihan Investasi tak Tertagih atas Investasi Dana Bergulir	(4.017.374.637,27)	(4.049.290.722,18)	31.916.084,91	(0,79)
Jumlah Penyisihan	(4.517.718.707,27)	(4.385.460.792,18)	(132.257.915,09)	3,02



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Investasi Tak Tertagih				
<i>Net Realizable Value (NRV)</i>	2.031.611.260,40	2.222.148.363,54	(190.537.103,14)	(8,57)

Penjelasan rinci atas Investasi Non Permanen adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1. Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	(Rp)	(Rp)
	778.619.000,00	778.619.000,00

Pinjaman kepada Perusahaan Daerah merupakan Pinjaman kepada PDAM dilaksanakan berdasarkan:

1. Surat Perjanjian Nomor 06 Tahun 2001 dengan nilai pinjaman sebesar Rp532.000.000,00 yang telah dilunasi sebesar Rp492.164.000,00 sehingga nilai pinjaman per 31 Desember 2019 sebesar Rp39.836.000.
2. Surat Perjanjian Nomor 23 Tahun 2002 dengan nilai pinjaman sebesar Rp820.870.000,00 yang mana belum ada pelunasan sampai dengan 31 Desember 2019.

Nilai Pinjaman kepada Perusahaan Daerah per 31 Desember 2019 sama dengan nilai per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp778.619.000,00. Rincian mutasi pinjaman kepada perusahaan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 70 Mutasi Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah

(dalam Rupiah)

No	Jatuh Tempo	Mutasi Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah			
		Pokok/Tahun	Pelunasan	Investasi non permanen 31/12/2019	Bagian Lancar Pinjaman 31/12/2019
I. PERJANJIAN NO 23/2002					
1	31/12/2011	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
2	31/12/2012	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
3	31/12/2013	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
4	31/12/2014	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
5	31/12/2015	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
6	31/12/2016	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
7	31/12/2017	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
8	31/12/2018	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Jatuh Tempo	Mutasi Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah			
		Pokok/Tahun	Pelunasan	Investasi non permanen 31/12/2019	Bagian Lancar Pinjaman 31/12/2019
9	31/12/2019	82.087.000,00	0,00	82.087.000,00	0,00
10	31/12/2020	82.087.000,00	0,00	0,00	82.087.000,00
	Jumlah	820.870.000,00	0,00	738.783.000,00	82.087.000,00
II. PERJANJIAN NO 6/2001					
1	31/12/2006	106.400.000,00	0,00	106.400.000,00	0,00
2	31/12/2007	106.400.000,00	15.000.000,00	91.400.000,00	0,00
3	31/12/2008	106.400.000,00	212.164.000,00	(105.764.000,00)	0,00
4	31/12/2009	106.400.000,00	0,00	106.400.000,00	0,00
5	31/12/2010	106.400.000,00	225.000.000,00	(118.600.000,00)	0,00
6	31/12/2011	0,00	40.000.000,00	(40.000.000,00)	0,00
7	31/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00
8	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
9	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
10	31/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
11	31/12/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
12	31/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
13	31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
14	31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	532.000.000,00	492.164.000,00	39.836.000,00	0,00
	Total	1.352.870.000,00	492.164.000,00	778.619.000,00	82.087.000,00

Berdasarkan tabel diatas, untuk pinjaman kepada perusahaan daerah yang telah jatuh tempo diakui sebagai Investasi Non Permanen dan untuk pinjaman yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2019 diakui sebagai Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah.

Pada Tanggal 8 Juni 2020 telah diajukan Surat Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Nomor 903/192/410.400.01/2020 perihal permohonan penyelesaian pinjaman PDAM kepada Pemerintah Daerah Kota Blitar. Surat tersebut menyatakan bahwa rencana pelunasan sisa pinjaman Tahap I berdasarkan perjanjian Nomor 6 Tahun 2001 sebesar Rp39.836.000,00 dan permohonan penyesuaian pinjaman Tahap II berdasarkan perjanjian Nomor 23 Tahun 2002 sebesar Rp820.870.000,00 menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Kota Blitar



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

kepada PDAM mengingat kondisi keuangan PDAM Kota Blitar masih mengalami kerugian.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
2. Investasi Dana Bergulir	<u>5.770.710.967,67</u>	<u>5.828.990.155,72</u>

Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Nilai Investasi Dana Bergulir per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.770.710.967,67 atau turun 1,00% dari saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.828.990.155,72. Rincian Investasi Dana bergulir pada Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Masyarakat Pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp95.030.000,00

Investasi Dana Bergulir pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian per 31 Desember 2019 sebesar Rp95.030.000,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2018 dengan kategori macet dikarenakan peminjam sebagian besar tidak berdagang lagi pada kios pasar sehingga sulit ditelusuri keberadaannya, kedepannya diupayakan untuk penghapusan piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyaluran Modal Kerja Pemberdayaan UKM melalui BPR Jatim Cabang Blitar

yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Blitar sebesar Rp40.071.250,00

Dana bergulir tersebut dikerjasamakan dengan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim Cabang Blitar sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Nomor 3 Tahun 2013 Nomor 0486/KRD/BPR/Blt/2013 tanggal 1 Maret 2013. Pada Tahun 2017 telah dilakukan perpanjangan Perjanjian berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kota Blitar dengan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim Cabang Blitar Tentang Pengelolaan Kredit Modal Kerja Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Nomor : 08 Tahun 2017 atau Nomor : 91/KRD/BPR/BLT/2017. Nilai Investasi dana bergulir pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jatim Cabang Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp40.071.250,00 yang merupakan nilai pokok pinjaman yang belum terbayar sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Investasi Dana Bergulir pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Blitar per 31 Desember 2019 sebesar Rp40.071.250,00 sama dengan saldo per 31 Desember 2018 dengan kategori macet dikarenakan peminjam telah berusia lanjut dan tidak berdagang lagi, kedepannya diupayakan untuk penghapusan piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. Penyaluran Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil (KPUK) melalui Bank BNI yang dikelola oleh BPKAD sebesar Rp550.000.000,00

Dana bergulir tersebut dikerjasamakan dengan Bank BNI sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Terakhir Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 20 Maret 2017 tentang Pengelolaan Kredit Usaha Kecil. Perjanjian ini merupakan kelanjutan dan pembaruan Perjanjian Penyaluran dan Pengelolaan Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil Nomor 1 A Tahun 2204 tanggal 2 Januari 2004 yang berakhir tanggal 31 Desember 2006 dan sekaligus menjadi payung hukum terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil (KPUK) yang dilaksanakan selama kurun waktu 1 Januari 2007 sampai dengan 19 Maret 2017 serta pelaksanaan selanjutnya. Pengelolaan pinjaman KPUK dilaksanakan melalui dua rekening BNI, yakni rekening Nomor 0055308986 yang digunakan untuk menampung dana pokok dan pengembalian pokok pinjaman KPUK dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp31.696.833,00 serta rekening nomor 0053545590 yang digunakan untuk menampung pendapatan bunga pinjaman KPUK dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.778.290,00.

Saldo dana bergulir KPUK pada awal Tahun 2018 adalah sebesar Rp1.700.000.000,00, pada tanggal 30 April 2018 telah dilakukan penarikan saldo rekening 0055308986 sebesar Rp1.150.000.000,00. Nilai penarikan ini merupakan pelunasan dana bergulir dan belum dapat dirinci per nama pembayar dana bergulir. Sisa saldo pokok pinjaman KPUK – Bank BNI pada 31 Desember 2019 sama dengan saldo pada 31 Desember 2018 sebesar Rp550.000.000,00 dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 71 Investasi Dana Bergulir pada BPKAD

(dalam

Rupiah)

Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan	%
Saldo di rekening 0055308986	31.696.833,00	7.689.339,00	24.007.494,00	312,22
Tunggakan pokok (baki debet)	518.395.657,00	549.101.765,00	(30.706.108,00)	(5,59)
Jasa Giro di rekening 0055308986	(92.490,00)	(5.490.676,00)	5.398.186,00	(98,32)
Penambahan saldo kredit di rekening 0055308986 (Biaya Kartu)	0,00	(1.300.428,00)	1.300.428,00	(100,00)
Jumlah	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	0,00

4. Pinjaman Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UM sebesar Rp5.085.609.717,67

Saldo per 31 Desember 2019 adalah Rp5.085.609.717,67 atau turun 1,13% dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp5.143.888.905,72 dengan rincian sebagaimana tabel berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 72 Daftar Dana Bergulir Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

(dalam Rupiah)

No	Jenis Perguliran	Tahun 2019	Tahun 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
1	UM	3.914.877.076,06	3.954.304.324,12	(39.427.248,06)	(1,00)
2	Koperasi	1.170.732.641,61	1.189.584.581,61	(18.851.940,00)	(1,58)
Jumlah		5.085.609.717,67	5.143.888.905,72	(58.279.188,05)	(1,13)

Pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat sisa dana di rekening penampungan dana bergulir sebesar Rp4.850.104,09. Nilai tersebut terdiri dari:

- Rp1.500.000,00 yang merupakan angsuran pinjaman dana bergulir Tahun 2019 tetapi disetorkan Tahun 2020 (STS No.900/11/410.2017.2/2018 tanggal 30 Januari 2019);
- Rp140.962,66 merupakan bunga tabungan rekening penampungan dana bergulir Dinas Koperasi dan UM Tahun 2019 yang belum disetorkan sebagai Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; dan
- Rp3.209.141,43 merupakan belanja untuk pemeliharaan rekening yang hanya diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan karena bukan termasuk bagian dari Dana Bergulir.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
3. Penyisihan Investasi Non Permanen Tak Tertagih	(4.517.718.707,27)	(4.385.460.792,18)

Penyisihan Investasi Non Permanen Tak Tertagih terdiri dari penyisihan investasi tak tertagih atas pinjaman kepada perusahaan daerah dan penyisihan investasi tak tertagih atas investasi dana bergulir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 73 Penyisihan Investasi Non Permanen Tak Tertagih

(dalam Rupiah)

Uraian	2019	2018
Penyisihan Investasi tak Tertagih atas Pinjaman Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	(500.344.070,00)	(336.170.070,00)
Penyisihan Investasi tak Tertagih atas Investasi Dana Bergulir	(4.017.374.637,27)	(4.049.290.722,18)
Jumlah Penyisihan Investasi Tak Tertagih	(4.517.718.707,27)	(4.385.460.792,18)

Perhitungan atas penyisihan Investasi Non Permanen Tahun 2019 atas Pinjaman kepada Perusahaan Daerah adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 74 Klasifikasi Penyisihan Pinjaman kepada Perusahaan Daerah (PDAM)

(dalam Rupiah)

Uraian	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	Jatuh tempo pada periode > 2 s.d 3 Tahun	Jatuh tempo pada periode >3 s.d 4 Tahun	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	Jumlah
Pinjaman kepada Perusahaan Daerah (PDAM)	164.174.000,00	82.087.000,00	82.087.000,00	450.271.000,00	778.619.000,00
% penyisihan	0,50%	10,00%	50,00%	100,00%	100,00%
Penyisihan Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	820.870,00	8.208.700,00	41.043.500,00	450.271.000,00	500.344.070,00
Net Realizable Value (NRV)	163.353.130,00	73.878.300,00	41.043.500,00	0,00	278.274.930,00

Perhitungan atas nilai bersih Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Air Minum dilakukan dengan mengelompokkan investasi yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*) yaitu jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun sebesar Rp164.174.000,00, jatuh tempo pada periode >2 s.d 3 Tahun sebesar Rp82.087.000,00, jatuh tempo pada periode >3 s.d 4 Tahun sebesar Rp82.087.000,00, jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun sebesar Rp450.271.000,00.

Perhitungan atas penyisihan Investasi Dana Bergulir Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 75 Klasifikasi Penyisihan Investasi Non Permanen

(Investasi Dana Bergulir Tahun 2019)

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
A.	Investasi Dana Bergulir						
1	Pemberdayaan Masyarakat Pasar	0,00	0,00	0,00	0,00	95.030.000,00	95.030.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
2	Penyaluran Modal Kerja Pemberdayaan UKM melalui BPR Jatim Cabang Blitar	0,00	0,00	0,00	0,00	40.071.250,00	40.071.250,00
3	Penyaluran Kredit Pemberdayaan Usaha Kecil melalui BNI 46	31.604.343,00	0,00	0,00	0,00	518.395.657,00	550.000.000,00
4	Pinjaman Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan UM	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085.609.717,67	5.085.609.717,67
	Jumlah Investasi Dana Bergulir	31.604.343,00	0,00	0,00	0,00	5.739.106.624,67	5.770.710.967,67
	% penyisihan	0%	5%	15%	40%	70%	
	Penyisihan investasi dana bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017.374.637,27	4.017.374.637,27
	Net Realizabel Value (NRV)	31.604.343,00	0,00	0,00	0,00	1.721.731.987,40	1.753.336.330,40

Berdasarkan tabel di atas, penyajian Investasi Dana Bergulir dalam kategori lancar sebesar Rp31.604.343,00 kategori dalam perhatian khusus Rp0,00, kategori kurang lancar sebesar Rp0,00, kategori diragukan sebesar Rp0,00 dan kategori macet sebesar Rp5.739.106.624,67. Rincian atas Investasi Dana Bergulir terlampir pada **Lampiran 18** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
2. Investasi Permanen	(Rp)	(Rp)
	24.746.200.545,04	22.452.712.700,58

Investasi Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen ini dinilai dengan menggunakan metode ekuitas (*Equity Method*) untuk Penyertaan Modal pada PDAM dan PD BPR Artha Praja. Sedangkan Penyertaan modal pada PT Bank Jatim masih menggunakan metode biaya (*Cost Method*).



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2019 sebesar Rp24.746.200.545,04 atau naik 10,21% dibandingkan dengan saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2018 sebesar Rp22.452.712.700,58.

Rincian saldo Investasi Permanen dibandingkan dengan Tahun lalu adalah sebagai berikut :

Tabel 76 Rincian Investasi Permanen Per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim - Metode Biaya	4.246.771.092,11	4.246.771.092,11
2	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM - Metode Ekuitas	10.977.548.550,93	8.537.938.844,19
3	Penyertaan Modal pada PD BPR Artha Praja -Metode Ekuitas	9.521.880.902,00	9.668.002.764,28
Jumlah		24.746.200.545,04	22.452.712.700,58

Penjelasan rinci atas Investasi Permanen adalah sebagai berikut:

Penyertaan Modal	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1. Pemerintah Daerah	(Rp)	(Rp)
pada PT Bank Jatim	4.246.771.092,11	4.246.771.092,11

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Jatim per 31 Desember 2019 sama dengan saldo per 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp4.246.771.092,11. Penilaian Penyertaan Modal pada PT Bank Jatim menggunakan metode biaya. Nilai tersebut merupakan penyertaan modal sebanyak 16.987.084 lembar saham berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahun an Tahun Buku 2018 PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tanggal 26 April 2019 No 99. Pada Tahun 2019, Pemerintah Kota Blitar menerima manfaat ekonomis dari investasi tersebut berupa dividen sebesar Rp774.780.901,24 atas bagian laba Tahun buku 2018.

Penyertaan Modal	31 Desember 2019	31 Desember 2018
2. Pemerintah Daerah	(Rp)	(Rp)
pada PDAM	10.977.548.550,93	8.537.938.844,19

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.977.548.550,93. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM naik sebesar Rp2.439.609.706,74 atau 28,57% dari saldo per 31 Desember 2019. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PDAM dihitung dengan menggunakan Metode Ekuitas dengan penjelasan sebagai berikut:

d. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Blitar	Rp
32.782.368.963,58	
s/d Tahun 2018	
e. Penyertaan Modal Pemerintah Kota Blitar	Rp
2.500.000.000,00	
pada Tahun 2019	
f. Penyertaan Hibah dari Pemerintah Pusat	Rp
5.981.471.897,50	
g. Hibah Pemerintah Provinsi Jatim	Rp
1.033.276.800,00	
h. Hibah Pemerintah Kota Blitar	<u>Rp</u>
214.753.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal Kota Blitar	Rp
42.511.870.661,08	
1) Pengukuran kembali imbalan pasca kerja	Rp
(170.297.497,00)	
2) Rugi s.d 31 Desember 2018	Rp
(30.264.306.255,62)	
3) Rugi Tahun 2019	<u>Rp</u>
(1.099.718.357,53)	
Jumlah Ekuitas pada PDAM	Rp
10.977.548.550,93	

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Blitar per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp42.511.870.661,08 terdiri dari modal pendirian dan pembangunan sarana prasarana pengelolaan air minum. Pada Tahun 2019 telah dicairkan penyertaan Modal kepada PDAM sebesar Rp2.500.000.000,00 sesuai SP2D Nomor 24554/LS PEMBIAYAAN DAU tanggal 23 Desember 2019.

Sumber pencatatan penyertaan modal kepada PDAM diuraikan sebagai berikut:

- 1) Penyertaan modal dari Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp32.782.368.963,58, berdasarkan:
 - a) Hibah Non Kas dari Pusat atas utang PDAM sebesar Rp19.284.423.541,58 berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- b) Penyertaan modal dari penyeteroran ke PDAM sebesar Rp13.497.945.422,00.
- 2) Penyertaan modal Pemerintah Kota Blitar ke PDAM pada Tahun 2019 sebesar Rp2.500.000.000,00 berdasarkan SP2D Nomor 24554/LS PEMBIAYAAN DAU Tanggal 23 Desember 2019.
- 3) Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5.981.471.897,50, berdasarkan:
 - a) Berita Acara Penyerahan Proyek Dari Walikota Blitar kepada Direktur Utama PDAM Nomor 024/26/422.021/2000 Tanggal 22 Juni 2000 nilai atas penyertaan modal pemerintah pusat sebesar Rp5.715.623.000,00;
 - b) Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sarana Air Minum Jawa Timur Nomor 02/BAST/PK-PAM.JT/2010 Tanggal 10 Nopember 2010 sebesar Rp167.917.200,00;
 - c) Dokumen lainnya yang masih ditelusuri dokumen berita acara serah terimanya sebesar Rp97.931.697,50.
- 4) Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp1.033.276.800,00, berdasarkan:
 - a) Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Sarana Air Minum Jawa Timur Nomor 29/BAST/PK-PAM.JT/2008 Tanggal 15 Desember 2008 sebesar Rp258.744.200,00;
 - b) BAST Pengelolaan Sementara Hasil Pembangunan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kota Blitar Nomor 602.1/750/121/PP/2004 Tanggal 5 Oktober 2004 antara Kepala Sub Dinas Pengembangan Perkotaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Pembangunan Prasarana Perkotaan Dinas Permukiman Propinsi Jawa Timur TA 2004 kepada Plt. Direktur Utama PDAM sebesar Rp645.389.800,00;
 - c) Surat perintah mengeluarkan barang Tanggal 29 April dan 11 Mei 2011 atas pekerjaan SNVT Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Jawa Timur di Kota Blitar sebesar Rp31.142.800,00;
 - d) Dokumen lainnya yang masih ditelusuri dokumen berita acara serah terimanya sebesar Rp98.000.000,00.
- 5) Hibah dari Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp214.753.000,00, berdasarkan:
 - a) Dokumen bantuan instalasi perpompaan sesuai SK Walikota Blitar Nomor 188/249/HK/422.010/06 tanggal 12 Mei 2006 sebesar Rp38.500.000,00;
 - b) Proposal Bantuan Renovasi Gedung Kantor PDAM Pagar Pengaman, Pengadaan—Meubelair pada Tahun 2011 sebesar Rp176.253.000,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. Penyertaan Modal pada PD BPR Artha Praja	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
	<u>9.521.880.902,00</u>	<u>9.668.002.764,28</u>

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR Artha Praja per 31 Desember 2019 sebesar Rp9.521.880.902,00. Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BPR Artha Praja turun sebesar Rp146.121.862,28 atau 1,51% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp9.668.002.764,28. Penurunan ini disebabkan penurunan laba pada BPR Artha Praja Kota Blitar yang semula laba pada Tahun 2018 sebesar Rp788.576.635,00, pada Tahun 2019 hanya sebesar Rp444.642.784.

Perusahaan Daerah BPR Artha Praja Kota Blitar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Pemerintah Kota Blitar tanggal 21 Juli 2004. Perubahan anggaran dasar terakhir adalah Keputusan Walikota Blitar Nomor 188/791/HK/410.010.2/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Praja Kota Blitar. Kepemilikan modal Pemerintah Kota Blitar pada BPR Artha Praja adalah 100% sehingga penilaian investasi menggunakan metode ekuitas dengan perhitungan sebagai berikut:

1) Nilai Penyertaan Modal s/d 31 Desember 2019	Rp	8.000.000.000,00
2) Akumulasi Laba/(Rugi) Tahun 2019	Rp	1.521.880.902,00
Nilai Investasi per 31 Desember 2019	Rp	<u>9.521.880.902,00</u>

Nilai Penyertaan Modal s/d 31 Desember 2018 dirinci sebagai berikut:

1) Investasi awal Tahun 2004	Rp	1.000.000.000,00
2) Penambahan modal Tahun 2010	Rp	250.000.000,00
3) Penambahan modal Tahun 2012	Rp	750.000.000,00
4) Penambahan modal Tahun 2015	Rp	1.500.000.000,00
5) Penambahan modal Tahun 2016	Rp	2.000.000.000,00
6) Penambahan modal Tahun 2017	Rp	1.000.000.000,00
7) Penambahan modal Tahun 2018	Rp	1.500.000.000,00
Jumlah	Rp	<u>8.000.000.000,00</u>

Sedangkan akumulasi Laba/(Rugi) Tahun 2019 dirinci sebagai berikut:

1) Cadangan Umum	Rp	735.763.218,00
2) Cadangan Tujuan	Rp	735.763.218,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3)	Laba bersih per 31/12/2019	Rp	444.642.784,00
4)	Pembagian Dividen untuk Daerah	Rp	(394.288.318,00)
	Jumlah	Rp	1.521.880.902,00

Pada Tahun 2019, Pemerintah Kota Blitar menerima manfaat ekonomis dari investasi tersebut berupa dividen sebesar Rp394.288.318,00 atas bagian laba Tahun 2018.

7.5.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD, melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya, dan dari sitaan atau rampasan.

Pengelolaan Aset Daerah/Barang Milik Daerah guna menjamin kepastian, ketepatan dalam pencatatan dan akurasi data sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah maupun PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah akan dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar.

Tabel 77 Daftar Mutasi Aset Tetap Tahun 2019

(dalam Rupiah)

No	Aset Tetap	Saldo 31 Desember 2018	Mutasi Tambah	Mutasi Kurang	Saldo 31 Desember 2019
1	Tanah	1.163.090.256.750,00	78.316.031.581,00	96.496.000,00	1.241.309.792.331,00
2	Peralatan dan Mesin	377.728.273.694,95	95.993.454.582,41	11.096.907.490,44	462.624.820.786,92
3	Gedung dan Bangunan	684.963.253.453,08	195.913.833.078,38	68.347.967.193,42	812.529.119.338,04
4	Jalan, irigasi dan Jaringan	690.220.967.239,42	62.768.200.549,39	4.443.954.852,90	748.545.212.935,91
5	Aset Tetap lainnya	35.026.214.600,80	5.733.626.052,90	3.953.120.034,36	36.806.720.619,34
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.028.032.900,00	48.704.408.367,05	53.914.945.212,05	8.817.496.055,00
7	Akumulasi Penyusutan	(850.000.395.485,58)	(129.370.443.644,50)	(12.009.413.717,32)	(967.361.425.412,76)
Jumlah Aset Tetap		2.115.056.603.152,67	358.059.110.566,63	129.843.977.065,85	2.343.271.736.653,45

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.343.271.736.653,45 atau naik sebesar 10,79% dibandingkan dengan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.115.056.603.152,67. Selanjutnya informasi terkait rincian Aset Tetap per SKPD disajikan pada **Lampiran 19** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Rincian Aset Tetap per jenis aset adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Tanah	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
	<u>1.241.309.792.331,00</u>	<u>1.163.090.256.750,00</u>

Saldo Tanah per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.241.309.792.331,00 atau naik 6,73% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.163.090.256.750,00. Rincian mutasi Tanah Tahun 2019 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018 **Rp 1.163.090.256.750,00**

Mutasi Tambah:

1. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2019	Rp	7.034.003.140,00
2. Kapitalisasi belanja jasa sertifikasi tanah berupa :		
a. Jasa sertifikasi tanah istana gebang pada Dinas Pariwisata	Rp	610.000,00
b. Jasa sertifikasi tanah Taman Kehati pada Dinas Lingkungan Hidup	Rp	1.668.760,00
3. Kapitalisasi belanja jasa administrasi pemungutan PBB pada tanah sawah di Kelurahan Blitar	Rp	24.371.685,00
4. Hibah tanah makam aryo blitar dari LPMK Kota Blitar	Rp	320.625.000,00
5. Hibah tanah sawah di Kelurahan Blitar	Rp	935.307.000,00
6. Koreksi tambah aset karena inventarisasi tanah berupa 1 bidang tanah yang belum tercatat pada :		
a. Kelurahan Karang Sari berupa tanah eks bengkok kepala desa sebesar Rp1,00	Rp	1,00
7. Koreksi tambah 33 bidang tanah yang telah bersertifikat sesuai SK Wali Kota Blitar Nomor 188/246/HK/410.010.2/2020 tanggal 25 Juni 2020 pada :		
a. Kelurahan Bendogerit berupa tanah pengembangan kawasan MBK sebesar Rp2.079.168.000,00 (sertifikat nomor 00075 tanggal 4 april 2006) dan tanah kios utara MBK sebesar Rp1.042.132.000,00 (sertifikat nomor 00101)	Rp	4.836.104.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- tanggal 23 September 2010)
dan Rp1.714.804.000,00
(sertifikat nomor 00102
tanggal 23 September 2010)
- b. Kelurahan Gedog berupa
tanah pemakaman umum
sebesar Rp536.000.000,00
(sertifikat nomor 00026
tanggal 15 Juni 2002),
Rp474.695.000,00
(sertifikat nomor 00027
tanggal 15 Juni 2002) dan Rp
1.454.721.000,00
Rp377.696.000,00 (sertifikat
nomor 00053 tanggal 21
September 2007) serta tanah
balai pertemuan sebesar
Rp66.330.000,00 (sertifikat
nomor 00028 tanggal 15 Juni
2002)
- c. Kelurahan Bendo berupa
tanah rumah dinas
Kecamatan Kepanjenkidul Rp
98.982.000,00
(sertifikat nomor 6 tanggal
29 Agustus 1985)
- d. Kelurahan Kauman berupa
tanah pertanian sebesar
Rp17.691.796.000,00
(sertifikat nomor 00019
tanggal 16 Januari 2007),
Rp654.524.000,00 (sertifikat
nomor 00020 tanggal 31 Juli
2007) dan tanah KUA Rp
18.599.902.000,00
Kepanjenkidul sebesar
Rp253.582.000,00 (sertifikat
nomor 00021 tanggal 30
Januari 2008)
- e. Kelurahan Ngadirejo berupa
tanah sumur bor Ngadirejo
Rp159.520.000,00 (sertifikat
nomor 00019 tanggal 3
April 2003), sumur bor
Bangsongan
Rp43.680.000,00 (sertifikat Rp
511.000.000,00
nomor 00013 tanggal 29
Maret 2003) dan tanah
pertanian sebesar
Rp307.800.000,00 (sertifikat
nomor 00100 tanggal 29 Juli
2010)
- f. Kelurahan Sentul berupa Rp
1.507.500.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- tanah eks bengkok
(sertifikat nomor 00028
tanggal 24 Maret 2003)
- g. Kelurahan Tanggung berupa tanah eks bengkok
(sertifikat nomor 1 tanggal 5 Desember 1989) Rp 505.113.000,00
- h. Kelurahan Karang Sari berupa tanah pertanian
(sertifikat nomor 00024 tanggal 9 Desember 2009) Rp 318.060.000,00
- i. Kelurahan Pakunden berupa tanah Fasilitas Umum " KALIMAS INDAH" sebesar Rp180.570.000,00 (sertifikat nomor 00796 tanggal 12 Nopember 2004), tanah Mushola " KALIMAS INDAH " sebesar Rp77.321.000,00 (sertifikat nomor 00790 tanggal 12 Nopember 2004), tanah pertanian sebesar Rp588.936.000,00 (sertifikat nomor 00101 tanggal 17 April 2012) dan dan Rp4.933.728.000,00 (sertifikat nomor 00103 tanggal 17 April 2012), tanah Gedung pramuka sebesar Rp1.209.356.000,00 (sertifikat nomor 00102 tanggal 17 April 2012) Rp 6.989.911.000,00
- j. Kelurahan Tanjungsari berupa tanah Tempat Ibadah (Masjid) sebesar Rp468.556.000,00 (sertifikat nomor 33 tanggal 16 Oktober 1998), tanah pertanian sebesar Rp2.260.233.000,00 (sertifikat nomor 00050 tanggal 29 Juli 2010), tanah jalan fasum perumahan tanjungsari sebesar Rp334.014.000,00 (sertifikat nomor 00027 tanggal 01 Mei 2009) dan sisa luas tanah sebesar Rp2.606.061.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- (sertifikat nomor 00110 tanggal 29 Oktober 2009)
- k. Kelurahan Sukorejo berupa tanah Pasar Dimoro (sertifikat nomor 00039 tanggal 28 Juli 2003) Rp 12.179.304.000,00
- l. Kelurahan Turi berupa tanah pertanian (sertifikat nomor 00017 tanggal 9 Desember 2009) Rp 697.680.000,00
- m. Kelurahan sananwetan berupa tanah balai RW karanglo sebesar Rp559.554.000,00 (sertifikat nomor 100 tanggal 28 Pebruari 2013), tanah TK PKK Karanglo sebesar Rp243.261.000,00 (sertifikat nomor 101 tanggal 28 Pebruari 2013), tanah Kantor KPT dan Dinas Pendapatan sebesar Rp2.028.786.000,00 (sertifikat nomor 102 tanggal 28 Pebruari 2013), tanah Puskesmas Sananwetan dan Kesosnaker sebesar Rp2.674.260.000,00 (sertifikat nomor 104 tanggal 28 Pebruari 2013), dan tanah KUD Sananwetan sebesar Rp1.573.390.000,00 (sertifikat nomor 107 tanggal 31 Desember 2014) Rp 7.079.251.000,00
8. Koreksi tambah 5 bidang tanah yang semula bernilai Rp1,00 menjadi bernilai sesuai dengan SK Wali Kota Blitar Nomor 188/246/HK/410.010.2/2020 tanggal 25 Juni 2020 dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kelurahan Sananwetan berupa tanah eks bengkok Kel. Sananwetan yang dimanfaatkan sebagai lahan sawah di jalan Sumatra Rp 4.556.499.999,00
- b. Kelurahan Turi berupa tanah eks bengkok Kel. Turi yang dimanfaatkan sebagai lahan sawah Rp 926.249.999,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

c. Kelurahan Turi berupa tanah hibah masyarakat yang dimanfaatkan untuk makam	Rp	243.104.999,00
d. Kelurahan Gedog berupa tanah aigendom yang dimanfaatkan untuk pengolahan sampah	Rp	2.040.599.999,00
e. Kelurahan Karang Sari berupa tanah yang dimanfaatkan untuk agro mini	Rp	1.786.598.999,00
Jumlah	Rp	78.316.031.581,00

Mutasi Kurang:

1. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum berupa :		
a. Appraisal (penilaian) Tanah untuk pasar sayur Kelurahan Rembang	Rp	23.485.000,00
b. Appraisal (penilaian) Tanah Perluasan Kantor Kelurahan Sentul	Rp	29.205.000,00
c. Appraisal (penilaian) Tanah Sirkuit Kelurahan Sentul	Rp	43.806.000,00
Jumlah	Rp	96.496.000,00

Jumlah mutasi bersih Aset Tetap – Tanah Rp 78.219.535.581,00

Saldo Akhir per 31 Desember 2019 Rp **1.241.309.792.331,00**

2. Peralatan dan Mesin	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
	<u>462.624.820.786,92</u>	<u>377.728.273.694,95</u>

Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp462.624.820.786,92 atau naik 22,48% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp377.728.273.694,95. Rincian mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2019 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018 Rp **377.728.273.694,95**

Mutasi Tambah:

1. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2019	Rp	79.977.360.350,00
2. Realisasi Belanja Modal BOS TA 2019	Rp	1.531.588.499,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. Realisasi Belanja Modal dari Dana Hibah UKS berupa komposter pada SMPN 1	Rp	2.500.000,00
4. Belanja Barang dan Jasa BOS yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin pada :	Rp	
a. SMPN 2 berupa komputer <i>server, switch hub</i> , konektor dan <i>hard disk</i> yang dianggarkan pada belanja pemeliharaan	Rp	18.356.000,00
b. Dinas Pendidikan berupa		
- gorden dan rel yang dianggarkan pada belanja peralatan kebersihan (SDN Tlumpu)	Rp	1.175.000,00
- Bel listrik pada SDN Klampok	Rp	2.945.000,00
5. Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Peralatan dan Mesin pada :		
a. Dinas Perhubungan berupa :		
- Pembelian meja kantor yang dianggarkan pada belanja pemeliharaan	Rp	25.000.000,00
- Penambahan nilai kendaraan bermotor berupa biaya balik nama dan BPKB kendaraan yang dianggarkan pada belanja bea balik nama kendaraan	Rp	29.091.900,00
6. Reklasifikasi antar akun aset tetap ke Aset Tetap-Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap-Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.072.614.035,00 pada :		
a. Dinas Pendidikan berupa papan penunjuk sekolah	Rp	96.949.281,00
b. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik berupa wahana	Rp	20.385.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

playground anak		
c. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo berupa peralatan kedokteran	Rp	3.934.657.754,00
d. Badan Kesatuan Bangsa berupa rambu-rambu	Rp	20.622.000,00
7. Reklasifikasi antar akun aset tetap Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan berupa rambu-rambu akibat adanya perubahan kodefikasi Permendagri 108 Tahun 2016 sebesar Rp7.779.081.797,37 pada :		
a. Dinas Perhubungan	Rp	7.733.906.797,37
b. Dinas Pekerjaan Umum	Rp	7.200.000,00
c. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	Rp	20.235.000,00
d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp	15.225.000,00
e. Kecamatan Kepanjenkidul	Rp	1.715.000,00
f. Kelurahan Tanggung	Rp	800.000,00
8. Reklasifikasi antar akun aset tetap Peralatan dan Mesin dari Jalan, Irigasi, Jaringan pada :		
a. Kelurahan Gedog berupa modem internet	Rp	7.497.500,00
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa penguat sinyal	Rp	11.825.000,00
9. Hibah APBN berupa bus sekolah bantuan dari Kementerian Perhubungan dengan nomor polisi AG 7265 PP Tahun 2018 pada Dinas Perhubungan	Rp	670.000.000,00
10. Reklas dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai dengan ketentuan pada Permendagri 108 Tahun 2016 sebesar Rp1.864.419.501,04		
a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	8.955.000,00
b. Bagian Umum	Rp	37.705.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana	Rp	19.800.000,00
d. BPKAD	Rp	9.761.000,00
e. Dinas Pendidikan	Rp	550.886.000,00
f. Dinas P3AP2KB	Rp	41.653.000,00
g. Dinas Perhubungan	Rp	46.171.000,00
h. Dinas Kesehatan	Rp	39.200.000,00
i. Dinas Koperasi	Rp	43.574.501,04
j. Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp	188.639.580,00
k. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	23.205.180,00
l. Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp	444.443.300,00
m. Dinas Lingkungan Hidup	Rp	188.608.440,00
n. Kecamatan Kapanjenkidul	Rp	18.962.800,00
o. Kecamatan Sananwetan	Rp	4.717.800,00
p. Kecamatan Sukorejo	Rp	14.328.000,00
q. Kelurahan Blitar	Rp	11.360.000,00
r. Kelurahan Karang Sari	Rp	300.000,00
s. Kelurahan Kapanjenkidul	Rp	250.000,00
t. Kelurahan Kauman	Rp	7.400.000,00
u. Kelurahan Pakunden	Rp	1.500.000,00
v. Kelurahan Ngadirejo	Rp	2.145.800,00
w. Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	3.380.000,00
x. SMP 1	Rp	14.003.000,00
y. SMP 2	Rp	18.292.100,00
z. SMP 3	Rp	24.096.000,00
aa. SMP 4	Rp	36.961.000,00
bb. SMP 5	Rp	27.307.000,00
cc. SMP 6	Rp	16.958.000,00
dd. SMP 7	Rp	1.750.000,00
ee. SMP 8	Rp	10.631.000,00
ff. SMP 9	Rp	7.475.000,00
Jumlah	Rp	95.993.454.582,41

Mutasi Kurang:

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak diakui sebagai aset tetap karena tidak sesuai dengan ketentuan kapitalisasi



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kebijakan	Akuntansi		
Pemerintah Kota Blitar			
a.	APBD	Rp	2.300.648.838,30
b.	BOS	Rp	185.522.324,00
2.	Reklasifikasi aset tetap Peralatan dan Mesin ke Beban Persediaan berupa :		
a.	Belanja bahan kesehatan (<i>heacting set</i>) pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	Rp	22.750.000,00
b.	Belanja alat listrik (baterai) pada Inspektorat	Rp	2.677.188,00
3.	Reklasifikasi antar aset tetap Peralatan dan Mesin BOS ke Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp32.483.100,00 pada :		
a.	Dinas Pendidikan berupa alat olahraga lainnya	Rp	21.383.100,00
b.	UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 berupa alat olahraga lainnya	Rp	2.880.000,00
c.	UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 berupa alat olahraga lainnya	Rp	475.000,00
d.	UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 berupa alat olahraga lainnya	Rp	4.770.000,00
e.	UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 berupa alat olahraga lainnya	Rp	2.975.000,00
4.	Reklasifikasi aset tetap Peralatan dan Mesin BOS ke Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud pada UPT Sekolah Menengan Pertama Negeri 1 berupa software aplikasi cbt	Rp	6.000.000,00
5.	Reklasifikasi aset tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya - Aset Lain-lain pada :		
a.	Badan Kepegawaian Daerah berupa usulan penghapusan laptop dan eksternal hardisk yang hilang	Rp	44.703.630,00
6.	Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada :		
a.	Bagian Perekonomian	Rp	80.000.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dan Kesejahteraan Rakyat berupa papan data sesuai dengan SK Nomor 188/41/HK/410.010.2/2019		
b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdasarkan SK Nomor 188.4/KEP/410.010.2/2019	Rp	2.152.409.900,00
7. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya Berupa Alat Samroh pada Dinas Pendidikan (SDN Pakunden 1)	Rp	1.500.000,00
8. Reklasifikasi aset tetap Peralatan dan Mesin ke aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik berupa Fiber Optik yang masih direalisasi 70% dari nilai kontrak	Rp	5.959.336.400,00
9. Dampak Kumulatif atas perubahan kodefikasi barang milik daerah berdasar Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 sebesar Rp170.374.714,14 pada :		
a. Badan Kepegawaian Daerah (baterai)	Rp	6.365.000,00
b. Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (baterai)	Rp	46.072.291,00
c. Bagian Umum (baterai)	Rp	3.696.000,00
d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (baterai)	Rp	5.000.000,00
e. Dinas Ketahanan Pangan (baterai)	Rp	820.000,00
f. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (baterai)	Rp	1.050.000,00
g. Dinas Pariwisata (baterai)	Rp	2.460.000,00
h. Dinas Perhubungan (baterai)	Rp	4.380.000,00
i. Kecamatan Sananwetan	Rp	975.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

(baterai)		
j. Kelurahan Kauman (baterai)	Rp	2.270.000,00
k. Kelurahan Plosokerep (baterai)	Rp	2.646.800,00
l. Kelurahan Sananwetan (baterai)	Rp	1.000.000,00
m. Kelurahan Sentul (baterai)	Rp	1.500.000,00
n. Kelurahan Sukorejo (baterai)	Rp	1.892.800,00
o. Satuan Polisi Pamong Praja (baterai)	Rp	2.092.857,14
p. SMPN 5 (baterai)	Rp	1.750.000,00
q. Dinas Pendidikan (baterai)	Rp	6.780.000,00
r. Badan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (jaket kulit)	Rp	17.425.000,00
s. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo (heating set)	Rp	16.854.166,00
t. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo (heating set)	Rp	45.344.800,00
10. Dampak kumulatif atas aset tetap Peralatan dan Mesin yang ternyata teridentifikasi sebagai barang persediaan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 dan telah dipergunakan berupa kabel listrik sebesar Rp60.046.396,00 pada :		
a. Bagian Humas	Rp	1.500.000,00
b. Dinas Perhubungan	Rp	1.500.000,00
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	300.000,00
d. Dinas Sosial	Rp	1.000.000,00
e. Sekretariat DPRD	Rp	1.250.000,00
f. Kelurahan Sukorejo	Rp	84.000,00
g. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	Rp	3.503.500,00
h. Bagian Umum	Rp	4.772.709,00
i. SMPN 1	Rp	22.272.642,00
j. Dinas Pendidikan	Rp	23.863.545,00
11. Reklas Aset Tetap Peralatan		



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dan Mesin dari Aset Tetap Lainnya sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp78.755.000,00 pada :

a. DIKDA	Rp	24.589.400,00		
b. Dinas P3AP2KB	Rp	3.775.000,00		
c. Dispora	Rp	4.560.000,00		
d. Kec. Kepanjenkidul	Rp	8.965.000,00		
e. Kec. Sananwetan	Rp	1.252.800,00		
f. Kec. Sukorejo	Rp	242.000,00		
g. Kel. Blitar	Rp	350.000,00		
h. Kel. Karang Sari	Rp	300.000,00		
i. Kel. Kepanjenkidul	Rp	250.000,00		
j. Kel. Ngadirejo	Rp	2.145.800,00		
k. Satpol PP	Rp	480.000,00		
l. SMP 1	Rp	300.000,00		
m. SMP 2	Rp	3.823.000,00		
n. SMP 3	Rp	4.120.000,00		
o. SMP 4	Rp	14.840.000,00		
p. SMP 5	Rp	2.157.000,00		
q. SMP 6	Rp	3.880.000,00		
r. SMP 8	Rp	1.050.000,00		
s. SMP 9	Rp	1.375.000,00		
Jumlah	Rp	11.096.907.490,44		
Jumlah mutasi bersih Aset Tetap – Peralatan dan Mesin			Rp	84.896.547.091,97
Saldo Akhir per 31 Desember 2019			Rp	462.624.820.786,92

3. Gedung dan Bangunan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
	<u>812.529.119.338,04</u>	<u>684.963.253.453,08</u>

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar Rp812.529.119.338,04 atau naik 15,70% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp684.963.253.453,08 Rincian mutasi Gedung dan Bangunan Tahun 2019 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018		Rp	684.963.253.453,08
<u>Mutasi Tambah:</u>			
1. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2019	Rp	100.520.199.055,33	
2. Realisasi Belanja Modal BOS TA 2019	Rp	96.529.000,00	



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp52.903.069.212,05 terdiri dari :
- a. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp100.710.000,00 berupa :
- Perencanaan taman rembang JL.CEMARA KEL.REMBANG Rp 40.000.000,00
 - Jasa perencanaan pembangunan taman eks Kelurahan Bendo TA 2017 Rp 15.125.000,00
 - Jasa perencanaan pembangunan taman eks Pasar Pahing TA 2017 Rp 27.575.000,00
 - honor pembangunan Pasar Pahing Rp 3.060.000,00
 - honor pembangunan taman eks Kelurahan Bendo Rp 2.550.000,00
 - review perencanaan Taman Rembang Rp 12.400.000,00
- b. Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp215.094.000,00 berupa :
- Perencanaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 3 Rp 122.792.000,00
 - Perencanaan Gedung Kantor Kelurahan Karangtengah (KOREKSI BPK) Rp 42.582.000,00
 - Studi Kelayakan Relokasi Kantor Kelurahan Karangtengah Rp 49.720.000,00
- c. Dinas Pendidikan sebesar Rp11.895.110.900,00 berupa :
- Study Kelayakan SMPN 3 Rp 44.880.000,00
 - Masterplan SMPN 3 Rp 122.500.000,00
 - bangunan gedung SMPN 3 Rp 11.726.080.900,00
 - atribusi jasa konsultan Rp 1.650.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

			pembangunan SMPN 3		
d.	Kelurahan Tanggung berupa pondasi pagar	Rp		18.000.000,00	
e.	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana berupa <i>detail engineering design</i> renovasi gedung bakesbangpol	Rp		24.750.000,00	
f.	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo berupa perencanaan ruang hemodialisa	Rp		49.600.000,00	
g.	Pasar Legi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang sudah dimanfaatkan	Rp		40.599.804.312,05	
4.	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Aset Tetap-Jalan, Irigasi, Jaringan ke Aset Tetap - Gedung dan Bangunan sebesar Rp244.498.000,00 pada :				
a.	Dinas Pendidikan berupa pembelian atap galvalum di SDN Sentul 4 dari dana BOS	Rp		5.500.000,00	
b.	UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 berupa bangunan kolam ikan dari dana BOS	Rp		4.327.000,00	
c.	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik berupa pembangunan tempat wudhu	Rp		10.865.300,00	
d.	Renovasi Pos RW.II pada Kelurahan Kepanjenlor	Rp		20.000.000,00	
e.	Gapura pada Kelurahan Sentul	Rp		50.313.200,00	
f.	Kamar mandi pada Dinas Pendidikan	Rp		73.492.500,00	
g.	MCK pada Kelurahan Kepanjenlor	Rp		80.000.000,00	
5.	Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa MASTERPLAN PENGEMBANGAN	Rp		156.293.000,00	



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

WATERPARK SUMBER
UDEL

6. Hibah APBN pada UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 sebesar Rp990.764.000,00 berupa :		
a. Renovasi gedung Ruang keterampilan	Rp	86.441.468,00
b. Renovasi gedung Ruang koperasi Siswa.	Rp	159.164.689,00
c. Renovasi gedung Ruang laboratorium siswa dan kamar mandi siswa lantai 1	Rp	175.048.419,00
d. Renovasi gedung Ruang bahasa	Rp	242.368.536,00
e. Renovasi gedung ruang perpustakaan dan ruang serbaguna (aula)	Rp	327.740.888,00
7. Hibah dari LPMK Kelurahan Blitar berupa bangunan gazebo di Makam Aryo Blitar	Rp	150.000.000,00
8. Hibah Gedung Rusunawa sesuai 600.1/BA/DC/2019 tanggal 11 Desember 2019	Rp	40.811.297.811,00
9. Reklasifikasi Pagar Makam Aryo Blitar dari Aset Tetap Lainnya (Aset Dalam Renovasi) ke Gedung dan Bangunan pada Kelurahan Blitar	Rp	41.183.000,00
Jumlah	Rp	195.913.833.078,38

Mutasi Kurang:

1. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang tidak diakui sebagai aset tetap karena tidak sesuai dengan ketentuan kapitalisasi Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar:		
a. APBD	Rp	1.372.440.890,00
b. BOS	Rp	91.382.000,00
2. Reklasifikasi antar akun aset tetap ke Aset Tetap-Peralatan dan Mesin dari Aset Tetap-Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.072.614.035,00 pada :		
a. Dinas Pendidikan berupa papan penunjuk sekolah	Rp	96.949.281,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

b.	Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik berupa wahana <i>playground</i> anak	Rp	20.385.000,00
c.	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo berupa peralatan kedokteran	Rp	3.934.657.754,00
d.	Badan Kesatuan Bangsa berupa rambu-rambu	Rp	20.622.000,00
3.	Reklasifikasi antar akun aset tetap ke Aset Tetap-Jalan, Irigasi, Jaringan dari Aset Tetap-Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.133.777.845,00 pada :		
a.	Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo sebesar Rp349.745.000,00 berupa :		
-	Pengawasan dan Perencanaan Jaringan Listrik Lantai 3	Rp	9.790.000,00
-	Jaringan Listrik lantai 3	Rp	339.955.000,00
b.	Kelurahan Ngadirejo sebesar Rp250.000.000,00 berupa :		
-	Drainase dan plat duiker Agus Salim RT 03 RW. 01	Rp	30.000.000,00
-	Saluran U Sam Ratu Langi RT 01 RW. 01	Rp	30.000.000,00
-	Talud jalan makam Ci Mandiri RT. 02 RW. 04	Rp	30.000.000,00
-	Drainase U dan plat duiker M yamin RT. 03 RW. 02	Rp	40.000.000,00
-	Saluran irigasi RT.01 RW.03		40.000.000,00
-	MCK dekat lapangan sepak bola	Rp	80.000.000,00
c.	Dinas Ketahanan Pangan berupa Paving dan Ornamen Kebun Edukasi Pertanian Rp3.674.000,00, Pengawasan Rp21.066.150,00, fisik Rp308.592.695,00, honor	Rp	337.172.845,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	panitia Rp3.840.000,00		
d.	Kelurahan Sukorejo berupa Pembangunan <i>joging track</i> di lapangan RW I Kelurahan Sukorejo	Rp	166.490.000,00
e.	Kelurahan Sananwetan berupa saluran air	Rp	30.370.000,00
4.	Penghapusan Aset Tetap- Gedung dan Bangunan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa penghapusan kantor pasar legi karena kebakaran sesuai dengan SK Nomor 188.4/KEP/410.010.2/2019	Rp	11.184.345.000,00
5.	Reklasifikasi Aset Tetap- Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp40.694.644.367,05 pada :		
a.	Bagian Umum sebesar Rp105.222.700,00 berupa :		
-	Perencanaan renovasi gedung PKK	Rp	5.986.200,00
-	Perencanaan Renovasi Mushola setda Kota Blitar	Rp	99.236.500,00
b.	Sekretariat DPRD berupa Perencanaan rehabilitasi ruang AKD dan rehab kamar mandi/WC	Rp	31.509.500,00
c.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah berupa Masterplan Pembangunan Gedung DPRD	Rp	196.368.500,00
d.	Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp515.546.355 berupa :		
-	Penyusunan andal lalin pembangunan Taman Kehati di Kelurahan Tanjungsari (dokumen) bidang KKL	Rp	50.365.000,00
-	UKL/UPL Pembangunan taman Gedog Bid KKL TA 2019	Rp	74.198.000,00
-	DED Taman Gedog	Rp	95.660.500,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

TA 2019		
- DED Taman Kehati Tanjungsari	Rp	95.626.200,00
- Pengadaan tanah urug untuk pemadatan parkir Taman Kehati di Kel Tanjungsari	Rp	199.696.655,00
e. Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa Pendampingan LKPP, Pengawasan dan Pembangunan Pasar Legi Kota Blitar	Rp	39.806.541.312,05
f. Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp39.456.000,00 berupa :		
a. Tanah uruk Pasar Sayur. Perencanaan	Rp	19.300.000,00
b. Pemasangan patok sempadan sungai / kali lahar	Rp	20.156.000,00
6. Pembayaran utang belanja modal Tahun 2018 atas Pembangunan Gedung Bedah Sentral RSUD Mardi Waluyo	Rp	587.669.800,00
7. Reklasifikasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp142.773.039,00 berupa :		
a. Lampu taman pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp	49.273.039,00
b. Pavingisasi pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp	16.000.000,00
c. Renovasi Saluran Air pada Kelurahan Kepanjenlor	Rp	77.500.000,00
8. Koreksi atas marka jalan yang masih tercatat pada Aset Tetap Gedung Bangunan sebesar Rp219.521.420,00 pada :		
a. Kec. Sukorejo	Rp	151.575.870,00
b. Dinas Perhubungan	Rp	67.945.550,00
9. Reklasifikasi antar akun Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Gedung dan Bangunan sesuai ketentuan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 berupa Rambu – Rambu sebesar		



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rp7.779.081.797,37 pada :		
a. Dinas Perhubungan	Rp	7.733.906.797,37
b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	7.200.000,00
c. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo	Rp	20.235.000,00
d. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp	15.225.000,00
e. Kecamatan Kepanjenkidul	Rp	1.715.000,00
f. Kelurahan Tanggung	Rp	800.000,00
10. Penghapusan aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup	Rp	1.069.717.000,00
Jumlah	Rp	68.347.967.193,42
Jumlah mutasi bersih Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	Rp	127.565.865.884,96
Saldo Akhir per 31 Desember 2019	Rp	812.529.119.338,04

	<u>31 Desember 2019</u> (Rp)	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	748.545.212.935,91	690.220.967.239,42

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar Rp748.545.212.935,91 naik 8,45% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp690.220.967.239,42. Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2019 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018 **Rp 690.220.967.239,42**

Mutasi Tambah:

1. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2019	Rp	51.077.324.065,39
2. Realisasi Belanja Modal BOS TA 2019	Rp	12.772.000,00
3. Reklasifikasi antar akun aset tetap ke Aset Tetap-Jalan, Irigasi, Jaringan dari Aset Tetap-Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.272.710.884,00 pada :		
a. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo sebesar Rp349.745.000,00 berupa :		
- Pengawasan dan Perencanaan Jaringan Listrik Lantai 3	Rp	9.790.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Jaringan Listrik lantai 3	Rp	339.955.000,00
b. Kelurahan Ngadirejo sebesar Rp250.000.000,00 berupa :		
- Drainase dan plat duiker Agus Salim RT 03 RW. 01	Rp	30.000.000,00
- Saluran U Sam Ratu Langi RT 01 RW. 01	Rp	30.000.000,00
- Talud jalan makam Ci Mandiri RT. 02 RW. 04	Rp	30.000.000,00
- Drainase U dan plat duiker M yamin RT. 03 RW. 02	Rp	40.000.000,00
- Saluran irigasi RT.01 RW.03	Rp	40.000.000,00
- MCK dekat lapangan sepak bola	Rp	80.000.000,00
c. Dinas Ketahanan Pangan berupa Paving dan Ornamen Kebun Edukasi Pertanian Rp3.674.000,00, Pengawasan Rp21.066.150,00, fisik Rp308.592.695 ,00 dan honor panitia Rp3.840.000,00.	Rp	337.172.845,00
d. Kelurahan Sukorejo berupa Pembangunan <i>joging track</i> di lapangan RW I Kelurahan Sukorejo	Rp	166.490.000,00
e. Kelurahan Sananwetan berupa saluran air	Rp	30.370.000,00
f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa lampu taman	Rp	49.273.039,00
g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berupa pavingisasi	Rp	16.000.000,00
h. Kel. Kepanjenlor berupa renovasi saluran air	Rp	77.500.000,00
4. Hibah APBN di Dinas Pekerjaan Umum berupa Pembangunan City Walk di Makam Bung Karno	Rp	10.050.595.000,00
5. Kapitalisasi dari Belanja Barang jasa menjadi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp25.128.600,00 pada berupa		
a. Tambah daya listrik di SMPN 3	Rp	21.928.600,00
b. Pembuatan sumur bor	Rp	3.200.000,00
6. Reklasifikasi antar Aset Tetap		



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

KDP ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa perencanaan jalan dan irigasi yang pekerjaan fisiknya sudah selesai di Tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp295.520.000,00 antara lain :

a. perencanaan pembangunan peningkatan jalan Tahun 2019	Rp	48.000.000,00
b. perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Rp	53.408.000,00
c. perencanaan kegiatan BLK jalan di Kecamatan Sananwetan	Rp	95.170.000,00
d. perencanaan kegiatan pemeliharaan irigasi DAK	Rp	98.942.000,00
7. Reklasifikasi Aset dari Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp30.310.000,00 berupa :		
a. Perencanaan drainase keliling kantor Dinas PU	Rp	10.000.000,00
b. Perencanaan Peningkatan Saluran Irigasi di D.I. Tulungrejo	Rp	20.310.000,00
Jumlah	Rp	62.768.200.549,39

Mutasi Kurang:

1. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang tidak diakui sebagai aset tetap karena tidak sesuai dengan ketentuan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar:		
a. APBD	Rp	590.150.995,00
b. BOS	Rp	2.945.000,00
2. Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Aset Tetap-Jalan, Irigasi, Jaringan ke Aset Tetap - Gedung dan Bangunan sebesar Rp244.498.000,00 pada :		
a. Dinas Pendidikan berupa pembelian atap galvalum di SDN Sentul 4 dari dana BOS	Rp	5.500.000,00
b. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 berupa bangunan kolam ikan dari dana BOS	Rp	4.327.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

c. Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik berupa pembangunan tempat wudhu	Rp	10.865.300,00
d. Renovasi Pos RW.II pada Kelurahan Kepanjenlor	Rp	20.000.000,00
e. Gapura pada Kelurahan Sentul	Rp	50.313.200,00
f. Kamar mandi pada Dinas Pendidikan	Rp	73.492.500,00
g. MCK pada Kelurahan Kepanjenlor	Rp	80.000.000,00
3. Reklasifikasi antar akun aset tetap Peralatan dan Mesin dari Jalan, Irigasi, Jaringan berupa modem internet pada Kelurahan Gedog	Rp	7.497.500,00
4. Koreksi atas marka jalan yang masih tercatat sebagai aset tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Perhubungan	Rp	279.469.259,00
5. Belanja Barang dan jasa yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Penguat Sinyal pada Dispenduk Capil	Rp	11.825.000,00
6. Penghapusan Aset Tetap-Jalan, Irigasi, Jaringan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa instalasi listrik di Pasar Legi yang terdampak kebakaran sesuai dengan SK Nomor 188.4/KEP/410.010.2/2019	Rp	174.170.000,00
7. Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum berupa :		
a. Peningkatan jalan Tahun Anggaran 2020.	Rp	44.020.000,00
b. Study kelayakan pengembangan jalan Borobudur	Rp	64.900.000,00
8. Reklasifikasi dari Aset Tak Berwujud ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa jasa konsultasi <i>updating</i> data base kondisi jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	92.776.000,00
9. Reklasifikasi Pekerjaan ajalan atas bukan aset milik Pemkot (Aset Dalam Renovasi) dari Jalan,	Rp	1.497.699.148,90



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat			
10. Reklasifikasi Jalan Halmahera dan Jalan Maluku berupa usulan penghapusan dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lain-Lain pada Dinas Pekerjaan Umum	Rp	1.434.003.950,00	
Jumlah	Rp	4.443.954.852,90	
Jumlah mutasi bersih Aset Tetap – Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	58.324.245.696,49	
Saldo Akhir per 31 Desember 2019	Rp	748.545.212.935,91	

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
5. Aset Tetap Lainnya	36.806.720.619,34	35.026.214.600,80

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp38.806.720.619,34 naik 5,08% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp35.026.214.600,80. Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya tahun 2019 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018 **Rp 35.026.214.600,80**

Mutasi Tambah:

1. Realisasi Belanja Modal APBD TA 2019	Rp	3.380.084.624,00
2. Realisasi Belanja Modal BOS TA 2019	Rp	812.908.980,00
3. Reklasifikasi antar aset tetap Peralatan dan Mesin BOS ke Aset Tetap Lainnya BOS sebesar Rp32.483.100,00 pada :		
a. Dinas Pendidikan berupa alat olahraga lainnya	Rp	21.383.100,00
b. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 berupa alat olahraga lainnya	Rp	2.880.000,00
c. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 berupa alat olahraga lainnya	Rp	475.000,00
d. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 berupa alat olahraga lainnya	Rp	4.770.000,00
e. UPT Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 berupa alat olahraga lainnya	Rp	2.975.000,00
4. Reklasifikasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya Berupa Alat Samroh pada Dinas Pendidikan (SDN Pakunden 1)	Rp	1.500.000,00
5. Kapitalisasi Belanja barang dan Jasa menjadi Aset Tetap Lainnya berupa :		
a. Belanja buku dari belanja penggandaan pada Dikda - SDN Tlumpu	Rp	194.000,00
b. Belanja buku yang direalisasikan pada	Rp	8.756.200,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Belanja jasa kerja pada Dikda - SDN
Sentul 2

- | | |
|---|---------------------|
| 6. Reklasifikasi Pekerjaan ajalan atas bukan aset milik Pemkot (Aset Dalam Renovasi) dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat | Rp 1.497.699.148,90 |
|---|---------------------|

Jumlah **Rp 5.733.626.052,90**

Mutasi Kurang:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang tidak diakui sebagai Aset Tetap karena tidak sesuai dengan ketentuan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar: | |
| a. APBD | Rp 106.089.050,00 |
| b. BOS | Rp 65.562.100,00 |
| 2. Belanja Aset Tetap Lainnya yang direklasifikasi ke Aset Lancar - Persediaan berupa peralatan membatik untuk praktek | Rp 210.000,00 |
| 3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sesuai dengan ketentuan pada Permendagri No 108 sebesar Rp1.864.419.501,04 pada : | |
| a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Rp 8.955.000,00 |
| b. Bagian Umum | Rp 37.705.000,00 |
| c. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana | Rp 19.800.000,00 |
| d. BPKAD | Rp 9.761.000,00 |
| e. Dinas Pendidikan | Rp 550.886.000,00 |
| f. Dinas P3AP2KB | Rp 41.653.000,00 |
| g. Dinas Perhubungan | Rp 46.171.000,00 |
| h. Dinas Kesehatan | Rp 39.200.000,00 |
| i. Dinas Koperasi | Rp 43.574.501,04 |
| j. Dinas Perdagangan dan Perindustrian | Rp 188.639.580,00 |
| k. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Rp 23.205.180,00 |
| l. Dinas Pemuda dan Olahraga | Rp 444.443.300,00 |
| m. Dinas Lingkungan Hidup | Rp 188.608.440,00 |
| n. Kecamatan Kepanjenkidul | Rp 18.962.800,00 |
| o. Kecamatan Sananwetan | Rp 4.717.800,00 |
| p. Kecamatan Sukorejo | Rp 14.328.000,00 |
| q. Kelurahan Blitar | Rp 11.360.000,00 |
| r. Kelurahan Karang Sari | Rp 300.000,00 |
| s. Kelurahan Kepanjenkidul | Rp 250.000,00 |



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

t. Kelurahan Kauman	Rp	7.400.000,00
u. Kelurahan Pakunden	Rp	1.500.000,00
v. Kelurahan Ngadirejo	Rp	2.145.800,00
w. Satuan Polisi Pamong Praja	Rp	3.380.000,00
x. SMP 1	Rp	14.003.000,00
y. SMP 2	Rp	18.292.100,00
z. SMP 3	Rp	24.096.000,00
aa. SMP 4	Rp	36.961.000,00
bb. SMP 5	Rp	27.307.000,00
cc. SMP 6	Rp	16.958.000,00
dd. SMP 7	Rp	1.750.000,00
ee. SMP 8	Rp	10.631.000,00
ff. SMP 9	Rp	7.475.000,00
4. Dampak kumulatif atas koreksi Aset Tetap Lainnya yang teridentifikasi merupakan barang persediaan sesuai Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 berupa sebesar Rp377.957.234,42 pada :		
a. Dinas Pendidikan	Rp	188.119.872,76
b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Rp	966.000,00
c. DP3AP2KB	Rp	11.059.000,00
d. Kecamatan Sukorejo	Rp	2.401.000,00
e. SMPN 1	Rp	56.030.001,66
f. SMPN 2	Rp	37.571.750,00
g. SMPN 3	Rp	15.536.000,00
h. SMPN 4	Rp	13.771.000,00
i. SMPN 6	Rp	11.085.000,00
j. SMPN 9	Rp	11.565.000,00
k. Kelurahan Kepanjenlor	Rp	749.200,00
l. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan PB	Rp	2.080.000,00
m. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Rp	986.450,00
n. SMPN 8	Rp	6.550.000,00
o. Dinas Lingkungan Hidup	Rp	2.848.560,00
p. SMPN 5	Rp	2.276.000,00
q. Kelurahan Blitar	Rp	1.264.000,00
r. Kecamatan Kepanjen kidul	Rp	1.930.000,00
s. Kelurahan Ngadirejo	Rp	5.016.400,00
t. Kecamatan Sananwetan	Rp	1.755.600,00
u. Kelurahan Bendogerit	Rp	2.136.400,00
v. Dinas Pemuda dan Olahraga	Rp	2.200.000,00
w. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rp	60.000,00
5. Reklasifikasi Pagar Makam Aryo Blitar	Rp	41.183.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dari Aset Tetap Lainnya (Aset Dalam Renovasi) ke Gedung dan Bangunan pada Kelurahan Blitar

6. Reklasifikasi jalan perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-Lain sebesar Rp 1.497.699.148,90
Rp1.497.699.148,90)

Jumlah	Rp 3.953.120.034,36	
Jumlah mutasi bersih Aset Tetap Lainnya		Rp 1.780.506.018,54
Saldo Akhir per 31 Desember 2019		Rp 36.806.720.619,34

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	<u>31 Desember 2019</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Rp)</u>
	8.817.496.055,00	14.028.032.900,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) merupakan aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Saldo KDP per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.817.496.055,00 atau turun 37,14% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp14.028.032.900,00. Rincian mutasi KDP Tahun 2019 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018 **Rp 14.028.032.900,00**

Mutasi Tambah:

1. Reklasifikasi Aset Tetap Tanah ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum berupa :
 - a. Appraisal (penilaian) Tanah untuk pasar sayur Kel. Rembang Rp 23.485.000,00
 - b. Appraisal (penilaian) Tanah Perluasan Kantor Kel. Sentul Rp 29.205.000,00
 - c. Appraisal (penilaian) Tanah Sirkuit Kel. Sentul Rp 43.806.000,00
2. Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa Studi kelayakan, masterplan dan perencanaan atas pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun 2020 sebesar Rp375.275.500,00 antara lain :



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a.	Study Kelayakan Kel. Tlumpu	Rp	48.800.000,00
b.	Masterplan Taman Kehati	Rp	75.493.000,00
c.	Studi Kelayakan Taman Kehati Tanjungsari	Rp	77.907.500,00
d.	Studi Kelayakan RTH Gedog (Taman Outbond)	Rp	49.775.000,00
e.	Masterplan Outbond Gedog	Rp	78.800.000,00
f.	Perencanaan Gedung Kantor Kelurahan Tlumpu	Rp	44.500.000,00
3.	Reklasifikasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan ke Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp40.694.644.367,05 pada :		
a.	Bagian Umum sebesar Rp105.222.700,00 berupa :		
-	Perencanaan renovasi gedung PKK	Rp	5.986.200,00
-	Perencanaan Renovasi Mushola Setda Kota Blitar	Rp	99.236.500,00
b.	Sekretariat DPRD berupa Perencanaan rehabilitasi ruang AKD dan rehab kamar mandi/WC	Rp	31.509.500,00
c.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah berupa Masterplan Pembangunan Gedung DPRD	Rp	196.368.500,00
d.	Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp515.546.355 berupa :		
-	Penyusunan andal lalin pembangunan Taman Kehati di Kelurahan Tanjungsari (dokumen) bidang KKL	Rp	50.365.000,00
-	UKL/UPL Pembangunan taman Gedog Bid KKL TA 2019	Rp	74.198.000,00
-	DED taman gedog TA 2019	Rp	95.660.500,00
-	DED Taman Kehati Tanjungsari	Rp	95.626.200,00
-	Pengadaan tanah urug	Rp	199.696.655,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	untuk pemadatan parkir Taman Kehati di Kel Tanjungsari		
e.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa Pendampingan LKPP, Pengawasan dan Pembangunan Pasar Legi Kota Blitar	Rp	39.806.541.312,05
f.	Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp39.456.000,00 berupa :		
	- Tanah uruk Pasar Sayur. Perencanaan	Rp	19.300.000,00
	- Pemasangan patok sempadan sungai / kali lahar	Rp	20.156.000,00
4.	Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum berupa :		
a.	Peningkatan jalan Tahun Anggaran 2020.	Rp	44.020.000,00
b.	Study kelayakan pengembangan Jalan Borobudur	Rp	64.900.000,00
5.	Reklasifikasi aset tetap Peralatan dan Mesin ke aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan pada Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik berupa Fiber Optik yang masih direalisasi 70% dari nilai kontrak	Rp	5.959.336.400,00
6.	Reklasifikasi dokumen perencanaan perolehan aset dari Aset Tak berwujud ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.469.736.100,00 pada :		
a.	Dinas Pemuda dan Olahraga berupa andalalin pembangunan sirkuit	Rp	94.847.500,00
b.	Dinas Kesehatan berupa Biaya perencanaan pembangunan Puskesmas Sukorejo Tahun Anggaran 2018	Rp	133.144.500,00
c.	Dinas Lingkungan Hidup berupa :		



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

-	Perencanaan Taman PETA	Rp	30.000.000,00
-	Penyusunan Dokumen Lingkungan Taman Tanjungsari di Kelurahan Tanjungsari	Rp	40.027.000,00
-	Penyusunan kajian Taman Tanjungsari Tahun Anggaran 2017	Rp	49.960.000,00
d.	Dinas Perhubungan berupa Biaya Perencanaan Penerangan Jalan Umum Tahun Anggaran 2018	Rp	31.065.000,00
e.	Dinas Perumahan Rakyat berupa Perencanaan FS Pembangunan Gedung Kantor Dispera	Rp	39.611.000,00
f.	Sekretariat DPRD berupa Perencanaan rehabilitasi ruang AKD dan rehab kamar mandi/WC	Rp	31.509.500,00
g.	Dinas Pekerjaan Umum berupa :		
-	Perencanaan Tennis Indoor Kebonrojo	Rp	25.232.000,00
-	Perencanaan Revitalisasi Kantor Walikota	Rp	37.800.000,00
-	Perencanaan Diorama dan Area Terbuka di Kawasan Istana Gebang	Rp	43.950.000,00
-	Perencanaan Gedung Kantor Kelurahan Gedog	Rp	44.500.000,00
-	Perencanaan Revitalisasi Kantor Kelurahan Kepanjenlor	Rp	45.490.000,00
-	perencanaan pembangunan gedung kesenian di kawasan Istana Gebang	Rp	46.500.000,00
-	Perencanaan Museum di Kawasan Istana Gebang	Rp	47.550.000,00
-	Perencanaan Penataan Sapras Utara MBK Tahap I	Rp	49.490.000,00
-	Revitalisasi Kawasan	Rp	



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

MBK		49.850.000,00
- Perencanaan Gedung Kantor Kelurahan Kapanjenlor	Rp	50.029.000,00
- Perencanaan master plan kantor walikota	Rp	50.140.000,00
- Perencanaan Aula Kelurahan Tanjungsari	Rp	50.390.000,00
- Perencanaan Gedung Kantor Kelurahan Sananwetan	Rp	50.440.000,00
- Peningkatan Jalan di Perempatan Jl. Serayu dan Jl. Ciliwung	Rp	3.000.000,00
- Perencanaan Peningkatan jalan di Pertigaan Jl. Palembang dan Jl. Cemara	Rp	8.202.100,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan di Jl. Sumatra	Rp	9.000.000,00
- Perencanaan Rehabilitasi saluran di Jl. Kacapiring (Pasar Templek)	Rp	9.727.500,00
- Perencanaan Peningkatan jalan di Jl. Merapi Perempatan	Rp	15.800.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan di Jl. Mahakam Lanjutan	Rp	55.198.000,00
- Perencanaan Kegiatan DAK Jalan di Kecamatan Kapanjenkidul TA 2019	Rp	95.750.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan di Jl. Brantas	Rp	114.943.000,00
- Perencanaan Tanah uruk Pasar Sayur	Rp	19.300.000,00
- Appraisal (penilaian) Tanah untuk pasar sayur Kelurahan Rembang	Rp	23.485.000,00
- Appraisal (penilaian) Tanah Perluasan Kantor Kelurahan Sentul	Rp	29.205.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Penyusunan DED Geometrik di Pertigaan Jalan cemara dan jalan palem Tahun Anggaran 2015	Rp	44.600.000,00
Jumlah	Rp	48.704.408.367,05

Mutasi Kurang:

1. Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp52.903.069.212,05 terdiri dari :
 - a. Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp100.710.000,00 berupa :

- Perencanaan Taman Rembang JL.CEMARA KEL.REMBANG	Rp	40.000.000,00
- Jasa perencanaan pembangunan taman eks Kelurahan Bendo TA 2017	Rp	15.125.000,00
- Jasa perencanaan pembangunan Taman eks Pasar Pahing TA 2017	Rp	27.575.000,00
- Honorarium pembangunan Pasar Pahing	Rp	3.060.000,00
- Honorarium pembangunan taman eks Kelurahan Bendo	Rp	2.550.000,00
- Review perencanaan Taman Rembang	Rp	12.400.000,00
 - b. Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp215.094.000,00 berupa :

- Perencanaan Pembangunan Gedung SMP Negeri 3	Rp	122.792.000,00
- Perencanaan Gedung Kantor Kelurahan Karangtengah (KOREKSI BPK)	Rp	42.582.000,00
- Studi Kelayakan Relokasi Kantor Kelurahan Karangtengah	Rp	49.720.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- c. Dinas Pendidikan sebesar Rp11.895.110.900,00
berupa :
- Study Kelayakan SMPN 3 Rp 44.880.000,00
 - Masterplan SMPN 3 Rp 122.500.000,00
 - Bangunan gedung SMPN 3 Rp 11.726.080.900,00
 - Atribusi jasa konsultan pembangunan SMPN 3 Rp 1.650.000,00
- d. Kelurahan Tanggung berupa pondasi pagar Rp 18.000.000,00
- e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana berupa detail engineering design renovasi gedung bakesbangpol Rp 24.750.000,00
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo berupa perencanaan ruang hemodialisa Rp 49.600.000,00
- g. Pasar legi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang sudah dimanfaatkan Rp 40.599.804.312,05
2. Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp716.356.000,00 pada :
- a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa :
- Penyusunan DED Geometrik di Pertigaan Jalan cemara - jalan palem Rp 44.600.000,00
 - Perencanaan Tanah Urug Pasar Sayur Rp 19.300.000,00
 - Appraisal (penilaian) Tanah untuk pasar sayur Kel. Rembang Rp 23.485.000,00
 - Appraisal (penilaian) Tanah Perluasan Kantor Kel. Sentul Rp 29.205.000,00
 - Appraisal (penilaian) Tanah Sirkuit Kel. Sentul Rp 43.806.000,00
 - Studi Kelayakan Rp 64.900.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	Pengembangan Jalan Borobudur		
b.	Dinas Perhubungan		
-	Biaya Perencanaan PJU	Rp	31.065.000,00
c.	BAPPEDA		
-	Studi Kelayakan Pengembangan Puskesmas Sukorejo	Rp	49.417.500,00
-	Masterplan Pengembangan Puskesmas Sukorejo	Rp	49.555.000,00
-	Penyusunan FS Pembangunan Kantor DPRD	Rp	97.378.500,00
-	Penyusunan Studi Kelayakan Depot Arsip Pemerintah Kota Blitar	Rp	98.990.000,00
d.	Dinas Kesehatan		
-	Biaya perencanaan pembangunan Puskesmas Sukorejo	Rp	133.144.500,00
e.	DPRD	Rp	
-	Perencanaan rehabilitasi ruang AKD dan rehab kamar mandi/WC	Rp	31.509.500,00
3.	Reklasifikasi antar Aset Tetap KDP ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa perencanaan jalan dan irigasi yang pekerjaan fisiknya sudah selesai di Tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Rp295.520.000,00 antara lain :		
a.	Perencanaan pembangunan peningkatan jalan Tahun 2019	Rp	48.000.000,00
b.	Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	Rp	53.408.000,00
c.	Perencanaan kegiatan BLK jalan di Kecamatan Sananwetan	Rp	95.170.000,00
d.	Perencanaan kegiatan pemeliharaan irigasi DAK	Rp	98.942.000,00
	Jumlah	Rp	53.914.945.212,05



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah mutasi bersih Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	(5.210.536.845,00)
Saldo Akhir per 31 Desember 2019	Rp	8.817.496.055,00

7.5.3.1.4 Akumulasi Penyusutan

	<u>31 Desember 2019</u> (Rp)	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)
Akumulasi Penyusutan	(967.361.425.412,76)	(850.000.395.485,58)

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Pemerintah Kota Blitar dari Tahun ke Tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Masa manfaat aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Blitar nomor 74 Tahun 2019 disajikan pada **Lampiran 20**.

Perhitungan penyusutan dihitung secara Tahunan pada akhir periode Tahun berjalan/saat penyusunan laporan keuangan, meskipun aset baru diperoleh dalam hitungan hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Akumulasi Penyusutan Tahun 2019 sebesar (Rp967.361.425.412,76) ini naik sebesar 13,81% dibandingkan saldo Tahun 2018 sebesar (Rp850.000.395.485,58).

Tabel 78 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Saldo	Mutasi	Mutasi	Saldo
		Awal	Tambah	Kurang	Akhir
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
1	Peralatan dan mesin	268.171.167.157,83	56.096.435.493,90	2.436.391.706,48	321.831.210.945,25
2	Gedung dan bangunan	267.828.119.730,12	32.247.797.419,08	6.546.941.380,94	293.528.975.768,26
3	Jalan, instalasi jaringan	307.545.489.557,64	39.660.876.140,74	1.096.273.678,66	346.110.092.019,72
4	Aset tetap lainnya	6.455.619.039,99	1.365.334.590,78	1.929.806.951,24	5.891.146.679,53
Jumlah		850.000.395.485,58	129.370.443.644,50	12.009.413.717,32	967.361.425.412,76



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

a. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
	(321.831.210.945,25)	(268.171.167.157,83)

Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar (Rp321.831.210.945,25) atau naik sebesar 20,01% dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar (Rp268.171.167.157,83). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2019 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018 **Rp (268.171.167.157,83)**

Mutasi Tambah:

1. Beban Penyusutan TA 2019	Rp	(49.179.785.123,31)
2. Dampak kumulatif kurang catat atas penyusutan saldo awal 2018	Rp	(272.539.348,53)
3. Reklasifikasi akumulasi penyusutan alat olahraga yang pindah klasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin	Rp	(1.225.709.201,04)
4. Reklasifikasi Akumulasi penyusutan s.d 2018 atas Rambu-Rambu dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin	Rp	(5.418.401.821,02)
Jumlah	Rp	(56.096.435.493,90)

Mutasi Kurang:

1. Dampak Kumulatif penyusutan aset tetap peralatan dan mesin TA 2019	Rp	(193.207.074,48)
2. Reklasifikasi dari penyusutan peralatan dan mesin ke penyusutan aset lain-lain atas akumulasi penyusutan laptop dan eksternal hard disk hilang pada BKD sampai dengan Tahun 2019	Rp	(11.074.732,00)
3. Penghapusan barang Pasar Legi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Rp	(2.152.109.900,00)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4. Penghapusan rangka baliho pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Rp	(80.000.000,00)	
Jumlah		Rp (2.436.391.706,48)	
Jumlah mutasi bersih Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	(53.660.043.787,42)	
Saldo Akhir per 31 Desember 2019		Rp (321.831.210.945,25)	

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
b. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(293.528.975.768,26)	(267.828.119.730,12)

Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 sebesar (Rp293.528.975.768,26) atau naik sebesar 9,60% dari saldo per 31 Desember 2018 sebesar (Rp267.828.119.730,12) Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2019 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018 **Rp (267.828.119.730,12)**

Mutasi Tambah:

1. Beban Penyusutan TA 2019	Rp	(31.396.417.457,51)
2. Dampak kumulatif kurang catat atas penyusutan saldo awal 2018	Rp	(847.261.661,57)
3. Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan sampai dengan 2018 atas Pagar Makam Aryo Blitar dan Dampak Kumulatif perubahan masa manfaat pada Aset Tetap Lainnya dan Gedung dan Bangunan	Rp	(4.118.300,00)
Jumlah	Rp	(32.247.797.419,08)

Mutasi Kurang:

1. Dampak Kumulatif penyusutan Aset Gedung dan Bangunan TA 2019	Rp	(100.548.873,33)
2. Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019	Rp	(346.507.950,00)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3. Penghapusan Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019	Rp	(706.480.000,00)	
4. Penghapusan gedung Pasar Legi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Rp	(3.916.757.619,00)	
5. Reklasifikasi Akumulasi penyusutan s.d 2018 atas Rambu-Rambu dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin	Rp	(1.476.646.938,62)	
Jumlah	Rp	(6.546.941.380,95)	
Jumlah mutasi bersih Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp		(25.700.856.038,14)
Saldo Akhir per 31 Desember 2019	Rp		(293.528.975.768,26)

	<u>31 Desember 2019</u> <u>(Rp)</u>	<u>31 Desember 2018</u> <u>(Rp)</u>
c. Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(346.110.092.019,72)	(307.545.489.557,64)

Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 sebesar (Rp346.110.092.019,72) atau naik sebesar 12,54% dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar (Rp307.545.489.557,64). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2019 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018 **Rp (307.545.489.557,64)**

Mutasi Tambah:

1. Beban Penyusutan TA 2019	Rp	(39.005.962.535,85)
2. Dampak kumulatif kurang catat atas penyusutan saldo awal 2018	Rp	(654.913.604,89)
Jumlah	Rp	(39.660.876.140,74)

Mutasi Kurang:

1. Dampak kumulatif atas lebih catat Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa marka jalan pada dinas perhubungan	Rp	(191.328.361,96)
---	----	------------------



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- | | | |
|---|----|------------------|
| 2. Penghapusan jaringan pasar legi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan | Rp | (7.982.700,03) |
| 3. Reklasifikasi Akumulasi penyusutan sampai dengan 2018 atas Jl. Halmahera dan Jl. Maluku pada Dinas Pekerjaan Umum dari aset tetap jalan irigasi jaringan ke aset lain-lain | Rp | (861.635.616,67) |
| 4. Reklas Jalan perumahan asabri pada Dinas Perumahan Rakyat dari aset tetap jalan irigasi jaringan ke Aset Tetap Lainnya (Aset Renovasi) | Rp | (35.327.000,00) |

Jumlah **Rp (1.096.273.678,66)**

Jumlah mutasi bersih Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp (38.564.602.462,08)

Saldo Akhir per 31 Desember 2019 **Rp (346.110.092.019,72)**

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
d. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(5.891.146.679,53)	(6.455.619.039,99)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar (Rp5.891.146.679,53) atau naik sebesar 8,74% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar (Rp6.455.619.039,99). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya tahun 2019 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018 **Rp (6.455.619.039,99)**

Mutasi Tambah:

- | | | |
|---|----|--------------------|
| 1. Beban Penyusutan TA 2019 | Rp | (1.216.537.415,78) |
| 2. Dampak kumulatif kurang catat atas penyusutan saldo awal 2018 | Rp | (113.470.175,00) |
| 3. Reklas Jalan perumahan asabri pada Dinas Perumahan Rakyat dari aset tetap jalan irigasi jaringan ke Aset Tetap Lainnya (Aset Renovasi) | Rp | (35.327.000,00) |

Jumlah **Rp (1.365.334.590,78)**



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Mutasi Kurang:

1. Reklasifikasi beban penyusutan 2019 atas jalan perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-Lain	Rp	(292.474.429,78)
2. Dampak Kumulatif penyusutan aset tetap lainnya ta 2019	Rp	(373.323.120,42)
3. Reklasifikasi akumulasi penyusutan alat olahraga yang pindah klasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin	Rp	(1.212.209.201,04)
4. Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan s.d 2018 atas Pagar Makam Aryo Blitar dan Dampak Kumulatif perubahan masa manfaat pada Aset Tetap Lainnya dan Gedung dan Bangunan	Rp	(16.473.200,00)
5. Reklasifikasi jalan perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-Lain	Rp	(35.327.000,00)
Jumlah	Rp	(1.929.806.951,24)

Jumlah mutasi bersih Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp	564.472.360,46
Saldo Akhir per 31 Desember 2019	Rp	(5.891.146.679,53)

Selain Aset Tetap tersebut diatas, Pemerintah Kota Blitar membukukan nilai Aset Tetap Ekstrakomptabel per 31 Desember 2019 pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp4.714.741.197,30. Rincian Aset Tetap *Ekstracomptable* disajikan pada **Lampiran 21**.

7.5.3.1.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Tabel 79 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	2019	2018
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	394.418.750,00	500.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	3.114.000.000,00	3.114.000.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aset Tak Berwujud	11.955.752.880,00	10.229.115.280,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(6.814.709.566,00)	(7.386.955.999,68)
Aset Lain-lain	7.723.578.326,05	31.726.135.444,89
Akumulasi penyusutan Aset Lain-lain	(5.996.116.666,00)	(1.731.982.316,61)
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	128.175.000,00	0,00
Jumlah	10.505.098.724,05	35.950.812.408,60

Aset Lainnya	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
	<u>10.505.098.724,05</u>	<u>35.950.812.408,60</u>

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp10.505.098.724,05 atau turun 70,78% dibandingkan dengan saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp35.950.812.408,60. Aset Lainnya terdiri dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan Pihak Ketiga, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

1. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
	<u>394.418.750,00</u>	<u>500.000,00</u>

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2019 sebesar Rp394.418.750,00 dari Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atas 25 anggota DPRD Pemkot Blitar yang terdampak temuan pemeriksaan BPK RI TA 2018 atas kelebihan pembayaran Dana Operasional Pimpinan, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses DPRD.

Tabel 80 Mutasi Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2019

(dalam

Rupiah)

No	Uraian	Saldo 31/12/2018	Penambahan TGR	Pengurangan TGR	Saldo 31/12/2019
1.	Pihak Ketiga	500,000,00	0,00	500.000,00	0,00
2.	Sekretariat DPRD	0,00	394.418.750,00	0,00	394.418.750,00
	Jumlah	500,000,00	394.418.750,00	500.000,00	394.418.750,00

Mutasi Pengurangan sebesar Rp500.000,00 dikarenakan Pihak Ketiga tidak termasuk dalam kategori yang tercantum dalam definisi Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) 25 anggota DPRD Pemerintah Kota Blitar dibuat atas kelebihan pembayaran Dana Operasional Pimpinan, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses DPRD dengan nilai total sebesar Rp1.429.470.000,00. Nilai tersebut telah dibayarkan ke kas daerah sebesar Rp347.091.250,00 selama TA 2019, sehingga pada 31 Desember 2019 terdapat saldo TGR sebesar Rp1.082.378.750,00. Bagian lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 tersebut adalah sebesar Rp687.960.000,00, sedangkan sisanya sebesar Rp394.418.750,00 disajikan pada Aset Lainnya.

Selanjutnya informasi terkait perhitungan saldo akhir Tuntutan Ganti Rugi TA 2019 disajikan pada **Lampiran 22** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

2.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		(Rp)	(Rp)
		3.114.000.000,00	3.114.000.000,00

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.114.000.000,00 merupakan nilai aset tetap tanah milik Pemerintah Kota Blitar yang dikerjasamakan dengan metode Bangun Guna Serah (BGS) untuk *Blitar Square* berdasarkan perjanjian Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Tanah Milik Pemerintah Kota Blitar diaddendum dengan perjanjian Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kerjasama Bangun Guna Serah (BGS) Tanah Milik Pemerintah Kota Blitar.

3.	Aset Tak Berwujud	31 Desember 2019	31 Desember 2018
		(Rp)	(Rp)
		11.955.752.880,00	10.229.115.280,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.955.752.880,00 atau naik sebesar 16,88% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar sebesar Rp10.229.115.280,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset *software*, masterplan, dan kajian dengan rincian mutasi Aset Tak Berwujud Tahun 2019 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018

Rp 10.229.115.280,00

Mutasi Tambah:

- | | | | |
|----|--|----|------------------|
| 1. | Realisasi Belanja Modal APBD TA 2019 | Rp | 2.943.120.200,00 |
| 2. | Reklasifikasi aset tetap Peralatan dan Mesin BOS ke Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud pada UPT Sekolah Menengan Pertama Negeri 1 berupa | Rp | 6.000.000,00 |



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

software aplikasi cbt

3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset Tak Berwujud sebesar Rp716.356.000,00 pada :

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa :

- Penyusunan DED Geometrik di Pertigaan Jalan Cemara - Jalan Palem	Rp	44.600.000,00
- Perencanaan Tanah Urug Pasar Sayur	Rp	19.300.000,00
- Appraisal (penilaian) Tanah untuk pasar sayur Kel. Rembang	Rp	23.485.000,00
- Appraisal (penilaian) Tanah Perluasan Kantor Kel. Sentul	Rp	29.205.000,00
- Appraisal (penilaian) Tanah Sirkuit Kel. Sentul	Rp	43.806.000,00
- Studi Kelayakan Pengembangan Jalan Borobudur	Rp	64.900.000,00

b. Dinas Perhubungan

- Biaya Perencanaan PJU	Rp	31.065.000,00
-------------------------	----	---------------

c. BAPPEDA

- Studi Kelayakan Pengembangan Puskesmas Sukorejo	Rp	49.417.500,00
- Masterplan Pengembangan Puskesmas Sukorejo	Rp	49.555.000,00
- Penyusunan FS Pembangunan Kantor DPRD	Rp	97.378.500,00
- Penyusunan Studi Kelayakan Depot Arsip Pemerintah Kota Blitar	Rp	98.990.000,00

d. Dinas Kesehatan

- Biaya perencanaan pembangunan Puskesmas Sukorejo	Rp	133.144.500,00
--	----	----------------

e. DPRD

- Perencanaan rehabilitasi ruang AKD dan rehab kamar mandi/WC	Rp	31.509.500,00
---	----	---------------

4. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tak Berwujud pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa jasa konsultasi updating database kondisi jalan

	Rp	92.776.000,00
--	----	---------------

Jumlah **Rp** **3.758.252.200,00**

Mutasi Kurang:

1. Reklasifikasi Aset Tidak Berwujud ke



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa Studi kelayakan, masterplan dan perencanaan atas pekerjaan yang dilaksanakan pada Tahun 2020 sebesar Rp375.275.500,00 antara lain :

a. Study Kelayakan Kel. Tlumpu	Rp	48.800.000,00
b. Masterplan Taman Kehati	Rp	75.493.000,00
c. Studi Kelayakan Taman Kehati Tanjungsari	Rp	77.907.500,00
d. Studi Kelayakan RTH Gedog (Taman Outbond)	Rp	49.775.000,00
e. Masterplan Outbond Gedog	Rp	78.800.000,00
f. Perencanaan Gedung Kantor Kelurahan Tlumpu	Rp	44.500.000,00
2. Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa masterplan pengembangan Waterpark Sumber Udel	Rp	156.293.000,00
3. Reklasifikasi Aset dari Aset Tidak Berwujud ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp30.310.000,00 berupa :		
a. Perencanaan drainase keliling kantor Dinas PU	Rp	10.000.000,00
b. Perencanaan Peningkatan Saluran Irigasi di D.I. Tulungrejo	Rp	20.310.000,00
4. Reklasifikasi dokumen perencanaan perolehan aset dari Aset Tak berwujud ke Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.469.736.100,00 pada :		
a. Dinas Pemuda dan Olahraga berupa andalalin pembangunan sirkuit	Rp	94.847.500,00
b. Dinas Kesehatan berupa biaya perencanaan pembangunan Puskesmas Sukorejo Tahun Anggaran 2018	Rp	133.144.500,00
c. Dinas Lingkungan Hidup berupa :		
- Perencanaan taman PETA	Rp	30.000.000,00
- Penyusunan Dokumen Lingkungan Taman Tanjungsari di Kelurahan Tanjungsari	Rp	40.027.000,00
- Penyusunan kajian Taman Tanjungsari Tahun Anggaran 2017	Rp	49.960.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

d.	Dinas Perhubungan berupa Biaya Perencanaan Penerangan Jalan Umum Tahun Anggaran 2018	Rp	31.065.000,00
e.	Dinas Perumahan Rakyat berupa Perencanaan FS Pembangunan Gedung Kantor Dispera	Rp	39.611.000,00
f.	Sekretariat DPRD berupa Perencanaan rehabilitasi ruang AKD dan rehab kamar mandi/WC	Rp	31.509.500,00
g.	Dinas Pekerjaan Umum berupa :	Rp	
-	Perencanaan Tenis Indoor Kebonrojo	Rp	25.232.000,00
-	Perencanaan Revitalisasi Kantor Walikota	Rp	37.800.000,00
-	Perencanaan Diorama dan Area Terbuka di Kawasan Istana Gebang	Rp	43.950.000,00
-	Perencanaan Gedung Kantor Kelurahan Gedog	Rp	44.500.000,00
-	Perencanaan Revitalisasi Kantor Kelurahan Kepanjenlor	Rp	45.490.000,00
-	perencanaan pembangunan gedung kesenian di kawasan Istana Gebang	Rp	46.500.000,00
-	Perencanaan Museum di Kawasan Istana Gebang	Rp	47.550.000,00
-	Perencanaan Penataan Sapras Utara MBK Tahap I	Rp	49.490.000,00
-	Revitalisasi Kawasan MBK	Rp	49.850.000,00
-	Perencanaan Gedung Kantor Kelurahan Kepanjenlor	Rp	50.029.000,00
-	Perencanaan master plan kantor walikota	Rp	50.140.000,00
-	Perencanaan Aula Kelurahan Tanjungsari	Rp	50.390.000,00
-	Perencanaan Gedung Kantor Kelurahan Sananwetan	Rp	50.440.000,00
-	Peningkatan Jalan di Perempatan Jl. Serayu dan Jl. Ciliwung Perencanaan	Rp	3.000.000,00
-	Perencanaan Peningkatan jalan di Pertigaan Jl. Palem dan Jl. Cemara	Rp	8.202.100,00
-	Perencanaan Peningkatan Jalan di Jl. Sumatra	Rp	9.000.000,00
-	Perencanaan Rehabilitasi saluran di Jl. Kacapiring (Pasar Templek)	Rp	9.727.500,00
-	Perencanaan Peningkatan jalan	Rp	



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

di Jl. Merapi Perempatan		15.800.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan di Jl. Mahakam Lanjutan	Rp	55.198.000,00
- Perencanaan Kegiatan DAK Jalan di Kecamatan Kepanjenkidul TA 2019	Rp	95.750.000,00
- Perencanaan Peningkatan Jalan di Jl. Brantas	Rp	114.943.000,00
- Perencanaan Tanah uruk Pasar Sayur	Rp	19.300.000,00
- Appraisal (penilaian) Tanah untuk pasar sayur Kelurahan Rembang	Rp	23.485.000,00
- Appraisal (penilaian) Tanah Perluasan Kantor Kelurahan Sentul	Rp	29.205.000,00
- Penyusunan DED Geometrik di Pertigaan Jalan Cemara dan Jalan Palem Tahun Anggaran 2015	Rp	44.600.000,00
Jumlah	Rp	2.031.614.600,00

Jumlah mutasi bersih Aset Tak Berwujud	Rp	1.726.637.600,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2019	Rp	11.955.752.880,00

Daftar Aset Tak Berwujud per SKPD disajikan pada **Lampiran 23** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
4. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(Rp)	(Rp)
	(6.814.709.566,00)	(7.386.955.999,68)

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar (Rp6.814.709.566,00) atau turun sebesar 7,75% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar (Rp7.386.955.999,68). Rincian mutasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2019 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018		Rp (7.386.955.999,68)
<u>Mutasi Tambah:</u>		
1. Beban Amortisasi TA 2019	Rp	(1.294.160.610,00)
Jumlah	Rp	(1.294.160.610,00)
<u>Mutasi Kurang:</u>		
1. Dampak Kumulatif atas Amortisasi TA 2019	Rp	(1.866.407.043,68)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah	Rp (1.866.407.043,68)	
Jumlah mutasi bersih Amortisasi Aset Tak Berwujud		Rp 572.246.433,68
Saldo Akhir per 31 Desember 2019		Rp (6.814.709.566,00)

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
5. Aset Lain-lain	7.723.578.326,05	31.726.135.444,89

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar Rp7.723.578.326,05 atau turun 75,66% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp31.726.135.444,89. Aset Lain-lain terdiri dari kumpulan usulan penghapusan atas Aset Tetap SKPD sebelum diterbitkan SK Penghapusan atas pengadaan sampai dengan tahun 2019 dan Aset Tetap yang diserahkan kepada Pemerintah Pusat dengan rincian mutasi tahun 2019 sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018 **Rp 31.726.135.444,89**

Mutasi Tambah:

1. Reklasifikasi aset tetap Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya - Aset Lain-lain pada :		
a. Badan Kepegawaian Daerah berupa usulan penghapusan laptop dan eksternal hardisk yang hilang	Rp	44.703.630,00
b. Reklasifikasi Jalan Halmahera dan Jalan Maluku berupa usulan penghapusan dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Lain-Lain pada Dinas Pekerjaan Umum	Rp	1.434.003.950,00
2. Reklasifikasi Pekerjaan jalan atas bukan aset milik Pemkot (Aset Dalam Renovasi) dari Jalan, Irigasi dan Jaringan ke Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perumahan Rakyat sebesar Rp1.497.699.148,90)	Rp	1.497.699.148,90
Jumlah	Rp	2.976.406.728,90

Mutasi Kurang:

1. Penghapusan aset lain-lain sebesar Rp26.978.963.847,74 antara lain :		
a. Kelurahan Tanjungsari berdasarkan SK Nomor 188.4/5/KEP/410.010.2/2019 berupa	Rp	52.195.985,00
b. Dinas Perhubungan antara lain : - berdasarkan SK Nomor 188.4 / 1 / KEP / 410.010.2 / 2019	Rp	157.887.350,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

-	berdasarkan SK Nomor 188.4 / 2 / KEP / 410.010.2 / 2019	Rp	26.247.438.512,74
c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian antara lain :			
-	berdasarkan SK Nomor 188.4 / 3 / KEP / 410.010.2 / 2019	Rp	469.300.000,00
-	berdasarkan SK Nomor 188.4/KEP/410.010.2/2019 berupa penutup tangga (los buah) dan rehabilitasi atap roof pasar legi	Rp	52.142.000,00
Jumlah		Rp	26.978.963.847,74

Jumlah mutasi bersih Penyusutan Aset Lain-lain Rp (24.002.557.118,84)

Saldo Akhir per 31 Desember 2019 **Rp 7.723.578.326,05**

Daftar Aset Lain-Lain per SKPD disajikan pada **Lampiran 24** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan Atas Laporan Keuangan.

	<u>31 Desember 2019</u> (Rp)	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)
6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(5.996.116.666,00)	(1.731.982.316,61)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 sebesar (Rp5.996.116.666,00) atau naik sebesar 246,20% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2018 sebesar (Rp1.731.982.316,61). Rincian mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2019 sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018 **Rp (1.731.982.316,61)**

Mutasi Tambah:

1.	Beban Penyusutan TA 2019	Rp	(158.987.994,30)
2.	Reklasifikasi beban penyusutan 2019 atas jalan perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-Lain	Rp	(292.474.429,78)
3.	Dampak kumulatif atas penyusutan aset lain-lain ta 2019	Rp	(19.000.910.131,57)
4.	Reklasifikasi dari penyusutan peralatan dan mesin ke penyusutan aset lain-lain atas	Rp	(11.074.732,00)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

akumulasi penyusutan laptop dan eksternal hard disk hilang pada BKD sampai dengan tahun 2019

5. Reklasifikasi Akumulasi penyusutan s.d 2018 atas Jl. Halmahera dan Jl. Maluku pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp861.635.616,67)	Rp	(861.635.616,67)
6. Reklasifikasi jalan perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dari Aset Tetap Lainnya ke Aset Lain-Lain	Rp	(35.327.000,00)
Jumlah	Rp	(20.360.409.904,32)

Mutasi Kurang:

1. Penghapusan asset lain-lain sebesar Rp16.096.275.554,93 pada :		
a. Kelurahan Tanjungsari		(50.395.985,00)
b. Dinas Perhubungan		(15.571.365.369,93)
c. Dinas Perdagangan dan Perindustrian		(474.514.200,00)
Jumlah	Rp	(16.096.275.554,93)

Jumlah mutasi bersih Penyusutan Aset Lain-lain Rp (4.264.134.349,39)

Saldo Akhir per 31 Desember 2019 Rp (5.996.116.666,00)

7. Kas yang Dibatasi Penggunaannya	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
	128.175.000,00	0,00

Kas yang Dibatasi Penggunaannya adalah uang yang dikuasai pemerintah dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, namun bukan merupakan hak pemerintah dan tidak setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Dibatasi Penggunaannya terdiri dari Jaminan Bongkar Sewa Reklame dan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa). Jaminan Bongkar Sewa Reklame adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

tersebut. Uang Jaminan Sewa Rusunawa adalah uang yang dijaminan oleh setiap calon penghuni kepada pengelola untuk dapat tinggal di rusunawa dan sebagai bentuk pertanggungjawaban apabila penyewa yang tidak bertanggungjawab meninggalkan rumah rusak/ada barang yang hilang maka uang sebagai pengganti untuk menutupi kerugian yang diakibatkan oleh penghuni sewa rusunawa. Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2019 sebesar Rp128.175.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 81 Rincian Kas Dibatasi Penggunaannya Tahun 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	SKPD	Nilai
1.	Jaminan Bongkar Sewa Reklame	DPM Naker dan PTSP	1.025.000,00
2.	Jaminan Sewa Rumah Susun	Dispera	127.150.000,00
Jumlah			128.175.000,00

7.5.3.2. Kewajiban

Esensi dari Kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa datang. Kewajiban dirinci menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.599.766.689,99 atau turun 49,42% dibandingkan dari saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp22.933.527.356,70.

7.5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang akan diharapkan dibayar dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.599.766.689,99 atau turun 49,99% dibandingkan dari saldo per 31 Desember 2018 sebesar Rp22.933.527.356,70. Saldo Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
	300.000,00	6.246.741,91

Saldo Utang PFK per 31 Desember 2019 sebesar Rp300.000,00 atau turun sebesar 95,20% dibandingkan saldo PFK per 31 Desember 2018 sebesar Rp6.246.741,91. Saldo Utang PFK tersebut berupa Utang Pemotongan PPh 21 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran BLUD RSUD Mardi Waluyo pada Tahun 2019 namun sampai dengan 31 Desember 2019 belum disetor ke Kas Negara (pajak lewat Tahun) sebesar Rp300.000,00.

2. Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
	2.631.117.225,29	7.078.384.229,79



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban kepada penyedia barang/jasa yang belum terselesaikan sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.631.117.225,29 turun 62,83% dibandingkan dengan saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 sebesar Rp7.078.384.229,79, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 82 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019
(dalam Rupiah)

No	SKPD	Nominal
I	RSUD MARDI WALUYO	2.495.577.275,29
1	Utang beban obat-obatan	1.041.598.732,88
2	Utang beban alat kesehatan	621.760.567,41
3	Utang beban bahan kimia	391.937.975,00
4	Utang beban alat kesehatan pihak ke III	440.280.000,00
II	DINAS PENDIDIKAN	121.794.950,00
1	Utang belanja pemeliharaan gedung TK Negeri	121.794.950,00
III	UPT Satuan Pendidikan SMPN 3 Blitar (DANA BOS)	13.745.000,00
1	Utang belanja peralatan ekstrakurikuler	13.745.000,00
	Total Utang Kepada Pihak Ketiga	2.631.117.225,29

Utang pihak ketiga pada RSUD Mardi Waluyo dikarenakan arus kas yang kurang lancar di BLUD RSUD Mardi Waluyo akibat keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS dan sampai dengan akhir Tahun klaim yang terbayar masih sampai dengan Bulan Juni 2019. Dengan adanya arus kas yang kurang lancar menyebabkan hutang kepada penyedia pada akhir Tahun

Utang pihak ketiga pada Dinas Pendidikan merupakan utang paket pekerjaan pemeliharaan Gedung TKN (TKN Sukorejo 1, TKN Karang Sari 1, TKN Pakunden 1, TKN Tanggung 1, TKN Ngadirejo 1). Penyedia sudah selesai melaksanakan pekerjaan sesuai Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Konstruksi dengan Nomor 027/239/PHO/410.110.3/2019 pada 31 Oktober 2019 akan tetapi belum dilaksanakan pembayaran oleh Dinas Pendidikan hingga akhir Tahun dikarenakan kesalahan administrasi. Hal ini telah diselesaikan secara internal antara pihak penyedia (CV.Mega Bhakti Konstruksi) dan Dinas Pendidikan Kota Blitar dengan terbitnya Surat Pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar Tanggal 29 Bulan Januari 2020 yang menyebutkan bahwa Nomor Rekening 1.01.1.0101.05.05.5.2.2.20.03 (Belanja Pemeliharaan Gedung di Dinas Pendidikan untuk Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan PNF dalam Program Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Anak Usia Dini) telah selesai



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dilaksanakan sesuai kontrak Nomor 027/238/PPK/4/410.110.3/2019 tetapi belum dilakukan pembayaran dan akan dianggarkan dalam P-APBD TA 2020.

Utang pihak ketiga pada UPT Satuan Pendidikan SMPN 3 dikarenakan kesalahan bank melakukan pendebitan pada rekening lain untuk transaksi pembayaran atas pembelian belanja peralatan ekstrakurikuler. Kesalahan tersebut baru diketahui saat melakukan tutup buku akhir Tahun sehingga timbulah utang pada penyedia barang

3. Utang Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
	14.776.923.750,69	0,00

Utang Beban merupakan barang/jasa yang sudah diterima tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum terbayarkan. Saldo Utang Beban per 31 Desember 2019 sebesar Rp14.776.923.750,69. Kenaikan Utang Beban yang signifikan disebabkan oleh adanya reklasifikasi rekening Utang Jangka Pendek Lainnya menjadi Utang Beban pada TA 2019, berdasarkan Perwali Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Perwali Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar. Utang Beban 2019 pada BLUD RSUD Mardi Waluyo dan seluruh SKPD di Pemerintah Kota Blitar berupa tagihan listrik, telepon, air, internet, jasa kerja, jasa pelayanan Kesehatan, premi jamkesda, Bantuan Sosial, BBM, jasa persampahan dan beban dari kegiatan PROLANIS. Rincian utang beban disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 83 Rincian Utang beban per 31 Desember 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Seluruh SKPD	BLUD	Total
1	Beban listrik 2019	409.641.549,00	121.946.600,00	531.588.149,00
2	Beban air 2019	3.155.350,00	27.000,00	3.182.350,00
3	Beban telepon 2019	17.743.609,00	11.222.036,00	28.965.645,00
4	Beban internet 2019	113.833.518,00	0,00	113.833.518,00
5	Beban insentif pemungutan pajak daerah tribulan IV 2019	466.178.766,00	0,00	466.178.766,00
6	Beban insentif pemungutan retribusi daerah tribulan IV 2019	223.946.835,69	0,00	223.946.835,69
7	Beban jasa kerja	62.435.000,00	0,00	62.435.000,00
8	Beban jasa pelayanan kesehatan	101.252.364,00	13.154.708.448,00	13.255.960.812,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Seluruh SKPD	BLUD	Total
9	Beban pelayanan yang ditanggung RSUD	0,00	52.104.683,00	52.104.683,00
10	Beban premi jamkesda	18.514.192,00	0,00	18.514.192,00
11	Beban bantuan sosial santunan kematian	7.600.000,00	0,00	7.600.000,00
12	Beban bahan bakar minyak	0,00	6.848.800,00	6.848.800,00
13	Beban jasa persampahan	2.625.000,00	0,00	2.625.000,00
14	Beban makanan dan minuman rapat/kegiatan-PROLANIS	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00
15	Beban jasa tenaga ahli/narasumber-PROLANIS	1.690.000,00	0,00	1.690.000,00
Jumlah		1.430.066.183,69	13.346.857.567,00	14.776.923.750,69

Selanjutnya informasi terkait Rincian Utang Beban per SKPD disajikan pada **Lampiran 25** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

4. Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
	333.612.682,00	15.693.464.367,00

Utang Jangka Pendek lainnya adalah klaim kepada Pemerintah Daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp333.612.682,00 turun 97,87% dibandingkan saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 sebesar Rp15.693.464.367,00. Penurunan Utang Jangka Pendek Lainnya yang signifikan disebabkan oleh adanya reklasifikasi rekening Utang Jangka Pendek Lainnya menjadi Utang Beban pada TA 2019, berdasarkan atas Perwali Nomor 74 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Perwali Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Blitar. Utang Jangka Pendek Lainnya 2019 merupakan Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah dilakukan rekonsiliasi berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Tripartit Saldo Akun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur Nomor: 943.3/03.D.01/203.4/2020 Tanggal 10 Maret 2020. Rincian utang kelebihan pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi disajikan pada tabel dibawah ini :



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tabel 84 Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

(dalam Rupiah)

No	SKPD	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Dinas Pendidikan	Pengelolaan Peserta didik dan pengembangan pembangunan karakter PAUD dan PNF	10.000.000,00	9.900.000,00	100.000,00
2	Dinas Pendidikan	Penyediaan Biaya Operasional Madrasah	100.000.000,00	54.503.000,00	45.497.000,00
3	Dinas Kesehatan	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	176.029.000,00	124.790.318,00	51.238.682,00
4	Bagian Tata Pemerintahan	Fasilitasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah	50.000.000,00	48.423.000,00	1.577.000,00
5	BPKAD	BPPDGS	1.311.930.000,00	1.118.730.000,00	193.200.000,00
		Bantuan Sekolah Swasta	225.600.000,00	183.600.000,00	42.000.000,00
Jumlah			1.873.559.000,00	1.539.946.318,00	333.612.682,00

5. Pendapatan Diterima di Muka	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
	225.796.500,01	155.432.018,00

Pendapatan Diterima di Muka adalah pendapatan yang sudah diterima pembayarannya oleh Pemerintah namun belum ada penyerahan barang/jasa dari Pemerintah. Nilai yang dicantumkan adalah sebesar bagian manfaat yang belum diserahkan oleh Pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan 31 Desember 2019. Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 sebesar Rp225.796.500,01 atau naik sebesar 45,27% dibandingkan saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2018 sebesar Rp155.432.018,00 yang terdiri dari:

Tabel 85 Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	SKPD	2019	2018	Keterangan
1	RSUD Mardi Waluyo	15.666.666,67	15.000.000,00	Pendapatan sewa tanah Kantor & ATM BPD Jatim, ATM Mandiri, ATM BRI
1	BPKAD	84.000.000,00	32.942.250,00	Fasilitas Umum - Sewa Tanah SPBU Kebonrojo
2	BPKAD	14.101.926,67	20.843.443,33	Fasilitas Umum - ATM BRI
3	BPKAD	0,00	10.869.478,00	Fasilitas Umum - ATM BPD Jatim dan PIPP
4	BPKAD	28.749.600,00	36.590.400,00	Fasilitas Umum - Menara Telekomunikasi pada Kelurahan Sananwetan
5	BPKAD	16.010.720,00	20.377.280,00	Fasilitas Umum - Menara Telekomunikasi pada Kelurahan Bendogerit
6	BPKAD	16.100.920,00	0,00	Fasilitas Umum - ATM Bank Mandiri
7	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	24.750.000,00	16.041.666,67	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan
8	Dinas Perhubungan	0,00	112.500,00	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Ijin Terop)
9	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	2.625.000,00	Retribusi Pemakaian kekayaan daerah (Sewa Tanah SUTT)
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	0,00	30.000,00	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (GOR Soekarno Hatta)
11	Kecamatan Sukorejo	26.416.666,67	0,00	Fasilitas Umum - Sewa Agrowisata Belimbing Karang Sari
Total		225.796.500,01	155.432.018,00	

Rincian mutasi Pendapatan Diterima di Muka Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo Awal	155.432.018,00
<u>Mutasi Tambah :</u>	
Dampak Kumulatif Kurang Catat Saldo Awal Pendapatan Diterima di Muka	7.333.333,33
Realisasi LRA Tahun 2019	<u>157.517.586,67</u>
Jumlah Mutasi Tambah	164.850.920,00
<u>Mutasi Kurang :</u>	



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka
atas tahun sebelumnya menjadi

Pendapatan LO TA 2019 94.486.437,99

Jumlah Mutasi Kurang 94.486.437,99

Jumlah Mutasi Bersih 70.364.482,01

Saldo Akhir 225.796.500,01

Rincian Pendapatan Diterima di Muka pada per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sewa Menyewa Hak Atas Tanah yang berlokasi di Lingkungan PIPP Kota Blitar yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Blitar dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
2. Sewa Tanah Aset Pemerintah Kota Blitar antara Pemerintah Kota Blitar dengan PT.Moderna Tehnik Perkasa dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2020;
3. Sewa Menyewa Bangunan di Pasar Legi dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
4. Sewa Menyewa Bangunan di Pasar Legi dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2020;
5. Sewa menyewa hak atas tanah, bangunan, dan pohon yang berlokasi di Lingkungan Agrowisata Belimbing Karang Sari yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Blitar dengan masa perjanjian terhitung sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020;
6. Sewa Menyewa Tanah dan/atau Bangunan untuk Anjungan Tunai Mandiri Bank Jatim antara RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Kantor Cabang Blitar dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
7. Sewa Menyewa Lokasi ATM Jl,Kalimantan No. 113 Kota Blitar antara RSUD Mardi Waluyo dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan masa perjanjian terhitung sejak Tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan Tanggal 1 September 2020; dan
8. Sewa Menyewa antara RSUD Mardi Waluyo Kota Blitar dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. Kantor Cabang Blitar tentang Sewa Bangunan dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak Tanggal 25 April 2019 sampai dengan Tanggal 25 April 2020.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Metode pengakuan pendapatan terutang atas perjanjian yang disusun pada tanggal pertengahan bulan berjalan yaitu dengan menghitung masa manfaat terutang pada awal bulan berikutnya.

Selanjutnya, informasi terkait perhitungan pendapatan diterima dimuka Tahun 2019 yang menyajikan nomor perjanjian, jangka waktu perjanjian, nilai perjanjian, dan perhitungan secara rinci disajikan pada **Lampiran 26** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

6.	Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikannya	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
		<u>128.175.000,00</u>	<u>0,00</u>

Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikannya adalah uang yang telah diterima oleh pemerintah daerah namun belum dapat ditentukan apakah uang tersebut menjadi hak pemerintah atau bukan.

Saldo Penerimaan kas yang belum teridentifikasi kepemilikannya pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp128.175.000,00 terdiri dari saldo Jaminan Bongkar Reklame (jambong) pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.025.000,00 dan saldo Jaminan Sewa Rusunawa pada Dinas Perumahan Rakyat sebesar Rp127.150.000,00.

7.5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Kewajiban Jangka Panjang	(Rp)	(Rp)
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika kewajiban tersebut jatuh tempo lebih dari satu Tahun setelah tanggal pelaporan. Pemerintah Kota Blitar tidak mempunyai kewajiban jangka panjang per 31 Desember 2019.

7.5.3.2.3. Ekuitas

		31 Desember 2019	31 Desember 2018
	Ekuitas	(Rp)	(Rp)
		<u>2.644.733.042.031,17</u>	<u>2.418.486.225.592,99</u>

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kota Blitar yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kota Blitar. Total saldo pos Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.644.733.042.031,17 meningkat sebesar 8,33% jika dibandingkan dengan ekuitas 31 Desember 2018 sebesar Rp2.418.486.225.592,99.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

7.5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kota Blitar dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer-LO, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah - LO. Realisasi Pendapatan Tahun 2019 LO sebesar Rp1.026.825.725.559,50. Adapun rincian Pendapatan LO adalah sebagai berikut.

Tabel 86 Rincian Pendapatan—LO Tahun Anggaran 2019 dan 2018

(dalam rupiah)

No	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan %
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	178.822.948.907,70	172.192.817.449,92	3,85
2	Pendapatan Transfer – LO	773.861.717.755,00	706.296.318.478,00	9,57
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO	74.141.058.896,80	26.902.316.298,03	175,59
Jumlah		1.026.825.725.559,50	905.391.452.225,95	13,41

7.5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2019 sebesar Rp178.822.948.907,70 mengalami kenaikan sebesar 3,85% dibandingkan tahun 2018 Rp172.192.817.449,92. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

**Tabel 87 Rincian Pendapatan Asli Daerah—LO
Tahun Anggaran 2019 dan 2018**

(dalam rupiah)

No	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Pajak Daerah	45.340.370.942,53	41.315.817.564,96	9,74
2	Pendapatan Retribusi Daerah	10.291.269.455,50	9.685.731.875,33	6,25
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	997.102.292,74	1.382.992.321,19	(27,90)
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	122.194.206.216,93	119.808.275.688,44	1,99
Jumlah		178.822.948.907,70	172.192.817.449,92	3,85



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

4. Pendapatan Pajak Daerah – LO	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
	45.340.370.942,5	41.315.817.564,96

3

Pajak Daerah-LO merupakan Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh BPKAD Kota Blitar yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Blitar. Pendapatan pajak pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2019, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2019 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan Tahun 2019. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan Laporan Operasional melainkan masuk pada pendapatan LRA. Pendapatan Pajak Daerah - LO pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp45.340.370.942,53 mengalami kenaikan sebesar 9,74% dibandingkan Tahun 2018 Rp41.315.817.564,96. Berikut adalah perhitungan Pajak Daerah pada Laporan Operasional Tahun 2019.

Pajak Daerah – Laporan Realisasi Anggaran		Rp	44.650.054.610,03
<u>Mutasi Tambah:</u>			
1	Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2019	Rp	8.566.328.579,00
2	Pendapatan diterima di muka Pajak Daerah per 31 Desember 2018	Rp	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan Pajak Daerah per 31 Desember 2019	Rp	10.514.579,00
4	Dampak Kumulatif atas lebih catat Piutang Pajak Daerah	Rp	3.466.960,00
	Jumlah	Rp	8.580.310.118,00
<u>Mutasi Kurang:</u>			
1	Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2018	Rp	7.887.300.285,50
2	Pendapatan diterima di muka Pajak Daerah per 31 Desember 2019	Rp	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan Pajak Daerah per 31 Desember 2018	Rp	0,00
4	Dampak Kumulatif atas kurang catat Piutang Pajak Daerah	Rp	2.693.500,00
	Jumlah	Rp	7.889.993.785,50
	Jumlah mutasi bersih	Rp	690.316.332,50
	Pajak Daerah- Laporan Operasional	Rp	45.340.370.942,53



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 88 Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO
Tahun Anggaran 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pajak Hotel-LO	1.102.357.060,00	1.012.799.951,00	8,84
2	Pajak Restoran-LO	4.573.815.103,60	3.678.515.773,46	24,34
3	Pajak Hiburan-LO	2.078.900.683,00	1.186.459.754,00	75,22
4	Pajak Reklame-LO	628.799.066,93	642.904.915,50	(2,19)
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	10.373.567.262,00	9.949.854.824,00	4,26
6	Pajak Parkir-LO	339.963.031,00	306.070.500,00	11,07
7	Pajak Air Tanah-LO	63.280.814,00	63.555.120,00	(0,43)
8	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO	12.663.256.122,00	12.251.626.153,00	3,36
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan-LO	13.516.431.800,00	12.224.030.574,00	10,57
Jumlah		45.340.370.942,53	41.315.817.564,96	9,74

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
5. Pendapatan Retribusi Daerah – LO	10.291.269.455,50	9.685.731.875,33

Pendapatan Retribusi Daerah - LO pada Pemerintah Kota Blitar dipungut dan dikelola oleh 20 SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kota Blitar. Pemungutan Retribusi Daerah Kota Blitar didasarkan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Operasional Retribusi Daerah pada tahun 2019 sebesar Rp10.291.269.455,50 mengalami kenaikan sebesar 6,25% dibandingkan tahun 2018 Rp9.685.731.875,33. Berikut adalah perhitungan atas Retribusi Daerah pada Laporan Operasional Tahun 2019.

Retribusi Daerah - Laporan Realisasi Anggaran		Rp 10.138.463.905,50
Mutasi tambah :		
Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2019	Rp 7.035.399.765,00	
Pendapatan diterima di muka Retribusi Daerah per 31 Desember 2018	Rp 18.809.166,67	
Dampak Kumulatif atas kurang catat Pendapatan Diterima di Muka	Rp 7.333.333,33	
Kas di Bendahara Penerimaan Retribusi Daerah per 31 Desember 2019	Rp 7.898.000,00	
Jumlah Mutasi Tambah	Rp 7.069.440.265,00	
Mutasi Kurang :		



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2018	Rp	6.864.141.715,00
Pendapatan diterima di muka Retribusi Daerah per 31 Desember 2019	Rp	24.750.000,00
Kas di Bendahara Penerimaan Retribusi Daerah per 31 Desember 2018	Rp	19.913.000,00
Dampak Kumulatif atas kurang catat Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	Rp	7.830.000,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp	6.916.634.715,00
Jumlah Mutasi Bersih	Rp	152.805.550,00
Retribusi Daerah- Laporan Operasional	Rp	10.291.269.455,50

Rincian penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah - LO Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 89 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO
Tahun Anggaran 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Retribusi Jasa Umum-LO	5.098.579.573,00	5.078.499.847,00	0,40
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.254.259.472,00	1.431.093.447,00	(12,36)
	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	263.623.000,00	141.897.000,00	85,78
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.791.873.000,00	1.728.902.000,00	3,64
	Retribusi Pelayanan Pasar	1.034.457.000,00	1.097.264.000,00	(5,72)
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	527.227.901,00	486.334.200,00	8,41
	Retribusi Penyediaan/Penyedotan Kakus	23.400.000,00	16.420.000,00	42,51
	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	10.900.000,00	11.555.000,00	(5,67)
	Sewa Alat-alat Berat/Walls	24.650.000,00	25.150.000,00	(1,99)
	Pelayanan Pemeriksaan Lab kesehatan Lingkungan	150.470.000,00	108.640.000,00	38,50
	Retribusi Tera Ulang	17.719.200,00	31.244.200,00	(43,29)
2	Retribusi Jasa Usaha-LO	4.317.307.382,50	4.054.419.428,33	6,48
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.795.033.382,50	1.546.409.595,00	16,08
	Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	136.825.000,00	172.205.333,33	(20,55)
	Retribusi Terminal	117.722.000,00	140.860.500,00	(16,43)
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	676.242.000,00	706.718.000,00	(4,31)
	Retribusi Rumah Potong Hewan	315.877.000,00	181.967.000,00	73,59
	Retribusi Tempat Rekreasi dan olah Raga	171.365.000,00	192.330.000,00	(10,90)
	Retribusi Jasa Informasi dan Penyiaran- LO	60.591.000,00	0,00	0,00
	Retribusi Memasuki Kawasan Wisata	1.043.652.000,00	1.113.929.000,00	(6,31)
3	Retribusi Perijinan Tertentu-LO	875.382.500,00	552.812.600,00	58,35
	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	873.989.500,00	551.259.600,00	58,54
	Retribusi Ijin Trayek	1.393.000,00	1.553.000,00	(10,30)
	Jumlah (1+2+3)	10.291.269.455,50	9.685.731.875,33	6,25



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
6. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	997.102.292,74	1.382.992.321,19

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Blitar pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah yaitu Penyertaan Modal pada PT Bank Jawa Timur dan PD BPR Artha Praja. Realisasi pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp997.102.292,74 mengalami penurunan sebesar (27,90)% dibandingkan Pendapatan LO 2018 sebesar Rp1.382.992.321,19. Perhitungan atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Laporan Operasional Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Laporan Realisasi Anggaran	Rp 1.169.069.219,24
Mutasi tambah :	
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2019	Rp 222.321.391,50
Jumlah Mutasi Tambah	Rp 222.321.391,50
Mutasi Kurang :	
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2018	Rp 394.288.318,00
Jumlah Mutasi Kurang	Rp 394.288.318,00
Jumlah Mutasi Bersih	Rp (171.966.926,50)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - Laporan Operasional	Rp 997.102.292,74

Rincian penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 90 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun Anggaran 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/ BUMD-LO			
A	Bagian Laba atas penyertaan modal pada PT Bank Jawa timur	774.780.901,24	749.130.404,40	3,42
B	Bagian Laba atas penyertaan modal pada PD BPR Artha Praja	222.321.391,50	633.861.916,79	(64,93)
	Jumlah	997.102.292,74	1.382.992.321,19	(27,90)

Pemerintah Kota Blitar dalam menghitung pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan menggunakan metode ekuitas (kepemilikan diatas 50%) yaitu



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

pendapatan diakui sebesar laba BUMD yang diperoleh untuk PD BPR Artha Praja dan proporsional untuk PT Bank Jawa Timur sesuai hasil RUPS (metode perolehan).

7. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
	<u>122.194.206.216,93</u>	<u>119.808.275.688,44</u>

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar Pendapatan Pajak Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode tahun anggaran 2019. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp122.194.206.216,93, mengalami kenaikan sebesar 3,36% dibandingkan Pendapatan LO Tahun 2018 sebesar Rp119.808.275.688,44. Perhitungan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada Laporan Operasional Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - Laporan Realisasi Anggaran **Rp** 110.182.591.046,62

Mutasi tambah :

1	Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan per 31 Desember 2019	Rp	45.669.947.272,37
2	Pendapatan diterima di muka Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan per 31 Desember 2018	Rp	136.622.851,33
3	Kas di Bendahara Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan per 31 Desember 2019	Rp	69.355.391,21
4	Dampak Kumulatif atas lebih catat piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan Penyesuaian	Rp	3.451.791,51
5	Kontraktual - Selisih pembayaran klaim dengan tagihan BPJS pada RSUD Mardi Reklasifikasi beban administrasi	Rp	754.000,00
6	pembayaran klaim BPJS ke beban jasa transaksi keuangan pada Dinas Kesehatan	Rp	10.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7	Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional karena penyesuaian piutang dana bergulir KPUK BNI		724.073,58		
8	Kas di Bendahara Lainnya		1.839.803,00		
	Jumlah Mutasi Tambah	Rp	45.882.705.183,00		
	Mutasi Kurang :				
1	Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan per 31 Desember 2018	Rp	33.448.804.706,72		
2	Pendapatan diterima di muka Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan per 31 Desember 2019	Rp	201.046.500,01		
3	Kas di Bendahara Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan per 31 Desember 2018	Rp	108.850.779,94		
4	Dampak Kumulatif atas kurang catat piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan	Rp	7.651.912,51		
5	Pembayaran Kas di Bendahara Pengeluaran PPKD	Rp	104.682.000,00		
6	Dampak Kumulatif atas lebih catat kas di bendahara penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan	Rp	54.113,51		
	Jumlah Mutasi Kurang	Rp	33.871.090.012,69		
	Jumlah Mutasi Bersih			Rp	12.011.615.170,31
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah yang Dipisahkan - Laporan Operasional	Rp			122.194.206.216,93



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah LO adalah sebagai berikut:

Tabel 91 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LO
Tahun Anggaran 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan %
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO	178.214.499,00	139.121.450,00	28,10
A	Penjualan hasil penebangan pohon	14.840.000,00	13.860.000,00	7,07
B	Penjualan Bahan Bekas Bangunan	132.550.999,00	0,00	0,00
C	Penjualan hasil pertanian	5.400.000,00	80.651.450,00	(93,30)
D	Penjualan hasil perikanan	25.423.500,00	44.610.000,00	(43,01)
2	Penerimaan Jasa Giro-LO	3.449.859.650,70	2.623.390.931,03	31,50
3	Pendapatan Bunga –LO	1.936.174.173,12	758.261.596,63	155,34
A	Bank Jatim	571.318.493,05	291.404.109,53	96,06
B	Bank BNI 46	450.672.599,14	167.400.315,86	169,22
C	Bank Mandiri	318.976.289,76	175.694.506,60	81,55
D	Bank BRI	407.474.283,36	110.852.074,64	267,58
E	Bank BTN	174.821.917,81	0,00	0,00
F	PDAM	12.910.590,00	12.910.590,00	0,00
4	Lain - lain/Pembulatan Gaji-LO	122.610,00	5.049,00	2.328,40
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	446.520.077,75	286.939.220,09	55,61
A	Bidang Pendidikan	9.534.450,00	101.660.662,40	(90,62)
B	Bidang Kesehatan	84.403.657,71	0,00	0,00
B	Bidang Pekerjaan Umum	338.390.892,11	175.089.542,89	93,27
C	Bidang Lingkungan Hidup	5.819.924,64	17.877,80	32.453,92
D	Bidang Pariwisata	8.371.153,29	0,00	0,00
E	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	0,00	10.171.137,00	(100,00)
6	Pendapatan Denda Pajak-LO	602.424.172,00	6.381.206,00	9.340,60
A	Denda Pajak Bumi dan Bangunan	602.424.172,00	6.381.206,00	9.340,60
7	Pendapatan Denda Retribusi-LO	213.072.000,00	140.275.000,00	51,90



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan %
A	Denda Retribusi Jasa Umum	109.700.000,00	134.675.000,00	(18,54)
B	Denda Retribusi Jasa Usaha	103.372.000,00	5.600.000,00	1.745,93
8	Pendapatan Denda Lain- Lain PAD Yang Sah-LO	250.000,00	14.750.000,00	(98,31)
9	Pendapatan dari Pengembalian –LO	394.564.471,00	964.868.990,59	(59,11)
A	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja	394.564.471,00	964.868.990,59	(59,11)
10	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum-LO	1.442.922.942,99	1.254.082.618,67	15,06
A	Fasilitas Umum	1.269.969.446,99	1.085.717.891,67	16,97
B	Fasilitas Rusunawa	172.953.496,00	168.364.727,00	2,73
11	Pendapatan dari BLUD-LO	107.632.781.642,76	108.644.330.202,20	(0,93)
12	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	0,00	852.690,50	(100,00)
A	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir UMKM/Koperasi	0,00	852.690,50	(100,00)
13	Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	5.355.828.300,00	4.472.179.350,00	19,76
A	Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD Kesehatan Kecamatan Kepanjen Kidul	1.637.209.200,00	1.247.015.100,00	31,29
B	Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD Kesehatan Kecamatan Sukorejo	1.628.120.400,00	1.369.026.000,00	18,93
C	Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD Kesehatan Kecamatan Sananwetan	2.090.498.700,00	1.856.138.250,00	12,63
14	Pendapatan atas Kelebihan Pembayaran	4.239.166,00	24.249.666,00	(82,52)
A	Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah	50.900,00	21.976.565,00	(99,77)
B	Kelebihan Pembayaran Retribusi Daerah	3.899.000,00	4.000,00	97.375,00
C	Kelebihan Pembayaran Lain- Lain PAD yang sah	289.266,00	2.269.101,00	(87,25)
15	Lain Lain PAD yang sah Lainnya – LO	1.367.200,00	1.565.917,73	(12,69)
16	BPJS Kesehatan Non Kapitasi	516.756.100,00	416.367.800,00	24,11
17	Hasil Eksekusi Jaminan	18.401.447,65	2.642.000,00	596,50
A	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan	8.824.223,94	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan %
B	Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame	9.577.223,71	2.642.000,00	262,50
18	Pendapatan atas Jasa Informasi dan Penyiaran	0,00	58.012.000,00	(100,00)
19	Pendapatan Bunga Tabungan- LO	707.763,96	0,00	0,00
Jumlah 1 s/d 19		122.194.206.216,93	119.808.275.688,44	(1,99)

7.5.4.1.2 Pendapatan Transfer - LO

Realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2019 sebesar Rp773.861.717.755,00. Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Perhitungan atas Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Pendapatan Transfer - Laporan Realisasi Anggaran		Rp	757.519.568.319,00
Mutasi tambah :			
1	Piutang Pendapatan Transfer per 31 Desember 2019	Rp	27.984.928.194,00
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	27.984.928.194,00
Mutasi Kurang :			
1	Piutang Pendapatan Transfer per 31 Desember 2018	Rp	5.024.336.392,00
2	Dampak Kumulatif Kurang Catat Piutang	Rp	6.284.829.684,00
3	Sisa Bantuan Keuangan Provinsi yang diterima tahun 2019 yang belum disetor ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur		333.612.682,00
Jumlah Mutasi Kurang			11.642.778.758,00
Jumlah Mutasi Bersih		Rp	16.342.149.436,00
Pendapatan Transfer - Laporan Operasional		Rp	773.861.717.755,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Pendapatan Transfer - LO adalah sebagai berikut:

Tabel 92 Rincian Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LO	641.979.344.464,00	626.534.717.922,00	2,47
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya –LO	51.430.800.000,00	13.000.000.000,00	295,62
3	Transfer Pemerintah Provinsi – LO	80.451.573.291,00	66.761.600.556,00	20,51
Jumlah		773.861.717.755,00	706.296.318.478,00	9,57

7.5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan-LO

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
Transfer Pemerintah Pusat	641.979.344.464,00	626.534.717.922,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO Tahun 2019 sebesar Rp641.979.344.464,00. Rincian realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-LO Tahun 2019 sebagai berikut.

Tabel 93 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO Tahun Anggaran 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan %
1	Bagi Hasil Pajak	42.515.389.332,00	33.311.778.801,00	27,63
	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	4.381.586.509,00	3.995.603.608,00	9,66
	Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri	11.905.625.329,00	15.634.320.193,00	(23,85)
	Bagi Hasil Pajak Cukai Hasil Tembakau	26.228.177.494,00	13.681.855.000,00	91,70
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	76.309.046.859,00	67.464.332.495,00	13,11
	Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi	65.153.062.564,00	62.568.101.586,00	4,13
	Bagi Hasil Pertambangan Gas Bumi	8.763.773.812,00	3.099.167.031,00	182,78
	Bagi Hasil Pertambangan Umum Royalty	1.381.798.587,00	814.447.240,00	69,66
	Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	38.789.197,00	31.203.994,00	24,31
	Bagi Hasil Sumber Daya Hutan	207.161.707,00	250.178.053,00	(17,19)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan %
	Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan	764.460.992,00	701.234.591,00	9,02
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	430.364.698.000,00	421.212.306.000,00	2,17
4	Dana Alokasi Umum Tambahan	7.411.761.000,00	0,00	0,00
5	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK)	85.378.449.273,00	104.546.300.626,00	(18,33)
	DAK Bidang Pendidikan	4.841.763.342,00	4.723.986.880,00	2,49
	DAK Bidang Kesehatan	7.897.897.386,00	10.836.389.900,00	(27,12)
	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	9.013.132.350,00	25.060.350.000,00	(64,03)
	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	2.107.876.970,00	2.211.111.700,00	(4,67)
	DAK Bidang Air Minum	0,00	600.113.000,00	(100,00)
	DAK Bidang Sanitasi (reguler)	1.028.239.000,00	1.574.339.200,00	(34,69)
	DAK Bidang Pertanian	2.547.599.701,00	648.750.000,00	292,69
	DAK Bidang Lingkungan Hidup	641.094.443,00	475.840.150,00	34,73
	Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman	3.209.644.000,00	2.365.755.000,00	35,67
	Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar	1.172.921.600,00	2.832.276.100,00	(58,59)
	Dana Alokasi Khusus Bidang KB (penugasan)	1.008.802.900,00	0,00	0,00
	DAK Bidang Sanitasi (penugasan)	445.200.000,00	1.819.500.150,00	(75,53)
	Dana Alokasi Khusus Bidang Pariwisata	1.099.104.511,00	1.821.926.000,00	(39,67)
	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	3.524.945.350,00	3.967.695.350,00	(11,16)
	Dana Alokasi Khusus Tunjangan Profesi Guru	40.291.163.325,00	42.132.720.844,00	(4,37)
	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Kesehatan	0,00	2.038.496.050,00	(100,00)
	Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional KB	2.935.551.276,00	631.945.082,00	364,53
	Dana Alokasi Khusus Penyelenggaraan Pendidikan	1.828.100.000,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan %
	Dana Alokasi Khusus Koperasi dan UKM	470.000.000,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Kepariwisataaan	521.736.000,00	0,00	0,00
	Dana Alokasi Khusus Tambahan Penghasilan Guru	0,00	90.900.000,00	(100,00)
	Dana Alokasi Khusus Pelayanan Administrasi Kependudukan	793.677.119,00	714.205.220,00	11,13
	Jumlah	641.979.344.464,00	626.534.717.922,00	2,47

7.5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Transfer Pemerintah Pusat –Lainnya	(Rp)	(Rp)
	51.430.800.000,00	13.000.000.000,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO Tahun 2019 sebesar Rp51.430.800.000,00 merupakan insentif daerah. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar 295,62% dibandingkan pendapatan pada TA 2018 yang hanya sebesar Rp13.000.000.000,00.

7.5.4.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi – LO

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Transfer Pemerintah Provinsi—LO	(Rp)	(Rp)
	80.451.573.291,00	66.761.600.556,00

Jumlah realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur – LO Tahun 2019 sebesar Rp80.451.573.291,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Transfer Pemerintah Provinsi - Laporan Realisasi Anggaran		Rp 89.014.268.201,00
Mutasi tambah :		
Piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2019	Rp	3.080.083.848,00
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	3.080.083.848,00
Mutasi Kurang :		
Piutang Transfer Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2018	Rp	5.024.336.392,00
Dampak Kumulatif Kurang Catat Piutang	Rp	6.284.829.684,00
Sisa Bantuan Keuangan Provinsi yang diterima tahun 2019 yang belum disetor ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Rp	333.612.682,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah Mutasi Kurang	Rp	11.642.778.758,00
Mutasi Bersih	Rp	(8.562.694.910,00)
Transfer Pemerintah Provinsi – LO	Rp	80.451.573.291,00

Rincian Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 94 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO
Tahun Anggaran 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

No	Uraian	2019	2018	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	25.861.006.458,00	17.804.276.510,00	45,25
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	11.593.325.833,00	8.989.647.628,00	28,96
3	Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.072.488.448,00	12.695.167.985,00	58,11
4	Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	216.577.401,00	165.789.474,00	30,63
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	21.168.228.833,00	25.354.188.959,00	(16,50)
6	Bantuan Keuangan Provinsi	1.539.946.318,00	1.752.530.000,00	(12,13)
	Jumlah	80.451.573.291,00	66.761.600.556,00	20,51

7.5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan yang Sah—LO

Pendapatan Lainnya yang Sah—LO	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
	74.141.058.896,80	26.902.316.298,03

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Tahun 2019 sebesar Rp74.141.058.896,80 merupakan Pendapatan Hibah. Pendapatan tersebut mengalami kenaikan sebesar 175,59% dibandingkan dengan pendapatan tahun lalu yang hanya sebesar Rp26.902.316.298,03. Mutasi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO adalah sebagai berikut:

Pendapatan Lainnya yang Sah – LRA	Rp	17.063.120.000,00
Mutasi tambah : Pendapatan Hibah	Rp	57.077.938.896,80
Mutasi Kurang:	Rp	0,00
Pendapatan Lainnya yang Sah – LO	Rp	74.141.058.896,80

Unsur Pendapatan Lain-lain yang Sah dari Pendapatan Lainnya Tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 95 Rincian Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO

(dalam Rupiah)

No	Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO	Nominal
1	Pendapatan Hibah dari APBN berupa kendaraan bus pada Dinas Perhubungan dari dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat-Kementrian	670.000.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO	Nominal
	Perhubungan	
2	Pendapatan hibah dari APBN pada SMPN 1 Blitar dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP)-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	990.764.000,00
3	Pendapatan Hibah Jalan, Irigasi, Jaringan dari APBN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	10.050.595.000,00
4	Pendapatan Hibah Rusunawa pada Dinas Perumahan Rakyat dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	40.811.297.811,00
5	Pendapatan Hibah Tanah sawah di Kelurahan Blitar dari warga a.n Budi Onggowarsito	935.307.000,00
6	Pendapatan Hibah BOSNAS	17.063.120.000,00
7	Pendapatan Hibah Alat Kontrasepsi dari Pemerintah Propinsi ke Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan KB	22.047.826,80
8	Pendapatan Hibah bahan obat-obatan dari Pemerintah Propinsi ke Dinas Kesehatan	1.040.813.604,00
9	Pendapatan Hibah bahan kesehatan dari Pemerintah Propinsi ke Dinas Kesehatan	1.055.243.759,00
10	Pendapatan Hibah persediaan cetak dari Pemerintah Propinsi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	79.282.500,00
11	Pendapatan hibah tanah makam aryo blitar beserta bangunan gazebo dari LPMK Kelurahan Blitar pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	470.625.000,00
12	Pendapatan Hibah transfer Dana Bantuan UN SMP pada Dinas Pendidikan	40.842.000,00
13	Pendapatan Hibah transfer Dana Bantuan Pemerintah Diklat PKB melalui PKP berbasis zonasi melalui Dinas Pendidikan untuk 3 Sekolah (SMPN 2 Blitar, SMPN 5 Blitar, SMPN 6 Blitar)	469.518.000,00
14	Pendapatan Hibah transfer Dana Bantuan Pemerintah UKS pada UPTD SMPN 1 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	49.987.396,00
15	Pendapatan Hibah transfer Dana Bantuan Pemerintah SPMI pada UPTD SMPN 6 dari LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan)	20.000.000,00
16	Pendapatan Hibah transfer Dana Bantuan Pemerintah SPMI pada UPTD SMPN 7 dari LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan)	20.000.000,00
17	Pendapatan Hibah transfer Dana Bantuan Pemerintah SPMI pada UPTD SMPN 8 dari LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan)	20.000.000,00
18	Pendapatan Hibah transfer Dana Bantuan Pemerintah SPMI, PKL, Pembinaan Kurikulum dan Sekolah Rujukan pada Dinas Pendidikan dari LPMP dan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan	317.750.000,00
19	Pendapatan Hibah Prolanis Pada UPT Puskesmas Sananwetan dari BPJS Kesehatan	2.900.000,00
20	Pendapatan Hibah Prolanis Pada UPT Puskesmas Kepanjenkidul dari BPJS Kesehatan	2.355.000,00
21	Pendapatan Hibah Prolanis Pada UPT Puskesmas Sukorejo dari BPJS Kesehatan	8.610.000,00
	Jumlah	74.141.058.896,80



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.4.2 BEBAN LO

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

7.5.4.2.1 Beban Pegawai

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
Beban Pegawai	<u>310.084.447.278,09</u>	<u>274.121.482.101,00</u>

Jumlah Beban Pegawai pada tahun 2019 sebesar Rp310.084.447.278,09 atau naik 13,12% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp274.121.482.101,00. Rincian Beban Pegawai tahun 2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 96 Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Beban Gaji dan Tunjangan-LO	241.468.852.059,00	231.608.655.859,00
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS-LO	56.187.922.824,00	29.679.775.219,00
3	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH-LO	3.934.224.100,00	4.402.333.500,00
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah-LO	351.082.303,09	272.927.695,00
5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah-LO	1.732.902.542,00	1.662.206.897,00
6	Uang Lembur-LO	328.596.500,00	257.387.000,00
7	Beban Pegawai BLUD Rumah Sakit	6.080.866.950,00	6.238.195.931,00
	Jumlah	310.084.447.278,09	274.121.482.101,00

7.5.4.2.2 Beban Persediaan

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
Beban Persediaan	<u>113.706.236.916,26</u>	<u>102.333.032.111,64</u>

Beban Persediaan disajikan dengan basis akrual, yaitu Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dengan penggunaan metode fisik maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik dikalikan dengan nilai per unit sesuai dengan metode Harga Pembelian Terakhir. Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2019 sebesar Rp113.706.236.916,26 atau naik 11,11% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp102.333.032.111,64. Rincian Beban Persediaan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 97 Rincian Beban Persediaan Tahun Anggaran 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Beban Bahan Pakai Habis	12.613.827.025,86	11.769.447.782,84
2	Beban Bahan/Material	12.905.383.747,22	12.989.389.174,07



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3	Beban Publikasi	5.745.530.725,00	5.505.057.541,36
4	Beban Cetak dan Penggandaan	12.489.013.585,44	10.950.938.844,07
5	Beban Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Atribut Dinas	557.329.565,00	447.194.660,00
6	Beban Pakaian Kerja	2.525.072.815,00	1.668.366.405,00
7	Beban Pakaian Khusus Hari hari Tertentu	5.215.651.875,00	4.227.997.900,00
8	Beban Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	0,00
9	Beban Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	0,00	0,00
10	Beban Barang/Jasa Yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	9.424.387.537,46	2.298.121.157,00
11	Beban Materi Pendidikan dan Perlengkapan Siswa	7.083.264.851,00	7.991.161.500,00
12	Beban Persediaan BLUD	45.146.775.189,28	44.485.357.147,30
Jumlah		113.706.236.916,26	102.333.032.111,64

7.5.4.2.3 Beban Jasa

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
Beban Jasa	190.683.550.907,94	171.658.774.458,41

Jumlah Beban Jasa pada tahun 2019 sebesar Rp190.683.550.907,94 atau naik 11,08% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp171.658.774.458,41. Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut:

Tabel 98 Rincian Beban Jasa Tahun Anggaran 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Honorarium PNS	3.454.436.000,00	2.720.121.676,00
2	Honorarium Non PNS	5.318.898.245,00	4.747.839.311,00
3	Beban Jasa Kantor	78.557.930.632,30	65.007.483.685,66
4	Beban Premi Asuransi	9.765.439.249,00	7.156.600.822,00
5	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	3.616.305.822,00	3.483.477.039,00
6	Beban Sewa Tanah/Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	1.405.972.100,00	706.868.500,00
7	Beban Sewa Sarana Mobilitas	654.867.250,00	538.936.400,00
8	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	6.346.389.640,00	5.510.372.211,67
9	Beban Makanan dan Minuman	27.949.995.671,00	24.020.965.685,00
10	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS	9.866.979.903,00	6.993.150.743,96
11	Beban Jasa Konsultansi	7.340.514.908,40	4.754.954.168,00
12	Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.129.908.800,00	786.625.000,00
13	Belanja Jasa Tenaga Ahli	7.895.106.418,00	5.558.290.609,52
14	Beban Jasa BLUD	27.380.806.269,24	39.673.088.606,60



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
	Jumlah	190.683.550.907,94	171.658.774.458,41

7.5.4.2.4 Beban Pemeliharaan

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban Pemeliharaan	(Rp)	(Rp)
	28.750.894.250,75	23.003.122.165,76

Jumlah Beban Pemeliharaan pada Tahun 2019 sebesar Rp28.750.894.250,75 atau naik 24,99% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp23.003.122.165,76. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Tabel 99 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Beban Pemeliharaan Jalan	1.512.953.009,00	741.957.500,00
2	Beban Pemeliharaan Jembatan	98.966.755,00	160.000.000,00
3	Beban pemeliharaan Gedung	9.250.236.092,94	6.846.332.798,00
4	Beban pemeliharaan Bangunan bukan Gedung	3.370.408.463,94	2.432.269.350,00
5	Beban pemeliharaan Mebeulair	321.072.935,00	354.353.350,00
6	Beban pemeliharaan Komputer dan Perlengkapannya	1.055.626.670,00	933.539.970,00
7	Beban Pemeliharaan <i>Software</i>	383.619.533,33	577.620.056,00
8	Beban Pemeliharaan Air Conditioner /AC	391.906.950,00	390.656.950,00
9	Beban pemeliharaan peralatan/mesin kantor	128.707.900,00	98.705.500,00
10	Beban pemeliharaan perlengkapan kantor	353.953.900,00	379.241.650,00
11	Beban pemeliharaan Alat - alat Komunikasi	45.765.000,00	54.075.900,00
12	Beban pemeliharaan Alat - alat studio	115.874.900,00	94.788.750,00
13	Beban pemeliharaan Alat - Alat kedokteran/kesehatan	38.570.900,00	57.897.500,00
14	Beban pemeliharaan Alat - alat Berat	287.859.000,00	160.236.000,00
15	Beban pemeliharaan Alat - alat bengkel/mesin	123.400.000,00	86.166.000,00
16	Beban pemeliharaan alat - alat Kesenian/Kebudayaan dan Olahraga	53.374.700,00	39.237.100,00
17	Beban pemeliharaan alat - alat Pertanian dan Perkebunan	633.500,00	439.000,00
18	Beban pemeliharaan alat laboratorium	56.145.500,00	22.000.000,00
19	Beban pemeliharaan alat - alat ukur	600.000,00	500.000,00
20	Beban pemeliharaan buku/kepuustakaan	2.890.200,00	4.541.300,00
21	Beban pemeliharaan Jaringan Air (kanal,irigasi,reservoir,air bersih/minum,saluran drainase/gorong-gorong)	2.647.476.260,36	1.768.777.700,00
22	Beban pemeliharaan Jaringan Listrik penerangan jalan umum, taman dan hutan kota	126.780.600,00	388.157.900,00
23	Beban Pemeliharaan Rambu - rambu Lalu lintas	485.184.394,00	347.750.342,00
24	Beban pemeliharaan instalasi telepon, internet dan listrik gedung	223.404.200,00	240.080.950,00
25	Beban pemeliharaan peralatan dapur/rumah tangga	12.652.000,00	21.817.000,00
26	Beban pemeliharaan penghias ruangan rumah tangga	30.833.550,00	33.149.350,00
27	Beban pemeliharaan tugu/tanda batas	3.915.000,00	12.148.000,00
28	Beban pemeliharaan trotoar	299.164.822,00	299.093.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
29	Beban Pemeliharaan alat - alat angkutan darat tidak bermotor	48.971.232,00	460.000,00
30	Beban Pemeliharaan Alat-alat Persampahan	205.408.925,00	120.040.100,00
31	Beban pemeliharaan alat-alat peternakan dan perikanan	7.575.000,00	13.300.000,00
32	Belanja pemeliharaan alat - alat Persenjataan/Keamanan	101.519.600,00	127.976.200,00
33	Beban pemeliharaan jaringan komputer peralatan sistem teknologi informasi	130.675.500,00	105.082.000,00
34	Beban pemeliharaan alat-alat bantu (feeder,compressor,electric generating set,pompa,mesin bor,unit pemeliharaan lapangan,alat pengolahan air kotor)	179.526.200,00	355.484.500,00
35	Beban pemeliharaan peralatan pemancar	177.470.820,00	37.800.000,00
36	Beban pemeliharaan bangunan bersejarah		93.830.000,00
37	Beban pemeliharaan BLUD	6.477.770.238,18	5.603.616.449,76
Jumlah		28.750.894.250,75	23.003.122.165,76

7.5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban Perjalanan Dinas	(Rp)	(Rp)
	32.218.513,371,00	33.226.179.375,99

Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2019 sebesar Rp32.218.513.371,00 atau turun 3,03% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp33.226.179.375,99. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Tabel 100 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	7.674.000,00	22.749.000,00
2	Beban perjalanan dinas luar daerah	26.351.810.626,00	28.071.666.209,99
3	Beban perjalanan dinas luar daerah untuk masyarakat	3.734.598.485,00	3.514.728.940,00
4	Beban perjalanan dinas BLUD	2.124.430.260,00	1.617.035.226,00
Jumlah		32.218.513.371,00	33.226.179.375,99

7.5.4.2.6 Beban Bunga

Tidak terdapat realisasi Beban Bunga pada TA 2019.

7.5.4.2.7 Beban Subsidi

Tidak terdapat realisasi Beban Subsidi pada TA 2019.

7.5.4.2.8 Beban Hibah

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Beban Hibah	(Rp)	(Rp)
	26.364.130.800,00	27.858.543.758,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah Beban Hibah pada Tahun 2019 sebesar Rp26.364.130.800,00 atau turun 5,36% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp27.858.543.758,00. Rincian Beban Hibah adalah sebagai berikut.

Tabel 101 Rincian Beban Hibah Tahun Anggaran 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	4.045.000.000,00	800.000.000,00
2	Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/ Organisasi	9.645.510.000,00	7.461.618.000,00
3	Beban Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat	11.088.100.000,00	9.945.926.000,00
4	Beban Hibah barang atau jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	1.585.520.800,00	9.650.999.758,00
Jumlah		26.364.130.800,00	27.858.543.758,00

7.5.4.2.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial	31 Desember 2018	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
	23.400.660.987,00	22.706.968.905,00

Jumlah Beban Bantuan Sosial pada Tahun 2019 sebesar Rp23.400.660.987,00 atau naik 3,05% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp22.706.968.905,00. Rincian Beban Bantuan Sosial adalah sebagai berikut:

Tabel 102 Rincian Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Beban Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat	4.850.947.500,00	4.002.875.000,00
2	Beban Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya	-	0,00
3	Beban Bantuan Sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	18.549.713.487,00	18.704.093.905,00
Jumlah		23.400.660.987,00	22.706.968.905,00

7.5.4.2.10 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
	120.957.690.526,75	102.299.676.745,36

Jumlah Beban Penyusutan pada tahun 2019 sebesar Rp120.957.690.526,75 atau naik 18,24% dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp102.299.676.745,36 . Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut:

Tabel 103 Rincian Beban Penyusutan Tahun Anggaran 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	49.179.785.123,31	39.118.378.527,61
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	31.396.417.457,51	25.230.151.986,60



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	39.005.962.535,85	36.951.285.013,01
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	924.062.986,00	825.639.251,40
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	451.462.424,08	174.221.966,74
Jumlah		120.957.690.526,75	102.299.676.745,36

7.5.4.2.11 Beban Amortisasi

Beban Amortisasi	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
	<u>1.294.160.610,00</u>	<u>979.803.640,08</u>

Jumlah Beban Amortisasi pada Tahun 2019 sebesar Rp1.294.160.610,00 atau turun 32,08% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp979.803.640,08. Beban Amortisasi tersebut merupakan amortisasi atas Aset Tak Berwujud.

7.5.4.2.12 Beban Transfer

Beban Transfer	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
	<u>522.520.505,00</u>	<u>512.228.180,00</u>

Jumlah Beban Transfer pada Tahun 2019 sebesar Rp522.520.505,00 atau naik 2,01% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp512.228.180,00. Beban Transfer tersebut merupakan bantuan keuangan kepada Partai Politik dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 104 Rincian Beban Transfer Tahun Anggaran 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	217.991.400,00	224.404.000,00
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	70.968.350,00	76.200.000,00
3	Partai Kebangkitan Bangsa	57.548.715,00	47.817.000,00
4	Partai Persatuan Pembangunan	46.559.400,00	40.373.500,00
5	Partai Demokrat	34.863.300,00	32.800.000,00
6	Partai Nasional Demokrat	14.546.200,00	21.829.000,00
7	Partai Hati Nurani Rakyat	20.202.300,00	19.206.000,00
8	Partai Golongan Karya	31.689.875,00	19.065.000,00
9	Partai Keadilan Sejahtera	21.063.285,00	18.290.000,00
10.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten Malang	7.087.680,00	12.243.680,00
Jumlah		522.520.505,00	512.228.180,00

7.5.4.2.13 Beban Lain-lain

Beban Lain-lain	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
	<u>6.015.652.781,81</u>	<u>3.621.984.379,69</u>



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Jumlah Beban Lain-lain pada Tahun 2019 sebesar Rp6.015.652.781,81 atau naik 66,09% dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp3.621.984.379,69. Rincian Beban Lain-lain adalah sebagai berikut.

Tabel 105 Rincian Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2019

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2018
1	Beban Modal Non Kapitalisasi	4.613.038.301,00	2.810.123.504,00
2	Beban Lain-lain BLUD	141.669.473,30	82.765.657,80
3	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1.096.771.007,51	647.008.217,90
4	Beban Penyisihan (Investasi) Tak Tertagih	164.174.000,00	82.086.999,99
Jumlah		6.015.652.781,81	3.621.984.379,69

7.5.4.3 Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Operasional	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
	<u>172.827.266.624,90</u>	<u>143.069.656.405,02</u>

Surplus dari Kegiatan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan Operasional -LO dan Beban Operasional – LO selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus dari Kegiatan Operasional TA 2019 adalah sebesar Rp172.827.266.624,90.

7.5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
	<u>(19.580.056.317,17)</u>	<u>(2.141.401.131,93)</u>

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada tahun 2019 sebesar (Rp19.580.056.317,17) terdiri dari:

1. (Rp1.099.718.357,53) atas penurunan nilai ekuitas PDAM.
2. (Rp146.121.862,28) atas penurunan nilai investasi BPR Artha Praja.
3. (Rp724.073,58) atas penyesuaian piutang hasil pengelolaan dana bergulir KPUK/BNI 46 pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.
4. (Rp1.800.000,00) atas nilai buku aset lain-lain Kelurahan Tanjungsari yang telah dihapuskan berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188.4 / 5 / KEP / 410.010.2 / 2019.
5. (Rp10.833.960.492,81) atas nilai buku aset lain-lain Dinas Perhubungan yang terdampak penyerahan Personil, Sarana dan Prasarana Dokumen (P2D) dari Pemerintah Kota Blitar kepada Pemerintah Pusat dan telah dihapuskan berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188.4/1 / KEP / 410.010.2 / 2019 dan Nomor 188.4 / 2 / KEP / 410.010.2 / 2019.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

6. (Rp7.481.002.480,97) atas nilai buku peralatan & mesin, gedung & bangunan, jalan, irigasi & jaringan, aset lain-lain pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang terdampak kebakaran Pasar Legi dan telah dihapuskan berdasarkan SK Penghapusan Nomor 188.4/KEP/410.010.2/2019.
7. (Rp16.729.050,00) atas nilai buku aset gedung dan bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup yang telah dihapuskan sesuai SK Nomor 188.4/7/KEP/410.010.2/2019.

7.5.4.5 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
	<u>(5.255.300,00)</u>	<u>(144.678.144,00)</u>

Jumlah Pos Luar Biasa pada Tahun 2019 adalah sebesar (Rp5.255.300,00). Pos luar biasa tersebut berupa Belanja Tak Terduga untuk pengembalian pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

7.5.4.6 Surplus/Defisit - LO

Surplus/Defisit LO	31 Desember 2019 (Rp)	31 Desember 2018 (Rp)
	<u>153.241.955.007,73</u>	<u>140.783.577.129,09</u>

Surplus merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus dari Kegiatan Non-Operasional dan Pos Luar Biasa. Surplus pada Laporan Operasional per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp153.241.955.007,73.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas merupakan salah satu jenis laporan pertanggungjawaban yang merupakan hasil proses akuntansi atas transaksi-transaksi keuangan Pemerintah Daerah meliputi transaksi anggaran dan non anggaran yang memuat perbandingan selisih antara penerimaan kas dan pengeluaran kas selama satu periode akuntansi.

Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan kas, yaitu semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah (BUD) dan pengeluaran kas, yaitu semua aliran kas yang keluar dari BUD, termasuk dana operasional Rumah Sakit Umum Daerah yang sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari tiga Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yaitu UPT Puskesmas Kecamatan Sananwetan, Sukorejo, dan Kepanjenkidul serta Dana BOS di Dinas Pendidikan.

7.5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi mencerminkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan operasi Pemerintah Daerah yang meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah menghasilkan kas tanpa ada bantuan sumberdaya lain.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
Arus Masuk Kas	940.722.867.100,39	894.409.176.023,96
Arus Keluar Kas	727.340.398.902,45	651.008.352.910,17
Arus Kas Bersih dari Aktivitas operasi	213.382.468.197,94	243.400.823.113,79

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 sebesar Rp213.382.468.197,94 atau turun 12,33% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2018 sebesar Rp243.400.823.113,79.

1. Arus Masuk Kas

Adalah kas masuk yang berasal dari Pendapatan APBD TA 2019 sebesar Rp940.722.867.100,39 terdiri dari arus masuk kas ke BUD dan termasuk Pendapatan yang dikelola BOSNAS, BLUD dan JKN FKTP. Pendapatan yang dikelola BLUD sebesar Rp95.869.457.204,43, FKTP JKN sebesar Rp5.355.828.300,00, dan dana BOS sebesar Rp17.063.120.000,00 sedangkan kas masuk ke BUD yaitu sebesar Rp822.434.461.595,96 yang terdiri dari:

- a. Kas masuk ke BUD yang berasal dari pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp44.650.054.610,03.
- b. Kas masuk ke BUD dari penerimaan Retribusi Daerah sebesar Rp10.138.463.905,50.
- c. Kas masuk ke BUD dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan berupa penerimaan dividen kas atas Penyertaan Modal sebesar Rp1.169.069.219,24.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- d. Kas masuk ke BUD, dana BLUD dari RSUD Mardi Waluyo dan dana JKN dari 3 FKTP yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp110.182.591.046,62. Lain-lain PAD yang Sah yang dikelola BLUD sebesar Rp95.869.457.204,43, dana FKTP JKN sebesar Rp5.355.828.300,00 dan kas masuk ke BUD yaitu sebesar Rp8.957.305.542,19.
- e. Kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp38.722.150.634,00.
- f. Kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp55.197.441.211,00.
- g. Kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Umum sebesar Rp437.776.459.000,00.
- h. Kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Pusat Dana Alokasi Khusus sebesar Rp85.378.449.273,00.
- i. Kas masuk ke BUD yang berasal dari Dana Penyesuaian sebesar Rp51.430.800.000,00.
- j. Kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi berupa Bagi hasil pajak sebesar Rp87.140.709.201,00.
- k. Kas masuk ke BUD yang berasal dari Transfer Pemerintah Provinsi berupa Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp1.873.559.000,00.
- l. Kas masuk yang berasal dari Pendapatan Hibah Dana BOS 57 sekolah sebesar Rp17.063.120.000,00.

2. Arus Keluar Kas

Adalah kas keluar yang berasal dari belanja pegawai, barang dan jasa APBD termasuk Belanja yang dikelola BLUD, BOS dan JKN FKTP TA 2019 sebesar Rp727.340.398.902,45. Belanja yang dikelola BLUD sebesar Rp97.794.765.630,70, FKTP JKN sebesar Rp4.524.805.121,00, dana BOS sebesar Rp12.869.997.791,79. Sedangkan kas keluar dari BUD yaitu sebesar Rp612.150.830.358,96, yang terdiri dari:

- a. Kas keluar dari yang digunakan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp309.909.180.300,40. Belanja pegawai yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp303.499.716.850,40, dari dana BLUD RSUD Mardi Waluyo sebesar Rp6.080.866.950,0 dan dari dana BOS sebesar Rp328.596.500,00.
- b. Kas keluar dari BUD, dana BLUD RSUD Mardi Waluyo, dana JKN dari 3 FKTP dan dana BOS yang digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp366.755.582.835,05. Belanja barang dan jasa yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp257.975.477.741,56, dari dana BLUD RSUD sebesar Rp91.713.898.680,70 dari dana JKN dari 3 FKTP sebesar Rp4.524.805.121,00 dan dari dana BOS sebesar Rp12.541.401.291,79.
- c. Kas keluar dari BUD yang digunakan untuk Belanja Hibah sebesar Rp26.739.219.800,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- d. Kas yang keluar dari BUD yang digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp23.408.640.162,00.
- e. Kas yang keluar dari BUD yang digunakan untuk Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp515.432.825,00.
- f. Kas yang keluar BUD yang digunakan untuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.255.300,00.
- g. Kas yang keluar BUD yang digunakan untuk Belanja Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp7.087.680,00.

7.5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi mencerminkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan Investasi Pemerintah Daerah yang meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas.

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	(Rp)	(Rp)
Arus Masuk Kas	0,00	0,00
Arus Keluar Kas	249.885.889.913,72	163.034.400.213,66
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(249.885.889.913,72)	(163.034.400.213,66)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2019 sebesar (Rp249.885.889.913,72) atau turun 53,27% dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2018 sebesar (Rp163.034.400.213,66).

1. Arus Kas Masuk

Adalah kas masuk ke BUD sebesar Rp0,00.

2. Arus Kas Keluar

Adalah arus kas keluar dari BUD yang berasal dari Belanja APBD TA 2019 dan termasuk Belanja BLUD, dana BOS dan JKN dari 3 FKTP, yaitu sebesar Rp249.885.889.913,72 yang terdiri dari:

- a. Kas keluar dari BUD yang digunakan untuk Belanja Modal Tanah sebesar Rp7.034.003.140,00.
- b. Kas keluar yang digunakan untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp81.508.948.849,00. Belanja Peralatan dan Mesin yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp75.647.401.263,40, dari dana BLUD RSUD sebesar Rp3.902.649.417,60, dari dana JKN dari 3 FKTP sebesar Rp427.309.669,00 dan dana BOS sebesar Rp1.531.588.499,00.
- c. Kas keluar yang digunakan untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp100.616.728.055,33. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp94.896.601.931,25. dan dari dana BLUD RSUD sebesar Rp5.623.597.124,08 dan dari dana BOS sebesar Rp96.529.000,00.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- d. Kas keluar yang digunakan untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp51.090.096.065,39. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp51.077.324.065,39. dan dari dana BOS sebesar Rp12.772.000,00
- e. Kas keluar yang digunakan untuk Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.192.993.604,00. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp3.380.084.624,00 dan dari dana BOS sebesar Rp812.908.980,00.
- f. Kas keluar yang digunakan untuk Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp2.943.120.200,00. Belanja Modal Aset Lainnya yang dikeluarkan dari BUD sebesar Rp2.665.875.200,00, dari dana BLUD RSUD sebesar Rp277.245.000,00.
- g. Kas keluar dari BUD yang digunakan untuk penyertaan modal berupa investasi pada PDAM sebesar Rp2.500.000.000,00.

7.5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan mencerminkan posisi penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan kegiatan pendanaan/pembiayaan Pemerintah Daerah yang meliputi Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas.

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	(Rp)	(Rp)
Arus Masuk Kas	62.582.722,53	1.514.989.692,01
Arus Keluar Kas	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan/Pendanaan	62.582.722,53	1.514.989.692,01

Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Tahun 2019 sebesar Rp62.582.722,53 atau turun 95,87% dibandingkan dengan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan Tahun 2018 sebesar Rp1.514.989.692,01.

1. Arus Kas Masuk

Adalah arus kas masuk ke BUD yang berasal penerimaan Dana Bergulir sebesar Rp62.582.722,53.

2. Arus Keluar Kas

Adalah arus kas keluar dari BUD sebesar Rp0,00.

7.5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris/Non Anggaran

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris, mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah.



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	(Rp)	(Rp)
Arus Masuk Kas	76.490.784.582,85	65.051.853.901,16
Arus Keluar Kas	76.497.051.404,76	65.076.014.575,43
Arus Kas Bersih dari	(6.266.821,91)	(24.160.674,27)
Aktivitas Transitoris		

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 2019 sebesar Rp6.266.821,91 atau naik 74,06% dibandingkan dengan arus kas bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2018 sebesar Rp24.160.674,27. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris merupakan arus kas bersih dari penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Tahun 2019 yang berasal dari BUD, BLUD RSUD, JKN dari 3 FKTP dan BOSNAS dan Sisa Tambahan Uang Persediaan (TU) di Bendahara Pengeluaran yang disetor TA 2020, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 106 Rincian Penerimaan dan Pengeluaran PFK Tahun 2019

(dalam Rupiah)

Jenis PFK	Penerimaan	Pengeluaran	Arus Kas Bersih
IWP 8%	11.103.071.247,00	11.103.071.247,00	0,00
IWP 2%	2.804.437.754,00	2.804.437.754,00	0,00
Taperum	235.956.000,00	235.956.000,00	0,00
Askes	4.206.657.287,00	4.206.657.287,00	0,00
PPh 21 gaji	934.563.594,00	934.563.594,00	0,00
PPh 21 BTL	9.388.924.211,00	9.388.924.211,00	0,00
PPN BL	30.102.037.398,00	30.105.156.660,91	(3.119.262,91)
PPh 21 BL	1.511.078.713,00	1.512.831.238,00	(1.752.525,00)
PPh 22 BL	2.016.941.936,00	2.016.941.936,00	0,00
PPh 23 BL	1.398.792.390,00	1.400.167.344,00	(1.374.954,00)
PPh Final BL	3.437.291.113,00	3.437.291.113,00	0,00
BLUD	8.511.572.186,00	8.511.572.186,00	0,00
JKN	326.549.959,00	326.549.959,00	0,00
BOSNAS	512.910.794,85	512.910.794,85	0,00
Sisa TU TA 2019	0,00	20.080,00	(20.080,00)
Jumlah	76.490.784.582,85	76.497.051.404,76	(6.266.821,91)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.5.5 Saldo Akhir Kas

	<u>31 Desember 2019</u>	<u>31 Desember 2018</u>
	(Rp)	(Rp)
Saldo Akhir Kas	174.663.656.285,21	211.349.783.921,00

Nilai saldo akhir kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp174.663.656.285,21 perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 107 Rincian Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2019 dan 2018

(dalam Rupiah)

Uraian	Saldo 2019	Saldo 2018
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(36.447.105.815,16)	81.857.251.917,87
Saldo Awal Kas di BUD / Kas Daerah	191.485.363.908,07	105.168.681.738,89
Saldo Awal Kas BOSNAS	2.082.743.069,59	1.950.018.101,36
Saldo Awal Kas BLUD	17.177.448.413,71	21.299.699.428,25
Saldo Awal Kas JKN	365.186.629,00	834.582.065,00
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	508.769,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	20.080,00	104.682.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	134.359.900,63
Saldo Akhir Kas	174.663.656.285,21	211.349.783.921,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.6 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional (LO) dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

7.5.6.1 Saldo awal ekuitas

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
Saldo awal ekuitas	2.418.486.225.592,99	2.242.790.461.147,35

Pada Tahun 2019 terdapat saldo awal ekuitas yang merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2018 sebesar Rp2.418.486.225.592,99.

7.5.6.2 Surplus/Defisit – LO

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
Surplus/Defisit-LO	153.241.955.007,73	140.783.577.129,09

Surplus/Defisit – LO Tahun 2019 Pemerintah Kota Blitar sebesar Rp153.241.955.007,73 merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kota Blitar Pada Tahun 2019.

7.5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh koreksi saldo awal TA 2019 sebesar Rp54.908.936.272,46 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
1. Piutang	6.300.826.345,00	39.022.513,77

Koreksi nilai piutang atas nilai Saldo Awal piutang 2019 sebesar Rp6.300.826.345,00 yang terdiri dari:

1. Koreksi atas kurang catat piutang BPJS Prolanis sebesar Rp4.740.000,00 pada Dinas Kesehatan (JKN Puskesmas Sananwetan sebesar Rp2.175.000,00 dan JKN Puskesmas Sukorejo sebesar Rp2.565.000,00).



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2. Koreksi atas kurang catat atas saldo awal piutang restoran sebesar Rp2.603.500,00 pada BPKAD yang terdiri dari :

**Tabel 108 Rincian Dampak Kumulatif atas Kurang Catat
Piutang Pajak Restoran**

No	Nama	Masa	Tahun	Nominal
1	Warung mak nyak	Desember	2018	1.328.500,00
2	Depot kita	Nopember	2018	50.000,00
3	Nasi goreng / bu itip	Nopember	2018	50.000,00
4	Warung nasi/jl semeru timur 18	Nopember	2018	75.000,00
5	Bakso kenangan	September	2018	150.000,00
6	Bakso kenangan	Oktober	2018	150.000,00
7	Bakso kenangan	Nopember	2018	150.000,00
8	Star noodles	september	2018	100.000,00
9	Star noodles	oktobber	2018	100.000,00
10	Star noodles	nopember	2018	150.000,00
11	Star noodles	Desember	2018	150.000,00
12	Bakso kiki/kenanga	Desember	2018	150.000,00
	Jumlah			2.603.500,00

3. Koreksi atas kurang catat atas saldo awal piutang pajak kos an. Buyung Mahardika Masa Desember 2018 sebesar Rp150.000,00 pada BPKAD.
4. Koreksi atas kurang catat atas saldo awal piutang pajak hotel an. Budi Manis Masa Desember 2018 sebesar Rp200.000,00 pada BPKAD.
5. Koreksi atas kurang catat atas saldo awal piutang pajak hiburan Karaoke Next KTV Masa Desember 2018 Rp600.000,00 pada BPKAD.
6. Koreksi atas lebih catat saldo awal piutang pajak air tanah sebesar Rp1.292.960,00 dikarenakan double pencatatan pada BPKAD yang terdiri dari :

**Tabel 109 Rincian Dampak Kumulatif atas Lebih Catat
Piutang Pajak Air Tanah**

(dalam Rupiah)

No	Nama	Masa	Tahun	Nominal
1	Fitrianingsih	Desember	2018	137.360,00
2	PT Karyadibya Mahardhika	Desember	2018	238.000,00
3	Fitrianingsih	Desember	2018	217.600,00
4	PDAM	Desember	2018	700.000,00
Total				1.292.960,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7. Koreksi atas lebih catat saldo awal piutang pajak hotel sebesar Rp2.464.000,00 dikarenakan double pencatatan pada BPKAD yang terdiri dari :

**Tabel 110 Rincian Dampak Kumulatif atas Lebih Catat
Piutang Pajak Hotel**

(dalam Rupiah)

No	Nama	Masa	Tahun	Nominal
1	Santoso	Desember	2018	864.000,00
2	Cemara Indah	Desember	2018	655.000,00
3	Retno 2	Desember	2018	150.000,00
4	Sri Rejeki	Desember	2018	795.000,00
Total				2.464.000,00

8. Koreksi atas lebih catat saldo awal piutang pajak parkir sebesar a.n Isabella Rp60.000,00 dikarenakan double pencatatan pada BPKAD.
9. Koreksi atas lebih catat saldo awal piutang pajak restoran dikarenakan double pencatatan sebesar Rp510.000,00 pada BPKAD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 111 Rincian Dampak Kumulatif atas Lebih Catat
Piutang Pajak Restoran**

(dalam Rupiah)

No	Nama	Masa	Tahun	Nominal
1	Warung Soto Ayam	Desember	2018	60.000,00
2	Warung Nasi Goreng / Tn Mohtar efendi	Desember	2018	75.000,00
3	Bakso Rea Reo	Desember	2018	50.000,00
4	Warung Pecel / Ny Sasiah	Desember	2018	50.000,00
5	Warung family / Tn Bambang Tris S	Desember	2018	50.000,00
6	Lesehan Dan Pemancingan / Ny Umu Komariah Rukma	Desember	2018	75.000,00
7	Warung Mie Ayam / Tn Rudi Hartono	Desember	2018	50.000,00
8	Warung Padang /Tn Retno	Desember	2018	50.000,00
9	Bakso Rejeki	Desember	2018	50.000,00
Total				510.000,00

10. Koreksi atas kurang Catat Piutang Bagi Hasil Provinsi sebesar Rp6.284.829.684,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/107/KPTS/013/2019 Tentang Penetapan Definitif Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota Berdasarkan Realisasi



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2017 Tanggal 11 Pebruari 2019 pada BPKAD , terdiri dari :

- Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp862.031.723,00 ;
 - Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sebesar Rp34.073.972,00 .
 - Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp3.694.975.918,00 ;
 - Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp1.693.748.071,00.
11. Koreksi atas lebih catat piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari KPUK/BNI 46 pada Tahun 2018 sebesar Rp 2.492.890,51 pada BPKAD.
12. Koreksi atas kurang catat saldo awal Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Tahun 2018 sebesar Rp704.000,00 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 112 Rincian Dampak Kumulatif atas Kurang Catat
Piutang Denda Retribusi Jasa Usaha**

No	Nama	Tahun	Nominal
1	Sugiono/Lisa	2018	72.000,00
2	Cicilia Yulianti	2018	56.000,00
3	Cicilia Yulianti	2018	144.000,00
4	Drianita Yusipalupi	2018	240.000,00
5	M. M. MAHENDRA	2018	192.000,00
Total			704.000,00

13. Koreksi atas kurang catat Piutang Pengembalian Belanja Tahun 2018 – Jasa Konsultansi temuan BPK RI sebesar Rp0,27, yaitu selisih antara jurnal koreksi sebesar Rp110.942.649,73 dengan Buku III LHP BPK RI sebesar Rp110.942.650,00 (CV. Wijaya Mandiri Rp14.315.000,00 + CV. EK Consultant Rp9.980.000,00 + CV. Skala Patria Rp34.874.000,00 + CV Trisula Konsulindo Rp10.024.900,00 + CV. Terate Manunggal Rp15.840.000,00 + dan CV. Kusuma Abadi Rp25.908.750,00) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
14. Koreksi atas kurang catat Piutang Pengembalian Belanja Tahun 2018 – JIJ temuan BPK RI sebesar Rp3.150.042,58, yaitu selisih antara jurnal koreksi sebesar Rp16.263.091,08 dengan Buku III LHP BPK RI sebesar Rp19.413.133,66 (CV. Elang Perkasa Rp4.918.355,41 + CV. Putra Indah Rp3.596.366,46 + CV. Atmojoyo Rp10.898.411,79) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
15. Koreksi atas kurang catat Piutang Pengembalian Belanja Tahun 2018 – Kekurangan volume pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Dimoro temuan BPK RI sebesar Rp636,90 yaitu selisih antara jurnal koreksi sebesar Rp



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

39.912.013,30 dengan Buku III LHP BPK RI sebesar Rp 39.912.650,20 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

16. Koreksi atas lebih catat Piutang Jasa Giro Tahun 2018 sebesar Rp63.521,68 pada Dinas Perumahan Rakyat dikarenakan nominal tersebut sudah termasuk dalam pencatatan Piutang Jasa Giro pada BPKAD.
17. Koreksi atas kurang catat Piutang Fasilitas Sosial (listrik rusunawa) Bulan Desember Tahun 2018 pada Dinas Perumahan Rakyat sebesar Rp7.830.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 113 Rincian Dampak Kumulatif atas Kurang Catat

Piutang Fasilitas Sosial

NO	NAMA PENYEWA	NOMINAL
1	RIDWAN	59.850,00
2	GUNTUR SANTOSO	59.850,00
3	KATINI	21.280,00
4	AMIR MAHMUD	54.530,00
5	KRISTIANUS LAKSONO	29.925,00
6	SUSILO	83.125,00
7	SAMPRONI	24.605,00
8	HENDY FEBIANTO	61.845,00
9	DAUD PRAHARA YUDA	25.935,00
10	ARIF MASHUDI	18.620,00
11	EDY SUBAGYO	33.915,00
12	KARYANTO	2.660,00
13	LENY SUNARSIH	69.160,00
14	SUPIAH	31.920,00
15	SUKARNI	13.300,00
16	BAMBANG SUJATMIKO	11.970,00
17	PUJIAN TO	56.525,00
18	SLAMET PUJI GUNAWAN	43.225,00
19	MUHAMAD ANSORI	19.950,00
20	SOEDARWATI	65.170,00
21	SULASTRI	275.975,00
22	AGUS SUPRAYITNO	58.520,00
23	WAHYU YUDIANTO	49.210,00
24	MUJI HARIS SANTOSO	34.580,00
25	PURWANTORO	51.205,00
26	DAVID MUJI IRAWAN	68.495,00
27	KARJOTO	34.580,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

28	SUPIANTO	57.855,00
29	MUJI ASTUTIK	95.760,00
30	MARTI	12.635,00
31	HALIMAH	20.615,00
32	SUPRIYANTO	51.205,00
33	HARLI YULIANTO SANJAYA	17.290,00
34	SUKIRAH	33.250,00
35	MUJIATI	665,00
36	MARONAH	7.980,00
37	IMAM SUGORO PUTRA	31.255,00
38	RIBUT WAHONO	18.620,00
39	TIU SANTOSO	49.210,00
40	SLAMET SISWANTO	39.900,00
41	RINI SUNARWATI	49.210,00
42	SINTA KUMALASARI	53.200,00
43	WINARSIH SRI REJEKI	50.540,00
44	SUHARNO	20.615,00
45	ADI DWI HERTANTO	33.915,00
46	DAVIT RENDIK KRISTIANTO	39.235,00
47	MOCHAMAD KARIM	24.605,00
48	TOTOK KUSMIANTO	59.185,00
49	ANDIK SULISTYO	59.850,00
50	IMAM ROSYIDIN	37.240,00
51	DIDIT PURNA IRAWAN	61.180,00
52	CHRISTOVER	75.145,00
53	HERTIN DWI LESTARI	29.925,00
54	MEI KARYAMTI	30.590,00
55	FUNGKI ANDRIAWAN	56.525,00
56	SUMINAH	141.645,00
57	DENI KURNIAWAN	99.085,00
58	DIANTO	23.940,00
59	SUJIWATI TRI PENI	21.945,00
60	ANGGA SENDA MAULANA	80.465,00
61	SUTIANIK	29.925,00
62	ANEKA RUBITA	17.290,00
63	PANGGIH SUTOPO	43.225,00
64	ENDIK BIANTORO	32.585,00
65	AGUS WIDODO	29.925,00
66	YUNI PUJI LESTARI	83.790,00
67	NADI	91.105,00
68	BEDJO	44.555,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

69	HENRY T MAKALIWE	9.310,00
70	TRI SUCI CAHYANINGSIH	1.995,00
71	MOCH NUR CHOLIS	2.660,00
72	SRI YATIN	15.960,00
73	IRWAN HARIANTO	105.735,00
74	SRI UMIATI	83.790,00
75	TEGUH WIBOWO	32.585,00
76	ANITA GUSTIANA	40.565,00
77	DIAN FERNANDO	56.525,00
78	ANNA OKTAVIA D	35.910,00
79	CHOLIB	47.215,00
80	SETYO PUJI	17.955,00
81	FX ANDI W	39.900,00
82	ARIF SETIAWAN	13.965,00
83	VERA KURNIA NINGSIH	48.545,00
84	SRIYATI	27.930,00
JUMLAH		3.797.150,00

18. Koreksi atas lebih catat piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari UMKM/Koperasi sebesar Rp. 895.379,32 yang merupakan saldo pada Kas di Bendahara Penerimaan pada Tahun 2018 yang disetor pada tanggal 30 Januari Tahun 2019 yang seharusnya diakui sebagai pengurang piutang pada Tahun 2018 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
19. Koreksi atas kurang catat Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari UMKM/Koperasi sebesar Rp82,76 atas perguliran UM Tahun 2010 Tahap II pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
20. Koreksi atas kurang catat Piutang Retribusi Tempat Rekreasi & Olahraga sebesar Rp7.830.000,00 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 114 Rincian Dampak Kumulatif atas Kurang Catat
Piutang Tempat Rekreasi & Olahraga**

NO	NAMA	SEWA	NOMINAL
A PIUTANG TAHUN 2014			
1	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	150.000,00
2	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000 ,00
3	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
4	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	150.000,00
5	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	150.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	NAMA	SEWA	NOMINAL
6	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
7	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	150.000,00
8	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
9	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
10	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	150.000,00
11	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
12	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
	Sub Jumlah Piutang GOR Sasana Krida Tahun 2014		1.590.000,00
B PIUTANG TAHUN 2015			
1	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
2	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	150.000,00
3	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
4	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
5	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	150.000,00
6	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
7	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
8	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
9	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	150.000,00
10	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
11	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	150.000,00
12	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
	Sub Jumlah Piutang GOR Sasana Krida Tahun 2015		1.560.000,00
C PIUTANG TAHUN 2016			
1	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	150.000,00
2	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	150.000,00
3	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
4	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
5	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
6	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
7	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
8	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	150.000,00
9	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
10	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
11	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

NO	NAMA	SEWA	NOMINAL
12	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	150.000,00
	Sub Jumlah Piutang GOR Sasana Krida Tahun 2016		1.560.000,00
D PIUTANG TAHUN 2017			
1	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	150.000,00
2	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
3	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
4	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
5	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
6	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	150.000,00
7	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
8	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
9	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
10	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
11	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	150.000,00
12	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	150.000,00
	Sub Jumlah Piutang GOR Sasana Krida Tahun 2017		1.560.000,00
E PIUTANG TAHUN 2018			
1	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	150.000,00
2	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
3	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	150.000,00
4	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
5	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
6	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
7	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	150.000,00
8	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
9	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	150.000,00
10	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
11	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
12	SUPRIYADI/PB NIRWANA	GOR Sasana Krida	120.000,00
	Sub Jumlah Piutang GOR Sasana Krida Tahun 2018		1.560.000,00
	Total		7.830.000,00

31 Desember 2019
(Rp)

31 Desember 2018
(Rp)



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2. Penyisihan Piutang	0,00	4.931.205,00
------------------------------	-------------	---------------------

Pada TA 2019, dampak kumulatif atas penyisihan piutang sebesar Rp 0,00.

	<u>31 Desember 2019</u> (Rp)	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)
3. Bagian Lancar	687.690.000,00	0,00
Tuntutan Ganti Rugi		

Koreksi nilai Saldo Awal Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi TA 2019 sebesar Rp687.690.000,00 atas kurang catat saldo awal Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti (TGR) 25 anggota DPRD yang terdampak temuan pemeriksaan BPK-RI TA 2018 atas kelebihan pembayaran Dana Operasional Pimpinan, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses DPRD.

	<u>31 Desember 2019</u> (Rp)	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)
4. Penyisihan Investasi Tak Tertagih	31.916.084,91	148.143.230,00

Koreksi atas kurang catat penyisihan Investasi tak Tertagih atas Dana Bergulir pada Dinas Koperasi pada Tahun 2018 sebesar Rp31.916.084,91.

	<u>31 Desember 2019</u> (Rp)	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)
5. Hutang	(4.740.000,00)	(255.122.346,00)

Koreksi nilai hutang atas kurang catat nilai saldo awal hutang beban 2019 sebesar Rp4.740.000,00 dari PROLANIS (Program Pengelolaan Penyakit Kronis) BPJS Kesehatan yang terdiri dari :

- a. UPT Puskesmas Sananwetan sebesar Rp2.175.000,00 atas kurang catat saldo awal hutang beban makanan dan minuman rapat/kegiatan dan jasa instruktur dan narasumber.
- b. UPT Puskesmas Sukorejo sebesar Rp2.565.000,00 atas kurang catat saldo awal hutang beban makanan dan minuman rapat/kegiatan dan jasa instruktur dan narasumber.

	<u>31 Desember 2019</u> (Rp)	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)
6. Persediaan	(241.522.364,00)	213.230.975,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Koreksi nilai persediaan atas nilai Saldo Awal Persediaan 2019 sebesar (Rp241.522.364,00) yang terdiri dari:

- a. Koreksi lebih catat saldo awal atas persediaan bahan kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp241.557.430,00.
- b. Koreksi lebih catat saldo awal atas persediaan cetak pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp47,50.
- c. Koreksi kurang catat saldo awal atas persediaan cetak pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp115.311,00.
- d. Koreksi lebih catat saldo awal persediaan cetak pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp80.197,50.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
7. Kas	2.140.666,03	30.996.827,77

Koreksi nilai kas atas nilai Saldo Awal Kas 2019 sebesar Rp2.140.666,03 yang terdiri dari :

- a. Koreksi nilai Kas atas nilai Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan 2019 sebesar Rp54.113,51 yaitu kurang catat Kas Di Bendahara Penerimaan jasa giro pada Bank Artha Praja dengan nomor rekening 10111000729 tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp54.113,51 pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
- b. Koreksi nilai kas atas nilai Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran 2019 sebesar Rp930.000,00 atas kurang catat Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup pada BNI dengan nomor rekening 124600600.
- c. Koreksi nilai kas atas nilai saldo awal Kas di Bendahara Lainnya 2019 sebesar Rp11.323,57 yaitu kurang catat Kas di Bendahara Lainnya Dinas Pendidikan untuk penampungan dana tunjangan profesi guru pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1440014060260.
- d. Koreksi nilai kas atas nilai saldo awal Kas di Bendahara Lainnya 2019 sebesar Rp1.145.228,95 yaitu kurang catat Kas di Bendahara Lainnya atas pendapatan hibah Bantuan Dana UN SMP pada Dinas Pendidikan serta pendapatan hibah Dana SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal), dan Dana Sekolah Rujukan pada 11 UPT Satuan Pendidikan SD Negeri di Pemerintah Kota Blitar, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 115 Rincian Kurang catat atas Saldo Kas di Bendahara Lainnya
pada Dinas Pendidikan dan 11 Sekolah
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jenis Dana	Nomor Rekening	Nominal
1.	Dinas Pendidikan	Bantuan Dana UN SMP	0141016563	12.746,43



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

2.	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sukorejo 3	Dana SPMI	0142949253	89.639,73
3.	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Pakunden 2	Dana SPMI	0142383616	96.809,41
4.	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sentul 2	Dana SPMI	0142883635	64.764,48
5.	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Bendo 1	Dana SPMI	0142383586	94.734,1
6.	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Kepanjenkidul 2	Dana SPMI	0009-01-014320-53-3	135.330,00
7.	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sananwetan 1	Dana SPMI	0009-01-026229-53-7	247.029,00
8.	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Sananwetan 3	Dana SPMI	0142383578	95.503,03
9.	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Rembang 2	Dana SPMI	0142383535	83.732,37
10.	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Karangtengah 1	Dana SPMI	0142379996	66.670,27
11.	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Bendogerit 1	Dana Sekolah Rujukan	0142883481	59.282,28
12.	UPT Satuan Pendidikan SD Negeri Turi 2	Dana SPMI	0142882141	98.987,85
	Total			1.145.228,95

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
8 Aset Lainnya	393.918.750,00	0,00

Koreksi nilai Saldo Awal Aset Lainnya 2019 sebesar Rp393.918.750,00 yang terdiri dari :

- a. Koreksi kurang catat saldo awal Aset Lainnya sebesar Rp394.418.750,00 atas Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) 25 anggota DPRD Pemkot Blitar yang terdampak temuan pemeriksaan BPK-RI TA 2018 atas kelebihan pembayaran Dana Operasional Pimpinan, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses DPRD.
- b. Koreksi lebih catat saldo awal Aset Lainnya sebesar Rp500.000,00 atas Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) Pihak Ketiga CV. Sien Orchid TA 2008 dikarenakan Pihak Ketiga tidak termasuk dalam kategori yang tercantum dalam definisi Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

31 Desember 2019

31 Desember 2018



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	(Rp)	(Rp)
9. Pendapatan Diterima Dimuka	(7.333.333,33)	0,00

Terdapat dampak kumulatif kurang catat saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada Tahun 2018 sebesar (Rp7.333.333,33) pada pendapatan Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan berupa sewa kios Pasar Legi atas nama Lukman Handoko dengan masa sewa bulan September 2018 sampai dengan bulan September 2019.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
10. Utang PFK	0,00	(2.112.535,87)

Pada TA 2019, dampak kumulatif atas Utang PFK sebesar Rp 0,00

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
11. Aset Tetap	(1.065.520.872,90)	836.096.307,00

Pada TA 2019, dampak kumulatif atas Aset Tetap sebesar Rp1.065.520.872,90 terdiri dari:

- | | | |
|---|----|----------------|
| 1. Tindak lanjut atas aset tetap yang belum terinventarisasi nilainya sebesar Rp1,00 pada Kelurahan Karang Sari berupa satu bidang tanah eks bengkok | Rp | 1,00 |
| 2. Koreksi atas marka jalan yang masih tercatat sebagai aset tetap gedung dan bangunan pada : | | |
| a. Kecamatan Sukorejo | Rp | 15.575.870,00 |
| b. Dinas Perhubungan | Rp | 67.945.550,00 |
| 3. Koreksi atas marka jalan yang masih tercatat sebagai aset tetap jalan, irigasi ringan pada Dinas Perhubungan | Rp | 279.469.259,00 |
| 4. Koreksi mengurangi aset tetap peralatan dan mesin yang ternyata teridentifikasi sebagai barang persediaan dan telah dipergunakan berupa baterai, jaket dan <i>heacting set</i> | Rp | 133.160.678,48 |
| 5. Koreksi mengurangi aset tetap lainnya | Rp | 305.378.960,42 |



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

yang ternyata teridentifikasi sebagai barang persediaan

- | | | |
|---|----|-------------------|
| 6. Koreksi aset tetap peralatan dan mesin yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi | Rp | 67.944.160,00 |
| 7. Koreksi atas aset tetap peralatan dan mesin yang ternyata teridentifikasi sebagai barang persediaan dan telah dipergunakan berupa kabel listrik | Rp | 60.046.396,00 |
| 8. Koreksi atas 33 bidang tanah bersertifikat dan 5 bidang tanah bernilai Rp1,00 sesuai SK Walikota Blitar Nomor 188/246/HK/410.010.2/2020 Tanggal 25 Juni 2020 | Rp | 69.999.445.995,00 |

	<u>31 Desember 2019</u> (Rp)	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)
12. Perubahan Kebijakan Akuntansi Aset Tetap	0,00	0,00

Pada TA 2019, dampak kumulatif atas Perubahan Kebijakan Aset Tetap sebesar Rp 0,00

	<u>31 Desember 2019</u> (Rp)	<u>31 Desember 2018</u> (Rp)
13. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.043.277.359,81)	34.209.759.409,36

Koreksi nilai penyusutan aset tetap pada tahun 2019 sebesar (Rp1.043.277.359,81) terdiri dari :

- | | | |
|--|----|--------------------|
| 1. Koreksi mengurangi aset tetap peralatan dan mesin yang teridentifikasi sebagai barang persediaan dan telah dipergunakan berupa baterai, jaket dan heating set | Rp | 133.160.678,48 |
| 2. Koreksi mengurangi aset tetap lainnya berupa aset yang teridentifikasi sebagai barang persediaan | Rp | 305.378.960,42 |
| 3. Koreksi atas aset tetap peralatan dan mesin yang ternyata teridentifikasi sebagai barang persediaan dan telah dipergunakan berupa kabel listrik | Rp | 60.046.396,00 |
| 4. Koreksi atas lebih catat penyusutan aset tetap tahun 2018 | Rp | (1.888.184.790,00) |



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.	Reklasifikasi akumulasi penyusutan alat olahraga yang pindah klasifikasi dari Aset Tetap Lainnya ke Peralatan dan Mesin	Rp	(13.500.000,00)
6.	Koreksi penghapusan akumulasi penyusutan barang peralatan dan mesin Non kapitalisasi	Rp	67.944.160,00
7.	Koreksi atas lebih catat Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa marka jalan pada dinas perhubungan	Rp	191.328.361,96
8.	Koreksi atas dampak kumulatif akumulasi penyusutan penghapusan marka jalan pada Gedung dan Bangunan	Rp	100.548.873,33

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
14. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	1.866.407.043,68	251.299.810,40

Koreksi nilai amortisasi aset tidak berwujud pada Tahun 2019 sebesar Rp1.866.407.043,68 merupakan kurang catat amortisasi aset tidak berwujud pada Tahun 2018.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
15. Perubahan Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00

Pada TA 2019, dampak komulatif atas Perubahan Kebijakan Akuntansi Aset Tak Berwujud sebesar Rp 0,00.

	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
16. Investasi Permanen	1.039.328.064,27	(728.232.079,88)

Koreksi atas kurang catat Investasi Permanen pada Perusahaan Daerah (PDAM) dikarenakan perubahan ekuitas pada PDAM akibat penyesuaian atas penyusutan aset dan biaya aktuarial sebesar Rp1.039.328.064,27.

31 Desember 2019	31 Desember 2018
-------------------------	-------------------------



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

	<u>(Rp)</u>	<u>(Rp)</u>
17. Investasi Non Permanen	517,24	164.174.000,00
<p>Koreksi atas kurang catat Investasi Dana Bergulir sebesar atas perguliran UM Tahun 2010 Tahap II pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebesar Rp517,24.</p>		
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
18. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(19.000.910.131,57)	0,00
<p>Koreksi nilai penyusutan aset tetap pada Tahun 2019 sebesar (Rp19.000.910.131,57) merupakan kurang catat penyusutan aset lainnya pada Tahun 2018</p>		
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
19. Perubahan Kodefikasi BMD	(120.303.149,66)	0,00
<p>Koreksi atas aset yang telah terdampak perubahan kodefikasi BMD berdasarkan Permendagri 108 Tahun 2016 senilai (Rp120.303.149,66) terdiri dari :</p>		
1. Koreksi mengurangi aset tetap peralatan dan mesin yang teridentifikasi sebagai barang persediaan dan telah dipergunakan berupa baterai, jaket dan heating set	Rp	(37.214.035,66)
2. Koreksi mengurangi aset tetap lainnya berupa aset yang teridentifikasi sebagai barang persediaan	Rp	(72.578.274,00)
3. Koreksi aset tetap peralatan dan mesin yang tidak memenuhi batasan kapitalisasi	Rp	(10.510.840,00)
	31 Desember 2019	31 Desember 2018
	(Rp)	(Rp)
20. Dampak Kumulatif kurang/lebih catat atas Akumulasi Penyusutan Perubahan Masa Manfaat	(3.929.399.982,40)	0,00



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Koreksi tambah dan kurang nilai penyusutan aset tetap pada Tahun 2019 sebesar (Rp3.929.399.982,40) akibat kurang dan lebih catat atas perubahan masa manfaat penyusutan Aset Lainnya pada tahun 2018 yang berdampak perubahan kodefikasi BMD berdasarkan Permendagri 108 tahun 2016 . Dampak kumulatif atas akumulasi penyusutan perubahan masa manfaat terdiri dari :

1. Dampak Kumulatif perubahan masa manfaat pada Aset Tetap Lainnya dan Gedung dan Bangunan atas Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan sampai dengan 2018 atas Pagar Makam Aryo Blitar sebesar (Rp12.354.900,00)
2. Reklasifikasi Akumulasi penyusutan sampai dengan 2018 atas Rambu-Rambu dari Gedung dan Bangunan ke Peralatan dan Mesin sebesar (Rp3.941.754.882,40)

7.5.6.4 Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada akhir periode pelaporan. Saldo Ekuitas akhir berasal dari:

Tabel 116 Perhitungan Ekuitas Akhir

(dalam Rupiah)	
Ekuitas Awal	2.418.486.225.592,99
Surplus Laporan Operasional	153.241.955.007,73
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar	54.908.936.272,46
Ekuitas Akhir	2.626.637.116.873,18



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.7 Informasi Penting Lainnya Yang Diperlukan

Dalam BAB ini akan disampaikan informasi-informasi yang perlu untuk diketahui oleh pemakai terkait dengan laporan keuangan. Informasi-informasi dimaksud sebagai berikut:

7.5.7.1 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (TP)

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa, dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten, atau Pemerintah Kota dan/atau Desa, serta dari pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah dan/atau Desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Dalam Tahun Anggaran 2019 Kota Blitar mendapat Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan rincian yang dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 117 Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Tahun 2019

(dalam Rupiah)

No.	OPD	Jenis Dana Pusat	Uraian	Anggaran	Realisasi	Keterangan
1.	Dinas Perumahan Rakyat	Dana Tugas Pembantuan	Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman			
			Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	
Jumlah Dana Tugas Pembantuan				4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	

Dana Tugas Pembantuan tersebut tidak dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dan tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019.

7.5.7.2 Penerimaan Kas yang Tidak Diterima Melalui Kas Umum Daerah



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penerimaan Kas yang tidak diterima melalui RKUD yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Dinas Pendidikan, Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah di RSD Mardi Waluyo, Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di 3 UPT Puskesmas serta pendapatan hibah ke Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah berupa Dana SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal), UKS (Usaha Kesehatan Sekolah), PKL (Praktik Kerja Lapangan), Dana Sekolah Rujukan, Dana Bantuan Pembinaan Kurikulum, Bantuan Dana UN SMP, dan Bantuan Pemerintah untuk PKB (Pengembangan Profesi Berkelanjutan) melalui PKP (Peningkatan Kompetensi Pembelajaran) Berbasis Zonasi.

7.5.7.3 Penyelesaian Kerugian Daerah

Catatan atas Laporan Keuangan juga mengungkapkan kemajuan penyelesaian kerugian daerah sampai dengan tahun anggaran berjalan. Berikut ini pengungkapan informasi penyelesaian kerugian daerah pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MPTPTGR) dibentuk Nomor 188/888/HK/410.010.2/2014 tanggal 1 Oktober 2014 yang kemudian dirubah dengan SK Walikota Blitar Nomor 188/148/HK/410.010.2/2016 tanggal 7 Maret 2016 selanjutnya dirubah dengan SK Walikota Nomor 188/164/HK/410.010.2/2017 tentang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kota Blitar dan terakhir dengan SK Walikota Blitar Nomor 188/232/HK/410.010.2/2019 tentang Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah tahun 2019. Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan pedoman teknis pelaksanaan TP-TGR melalui Peraturan Walikota Blitar Nomor 29 Tahun 2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Pedoman Teknis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah.

Posisi kerugian daerah pada Pemerintah Kota Blitar sebanyak 226 kasus sebesar Rp7.201.087.726,27 terdiri dari:

- a. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan SK Pembebanan dan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebanyak 91 kasus sebesar Rp2.649.767.138,23. Dari 91 kasus tersebut telah dilakukan pembayaran sekali lunas sebanyak 38 kasus sebesar Rp444.267.387,51, pembayaran secara angsuran yang telah dilunasi sebanyak 24 kasus sebesar Rp547.959.271,72 dan pembayaran secara angsuran yang belum lunas sebanyak 28 kasus sebesar Rp377.561.729,00 dan penghapusan sebesar Rp197.100.000,00 sehingga kasus yang belum selesai sebesar Rp1.082.878.750,00 (Rp2.649.767.138,23 – Rp444.267.387,51 – Rp547.959.271,72 – Rp377.561.729,00 – Rp197.100.000,00).



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- b. Tidak terdapat kasus kerugian yang sedang dalam proses pembebanan, baik yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara/pejabat lainnya, dan Pihak Ketiga.
- c. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi atau berasal dari hasil pemeriksaan BPK dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebanyak 135 kasus sebesar Rp4.551.320.588,04. Dari 135 kasus tersebut, telah dilakukan pembayaran sekali lunas sebesar Rp1.324.707.232,44, pembayaran angsuran sebesar Rp2.670.542.875,19 sehingga sisa kasus yang belum selesai sebesar Rp556.070.480,41 (Rp4.551.320.588,04 – Rp1.324.707.232,44 – Rp2.670.542.875,19).

Tim MP TPTGR telah mengusulkan pembebasan dan penghapusan kerugian daerah sebanyak tiga kasus kerugian daerah yang telah diterbitkan SK Pembebanan/SKTJM Tuntutan ganti Rugi dengan nilai kerugian daerah sebesar Rp225.116.229,00, atas usulan tersebut, Pemerintah Kota Blitar telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Kasus kerugian daerah pegawai negeri non bendahara a.n. Drs. H.M.Suwito Kurnia Wijaya telah didukung SKTJM sebesar Rp37.000.000,00 dan telah diangsur sebesar Rp12.000.000,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp25.000.000,00. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2005. Yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kasus tersebut telah dihapus dengan diterbitkannya SK Walikota blitar Nomor 188/732/HK/410.010.2/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penghapusan Kewajiban Penggantian Kerugian Daerah a.n. Drs. H.M. Suwito Kurnia Wijaya sebesar Rp25.000.000,00. Namun sisa kerugian daerah atas nama Drs.H.M.Suwito Kurnia Wijaya yang telah dihapuskan tersebut, ditindaklanjuti kembali oleh Ahli Waris dengan menyetor ke kas daerah sebesar Rp25.000.000,00.
- 2) Kasus kerugian daerah pegawai negeri non bendahara a.n. Drs. Heru Juswadi, yang terjadi pada tahun 2007 telah didukung dengan SK Pembebanan sebesar Rp3.016.229,00 dan belum terdapat angsuran. Yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kasus tersebut telah dibebaskan dengan terbitnya SK Walikota Blitar Nomor 188/46/410.010.2/2013 tanggal 5 Februari 2013 tentang Pembebasan Kerugian Daerah a.n. Sdr. Drs. Heru Juswadi. Namun, sisa kerugian daerah atas nama Drs.Heru Juswadi yang telah dibebaskan tersebut, ditindaklanjuti kembali dengan menyetor ke kas daerah pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.016.229,00.
- 3) Kasus kerugian daerah pegawai negeri non bendahara a.n. Drs. Agus Sularso telah didukung dengan SK Pembebanan sebesar Rp207.615.500,00 dan telah diangsur sebesar Rp10.515.500,00 sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp197.100.000,00. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2009. Yang bersangkutan telah meninggal dunia. Kasus tersebut telah dihapuskan dengan SK Walikota Blitar Nomor 188/731/HK/410.010.2/2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penghapusan Kewajiban Penggantian Kerugian



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Daerah a.n. Drs. Agus Sularso sebesar Rp197.100.000,00. Penghapusan kewajiban penggantian kerugian daerah atas nama Sdr. Suwito Kurnia Wijaya dan Sdr. Drs. Agus Sularso di atas telah mendapatkan persetujuan DPRD Kota Blitar sesuai surat persetujuan tanggal 11 September 2013.

7.5.7.4 Pengungkapan Informasi Permasalahan Investasi

1. Investasi Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro memiliki 11 (sebelas) rekening penampungan dana bergulir pada PT Bank Jawa Timur dan 1 (satu) rekening penampungan dana bergulir pada PT Bank BPR Jatim dengan posisi per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 118 Rekening Penampungan Dana Bergulir
pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro**

(dalam Rupiah)

No	Nomor Rekening	Saldo per 31-Des-18	Pendapatan Bunga	Penyetoran kas di bendahara penerimaan tahun 2018 pokok dan bunga dana bergulir ke kas daerah	Kas Di Bendahara penerimaan tahun 2019 pokok dan bunga dana bergulir belum disetor ke kas daerah	Penyetoran Bunga Tabungan ke RKUD sebagai penerimaan jasa giro kas daerah	Biaya Pajak dan Administrasi	Saldo per 31-Des-19
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+4-5+6-7-8)
1	01421674 84 - Dalir UKM	382.163,98	14.026,37	0,00	0,00	20.888,94	98.805,27	276.496,14
2	01410387 73 - Dalir UKM	374.466,42	6.472,39	0,00	0,00	28.083,02	97.294,48	255.561,31
3	01421862 17 - Dalir UKM	7.000.884,96	55.350,99	6.491.500,00	1.000.000,00	140.087,78	107.070,20	1.317.577,97
4	01410365 20 - Dalir UKM	411.021,14	4.736,14	0,00	0,00	1.276,42	96.947,24	317.533,62
5	01421363 25 - Dalir UKM	438.369,92	5.175,16	0,00	0,00	1.712,40	97.035,04	344.797,64
6	01421363 41 - Dalir UKM	392.000,00	4.374,88	0,00	0,00	477,18	96.874,98	299.022,72
7	01421724 70 - Dalir UKM	392.000,00	4.379,17	0,00	0,00	0,00	96.875,83	299.503,34
8	01430037 28 - Dalir UKM	392.500,00	4.309,09	0,00	0,00	0,00	90.861,82	305.947,27



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

9	01421327 11 - Dalir UKM	392.000,00	4.379,17	0,00	0,00	0,00	96.875,83	299.503,34
10	01421363 33 - Dalir Koperasi	392.000,00	4.379,17	0,00	0,00	0,00	96.875,83	299.503,34
11	10111000 729 - Dalir UKM	768.653,71	33.380,13	0,00	500.000,00	467.376,44	0,00	834.657,40
12	01410306 71 -Giro - Dalir Koperasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		11.336.060,13	140.962,66	6.491.500,00	1.500.000,00	659.902,18	975.516,52	4.850.104,09

Pada tanggal 31 Desember 2019 terdapat sisa dana di rekening penampungan dana bergulir sebesar Rp4.850.104,09 yang terdiri dari:

- Rp1.500.000,00 yang merupakan angsuran pinjaman dana bergulir tahun 2019 tetapi disetorkan tahun 2020 yang dicatat pada Kas di Bendahara Penerimaan dengan rincian STS sebagai berikut :
 - STS No.900/10/410.207.2/2019 tanggal 22 Januari 2020 bunga dana bergulir sebesar Rp137.931,03;
 - STS No.900/ /410.207.2/2019 tanggal 22 Januari 2020 pokok dana bergulir sebesar Rp862.068,97;
 - STS No.900/ /410.207.2/2019 tanggal 23 Januari 2020 bunga dana bergulir sebesar Rp68.965,52;
 - STS No.900/12 /410.207.2/2019 tanggal 23 Januari 2020 pokok dana bergulir sebesar Rp431.034,48;
- Rp140.962,66 merupakan bunga tabungan rekening penampungan dana bergulir Dinas Koperasi dan UM tahun 2019 yang belum disetorkan yang dicatat pada Kas di Bendahara Penerimaan; dan
- Rp3.209.141,43 merupakan belanja untuk pemeliharaan rekening yang hanya diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan karena bukan termasuk bagian dari Dana Bergulir.

2. Investasi Dana Bergulir pada Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat memiliki 1 (satu) rekening penampungan dana bergulir pada PT Bank BPR Jatim nomor rekening 0101028020 dengan posisi per 31 Desember 2019 sebesar Rp50.007,72 yang merupakan saldo minimal pada buku tabungan yang hanya diungkapkan pada Catatan Atas Laporan Keuangan karena bukan termasuk bagian dari Dana Bergulir.

7.5.7.5 Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2019

Tahun 2019 telah dilakukan kegiatan Pendataan/Inventarisasi Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI yang tertuang



PEMERINTAH KOTA BLITAR CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor: 78.B/LHP/XVIII/SBY/05/2019 tanggal 28 Mei 2019. Pemerintah Kota Blitar pada tahun 2019 telah melakukan inventarisasi aset jenis peralatan mesin dan aset tidak berwujud dengan dibantu oleh tenaga surveyor yang dilaksanakan pada bulan Agustus - September 2019. Pihak ketiga yang melaksanakan yaitu CV. SYNERGY dengan nomor kontrak 027/07.98/410.206.6/2019 tanggal 29 Juli 2019.

Berdasarkan hasil inventarisasi barang milik daerah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Blitar dengan dibantu tenaga surveyor, masing-masing OPD/unit kerja sampai dengan akhir tahun 2019 diinstruksikan untuk melaksanakan tindak lanjut dengan menelusuri kembali aset-aset yang belum dinyatakan *clear* oleh surveyor. Namun pada akhir tahun 2019 belum semua OPD/unit kerja melaporkan hasil penelusuran kembali tersebut.

Dari sejumlah OPD/unit kerja yang telah mengirimkan hasil penelusuran kembalinya, Pemerintah Kota Blitar menindaklanjuti dengan melakukan validasi atas hasil penelusuran kembali tersebut. Kegiatan validasi ini dilakukan oleh Tim Validasi yang terdiri dari unsur pengelola barang dan APIP Kota Blitar. Untuk tahap I, validasi dilakukan terhadap 43 OPD/unit kerja yang telah menyampaikan hasil penelusuran kembalinya. Kegiatan validasi ini masih akan terus berlangsung dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan OPD/unit kerja yang menyampaikan hasil penelusurannya.

7.5.7.6 Konstruksi dalam pengerjaan atas pekerjaan Pembangunan Jaringan *Fiber Optic* pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Terdapat pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jaringan *Fiber Optic* pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan pelaksana pekerjaan PT Gubah Alam Lestari sesuai Surat Perjanjian Nomor 027.1/3.2.29.1/410.105.2/2019 tanggal 3 Oktober 2019 dengan nilai kontrak sebesar Rp8.361.572.000,00. Sampai dengan per 31 Desember 2019, pelaksanaan fisik pekerjaan telah mencapai 76,55% dan direalisasikan sebesar Rp5.853.100.400,00. Telah dilakukan addendum atas kontrak sesuai Perubahan Kontrak Nomor 027.6/3.2.29.6/410.105.2/2019 tanggal 30 Desember 2019 untuk perpanjangan pelaksanaan pekerjaan selama 50 hari kalender. Sesuai dokumen PHO Nomor 027.8/3.2.29.8/4.10.105.2/2020 tanggal 11 Februari 2020 pekerjaan telah selesai dilaksanakan 100% dan dilanjutkan masa pemeliharaan. Oleh karenanya, masih terdapat kewajiban pembayaran Pemerintah Kota Blitar kepada pihak penyedia jasa sebesar Rp2.508.471.600,00 (Rp8.361.572.000,00 - Rp5.853.100.400,00) atas pekerjaan yang perikatannya dilakukan pada TA 2019 (nilai disajikan senilai bruto belum termasuk pajak).



PEMERINTAH KOTA BLITAR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

7.5.8. PENUTUP

Demikianlah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2019 yang dapat kami sampaikan. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Blitar ini meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Sal periode per 31 Desember 2019 . Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan Keuangan Negara dan Daerah. Semoga Laporan Keuangan dapat bermanfaat dan sebagai dasar akuntabilitas kepada para pengguna laporan dan *stakeholder*.


WALIKOTA BLITAR
[Signature]
SANTOSO